



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD 20 23

PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Perencanaan Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5) Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6) Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 7) Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 8) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11) Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P. RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se - Provinsi Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih dari unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik

berupa personal, barang kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun ;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Periode 1 (satu) Tahun;
14. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta kaidah pelaksanaannya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2023 dimaksud sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan Renja-PD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

- (2) Penetapan RKPD Tahun 2023 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2022 meliputi :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah;

- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Isu Strategis Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2020.
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Arahkan kepada Kabupaten/Kota.
- f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- h. BAB VIII : PENUTUP.
Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-4
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
	1.3.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	I-6
	1.3.2. Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023	I-8
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
	2.1. KONDISI UMUM DAERAH.....	II-1
	2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
	2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
	2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana	II-13
	2.1.1.3. Kondisi Umum Demografi	II-14
	2.1.1.4. Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara.....	II-19
	2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-20
	2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi ..	II-20
	2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
	2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-53
	2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-54
	2.1.3.1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	II-54
	2.1.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	II-73
	2.1.3.3. URUSAN PILIHAN.....	II-92
	2.1.3.4. UNSUR PENUNJUANG	II-104
	2.1.3.5. UNSUR PENDUKUNG	II-109
	2.1.3.6. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	II-111
	2.1.4. ASPEK DAYA SAING	II-112
	2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-113
	2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-117
	2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-118
	2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-119
	2.1.4.5. Indikator Lain yang mendukung Aspek Daya Saing.....	II-121
	2.1.5. Kejadian Luar Biasa Pandemi COVID-19	II-123
	2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-126
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021	II-135
	2.3. Realisasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara.....	II-154
	2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-170
	2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-172

	2.5. Isu Strategis	II-196
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Global.....	III-2
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional	III-4
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Sumatera Utara	III-5
	3.1.4. Proyeksi Perekonomian Sumatera Utara.....	III-9
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
	3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .	III-15
	3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-22
	3.3.1. Belanja Daerah.....	III-25
	3.3.2. Pembiayaan Daerah	III-29
	3.4. Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)	III-33
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-1
	4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-2
	4.2. Prioritas Pembangunan.....	IV-6
	4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-6
	4.2.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	IV-6
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023	IV-11
	4.2.3. Arah Kebijakan & Sasaran Pokok Pembangunan 2019-2023.....	IV-15
	4.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Utara	IV-89
	4.3.1. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-6
	4.4. Inovasi Dalam Proses Perencanaan.....	IV-134
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
	5.1. Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Wilayah/Zona (Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias).....	V-4
	5.1.1. Wilayah Pantai Timur	V-5
	5.1.2. Wilayah Pantai Barat	V-14
	5.1.3. Wilayah Dataran Tinggi.....	V-29
	5.1.4. Kepulauan Nias	V-44
	5.2. Proyeksi Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	V-55
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022	VI-1
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD/ KPBU/CSR/Hibah/Pinjaman	VI-1
	6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-3
	6.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VI-28
	6.4. Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	VI-36
	6.5. Pembiayaan Tahun Jamak (Multi Years)	VI-90
	6.6. Bantuan Hibah Kepada BUMDes di Desa Wisata	VI-90
	6.7. Dukungan Program RKPD Provsu Tahun 2023 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Pengarusutamaan Gender.....	VI-91

6.7.1.	Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender.....	VI-91
6.7.2.	Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	VI-95
6.8.	Rencana Penyesuaian SOTK Baru.....	VI-98
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VII-1
7.1.	Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara	VII-1
7.2.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara.....	VII-4
7.3.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	VII-6
7.4.	Indikator Kinerja Program	VII-26
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	2
Tabel. 2.2	Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara.....	6
Tabel. 2.3	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara per 2020- April 2021	14
Tabel. 2.4	Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)	16
Tabel. 2.5	Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020....	16
Tabel. 2.6	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	22
Tabel. 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (persen)	23
Tabel. 2.8	PRDB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah).....	25
Tabel. 2.9	Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun (2018=100).....	30
Tabel. 2.10	Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera	31
Tabel. 2.11	Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut daerah Provinsi Sumatera Utara September 2019-2021	29
Tabel. 2.12	Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019-2021	34
Tabel. 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2021	35
Tabel. 2.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2021	35
Tabel. 2.15	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Setara (Pulau Setara) Tahun 2021	37
Tabel. 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2019-2021	38
Tabel. 2.17	Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara	41
Tabel. 2.18	Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Sumatera Utara 2019-2021	43
Tabel. 2.19	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2019-2020	44
Tabel. 2.20	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2021	45
Tabel. 2.21	Angka Putus Sekolah Sumatera Utara 2019-2021	46
Tabel. 2.22	Persentase Penduduk yang Masih Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (%), 2021	47
Tabel. 2.23	Angka Partisipasi Sekolah Wilayah Setara, 2021	47
Tabel. 2.24	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2019-2021.....	50
Tabel. 2.25	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 2018-2020	54
Tabel. 2.26	Capaian Indikator Pendidikan Provsu Tahun 2019-2021	54
Tabel. 2.27	Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021	55
Tabel. 2.28	Indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019-2021	56
Tabel. 2.29	Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2021	60
Tabel. 2.30	Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	61
Tabel. 2.31	Capaian SPM Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	62
Tabel. 2.32	Capaian Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	

	Provinsi Sumatera Utara 2019-2021.....	62
Tabel. 2.33	Capaian Indikator Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara 2019-2021	63
Tabel. 2.34	Kondisi Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi Sumatera Utara 2019-2021	64
Tabel. 2.35	Indikator Irigasi dan Air Baku 2019-2021.....	65
Tabel. 2.36	Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2019-2021	66
Tabel. 2.37	Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2019-2021	67
Tabel. 2.38	Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2019-2021	68
Tabel. 2.39	Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu 2019-2021.....	69
Tabel. 2.40	Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara 2021.....	70
Tabel. 2.41	Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat....	71
Tabel. 2.42	Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara 2019-2021	71
Tabel. 2.43	Indikator SPM Sosial 2019-2021	72
Tabel. 2.44	Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2019-2021.....	74
Tabel. 2.45	Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2019-2021 ...	74
Tabel. 2.46	Kondisi pangan di Sumatera Utara Tahun 2021.....	75
Tabel. 2.47	Rincian Produksi Daging	75
Tabel. 2.48	Peta Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Utara.....	76
Tabel. 2.49	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2021	78
Tabel. 2.50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	79
Tabel. 2.51	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton Co2Eq) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021	80
Tabel. 2.52	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2019-2021	81
Tabel. 2.53	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2021	82
Tabel. 2.54	Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2019-2021.....	83
Tabel. 2.55	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi 2019-2021	83
Tabel. 2.56	Terminal Tipe B yang Merupakan Kewenangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	84
Tabel. 2.57	Terminal Tipe B Yang Sudah Diserahkan ke Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	84
Tabel. 2.58	Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	88
Tabel. 2.59	Capaian Indikator Kinerja sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	86
Tabel. 2.60	Indikator Penanaman Modal.....	87
Tabel. 2.61	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga 2019-2021	88
Tabel. 2.62	Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi	89
Tabel. 2.63	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian	90
Tabel. 2.64	Indikator Kebudayaan	90
Tabel. 2.65	Indikator Perpustakaan.....	91
Tabel. 2.66	Indikator Kearsipan, 2019-2021	92
Tabel. 2.67	Indikator Pariwisata.....	93
Tabel. 2.68	Indikator Pertanian Sumatera UtaraProvinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021	94
Tabel. 2.69	Potensi Baku Lahan Sawah	95
Tabel. 2.70	Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.....	96
Tabel. 2.71	Indikator Kehutanan.....	98
Tabel. 2.72	Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021	99

Tabel. 2.73	Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	99
Tabel. 2.74	Rasio Elektrifikasi dan Ratio Desa Berlistrik Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	100
Tabel. 2.75	Capaian Indikator Perdagangan	101
Tabel. 2.76	Indikator Perindustrian	101
Tabel. 2.77	Kondisi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.....	102
Tabel. 2.78	Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu 2019-2021	104
Tabel. 2.79	Indikator Keuangan Provsu	105
Tabel. 2.80	Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah.....	106
Tabel. 2.81	Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019-2021	107
Tabel. 2.82	Indikator Kepegawaian Daerah	107
Tabel. 2.83	Indikator Penelitian dan Pengembangan	108
Tabel. 2.84	Indikator Badan Penghubung	108
Tabel. 2.85	Indikator Pengawasan 2019-2021	109
Tabel. 2.86	Capaian Indikator Sekretariat Dewan 2019-2021	110
Tabel. 2.87	Capaian Indikator Sekretariat Daerah 2019-2021	110
Tabel. 2.88	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2021	112
Tabel. 2.89	Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara (rupiah/kapita/bulan).....	113
Tabel. 2.90	Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021.....	114
Tabel. 2.91	Perbandingan NTP Sumatera Utara dengan NTP Nasional	115
Tabel. 2.92	Perbandingan Nilai Tukar Petani Total dengan NTP Sektor Pangan dan Hortikultura Januari 2021 - April 2022	116
Tabel. 2.93	Perbandingan Nilai Tukar Petani Total dengan NTP Sektor Peternakan dan Perkebunan Januari 2021 - April 2022	117
Tabel. 2.94	Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	117
Tabel. 2.95	Angka Kriminalitas.....	118
Tabel. 2.96	Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah.....	119
Tabel. 2.97	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara	119
Tabel. 2.98	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	120
Tabel. 2.99	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020	121
Tabel. 2.100	Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara.....	121
Tabel. 2.101	Perkembangan IDI Sumatera Utara	122
Tabel. 2.102	Indeks Resiko Bencana Indonesia 2021	123
Tabel. 2.103	Jalur LRT Dan Monorel Mebidang	124
Tabel. 2.104	Target SPM Bidang Sosial.....	133
Tabel. 2.105	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2021	134
Tabel. 2.106	Rekapitulasi Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	137
Tabel. 2.107	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	141
Tabel. 2.108	IKU Perangkat Daerah/IKK.....	141
Tabel. 2.109	Capaian Indikator SGDs Sumatera Utara	155
Tabel. 2.110	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	170
Tabel. 2.111	Identifikasi Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara...	173
Tabel. 2.112	Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahandan Isu Strategis pada RKPD 2023	199
Tabel. 3.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023	3

Tabel. 3.2.	PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	6
Tabel. 3.3.	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (persen).....	8
Tabel. 3.4.	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	9
Tabel. 3.5.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023.....	11
Tabel. 3.6.	Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran	12
Tabel. 3.7.	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah).....	17
Tabel. 3.8.	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023 (Dalam Milyar Rupiah).....	20
Tabel. 3.9.	Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d Tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel. 3.10.	Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah).....	30
Tabel. 3.11.	Realisasi Dividen BUMD/BUMN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020	34
Tabel. 3.12.	Realisasi dan Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah).....	35
Tabel. 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023.....	4
Tabel. 4.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	18
Tabel. 4.3	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	24
Tabel. 4.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2023	26
Tabel. 4.5	Dukungan Program Prioritas Terhadap Tujuan Dan Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah	28
Tabel. 4.6	Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	56
Tabel. 4.7	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023.....	57
Tabel. 4.8	Rekap Usulan per Fraksi	95
Tabel. 4.9	Rekap usulan Berdasarkan Perangkat Daerah	95
Tabel. 4.10	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Dokumen RKPD Provsu Tahun 2023.....	97
Tabel 5.1	Makro Ekonomi Wilayah Pantai Timur 2019-2021	6
Tabel 5.2	Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Timur Tahun 2019-2021	7
Tabel 5.3	Kondisi Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Pantai Timur.....	8
Tabel 5.4	Kondisi Kesehatan Wilayah Pantai Timur Tahun 2018-2021	10
Tabel 5.5	Kondisi Infrastruktur Wilayah Pantai Timur Tahun 2019-2021	11
Tabel 5.6	Makro Ekonomi Wilayah Pantai Barat 2019-2021.....	17
Tabel 5.7	Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat Tahun 2019-2021.....	18
Tabel 5.8	Kondisi Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2020	19
Tabel 5.9	Kondisi Kesehatan Wilayah Pantai Barat	20
Tabel 5.10	Kondisi Infrastruktur Wilayah Pantai Barat	21
Tabel 5.11	Makro Ekonomi Wilayah Dataran Tinggi Tahun 2019-2021.....	31
Tabel 5.12	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Dataran Tinggi	32
Tabel 5.13	Kondisi Angka Putus Sekolah Wilayah Dataran Tinggi	33
Tabel 5.14	Kondisi Kesehatan Wilayah Dataran Tinggi.....	35

Tabel 5.15	Kondisi Infrastruktur Dataran Tinggi tahun 2019-2021.....	46
Tabel 5.16	Makro Ekonomi Wilayah Kepulauan Nias tahun 2019-2021.....	33
Tabel 5.17	Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021.....	48
Tabel 5.18	Kondisi Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021.....	48
Tabel 5.19	Kondisi Kesehatan Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021.....	50
Tabel 5.20	Kondisi Infrastruktur Wilayah Kepulauan Nias	51
Tabel 5.21	Proyeksi Target Makro Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	56
Tabel 6.1	Rencana Dukungan Pendanaan Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022 diurutkan sesuai prioritas (8 prioritas) APBD	2
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	12
Tabel 6.3	Konsistensi Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Pagu anggaran Pada RKPD Tahun 2022	19
Tabel 6.4	Rekapitulasi Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022	25
Tabel 6.5	Daftar Kegiatan Strategis yang dibiayai dengan Tahun Jamak.....	39
Tabel 6.6	Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).....	41
Tabel 6.7	Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	44
Tabel 6.8	Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada RKPD 2022	48
Tabel 6.9	Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya pada RKPD 2022	51
Tabel 6.10	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital	54
Tabel 7.1	Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	3
Tabel 7.2	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023....	5
Tabel 7.3	Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023...	7
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023.....	26

Daftar Grafik

Grafik.2.1	Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur	29
Grafik.2.2	Persentase Penduduk Lansia	30
Grafik.2.3	Sebaran penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota	31
Grafik.2.4	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 s.d. 2020	35
Grafik.2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020 (Persen)	36
Grafik.2.6	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 - 2020	38
Grafik.2.7	Perbandingan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020	39
Grafik.2.8	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 - 2020	39
Grafik.2.9	PDRB Perkapita ADHB Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020	40
Grafik.2.10	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	40
Grafik.2.11	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020	41
Grafik.2.12	Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2018-2020	42
Grafik.2.13	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	44
Grafik.2.14	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 ...	44
Grafik.2.15	Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020	45
Grafik.2.16	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020	51
Grafik.2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2018-2020	55
Grafik.2.18	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota	56
Grafik.2.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Wilayah Sumatera	56
Grafik.2.20	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara	57
Grafik.2.21	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota	58
Grafik.2.22	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020	58
Grafik.2.23	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020	61
Grafik.2.24	Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2020	62
Grafik.2.25	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020	62
Grafik.2.26	Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020	63
Grafik.2.27	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2018-2020	64
Grafik.2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen)	65
Grafik.2.29	Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2020	65
Grafik.2.30	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2020	66
Grafik.2.31	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020	87
Grafik.2.32	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	119
Grafik.2.33	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020	120

Grafik.2.34 Perkembangan IDI Sumatera Utara	121
Grafik. 3.1 Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2022	4
Grafik. 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2018-2020.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi	II-3
Gambar 2.2.	Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara	II-16
Gambar 2.3.	Konsep Pembangunan Sport Center	II-125
Gambar 2.4.	Konsep Pembangunan TPA MEBIDANGRO.....	II-125
Gambar 2.5.	Rencana Pembangunan Monorel.....	II-126
Gambar 4.1.	Misi Presiden, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan	IV-5
Gambar 4.2.	Prioritas dan Fokus Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022	IV-33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023; dan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. *Top-down*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. *Bottom-up*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.



- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD
 - b. Orientasi mengenai RKPD
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita acara forum konsultasi publik (pasal 81 Permendagri 86 tahun 2017).
 - c. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah
 - d. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah (ayat 2 pasal 83 Permendagri 86 tahun 2017), yang berisikan :
 - Agenda penyusunan RKPD
 - Pelaksanaan forum perangkat daerah
 - Musrenbang RKPD



- Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda
 - Verifikasi Rancangan Renja SKPD (ayat 4 pasal 84 Permendagri 86 tahun 2017)
3. Penyusunan Rancangan RKPD (pasal 90 Permendagri 86 tahun 2017)
 - a. Penelaahan terhadap rancangan awal RKP program strategis nasional (ayat 1 pasal 85 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Pengajuan persetujuan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ayat 1 pasal 86 Permendagri 86 tahun 2017)
 - c. Penyampaian surat edaran Gubernur tentang penyesuaian prioritas pembangunan kepada Bupati/Walikota yang memuat rancangan RKPD Provinsi dan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi (ayat 2 pasal 86 dan ayat 3 pasal 87 Permendagri 86 tahun 2017)
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD (pasal 90 Permendagri 86 tahun 2017)
 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - a. Penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi (ayat 1 pasal 100 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
 - c. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 2 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
 - d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
 - e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk di fasilitasi (ayat 2 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
 - f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 3 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
 - g. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 6 pasal



102 Permendagri 86 tahun 2017).

6. Penetapan RKPD

- a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (ayat 1 pasal 103 Permendagri 86 tahun 2017) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 I-7
- b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi (ayat 1 pasal 104 Permendagri 86 tahun 2017)
- c. Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (ayat 1 pasal 107 Permendagri 86 tahun 2017)

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan beberapa hal seperti memastikan konsistensi perencanaan pusat (RKP) dengan prioritas pembangunan pada rancangan Akhir RPJMD dan RKPD serta menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam menyusun program dan kegiatan serta mewujudkan perencanaan partisipatif dengan mengoptimalkan peran serta kelompok masyarakat dalam penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



- dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 20019-2023

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan RKPD tahun ke V (lima) atau tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dimana RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang



tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Sebelum RAPBD ditetapkan, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat :

1. Secara *substansial*, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun;
2. Secara *normative*, menjadi dasar penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;



4. Secara *factual*, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2. Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai :

- a. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023;
- b. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2023;
- c. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat daerah dan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan
- d. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Sstrategis pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam PRPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta Dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km², Sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Secara Geografis Sumatera Utara pada 0° 50' LS - 4° 40' LU dan 96° 40' - 100° 50' BT.

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

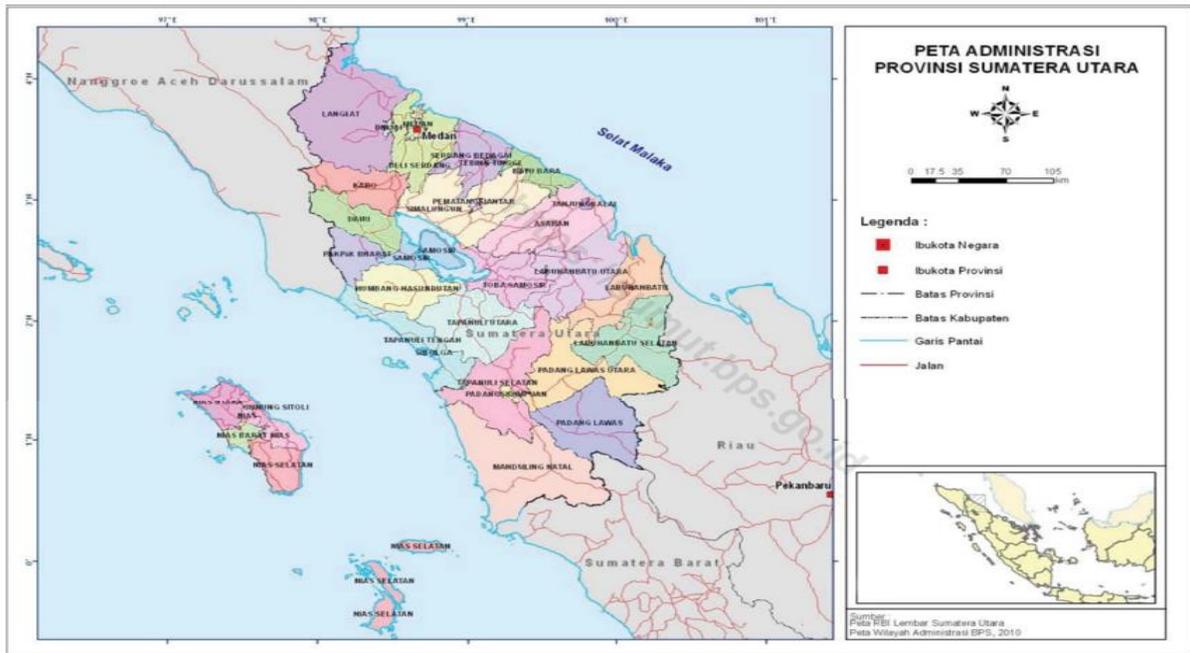
Jika dilihat dari luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km² atau sekitar 8,26 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec	Desa	Kel	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	15	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutar	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labusel	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA		455	5417	693	72.981,23

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2021



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2022

Gambar 2. 1.
Peta Wilayah Administrasi

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Sumatera Utara adalah $0^{\circ} 50'$ Lintang selatan - $4^{\circ} 40'$ lintang utara dan $96^{\circ} 40'$ - $100^{\circ} 50'$ bujur timur. Sumatera Utara berada di sebelah barat Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bisa dikembangkan menjadi hub internasional,

yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

c. Kondisi/Kawasan

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 4 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Terdapat Danau Toba yang luasnya mencapai 112.986,15 ha atau 1,57 persen dari total luas wilayah Sumut. Kabupaten yang memiliki ketinggian paling tinggi di atas permukaan laut adalah Kab. Toba yakni sekitar 900-2.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

3. Iklim

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis, Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian.

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan, Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

4. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 Km², antara 12 – 40 persen seluas 6.305 Km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km².

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0 - 300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300 - 600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

5. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

b. Potensi

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

6. Hidrologi

a. Sungai, Danau dan Rawa

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni :

Tabel. 2.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Keterangan
1.	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
2.	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
3.	Rokan	Lintas Provinsi
4.	Belawan – Ular – Padang	Strategis Nasional
5.	Toba – Asahan	Strategis Nasional
6.	Batang Angkola -Batang Gadis	Lintas Kab/Kota
7.	Wampu – Besitang	Lintas Kab/Kota
8.	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
9.	Barumun – Kualuh	Lintas Kab/Kota
10.	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
11.	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan penyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 persen) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 persen).

7. Klimatologi

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis, Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya

beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian, Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan, Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

8. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif, dan sebagainya akibat kegiatan budidaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut.

b. Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional. Kawasan lindung meliputi : a) kawasan hutan lindung; b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c) kawasan perlindungan setempat; d) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; e) kawasan rawan bencana; f) kawasan lindung geologi ; dan g.) kawasan lindung lainnya. Pola ruang kawasan hutan lindung disusun berdasarkan pada penetapan kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah

kabupaten/kota Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta potensi bahan tambang dan mineral.

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian mencatat pertumbuhan ekonomi dengan laju positif. Sektor pertanian sendiri pada kenyataannya didukung oleh pertanian rakyat. Berdasarkan Kepmentan Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, untuk Tanaman Pangan seperti Komoditas Padi akan diprioritaskan di Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Komoditas Jagung akan diprioritaskan di Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan dan Tapanuli Selatan. Untuk komoditas Kedelai, lokasi prioritas pengembangan Kawasan di Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Sedangkan untuk ubi kayu prioritas pengembangan Kawasan berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Untuk komoditas tanaman hortikultura, Cabai akan diprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, Batu Bara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Untuk komoditas Bawang merah akan dikembangkan pada Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Labuhanbatu Utara, Samosir, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat. Komoditas bawang putih, Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Simalungun, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Toba dan Tapanuli Selatan. Kabupaten Karo dan Simalungun merupakan kawasan pertanian untuk prioritas komoditas jeruk, sedangkan pisang akan diprioritaskan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

2. Perkebunan

Berdasarkan data yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2017 – 2037 Luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha atau 11,88 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 29,7 (persen dari total daratan Provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar ± 20.318.622,73 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata penambahan luas lahan perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,31 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 5,21 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana untuk luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta.

Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan kawasan sebagai amanat Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 di Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo.

3. Peternakan

Berdasarkan data hasil analisis di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diperoleh bahwa wilayah potensial bagi pengembangan sapi, untuk sapi potong di Sumatera Utara berturut-turut adalah di Kab. Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Asahan, dan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, sedangkan untuk sapi perah berada di daerah Kabupaten Karo. Pengembangan kerbau potensial dilakukan di Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan ternak kuda direkomendasikan dilakukan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternak kecil seperti kambing potensial diarahkan pemeliharaannya di Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Asahan. Domba potensi dikembangkan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengembangan ternak unggas seperti ayam buras potensi dikembangkan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun ayam pedaging potensi dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan, Langkat, Deli Serdang dan Kota Binjai. Kemudian, ayam petelur potensi dikembangkan di Kota Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai. Adapun ternak itik potensi dikembangkan di Kabupaten Toba, Mandailing Natal, Dairi, Nias, dan Serdang Bedagai.

4. Perikanan

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton per tahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah pulau sebanyak 213 sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Di kawasan Pantai Barat, antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, hasilnya mencapai 1.076.960 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79 persen). Budidaya kelautan antara lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Medan, mencapai 276.030 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji angka, senangin, teri dan pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75 persen). Sementara potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di bagian tengah yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Kota Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Binjai memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

5. Pariwisata

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya dan daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan kunjungan wisatawan nusantara, kunjungan wisatawan mancanegara, lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Pembangunan daya tarik wisata dilakukan dengan : a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya; b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan; c. pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; d. pengembangan masyarakat sadar wisata. Sedangkan Pembangunan daya tarik wisata budaya dilakukan dengan :

- a. membina dan mengembangkan lembaga kebudayaan dan kesenian pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah baik benda maupun tak benda sebagai daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang terjadwal.
- c. menyusun jadwal atraksi (calender event) kebudayaan dan kesenian tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata;

Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata dilakukan dengan penetapan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya yang bukan benda dalam bentuk makanan dan minuman dilakukan dengan memperhatikan standarisasi higienis dan halal.

Selain itu untuk peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 melaksanakan 6 (enam) kegiatan strategis daerah yaitu :

- a. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawing angkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah baru - tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal - padang lawas utara;

- b. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya
- c. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan
- d. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba
- e. Digitalisasi promosi pariwisata;
- f. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan daerah.

6. Bahan Tambang dan Mineral

Potensi bahan tambang terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah sebagai berikut:

1. Bahan Tambang Panas Bumi

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif di Provinsi Sumatera Utara tersebar di beberapa tempat antara lain di Desa Lau Debuk-Debuk Sibayak Kabupaten Karo terbukti sebesar 30 MW; Desa Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 135 MW; dan Desa Namorailangit Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 210 MW.

2. Bahan Tambang Minyak Bumi

Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

3. Bahan Tambang Gambut

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran lahan gambut terdapat di beberapa lokasi antara lain Desa Panai tengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

4. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara, terdapat 7 (tujuh) lokasi yang telah memiliki potensi cadangan antara lain Desa Pargarutan, Kec. Padangsidimpunan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Bahan Tambang Radioaktif

Potensi bahan tambang radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

6. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

7. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu/Gunung Sitoli, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk Durian/Pekanbaru, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidimpuan, CAT Natal-Ujunggading, CAT Lubuk Sikaping.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara April 2021 frekuensi kejadian bencana terbanyak adalah bencana banjir sebanyak 53 kali (Kabupaten/Kota), Angin Puting Beliuang (18 kali) Kebakaran Hutan dan Lahan (9 kali), tanah longsor (8 kali), letusan gunung api 2 kali serta gelombang pasang dan gempa bumi masing-masing 1 kali.

Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara per 2020- April 2021 dapat dilihat pada table selanjutnya.

Tabel. 2.3
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara per 2020- April 2021

Kabupaten/Kota	Gempa Bumi	Letusan Gunung Api	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang/ Abrasi
01 N i a s	-	-	-	1	-	-	-
02 Madina	-	-	-	4	1	1	1
03 Tapsel	1	-	-	1	1	-	-
04 Tapteng	-	-	-	1	1	-	-
05 Tapanuli Utara	-	-	1	-	-	1	-
06 Toba	-	-	-	-	-	1	-
07 Labuhanbatu	-	-	-	1	3	-	-
08 A s a h a n	-	-	-	7	-	-	-
09 Simalungun	-	-	2	-	-	-	-
10 D a i r i	-	-	1	-	3	2	-
11 K a r o	-	2	-	1	-	-	-
12 Deli Serdang	-	-	1	4	-	3	-
13 L a n g k a t	-	-	1	5	-	2	-
14 Nias Selatan	-	-	-	1	-	-	-
15 Humbahas	-	-	-	-	-	-	-
16 Pakpak Bharat	-	-	-	-	-	-	-
17 Samosir	-	-	-	-	-	-	-
18 Sergei	-	-	-	3	-	2	-
19 Batu Bara	-	-	-	10	-	2	-
20 Paluta	-	-	-	-	-	-	-
21 Padang Lawas	-	-	1	-	-	-	-
22 Labusel	-	-	-	-	-	-	-
23 Labura	-	-	-	2	-	1	-
24 Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-
25 Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-
26 S i b o l g a	-	-	1	-	-	-	-
27 Tanjungbalai	-	-	-	1	-	-	-
28 Pematangsiantar	-	-	-	1	-	1	-
29 Tebing Tinggi	-	-	-	2	-	-	-
30 M e d a n	-	-	-	3	-	2	-
31 B i n j a i	-	-	-	2	-	-	-
32 Padangsidempuan	-	-	-	3	-	-	-
33 Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara		2	8	53	9	18	1

Sumber : BPS Sumatera Utara/BNPB Nasional April 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian bencana alam di Sumatera Utara yang paling sering terjadi adalah bencana Banjir yaitu sebanyak 53 kali, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling banyak bencana banjir adalah Kabupaten Batubara yaitu sebanyak 10 kali.

2.1.1.3 Kondisi Umum Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Bedasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Sumatera Utara pada Bulan September 2020 sebanyak 10.80 juta jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1.82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181.72 ribu jiwa setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,22. Perkembangan Jumlah dan Laju Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara

Sementara jumlah penduduk jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan dengan jumlah penduduk perempuan, hasil sensus menunjukkan bahwa ada sebanyak 7.422.046 penduduk laki-laki dan 7.377.315 penduduk perempuan, total penduduk sumatera utara sebanyak 14.799.361 jiwa, Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	71 686	74 986	146 672
Mandailing Natal	235 478	237 408	472 886
Tapanuli Selatan	151 148	149 763	300 911
Tapanuli Tengah	183 814	181 363	365 177
Tapanuli Utara	156 176	156 582	312 758
Toba Samosir	102 850	103 349	206 199
Labuhan Batu	250 481	243 418	493 899
Asahan	389 391	380 569	769 960
Simalungun	497 314	492 932	990 246
Dairi	154 628	154 136	308 764
Karo	200 247	204 751	404 998
Deli Serdang	971 735	959 706	1 931 441
Langkat	520 784	509 418	1 030 202
Nias Selatan	180 917	179 614	360 531
Humbang Hasundutan	98 958	98 793	197 751
Pakpak Bharat	26 446	25 905	52 351
Samosir	67 957	68 484	136 441
Serdang Bedagai	331 101	326 389	657 490
Batu Bara	206 551	204 127	410 678
Padang Lawas Utara	132 893	127 827	260 720
Padang Lawas	131 476	129 535	261 011
Labuhan Batu Selatan	160 356	153 738	314 094
Labuhan Batu Utara	193 854	188 140	381 994
Nias Utara	73 216	74 058	147 274
Nias Barat	43 800	46 194	89 994
Sibolga	44 915	44 669	89 584
Tanjung Balai	89 159	86 868	176 027
Pematangsiantar	132 615	135 639	268 254
Tebing Tinggi	86 032	86 806	172 838
Medan	1 212 069	1 223 183	2 435 252
Binjai	145 859	145 983	291 842
Padang Sidempuan	112 004	113 101	225 105
Gunungsitoli	66 136	69 881	136 017
SUMATERA UTARA	7 422 046	7 377 315	14 799 361

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Selain itu jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5
Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin 2020

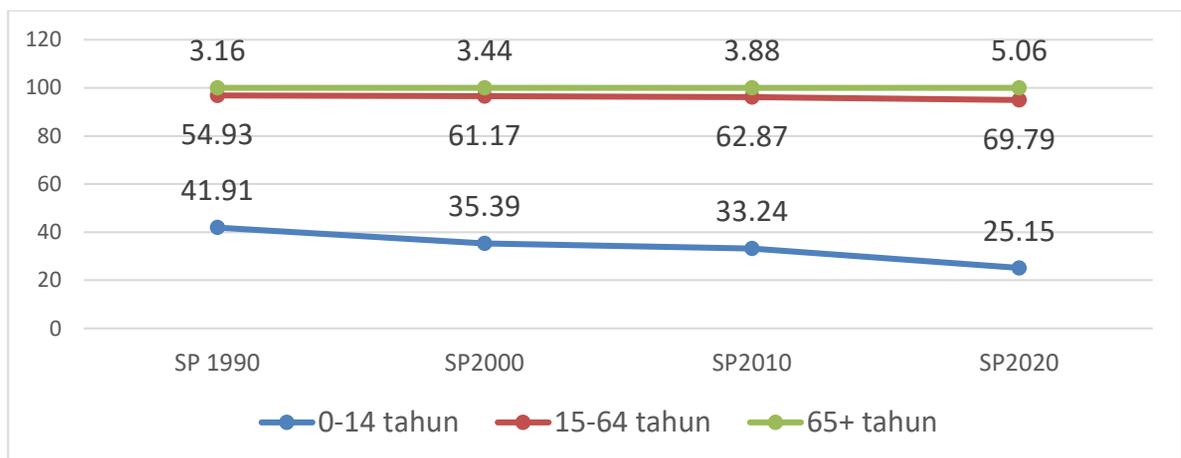
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	1 909 837	1 783 977	3 693 814
15-64	5 132 810	5 117 856	10 250 666
65+	322 613	420 663	743 276
Tidak Tahu/TT	56 786	54 819	111 605
TOTAL	7 422 046	7 377 315	14 799 361

Sumber : Sensus Penduduk 2020

2. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

- Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1990. Pada tahun 1990 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,94 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 69,79 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Utara masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 69,79 persen penduduknya masih berada di usia produktif.



Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.2
Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur

Pembangunan yang dicapai oleh Sumatera Utara selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara. Konsekwensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Sumatera Utara meningkat menjadi 8,64 persen di tahun 2020 dari 5,90 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP 2020.

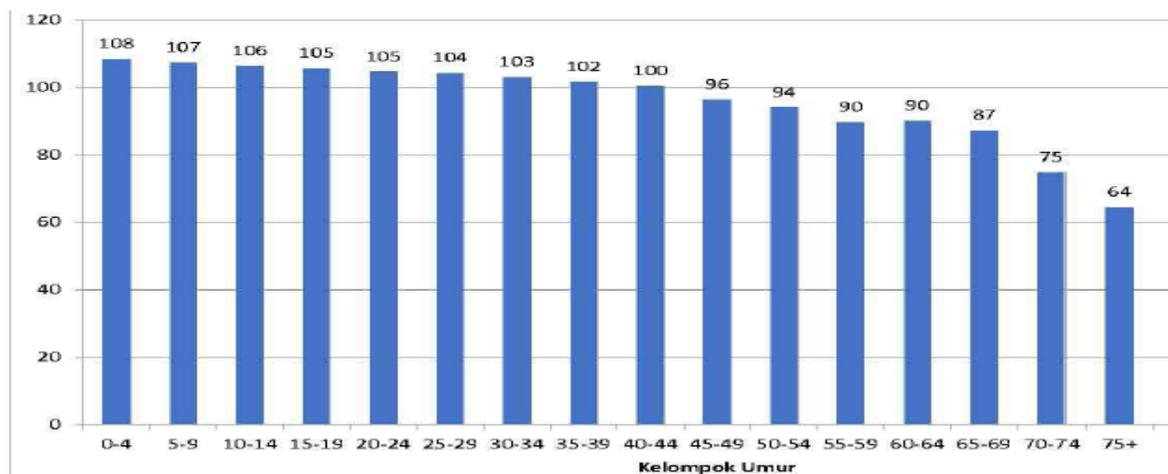


Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.3
Persentase Penduduk Lansia

- **Rasio Jenis Kelamin**

SP 2020 mencatat jumlah laki laki di Sumatera Utara sebanyak 7,42 juta orang atau 50,15 persen dari penduduk Sumatera Utara, jumlah penduduk Perempuan di Sumatera Utara sebanyak 7,38 juta orang, atau 49,85 persen dari penduduk Sumatera Utara. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara sebesar 101, yang artinya terdapatnya 101 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Utara pada tahun 2020.



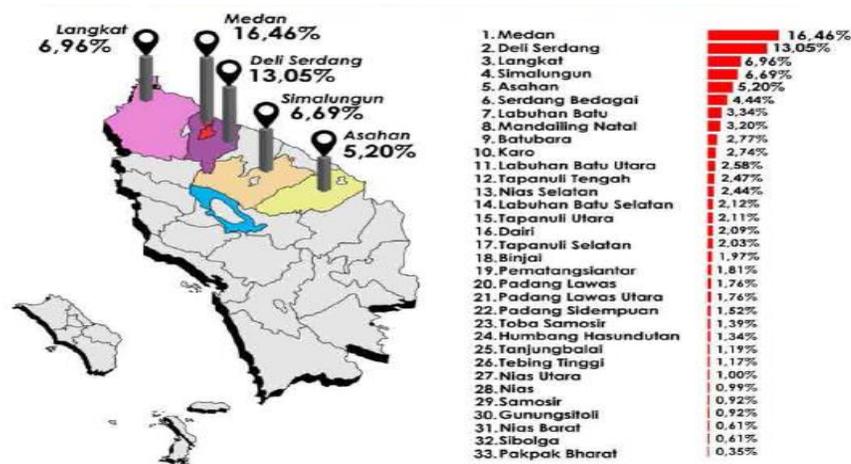
Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.4
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020

3. Distribusi/Pesebaran Penduduk

Sebaran Penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 0.36 persen wilayah Sumatera Utara. Namun Kota Medan di huni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46

persen penduduk Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak 1,93 juta orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen. Adapun Kabupaten/Kota lainnya masing-masing dibawah 5 persen.



Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.5
Sebaran penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota

2.1.1.4 Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 14 (empat belas) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 yaitu meliputi :

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;
6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;

11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi.

Penetapan KSP ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan KSN dan pengembangan ruang yang optimal di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah menetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu pulau berhala di Kabupaten Serdang Bedagei
2. Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan Perkotaan Medan_Binjai_Deli Serdang-Karo (Mebidangro)
3. Dari sudut kepentingan lingkungan yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

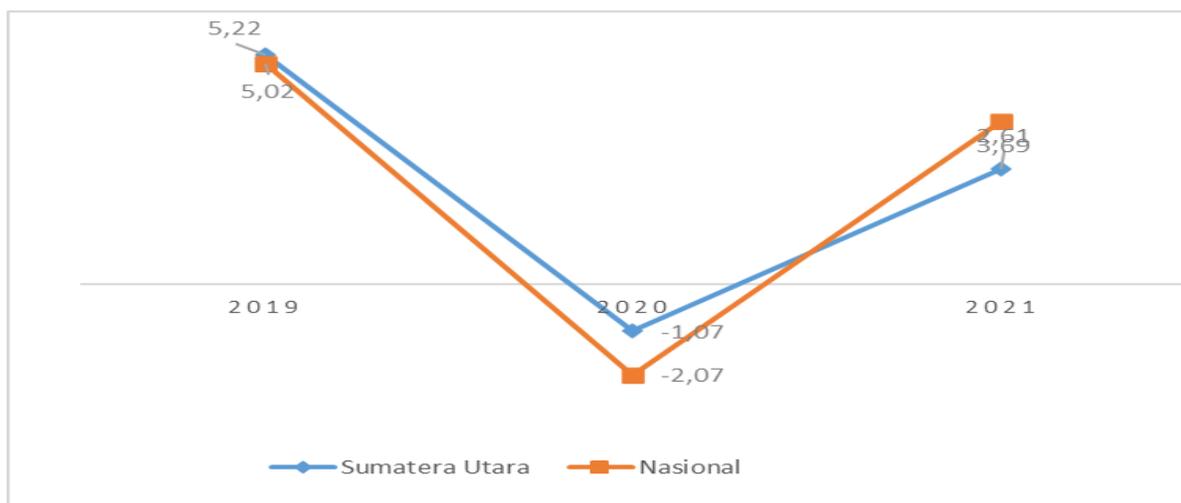
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,71 persen.

Ekonomi Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,61 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tahun 2021 tumbuh sebesar 2,61 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen yang disebabkan oleh dampak timbulnya pandemi Covid-19. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional sejak Tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

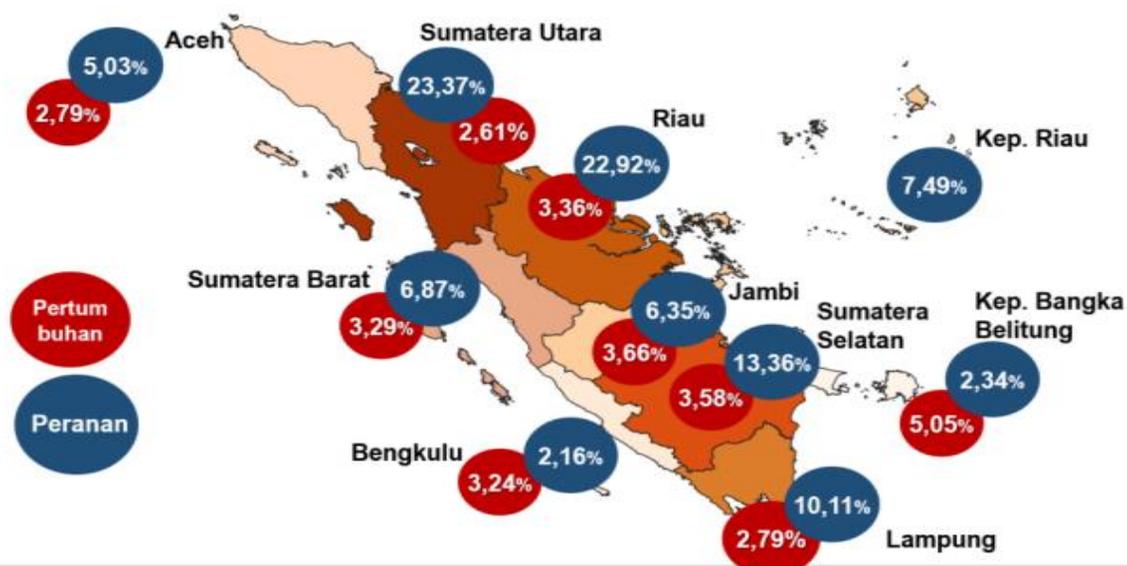


Sumber : BRS BPS Sumut, 2020 dan BRS BPS Indonesia 2021

Grafik 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019 s.d. 2021

2. PDRB Provinsi Sumatera Utara

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada tahun 2021 masih didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 23,37 persen; Provinsi Riau sebesar 22,92 persen dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,36 persen. Setelah hampir 2 tahun pandemi COVID -19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara menempati posisi terakhir dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 2,61 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,05 persen; diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen; dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,58 persen.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Grafik 2.7
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Tahun 2021 (persen)

Selanjutnya dapat dilihat Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran (Persen) sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	53,67	52,22	50,79
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,96	0,93	0,86
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	7,18	6,88	6,81
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	30,85	30,64	30,56
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	1,44	1,90	1,73
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-2,05	-10,31	15,09	33,41	33,18	38,83
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,84	-14,87	18,34	27,51	25,73	29,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,22	-1,07	2,61	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumut, 2021

Tabel. 2.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,13	1,95	3,87	20,53	21,34	22,04
Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	1,27	1,28	1,25
Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	19,04	19,29	19,52
Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,11	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	14,23	13,58	13,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	-1,87	3,62	18,82	18,89	18,91
Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	5,07	4,49	4,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	2,42	2,18	2,05
Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	2,14	2,28	2,34
Jasa Keuangan dan Ausransi	1,92	1,29	4,46	2,92	2,90	2,97
Real Estat	4,84	1,57	2,50	5,12	5,26	5,11
Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	1,08	1,07	1,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	0,37	2,08	3,68	3,72	3,54
Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	1,85	1,91	1,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	1,02	1,03	0,99
Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,58	0,57	0,54
	5,22	-1,07	2,61	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumut, 2021

Tabel. 2.8

PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				Harga Konstan (Milyar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155.077,17	164.152,76	173.074,95	189.491,36	127.202,64	133.726,02	136.327,03	1 141.601,18
Pertambangan dan Penggalian	9.552,01	10.160,53	10.373,47	10.710,15	6.792,01	7.099,79	6.936,06	7.069,09
Industri Pengolahan	148.430,31	152.246,63	156.503,61	167.886,09	96.174,60	97.362,10	96.548,31	97.928,00
Pengadaan Listrik dan Gas	840,58	908,22	932,38	986,94	694,58	728,79	751,85	788,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	754,74	796,70	831,19	870,54	489,6	516,23	535,77	555,17
Konstruksi	102.921,37	113.764,69	110.146,70	115.754,38	64.507,11	69.212,03	66.843,31	68.300,49
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134.161,13	150.489,01	153.226,38	162.578,56	90.652,79	96.936,19	95.120,46	98.560,07
Transportasi dan Pergudangan	37.043,61	40.566,53	36.409,27	35.869,85	24.372,50	25.786,50	22.492,59	21.676,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.636,58	19.379,42	17.692,13	17.663,47	12.131,73	13.209,12	11.985,59	11.888,96
Informasi dan Komunikasi	15.154,95	17.139,67	18.467,11	20.094,28	14.024,31	15.375,56	16.323,91	17.386,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	22.643,28	23.344,41	23.529,58	25.545,12	14.854,35	15.138,89	15.334,76	16.017,94
Real Estate	37.338,15	40.942,91	42.704,93	43.912,94	21.740,02	22.792,55	23.149,98	23.728,14
Jasa Perusahaan	7.649,07	8.667,23	8.692,10	8.847,57	4.678,85	4.950,74	4.717,73	4.711,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27.127,84	29.461,86	30.147,21	30.457,51	16.406,84	17.736,89	17.803,30	18.174,36
Jasa Pendidikan	13.527,65	14.767,59	15.489,68	16.017,36	10.418,74	10.924,95	11.091,33	11.429,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.273,25	8.155,28	8.374,06	8.499,17	4.977,04	5.207,26	5.079,18	5.092,08
Jasa Lainnya	4.215,03	4.665,51	4.593,54	4.685,66	2.644,91	2.810,24	2.705,20	2.743,87
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	741.347,42	799.608,95	811.188,31	859.870,95	512.762,62	539.513,85	533.746,36	547.651,82

Sumber : BPS Sumut, 2021

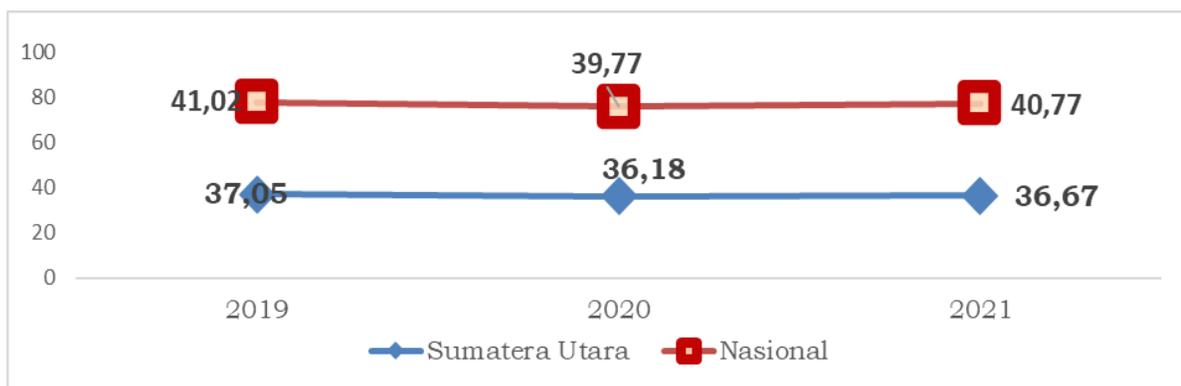
a. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,81 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 13,71 persen; diikuti oleh Komponen PK-P tumbuh sebesar 6,82 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 5,82 persen; dan Komponen PK-RT tumbuh sebesar 3,45 persen. Di sisi lain, Komponen PK-LNPRT mengalami kontraksi sebesar 1,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar sebesar 18,30 persen.

b. PDRB Perkapita

- PDRB ADHK

PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi sebesar Rp 36,67 Juta pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 36,18 Juta namun nilai PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHK Nasional yaitu sebesar Rp 40,77 Juta pada tahun 2021. Kedepan, PDRB Sumatera Utara diharapkan dapat lebih meningkat seiring dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat menambah income masyarakat.



Grafik 2.8
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan PDRB Perkapita ADHK se Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-6 setelah Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. PDRB Perkapita daerah penghasil komoditas pada pulau Sumatera terlihat cenderung memiliki nilai yang lebih besar. Berikut Grafik PDRB Perkapita ADHK Provinsi se-Pulau Sumatera dan Nasional :

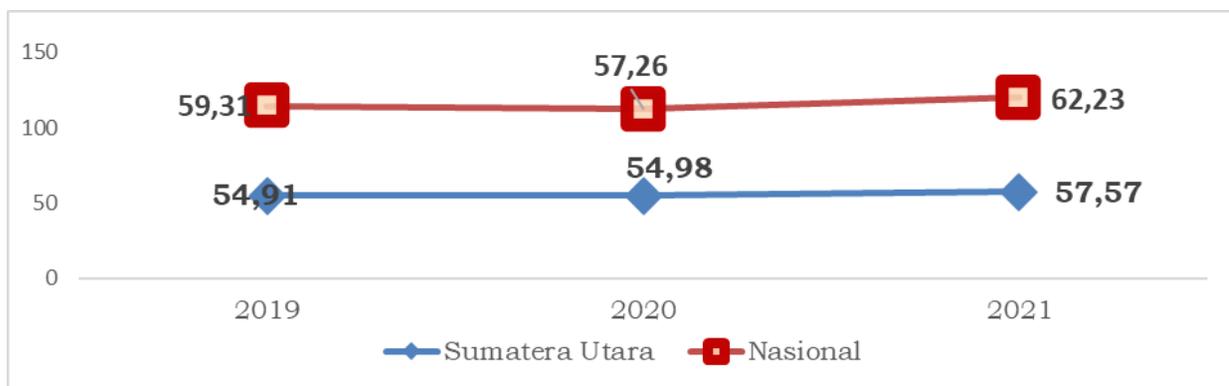


Sumber : BPS Indonesia, 2021

Grafik 2.9
Perbandingan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2021

- PDRB Perkapita ADHB

PDRB Perkapita ADHB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi sebesar Rp 57,57 Juta dibandingkan dengan Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 54,98 Juta. Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Nasional yang tercatat sebesar Rp. 62,23 Juta pada Tahun 2021.

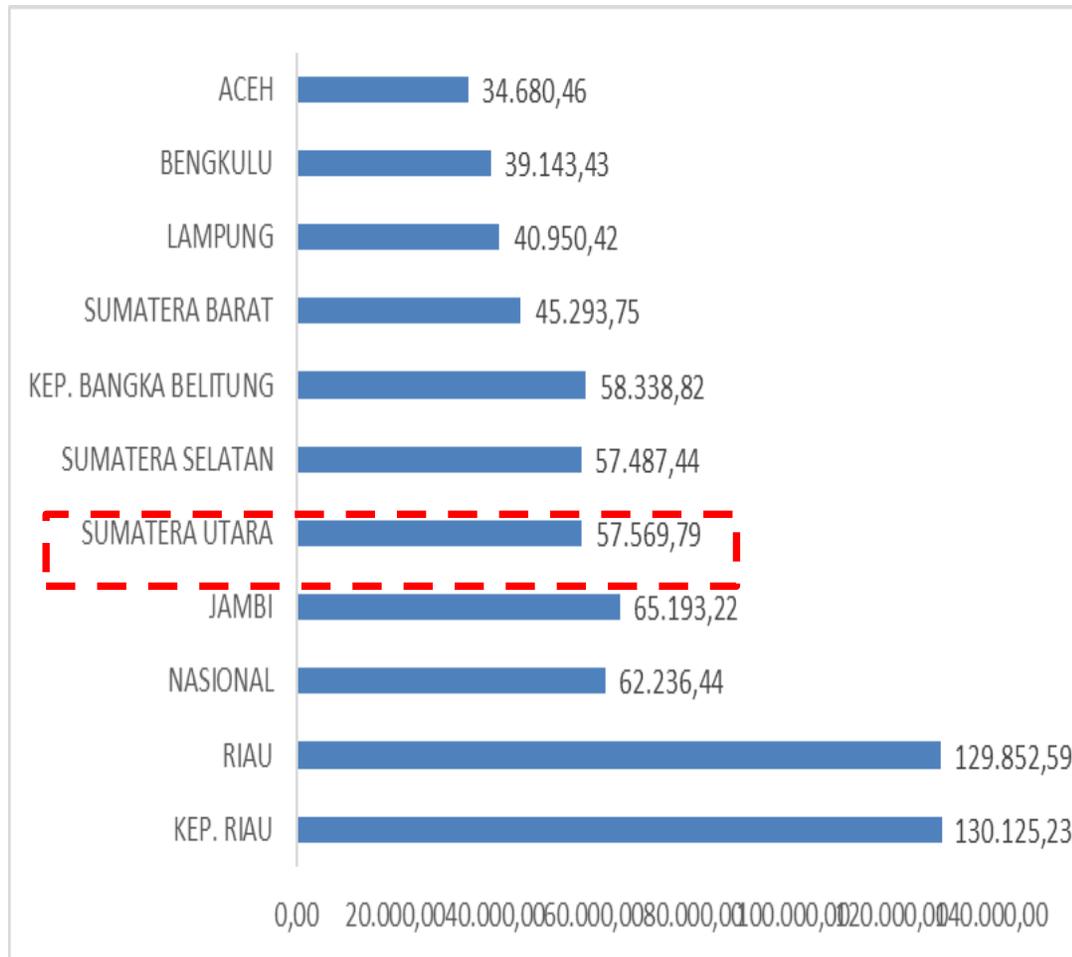


Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2021

Grafik 2.10
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan PDRB Perkapita ADHB se Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-4 tertinggi setelah Provinsi Kep. Bangka Belitung Rp 57,569 Juta, Provinsi Riau sebesar 58,33

Juta, dan Provinsi Jambi sebesar 65,19 Juta. Nilai PDRB ADHB dan ADHK sejatinya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena pembedanya terdapat pada komponen harga konsumen. Oleh karenanya, instrument peningkatan pendapatan diharapkan dapat berkontribusi positif pada capaian PDRB kedepan.

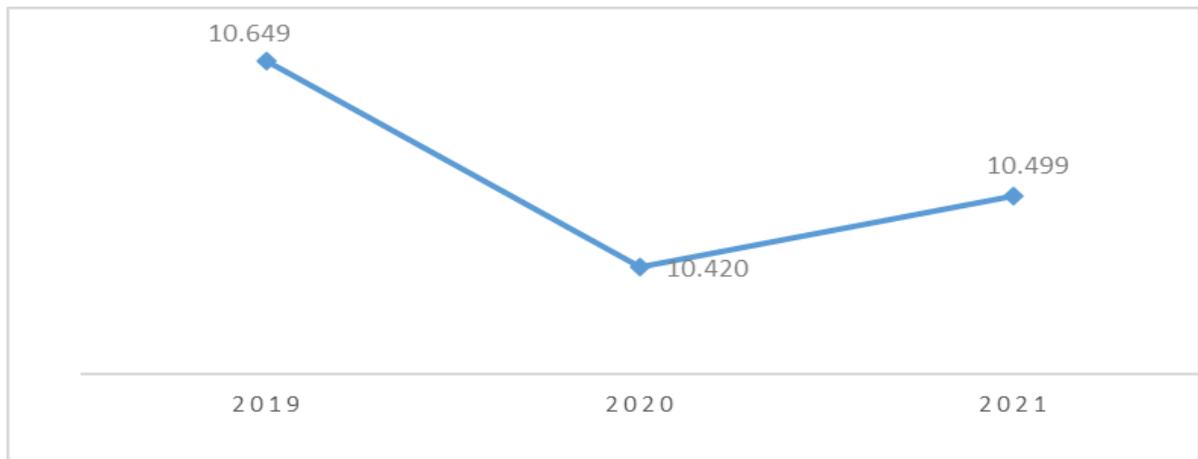


Sumber : BPS Indonesia, 2021

Grafik 2.11
PDRB Perkapita ADHB Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional
Tahun 2021

- Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp 10,49 Juta jika dibandingkan Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 10,42 Juta. Kondisi ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Indonesia, 2021

Grafik 2.12
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2021

Berdasarkan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita se Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-7 setelah Provinsi Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi. Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi se-Pulau Sumatera dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut. Pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Utara terlihat masih dibawah nasional dapat diasumsikan bahwa kinerja ekonomi Sumut yang lebih baik daripada nasional masih belum linear dengan peningkatan sektor pengeluaran. Kedepan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tidak hanya meningkatkan produksi namun juga mampu meningkatkan pengeluaran tentu harus menjadi prioritas.

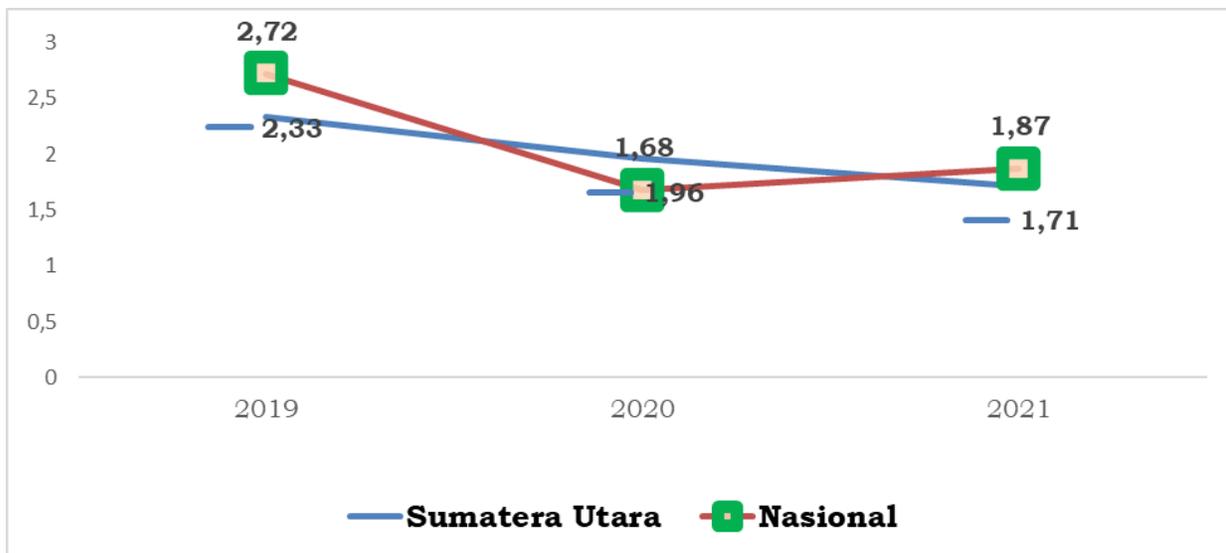


Sumber : BPS Indonesia, 2021

Grafik 2.13
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi se-Pulau Sumatera
dan Nasional Tahun 2021

3. Laju Inflasi

Pada tahun 2021 inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 1,71% angka ini turun dari tahun 2019 (1,96%). Jika dibandingkan dengan nasional Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2020 lebih baik dari pada nasional. Inflasi Sumatera Utara kedepan diharapkan dapat terus stabil tentunya dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Tim Pengendali Inflasi (TPID) Sumatera Utara. Perkembangan Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional adalah sebagai berikut :



Sumber : BPRS BPS 2021

Grafik 2.14
Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2019-2021

Pada Desember 2021, seluruh kota IHK di Sumatera Utara inflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,17 persen; Pematangsiantar sebesar 0,85 persen; Medan sebesar 0,44 persen; Padangsidempuan sebesar 0,35 persen; dan Gunung Sitoli sebesar 0,62 persen. Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada Desember 2021 inflasi 0,46 persen

Bulan Desember 2021, Medan tercatat inflasi 0,44 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,46 pada November 2021 menjadi 105,92 pada Desember 2021. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,00 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,68 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen. Di sisi lain, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya

sebesar 0,03 persen. Dua kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks, yaitu kelompok kesehatan; dan kelompok pendidikan.

Tabel. 2.9
Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun (2018=100)

Kota	IHK Desember 2020	IHK November 2021	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi Desember 2021 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sibolga	106,17	107,97	108,15	0,17	1,86	1,86
Pematangsiantar	105,55	106,88	107,79	0,85	2,12	2,12
Medan	104,15	105,46	105,92	0,44	1,70	1,70
Padangsidempuan	107,08	108,30	108,68	0,35	1,49	1,49
Gunung Sitoli	107,85	107,76	108,43	0,62	0,54	0,54
Gabungan 5 Kota IHK di Sumatera Utara	104,48	105,78	106,26	0,46	1,71	1,71

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, 2021

Inflasi Pulau Sumatera dapat dilihat dari Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, seluruh kota tercatat inflasi. Inflasi tertinggi di Pangkal Pinang sebesar 1,27 persen dengan IHK sebesar 107,16 dan terendah di Pekan Baru sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 106,53.

Tabel. 2.10
Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera

K o t a	Desember 2021	
	IHK	Tingkat Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Meulaboh	111,38	0,81
2. Banda Aceh	108,48	0,74
3. Lhokseumawe	108,71	0,59
4. Sibolga	108,15	0,17
5. Pematang Siantar	107,79	0,85
6. Medan	105,92	0,44
7. Padangsidempuan	108,68	0,35
8. Gunungsitoli	108,43	0,62
9. Padang	106,82	0,48
10. Bukittinggi	106,59	-0,04
11. Tembilahan	107,42	0,29
12. Pekanbaru	106,53	0,07
13. Dumai	107,70	-0,13
14. Bungo	107,69	0,45
15. Jambi	108,00	0,48
16. Palembang	106,55	0,42
17. Lubuklinggau	106,79	0,35
18. Bengkulu	106,85	0,39
19. Bandar Lampung	108,63	0,99
20. Metro	109,22	0,99
21. Tanjung Pandan	110,92	1,14
22. Pangkalpinang	107,16	1,27
23. Batam	107,23	0,58
24. Tanjung Pinang	105,70	0,42

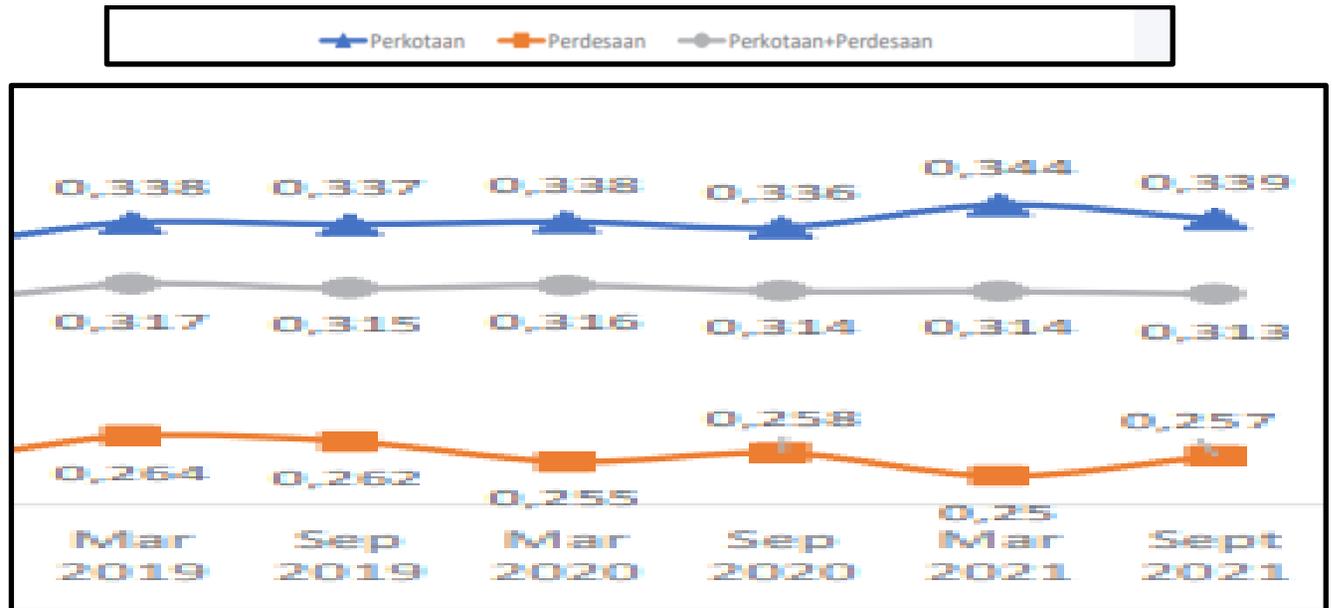
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, Desember 2021

4. Indeks Gini

Pada September 2021, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,313. Angka ini menurun sebesar 0.001 point jika dibandingkan baik dengan Gini Ratio Maret 2021 dan Gini Ratio September 2020 yang angkanya sama-sama sebesar 0,314.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,339 cukup menurun sebesar 0,005 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar

0,344. Sebaliknya, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,257 meningkat 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,250.



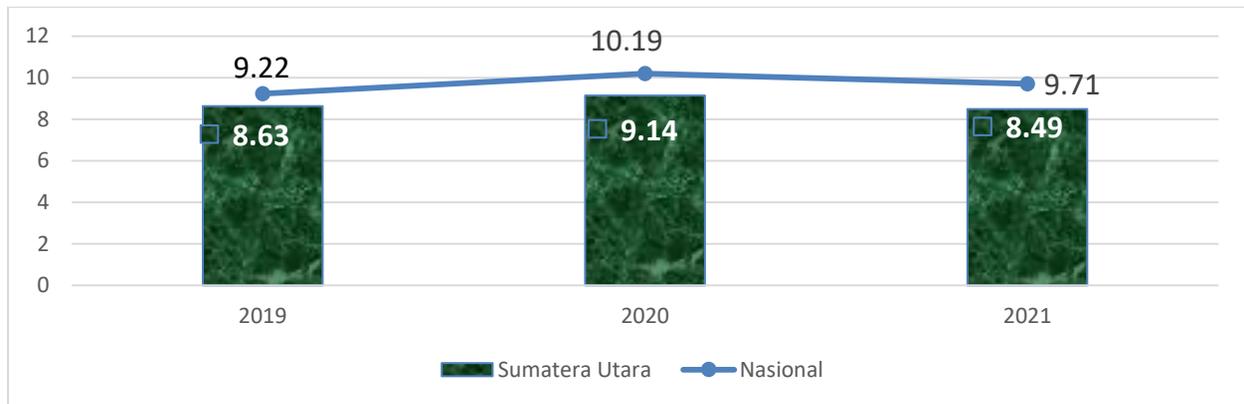
Grafik 2.15
Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara, 2019-2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kondisi Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,52 poin yaitu dari 9,01 persen pada Maret 2021 menjadi 8,49 persen pada September 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir, demikian juga dengan Nasional jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Jika dibandingkan dengan nasional, maka capaian Persentase kemiskinan provinsi Sumatera Utara lebih baik dari Nasional seperti terdapat pada grafik dibawah ini



Sumber : BRS, BPS Sumut dan Nasional 2022

Grafik 2.16
Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021 - September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 30,8 ribu jiwa, sedangkan di perdesaan turun sebanyak 40 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 9,15 persen menjadi 8,68 persen, demikian pula di perdesaan, turun dari 8,84 persen menjadi 8,26 persen, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini

Tabel. 2.11
Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut daerah Provinsi Sumatera Utara September 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2019	665,46	8,39
September 2020	756,24	9,25
September 2021	725,04	8,68
Perdesaan		
September 2019	595,04	9,14
September 2020	600,48	9,14
September 2021	548,03	8,26
Perkotaan + Desa		
September 2019	1.260	8,63
September 2020	1.356	9,14
September 2021	1.273	8,49

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2022

Pada September 2021 garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp.537.310,00 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.556.437,00 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar

Rp.513.987,00 per kapita per bulan. Dibandingkan dengan Maret 2021 garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2021 naik 2,20 persen yaitu dari Rp. 525.756,00 perkapita per bulan menjadi Rp. 537.310,00 perkapita per bulan. Garis kemiskinan di perkotaan naik 2,46 persen, yaitu dari Rp. 543.085,00 perkapita per bulan menjadi Rp. 556.437,00 per kapita per bulan. Sedangkan garis kemiskinan di perdesaan naik 1,84 persen dari Rp. 504.685,00 perkapita per bulan menjadi Rp. 513.987,00 per kapita per bulan.

Tabel. 2.12
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021

Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
September 2019	366 831	139 706	506 538
September 2020	378.679	141.850	520.529
September 2021	409.313	147.124	556.437
Perdesaan			
September 2019	367 379	103 166	470 545
September 2020	378.550	108.091	486.642
September 2021	399.971	114.016	513.987
Perkotaan + Desa			
September 2019	367 105	123 015	490 120
September 2020	378.617	126.619	505.236
September 2021	404.860	132.451	537.310

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2022

Tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun sebelumnya, pada September 2021, Indeks Kedalaman berlanjut menurun mengarah ke keadaan yang lebih baik, dan Keparahan Kemiskinan sedikit meningkat yang disebabkan oleh kenaikan indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan. Kedua Indeks ini untuk daerah perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibanding di perkotaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibanding daerah perkotaan. Trend penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan sejak Maret 2021 hingga September 2021 menunjukkan dampak pandemic terhadap ekonomi sedikit melemah dan sudah mulai menunjukkan perbaikan, khususnya di daerah perkotaan.

Tabel. 2.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Tahun 2019 – 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2019	1,335	1,653	1,480
September 2020	1,540	1,671	1,599
September 2021	1,400	1,513	1,450
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2019	0,316	0,440	0,372
September 2020	0,386	0,535	0,453
September 2021	0,342	0,432	0,382

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2022

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk miskin terbanyak ada di Kota Medan yaitu sebanyak 193,03 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 4,79 ribu jiwa. Semenara persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara masing-masing sebesar 26.42 dan 25.66 persen dan persentase terendah ada di Kabupaten Deli Serdang 4.01 persen. Capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.14
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2021

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1	Nias	24,33	16,82
2	Mandailing Natal	43,24	9,49
3	Tapanuli Selatan	25,01	8,80
4	Tapanuli Tengah	49,95	12,67
5	Tapanuli Utara	29,72	9,72
6	Toba Samosir	16,61	8,99
7	Labuhan Batu	45,03	8,74
8	Asahan	69,29	9,35
9	Simalungun	76,99	8,81
10	Dairi	23,72	8,31
11	Karo	38,01	8,79
12	Deli Serdang	92,52	4,01
13	Langkat	106,59	10,12
14	Nias Selatan	55,16	16,92
15	Humbang Hasundutan	18,71	9,65
16	Pakpak Bharat	4,79	9,35
17	Samosir	16,08	12,68
18	Serdang Bedagai	51,16	8,30
19	Batu Bara	52,59	12,38

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
20	Padang Lawas Utara	28,37	9,92
21	Padang Lawas	25,78	8,69
22	Labuhan Batu Selatan	30,36	8,53
23	Labuhan Batu Utara	37,13	10,02
24	Nias Utara	35,84	25,66
25	Nias Barat	21,75	26,42
26	Kota Sibolga	10,80	12,33
27	Kota Tanjung Balai	24,10	13,40
28	Kota Pematang Siantar	22,06	8,52
29	Kota Tebing Tinggi	17,37	10,30
30	Kota Medan	193,03	8,34
31	Kota Binjai	16,46	5,81
32	Kota Padangsidempuan	17,28	7,53
33	Kota Gunungsitoli	24,02	16,45
Sumatera Utara		1 343,86	9,01

Sumber : BPS Sumut 2021

Beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode Maret 2021 - September 2021 antara lain adalah:

1. Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan sangat berdampak jauh pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan, tetapi pada September 2021 mulai menunjukkan perbaikan.
2. Ekonomi Sumatera Utara triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen (y-on-y). Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 yang pertumbuhannya terkontraksi sebesar 2,6 persen (y-on-y).
3. Selama periode Maret 2021-September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,82 persen.
4. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,26 persen (y-on-y).

Jika dibandingkan dengan wilayah se Pulau Sumatera, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dibandingkan daerah lainnya, sementara penduduk miskin terendah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara jika dilihat dari Persentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin tertinggi ada di Provinsi Aceh, disusul Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Capaian jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Setara (Pulau Sumatera)
Tahun 2021

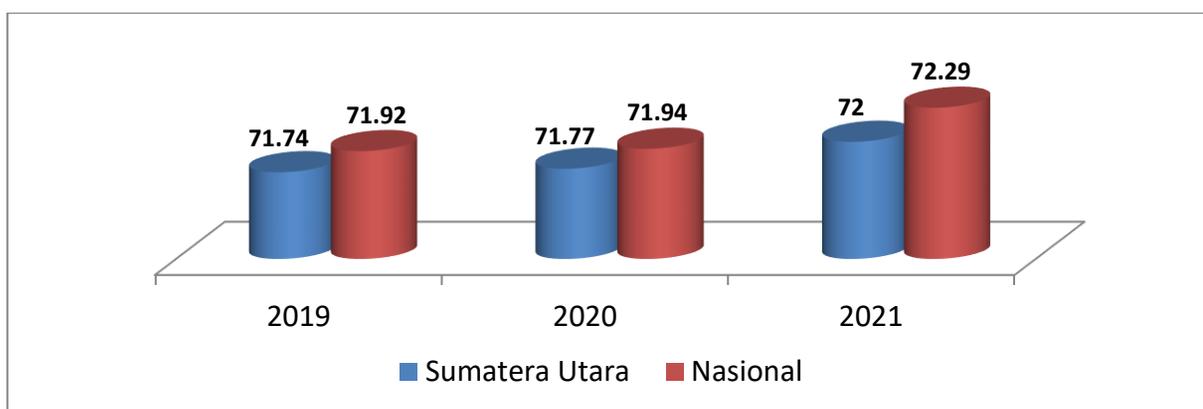
Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)*	Persentase Penduduk Miskin (%)*
Aceh	850,26	15,53
Sumatera Utara	1.273,07	8,49
Sumatera Barat	339,93	6,04
Riau	496,66	7,00
Jambi	279,86	7,67
Sumatera Selatan	1.116,61	12,79
Bengkulu	291,79	14,43
Lampung	1.007,02	11,67
Kep Bangka Belitung	69,70	4,67
Kep Riau	137,75	5,75

Sumber : BPS Indonesia, 2022

*) data September 2021

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2021 adalah sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32 persen (meningkat 0,23 poin) dibandingkan capaian IPM 2020. Pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Sumatera Utara. IPM 2020 tercatat sebesar 71,77 atau tumbuh 0,04 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan IPM 2019. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, IPM mulai mengalami percepatan di 2021. Jika dilihat capaian nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, Jika dibandingkan dengan nasional maka IPM Provinsi Sumatera Utara berada dibawah capaian nasional.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2022

Grafik 2.17
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara dan Nasional
2019-2021

Capaian IPM 2021 yang meningkat 0,23 poin didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan IPM 2020 yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2019-2021

Komponen	Satuan	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,95	69,10	69,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,15	13,23	13,27
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,45	9,54	9,58
Pengeluaran Perkapita	Rp	10.649	10.420	10.499
IPM	%	71,74	71,77	72,00

Sumber : BPS, Sumatera Utara 2021

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antarkabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Perubahan status terjadi pada Kabupaten Padang Lawas Utara, yang pada 2021 mencapai status “tinggi”. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (61,99), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (81,21) yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$).

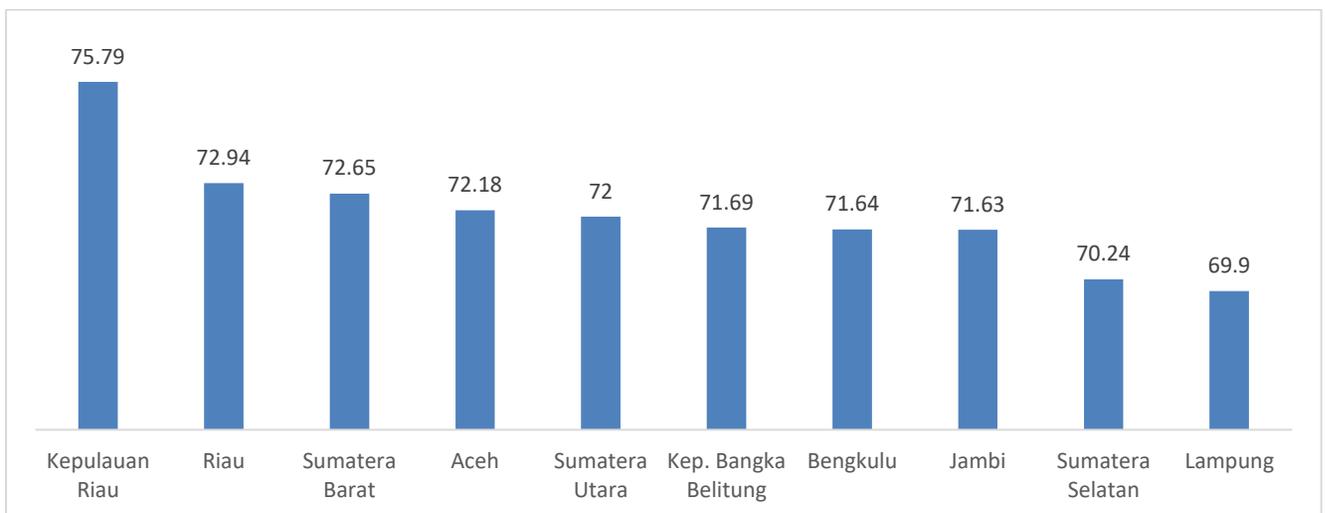
Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) pada 2021 adalah sebanyak 20, dengan status “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$) adalah 12, dan dengan status “rendah” ($IPM < 60$) sudah tidak ada lagi. Sejak 2018, tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia “rendah”.



Sumber : BPS, Sumatera Utara 2022

Grafik 2.18
IPM Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021

Selain itu jika dilihat perkembangan IPM dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera) maka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-5 (Lima) setelah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Sedangkan IPM tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,59 persen dan terendah ada di Provinsi Lampung sebesar 69,69, poin

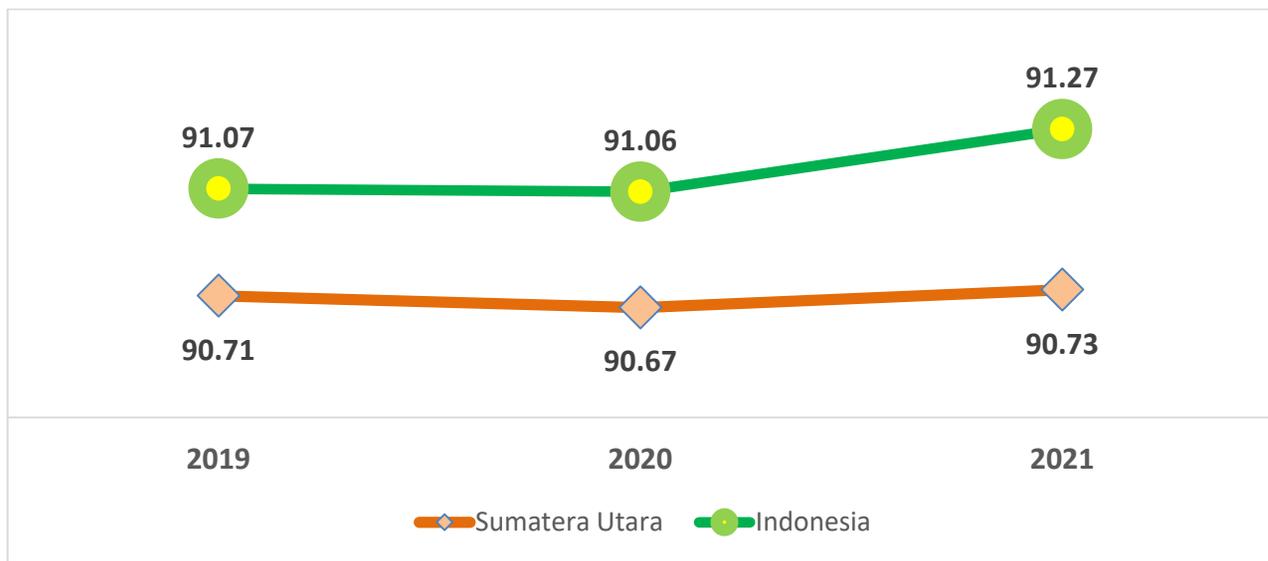


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia 2022

Grafik 2.19
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2021

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kondisi IPG di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan fluktuatif, pada kurun waktu 2019-2021 terjadi penurunan sebesar 0,04 point. Bila dilihat capaian IPG secara nasional, maka dapat diketahui bahwa kurun waktu tahun 2019 – 2021 capaian IPG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian nasional, sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan IPG dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : BPS Indonesia, Februari 2021

Grafik 2.20
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2021

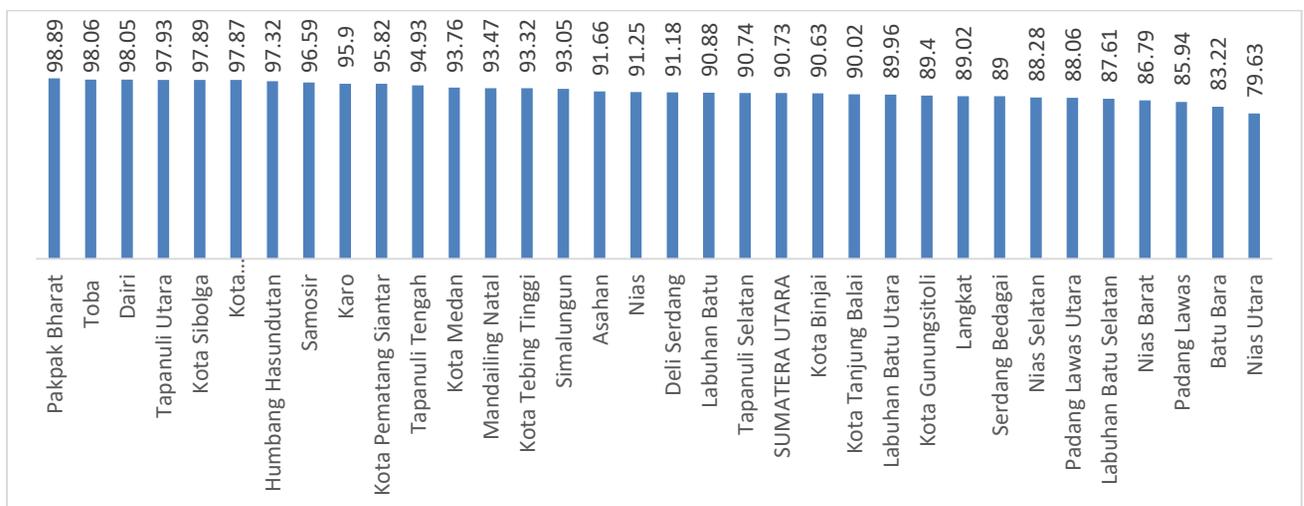
Bila melihat pada masing – masing variabel pendukung IPG yaitu Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata – rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita maka trend dari tahun 2019 – 2021 memperlihatkan kesenjangan yang paling menonjol adalah pada variabel Pengeluaran per Kapita, dimana pengeluaran per kapita untuk penduduk perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki – laki dengan kesenjangan rata – rata sebesar 0.54 persen. Sedangkan untuk variabel rata rata lama sekolah, kesenjangan tidak terlalu terlihat (kecil) dengan rata rata sebesar 0,5 tahun. Beda halnya dengan variabel angka harapan lama sekolah, usia harapan lama sekolah penduduk perempuan di Sumatera Utara lebih besar dari usia harapan lama sekolah penduduk laki – laki dengan rata – rata sebesar 0,3 tahun, begitu juga dengan variabel angka harapan hidup, memperlihatkan harapan hidup perempuan Sumatera Utara lebih besar dari harapan hidup penduduk laki-laki dengan rata – rata sebesar 3,86 tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.17
Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara 2019-2021

Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2019	67,07	70,92	12,97	13,40	9,76	9,17	15.471	8.315
2020	67,22	71,08	13,13	13,41	9,82	9,28	15,058	8,176
2021	67,35	71,21	13,14	13,48	9,84	9,33	15 265	8 227

Sumber : BPS Indoneisa, Februari 2021

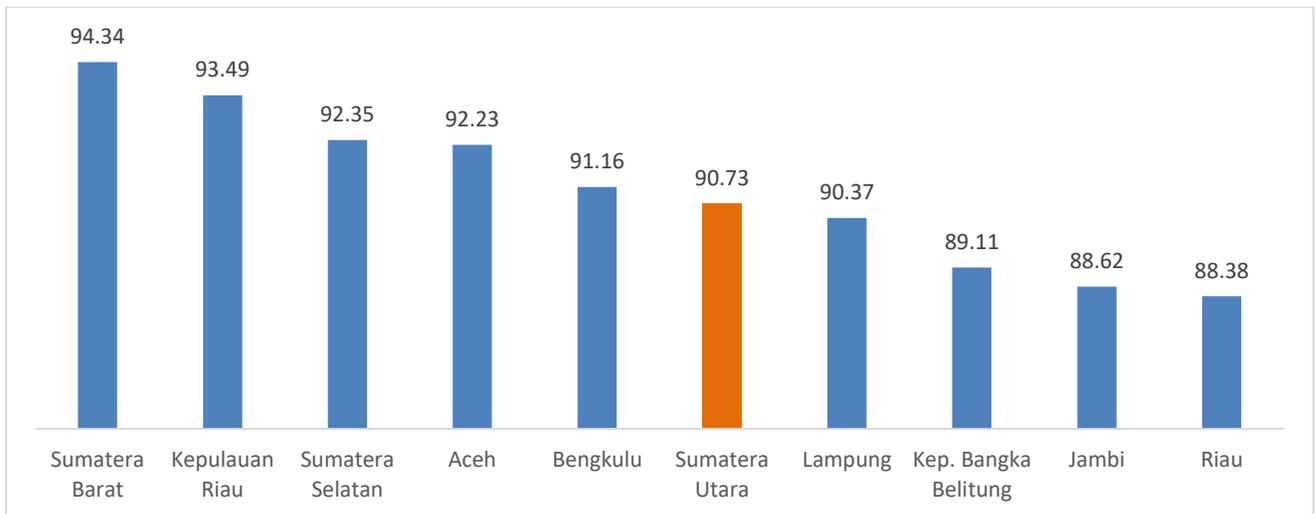
Jika dilihat dari Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota maka IPG tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat kemudian Kabupaten Toba, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara. Sementara capaian terendah ada di Kabupaten Nias Utara yaitu sebesar 79,63 persen. Perkembangan capaian IPG kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : BPS Indoneisa, 2021

Grafik 2.21
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota, 2021

Jika dilihat dari wilayah yang setara, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat dari grafik dibawah ini Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-6 setelah Bengkulu, capaian IPG tertinggi ada di Provinsi Sumatera Barat dan capaian terendah ada di Provinsi Riau, sebagaimana terlihat dibawah ini :

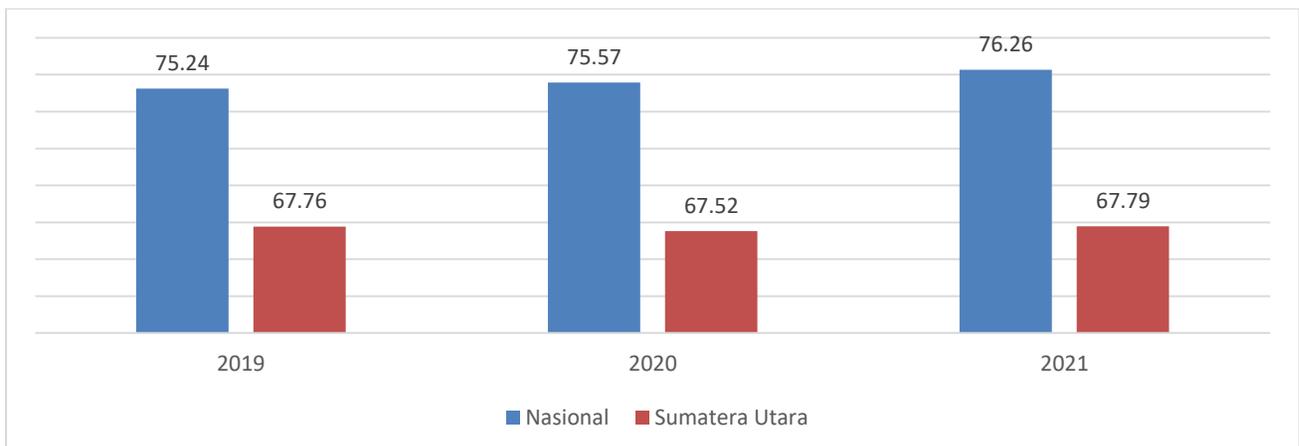


Sumber : BPS Indonesia, Februari 2021

Grafik 2.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Wilayah Sumatera, 2021

4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 memperlihatkan adanya peningkatan menjadi 67.79 dari 68.52 pada tahun 2020. Namun jika melihat perbandingan antara capaian IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian IDG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional dari tahun 2019 – 2021, sebagaimana grafik berikut :



Sumber : BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.23
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dan Nasional 2019-2021

Dilihat dari masing – masing variabel pendukung IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja maka trend dari tahun 2019 – 2021 memperlihatkan belum adanya perkembangan yang cukup baik dan masih rendahnya peran perempuan dalam sektor publik, terutama

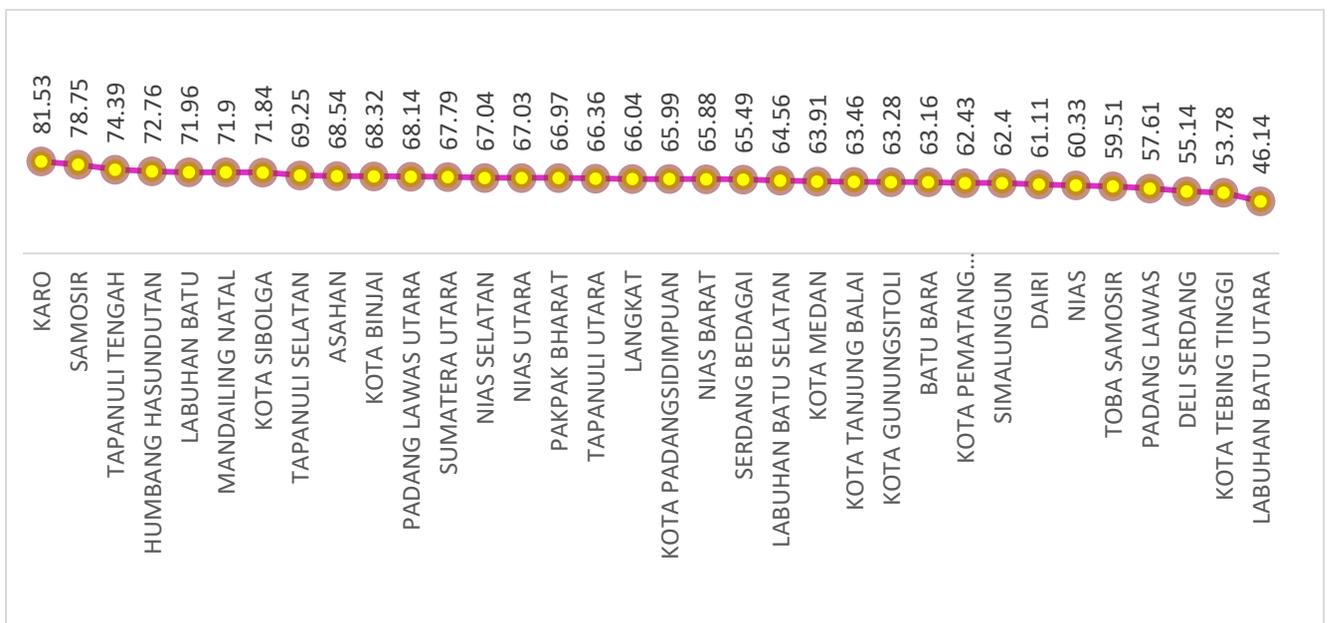
untuk keterlibatan perempuan di parlemen sebagai satu indikator *affirmative* sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.18
Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara 2019-2021

Tahun	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
2019	36,15	54.16	13.00
2020	36,12	54,26	13
2021	36,02	53,95	13,13

Sumber : BPS Indonesia, Juli 2022

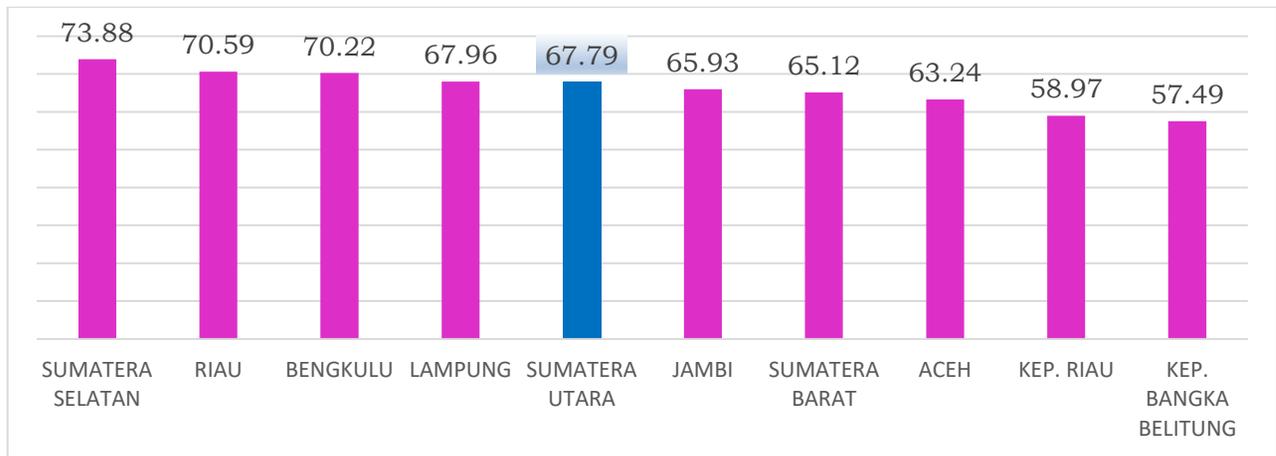
Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi ada di Kabupaten Karo sebesar 81.53 persen dan Kabupaten Samosir sebesar 78.75, persen capaian ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama yaitu sebesar 67,79 persen. Dan capaian terendah ada di kabupaten Labuhan Batu Utara. Perkembangan IDG Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.24
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota, 2021

Dilihat dari Perkembangan wilayah setara, maka Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi ada di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Riau, sementara itu Provinsi Sumatera Utara ada diperingkat ke-5, dan capaian IDG terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Capaian IDG wilayah setara adalah sebagai berikut:



Sumber : BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.25
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2021

5. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, HLS Sumatera Utara telah meningkat rata-rata 1,16 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,07 persen per tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, RLS dan HLS masih dapat tumbuh meskipun dengan perlambatan.

Jika dilihat dari capaian Nasional Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, HLS tahun 2020 masih tumbuh 0,23 persen, RLS tumbuh 1,68 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,08 persen.

Tabel. 2.19
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2019-2021

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Nasional	Sumatera Utara	Nasional	Sumatera Utara
2019	12.91	13.15	8.34	9.45
2020	12.98	13.23	8.48	9.54
2021	13.08	13.27	8.54	9.57

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2022

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Harapan Lama Sekolah tertinggi ada di Kota Medan dan Kota Padangsidimpuan sementara capaian terendah ada di Kabupaten Nias Selatan. Sementara capaian Rata-rata Lama

Sekolah tertinggi juga ada di Kota Medan dan Kota Pematang Siantar dan capaian terendah ada di Kabupaten Nias. Capaian HLS dan RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

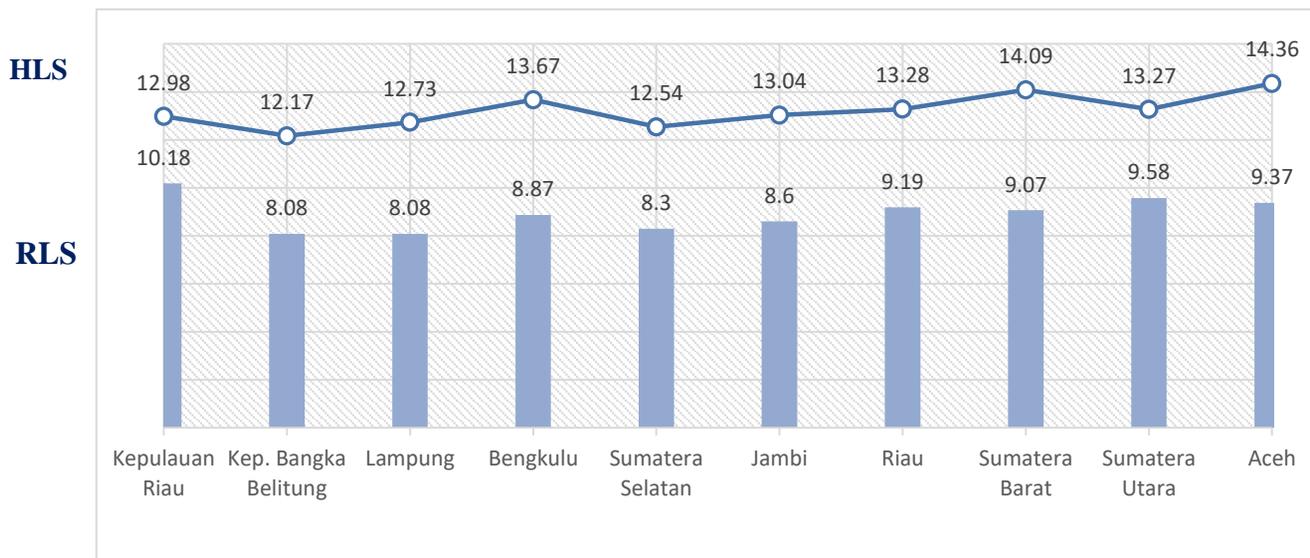
Tabel. 2.20
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, 2021

Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah
Nias	12.84	5.64
Mandailing Natal	13.61	8.63
Tapanuli Selatan	13.35	9.29
Tapanuli Tengah	13.07	8.84
Tapanuli Utara	13.70	9.99
Toba	13.46	10.57
Labuhan Batu	12.74	9.25
Asahan	12.61	8.80
Simalungun	12.79	9.61
Dairi	13.11	9.59
Karo	12.77	10.00
Deli Serdang	13.36	10.10
Langkat	13.24	8.66
Nias Selatan	12.27	6.06
Humbang Hasundutan	13.29	9.71
Pakpak Bharat	13.87	9.14
Samosir	13.48	9.44
Serdang Bedagai	12.61	8.69
Batu Bara	12.64	8.07
Padang Lawas Utara	13.04	9.38
Padang Lawas	13.27	9.02
Labuhan Batu Selatan	13.01	8.90
Labuhan Batu Utara	13.19	8.41
Nias Utara	13.04	6.77
Nias Barat	12.95	6.69
Sibolga	13.28	10.41
Tanjung Balai	12.62	9.45
Pematang Siantar	14.57	11.29
Tebing Tinggi	12.73	10.44
Medan	14.75	11.48
Binjai	13.63	10.94
Padangsidempuan	14.56	11.09
Gunungsitoli	13.75	8.62
Sumatera Utara	13,27	9,58

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera), maka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan Rata Rata lama Sekolah jika dibandingkan dengan wilayah setara Sumatera Utara berada pada

ururan ke-2 setelah Kepulauan Riau, capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah setara adalah sebagai berikut:



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2021

Grafik 2.26
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2021

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase, Perkembangan APS Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam kategori usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Capaian APS dari 2019 hingga 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.21
Angka Putus Sekolah Sumatera Utara 2019-2021

PROVINSI	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumatera Utara	99.41	99.44	99.32	96.89	97.04	96.99	77.67	78.21	78.66	25.75	26.98	27.05
Nasional	99.24	99.26	99.19	95.51	95.74	95.99	72.36	72.72	73.09	25.21	25.56	26.01

Sumber : BPS Nasional, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Provinsi Sumatera Utara untuk Angka Partisipasi Sekolah berada di atas Nasional sejak umur 7 hingga 24 tahun. Selain itu perkembangan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kabupaten/kota dan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.22
Persentase Penduduk yang Masih Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (%), 2021

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur Pendidikan/(tahun)				
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-15
Kabupaten					
01 Nias	98,51	94,46	77,58	19,05	75,03
02 Mandailing Natal	99,50	95,78	75,54	18,08	70,90
03 Tapanuli Selatan	98,32	97,88	79,08	21,32	75,04
04 Tapanuli Tengah	99,09	98,26	86,68	18,98	75,98
05 Tapanuli Utara	99,00	98,54	82,88	27,43	80,37
06 Toba	99,07	97,96	89,67	18,51	79,69
07 Labuhanbatu	99,41	95,75	76,52	23,34	72,00
08 Asahan	99,49	95,78	68,71	17,35	68,41
09 Simalungun	99,02	97,05	71,76	27,08	75,98
10 Dairi	99,56	97,89	89,24	20,39	79,24
11 Karo	98,79	93,24	84,41	17,56	72,58
12 Deli Serdang	99,71	98,22	78,84	25,86	72,68
13 Langkat	99,49	98,56	75,51	23,72	73,97
14 Nias Selatan	97,48	85,20	82,38	22,40	71,10
15 Humbahas	99,10	98,93	91,41	16,68	82,16
16 Pakpak Bharat	99,16	96,98	90,47	15,85	77,88
17 Samosir	99,32	98,18	93,66	10,95	78,31
18 Serdang Bedagai	99,01	96,88	78,24	12,57	67,95
19 Batu Bara	99,28	97,33	69,26	22,89	71,65
20 Padang Lawas Utara	99,22	97,20	76,06	22,30	75,00
21 Padang Lawas	99,29	96,49	73,89	32,11	74,94
22 Labuhanbatu Selatan	99,31	91,82	76,76	25,92	72,75
23 Labuhanbatu Utara	99,33	97,10	76,43	29,16	74,11
24 Nias Utara	98,77	96,98	83,48	21,25	75,83
25 Nias Barat	99,39	97,57	90,15	17,26	75,48
Kota					
71 Sibolga	99,41	97,90	79,42	17,41	69,28
72 Tanjungbalai	99,85	97,18	72,06	13,10	67,69
73 Pematangsiantar	99,31	97,64	83,02	37,10	75,54
74 Tebing Tinggi	98,68	97,22	70,93	18,98	65,97
75 Medan	99,82	98,13	80,81	43,80	74,75
76 Binjai	99,19	98,99	80,68	24,75	69,47
77 Padangsidimpuan	99,24	98,96	82,19	33,29	73,93
78 Gunungsitoli	99,62	99,58	86,26	24,07	71,64
Sumatera Utara	99,32	96,99	78,66	27,05	73,45

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Selanjutnya jika dilihat dari capaian wilayah setara, maka capaian Provinsi Sumatera Utara, capain Sumatera Utara termasuk dalam kategori rendah, capaian APS wilayah setara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.23
Angka Partisipasi Sekolah Wilayah Setara, 2021

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Aceh	99.75	99.84	99.67	98.52	98.49	98.42	83.26	83.27	83.28	32.54	32.50	32.61
Sumatera Utara	99.41	99.44	99.32	96.89	97.04	96.99	77.67	78.21	78.66	25.75	26.98	27.05
Sumatera Barat	99.52	99.61	99.61	96.23	96.60	96.63	83.63	83.68	84.07	35.66	35.96	36.41
Riau	99.36	99.53	99.65	95.37	95.53	95.66	77.29	77.42	77.81	28.16	28.35	28.79
Jambi	99.70	99.82	99.66	96.42	96.41	96.39	71.97	72.37	72.50	23.32	23.75	24.14

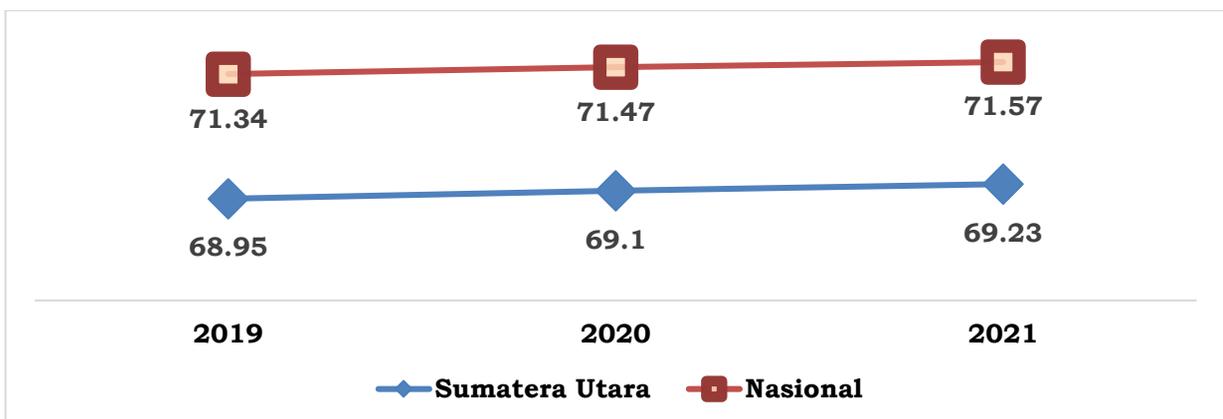
Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumatera Selatan	99.71	99.71	99.65	94.51	94.61	94.85	70.29	70.91	71.53	18.07	18.45	18.81
Bengkulu	99.77	99.78	99.76	97.18	97.49	97.49	79.39	79.72	79.75	30.71	29.99	30.46
Lampung	99.80	99.74	99.53	94.89	95.24	95.58	71.05	71.34	71.72	20.69	21.04	21.17
Kep. Bangka Belitung	99.76	99.70	99.47	92.87	93.34	93.17	67.79	67.75	68.15	17.01	17.47	18.02
Kep. Riau	99.48	99.55	99.62	98.50	98.82	98.85	84.04	84.62	84.40	18.98	19.71	19.83

Sumber : BPS Nasional, 2021

7. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,60 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara adalah 67,63 tahun, dan di 2021 mencapai 69,23 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Sumatera Utara 2020 dan 2021 mengalami perlambatan.

Jika dilihat dari perkembangan nasional, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) juga terus mengalami peningkatan, bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara, maka sejak tahun 2019-2021 capaian Provinsi Sumatera Utara berada dibawah capaian nasional. Sebagai mana terlihat pada grafik berikut:

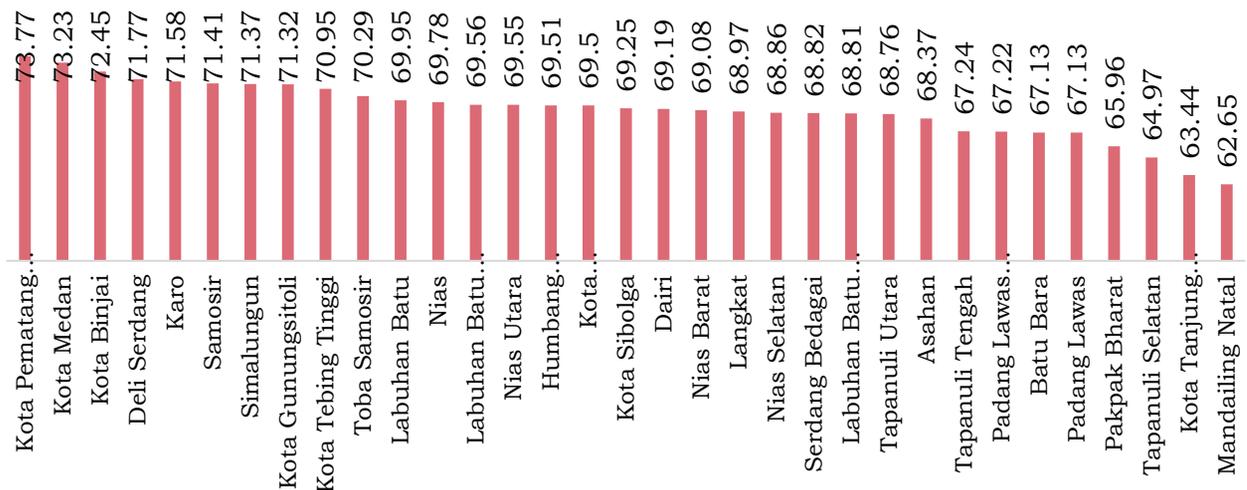


Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Grafik 2.27
Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional
Tabel. 2.2 Tahun 2019 2021

Jika dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup, maka capaian tertinggi ada di Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 73.77 tahun disusul Kota Medan dan Kota Binjai masing-masing sebesar 73.23 dan 72.45 tahun, sementara Umur

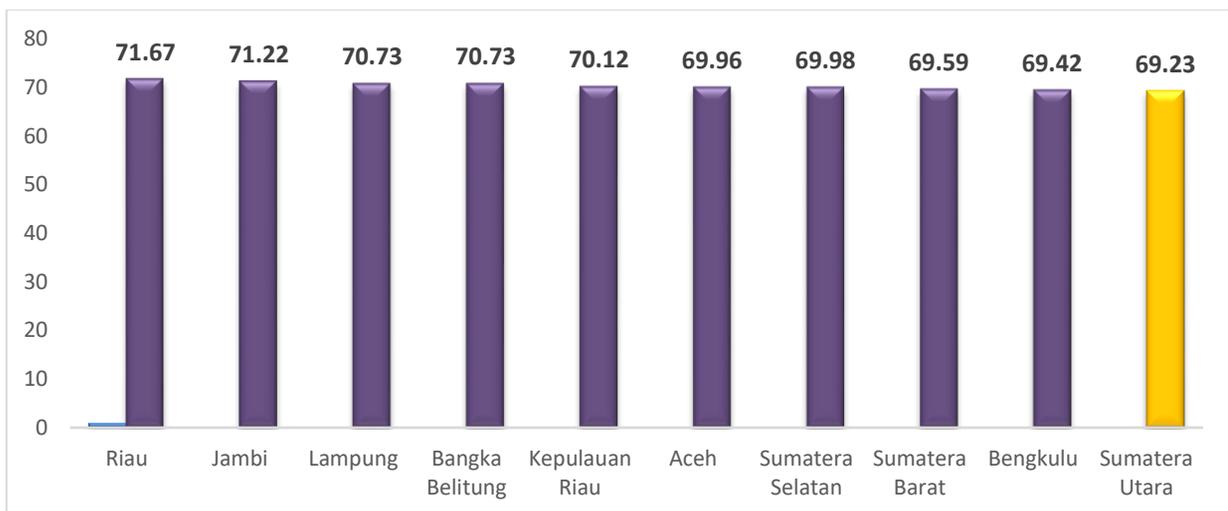
Harapan Hidup terendah ada di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 62.65 tahun, capaian Umur Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Grafik 2.28
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah se Kepulauan Sumatera, Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Provinsi Riau dan Jambi, dan UHH terendah ada di Provinsi Sumatera Utara, capaian UHH wilayah se Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2022

Grafik 2.29
Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2021

8. Kondisi Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 10,703 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 10,870 juta orang pada Agustus 2021. Penduduk usia kerja

mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 69,10 persen atau 7,51 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 7,04 juta orang penduduk bekerja dan 475 ribu orang pengangguran.

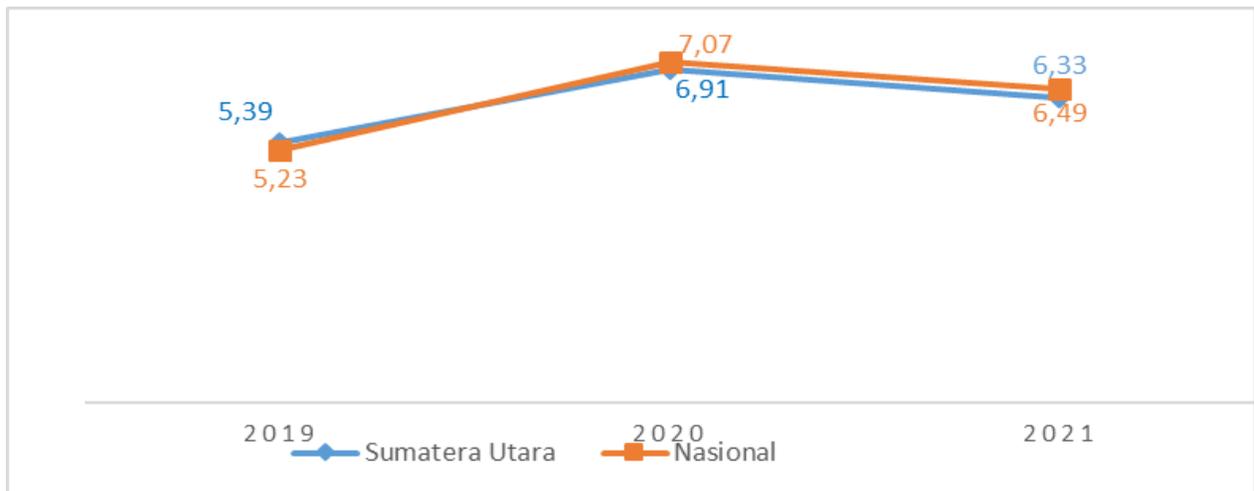
Tabel. 2.24
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2019-2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019 (ribu orang)	Agustus 2020 (ribu orang)	Agustus 2021 (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	10.532	10.703	10.870
Angkatan Kerja	7.411	7.350	7.511
Bekerja	7.012	6.842	7.036
Bukan Angkatan Kerja	3.121	3.353	3.359
	Persen	Persen	Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,39	6,91	6,33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,37	68,67	69,1

Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2021

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 161 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 adalah 69,1 persen, naik 0,43 persen poin dibandingkan Agustus 2020 (68,67 persen). Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2021 berdasarkan jenis kelamin, dimana TPAK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Agustus 2021, TPAK laki-laki naik sebesar 0,49 persen poin. Sedangkan TPAK perempuan juga naik sebesar 0,35 persen poin.

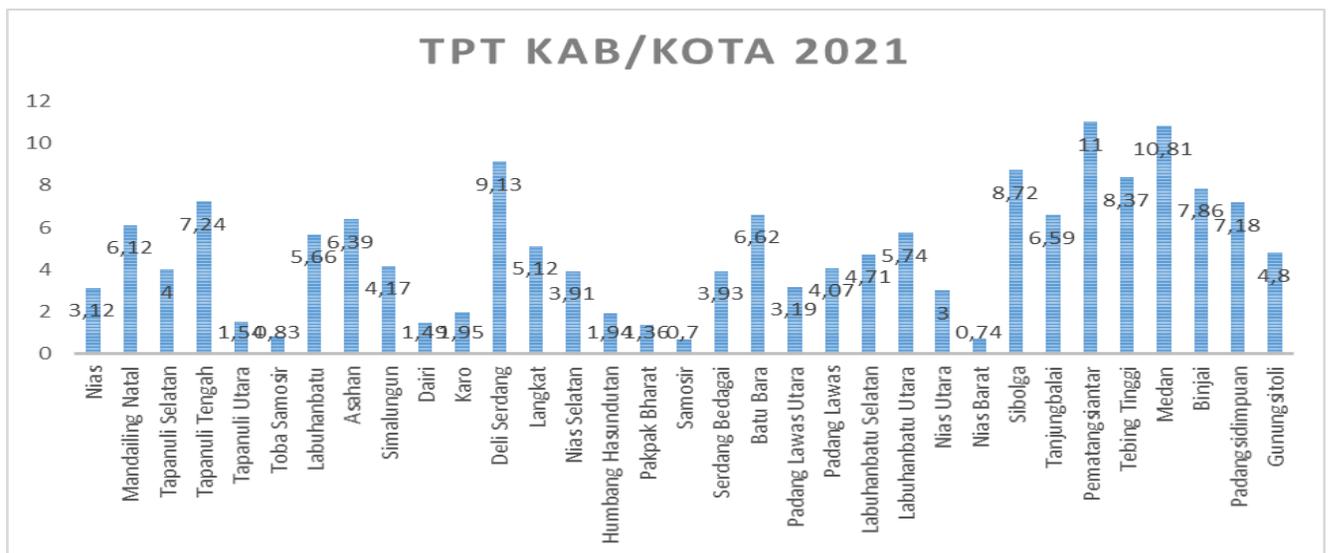
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 6,33 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur. TPT menunjukkan tren yang menurun, pada Agustus 2021 ini, nilai TPT mengalami penurunan 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. sementara di tingkat nasional Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, menurun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020, capaian TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2021

Grafik 2.30
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2019-2021

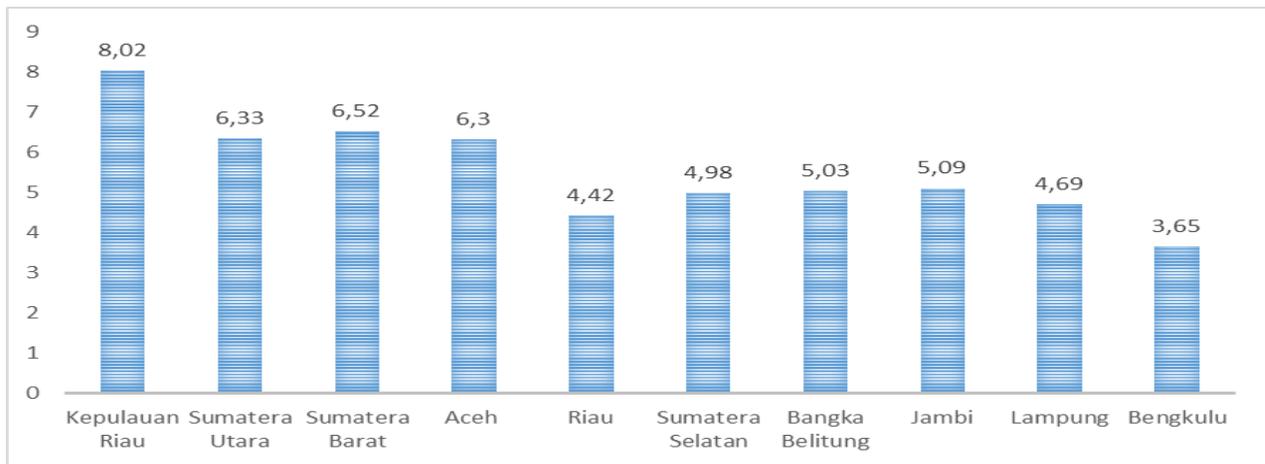
Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Pematangsiantar sebesar 11 persen, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, masing-masing sebesar 10,81 dan 9,13 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka terendah ada di Kabupaten Samosir sebesar 0,7 dan Kabupaten Nias Barat sebesar 0,74 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dapat dilihat dibawah ini:



Sumber : BPS Sumatera Utara 2021

Grafik 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota (persen) Tahun 2021

Berdasarkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Pulau Sumatera pada Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-3 tertinggi dari 10 Provinsi se-Pulau Sumatera. Perbandingan Nilai TPT Provinsi se-Pulau Sumatera dapat terlihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, Agustus 2021

Grafik 2.32 Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2021

Pandemi Covid 19 mempengaruhi Kondisi Ketenagakerjaan seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terdapat kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020. Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan sosial mulai dibuka kembali pada Juni 2020.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja. Pada Agustus 2021 penduduk usia kerja yang mencapai 10,870 juta, terdapat 814 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 7,49 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 9,67 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 4,61 persen, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Komponen	Jenis Kelamin				Daerah Tempat Tinggal				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Perkotaan		Perdesaan		Feb 2021	Ags 2021
	Feb 2021	Ags 2021	Feb 2021	Ags 2021	Feb 2021	Ags 2021	Feb 2021	Ags 2021		
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a. Pengangguran Karena Covid-19	43	60	16	24	47	68	12	16	59	84
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	16	8	22	20	34	23	4	5	38	28
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	21	35	13	24	27	48	7	11	34	59
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	327	376	236	267	398	459	165	184	563	643
Total	407	479	287	335	506	598	188	216	694	814
Penduduk Usia Kerja (PUK)	5344	5391	5.434	5.479	6.106	6.181	4.672	4.689	10.778	10.870
	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen
Persentase terhadap PUK	7,62	8,89	5,28	6,11	8,29	9,67	4,02	4,61	6,44	7,49

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021 dan Agustus 2021

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, Feb- Agustus 2021

Grafik 2.33

Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Feb - Agustus Tahun 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Penduduk di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah: suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-fak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Sedangkan penduduk asli pendatang berasal dari suku Jawa, Padang, Sunda dan lain-lain. Penduduk pendatang berasal dari suku Tionghoa, Arab dan India.

Keberagaman etnis penduduk Provinsi Sumatera menjadikan Sumatera Utara memiliki kekayaan seni dan budaya yang sangat beragam, hal ini tentu saja menjadi nilai lbi sekaligus tantangan bagi Provinsi Sumatera Utara untk dapat menjaga kerukunan dan melestarikan budaya yang ada.

Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 2018-2020

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	55	6	3
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10	2	11
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	53.7	58.82	
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	90	45.04	

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga Prov. Sumut, data diolah 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara menjadi 3 kali pelaksanaan Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021, kondisi ini terjadi karena keterbatasan penyelenggaraan Festival akibat dari pembatasan pergerakan sosial masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Pandemi virus corona telah mempengaruhi berbagai acara festival dan seni budaya di Sumatera Utara, masalah keamanan publik penyelenggaraan festival terpaksa dibatalkan, dan hampir semua indikator capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya penurunan yang signifikan terjadi pada Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar) pada tahun 2021 menjadi 45.04, hal ini disebabkan adanya pandemic Covid 19 yang membatasi kegiatan dimaksud.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Kondisi Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari capaian Indikator sebagai berikut:

Tabel 2.26
Capaian Indikator Pendidikan Provsu Tahun 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pendidikan	-	-	-	-	68,65- 69,15	68.76
Rata-Rata Lama Sekolah	9.79	9.45	9.97	9.54	9.68	9.57
Harapan Lama Sekolah	13.37	13.5	13.81	13.23	13.31	13.27
APK SM Sederajat	97.44	100.83	98.14	105.12	99.14	106.07
APM SM Sederajat	91.49	80.61	73.19	73.69	82.61	72.53

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	96.2	90.14	97	96.61	97.4	96,80
Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	56.1	52.07	57.4	48.97	58.7	49,46
Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	94.42	90.48	94.72	93.55	95.02	94,33
Persentase Guru SMK bersertifikasi	42.7	40.77	43.4	38.72	44.1	41,34

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu 2021

Jika dilihat dari tabel diatas, maka hampir semua capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara capaiannya berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, terdapat 1 (satu) indikator yaitu APK SM sederajat yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106.07 persen.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. SPM Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi meliputi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah:

- Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun
- Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas.

Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM Pendidikan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	96,10 %	96,10 %	96,10 %
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	34,9 %	34,9 %	16,55 %

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu, 2021

2. KESEHATAN

a. Dinas Kesehatan

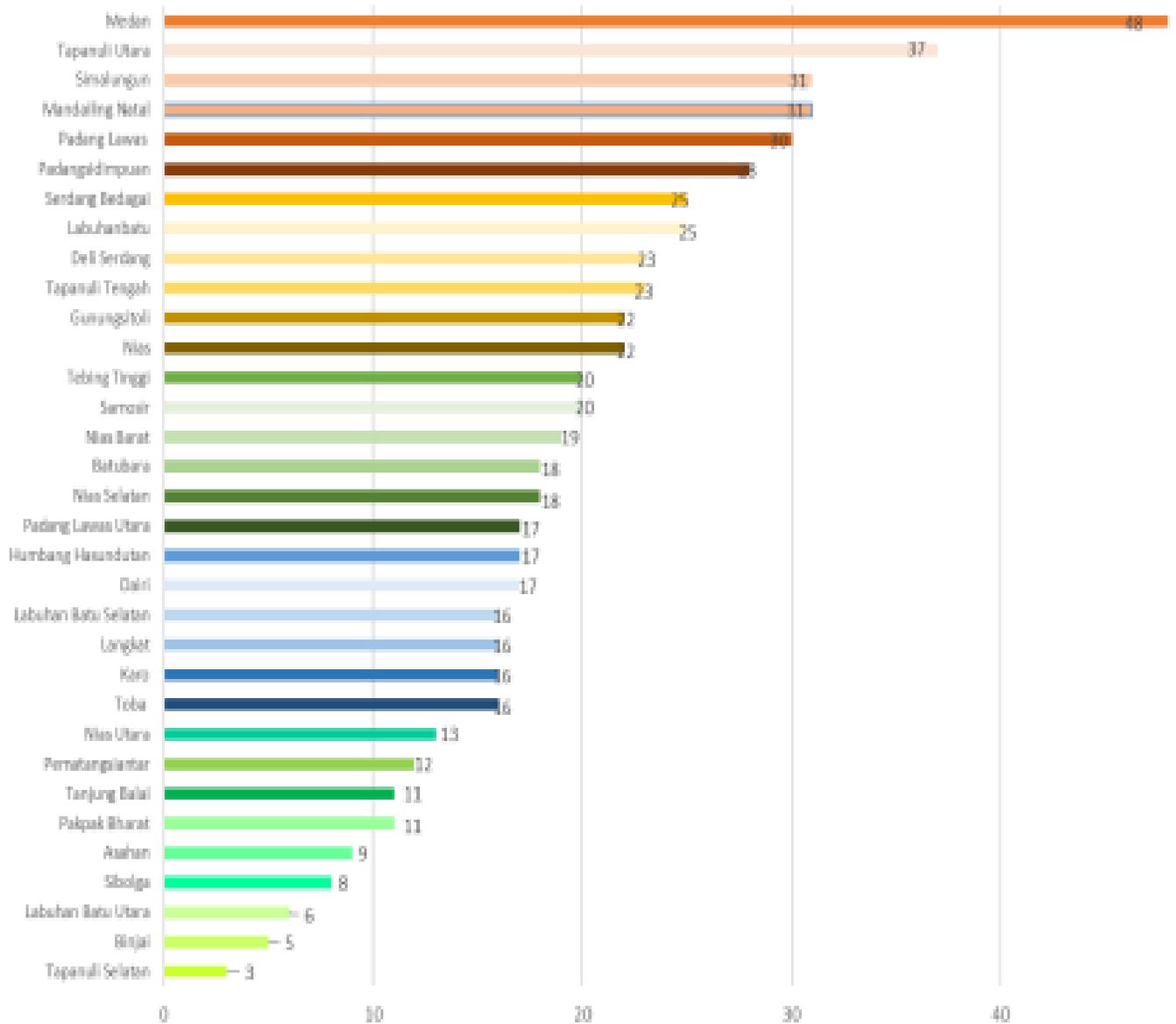
Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari capaian indikator utama pembangunan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,5	2,61	4,3	2,39	2,44	2,28
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	80,1	66,76	75,1	62,5	93,49	89,18
Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,01	11,97	10,99	12,24	12,24	8,78
Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	31,50	30,7	30,50	29,20	29,5	25,8

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2022

Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKB di Provinsi Sumatera Utara sebesar 2.28 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan AKB pada Tahun 2020, yaitu 2.39 per 1.000 kelahiran hidup (715 kasus kematian bayi dari 299.198 sasaran lahir hidup). Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 2.44 per 1.000 kelahiran hidup, maka AKB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 telah melampaui target. Kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 jika dilihat per kabupaten/kota seperti pada gambar berikut ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi 2022

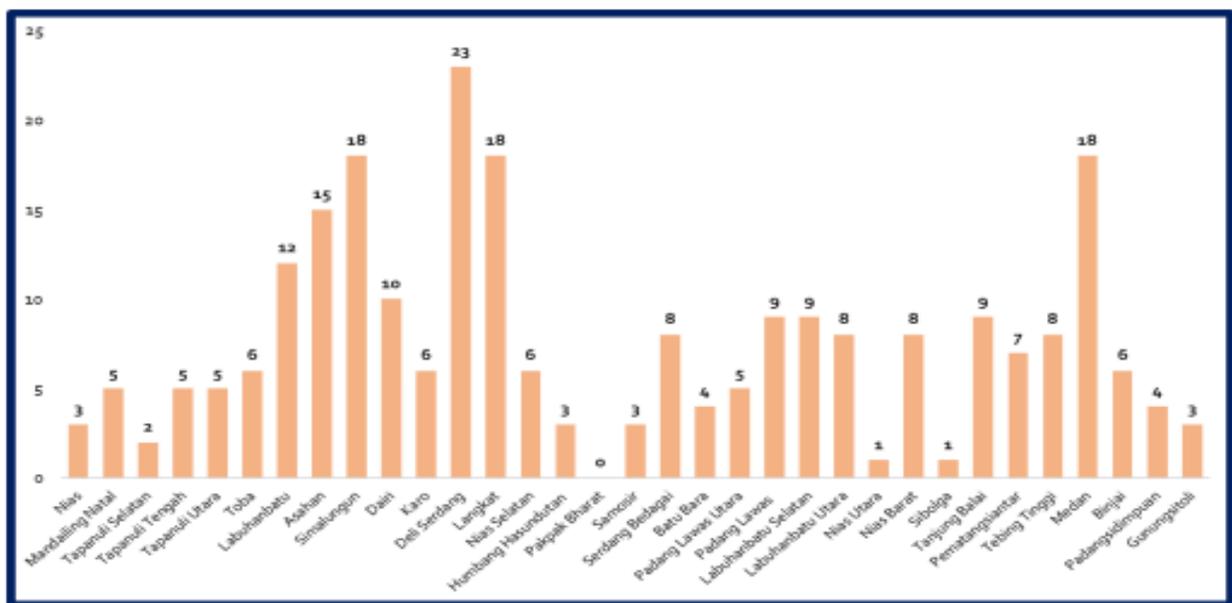
Grafik 2.34
Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian bayi terbanyak tahun 2021 ada di Kota Medan (48 kasus), Sedangkan kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Tapanuli Selatan (3 kasus). Penyebab kematian bayi terbesar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah asfiksia sebanyak 133 kasus (26.07%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 161 kasus (21.01%), kelainan sebanyak 70 kasus (11.06%), infeksi sebanyak 17 kasus (2,69%), diare dan pneumonia sebanyak 10 kasus (1.58%), COVID-19 sebanyak 5 kasus (0.79%), kondisi perinatal sebanyak 1 kasus (0,16%), dan sebab-sebab lain sebanyak 222 kasus (35.07%)

Keberhasilan penurunan kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 didukung oleh berbagai faktor, diantaranya adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan

cakupan akreditasi Puskesmas dan rumah sakit, serta upaya peningkatan pemahaman, keterampilan dan kemampuan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Disamping itu, terdapat alokasi dana transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik untuk program jaminan persalinan, rumah tunggu kelahiran bagi ibu hamil, serta BOK Kabupaten dan Puskesmas.

Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKI di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89.18 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan AKI pada Tahun 2020, yaitu 62.50 per 100.000 kelahiran hidup (187 kasus kematian ibu dari 299.198 sasaran lahir hidup), dan AKI Tahun 2019 (yakni 66.76 per 100.000 kelahiran hidup). Distribusi kasus kematian ibu per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi 2021

Grafik 2.35
Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa hanya ada 1 (satu) kabupaten yang tidak ditemukan kasus kematian ibu di wilayahnya sepanjang tahun 2021, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan kasus kematian tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Deli Serdang (23 kasus), diikuti Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, dan Kota Medan (masing-masing 18 kasus).

Tingginya kasus kematian ibu di tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) banyaknya ibu hamil serta melahirkan yang terpapar COVID-19 dan

meninggal dunia, (2) banyaknya ibu hamil yang merasa ragu untuk memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar, (3) terbatasnya APD untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan bagi petugas di Puskesmas dan masih adanya petugas yang belum mengetahui pedoman pelayanan pada masa pandemic COVID-19, dan (4) adanya pembatasan beberapa pelayanan berdasarkan pedoman pelayanan pada masa pandemic COVID-19 terutama pada ibu yang terinfeksi COVID-19.

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Angka kesakitan tertinggi dan berada di atas angka nasional ada di Kabupaten Padang Lawas (14.86), Kota Tanjung Balai (14.54%), Kota Gunungsitoli (14.37%), Kabupaten Serdang Bedagai (14.12%), dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (13.25%). Adapun angka kesakitan terendah ada di Kabupaten Samosir (4.86%), Kota Binjai (5.26%), Kabupaten Tapanuli Selatan (5.42%), Kota Pematangsiantar (5.62%), dan Kabupaten Labuhanbatu (5.65%) dan Kota Medan (6.05%). Kondisi morbiditas per kabupaten/kota tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	ANGKA KESAKITAN (%)
1	Nias	12.43
2	Mandailing Natal	10.27
3	Tapanuli Selatan	5.42
4	Tapanuli Tengah	9.79
5	Tapanuli Utara	6.43
6	Toba	8.81
7	Labuhanbatu	5.65
8	Asahan	8.12
9	Simalungun	10.35
10	Dairi	7.12
11	Karo	6.64
12	Deli Serdang	8.41
13	Langkat	9.12
14	Nias Selatan	10.23
15	Humbang Hasundutan	6.48
16	Pakpak Barat	10.70
17	Samosir	4.86
18	Serdang Bedagai	14.12
19	Batu Bara	10.48
20	Padang Lawas Utara	9.33
21	Padang Lawas	14.86
22	Labuhanbatu Selatan	13.25
23	Labuhanbatu Utara	12.37
24	Nias Utara	9.59
25	Nias Barat	12.01
26	Sibolga	7.94
27	Tanjung Balai	14.54
28	Pematangsiantar	5.62
29	Tebing Tinggi	7.52
30	Medan	6.05
31	Binjai	5.26
32	Padangsidempuan	10.42
33	Gunungsitoli	14.37
Sumatera Utara		8.78

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi 2021

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan diperoleh prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 25.8%, menurun sebesar 2.9% bila dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tahun 2020 (28.7%). Meski terjadi penurunan, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi stunting balita secara nasional, yaitu 24.4%, dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan oleh WHO (yaitu di bawah 20%). Prevalensi stunting pada balita tertinggi ada di Kabupaten Mandailing Natal (47.0%), Kabupaten Padang Lawas (42.0%), Kabupaten Pakpak Barat (40.8%), Kabupaten Nias Selatan (36.7%), Kabupaten Nias Utara (34.4%), Kabupaten Dairi (34.2%), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (33.1%). Sedangkan prevalensi stunting pada balita terendah dan di

bawah 20% sesuai yang disarankan oleh WHO ada di Kabupaten Deli Serdang (12.5%), Kota Pematangsiantar (15.0%), Kota Tebing Tinggi (17.3%) dan Kabupaten Asahan (18.9%) dan Kota Medan (19.9%). Secara keseluruhan, terdapat 11 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting di bawah prevalensi Provinsi, dan 22 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting di atas prevalensi Provinsi

Tabel 2.30
Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	Prevalensi Stunting (%)
1	Kabupaten Mandailing Natal	47.7
2	Kabupaten Padang Lawas	42.0
3	Kabupaten Pakpak Bharat	40.8
4	Kabupaten Nias Selatan	36.7
5	Kabupaten Nias Utara	34.4
6	Kabupaten Dairi	34.2
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	33.1
8	Kabupaten Nias	32.1
9	Kota Padangsidempuan	32.1
10	Kabupaten Langkat	31.5
11	Kabupaten Batu Bara	30.9
12	Kabupaten Labuhanbatu Utara	30.9
13	Kabupaten Tapanuli Selatan	30.8
14	Kabupaten Samosir	28.4
15	Kabupaten Simalungun	28.0
16	Kabupaten Nias Barat	27.9
17	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	27.0
18	Kabupaten Labuhanbatu	27.0
19	Kabupaten Humbang Hasundutan	26.7
20	Kabupaten Tapanuli Utara	26.7
21	Kota Gunungsitoli	26.3
22	Kota Tanjung Balai	26.1
23	Sibolga	25.8
24	Karo	25.3
25	Tapanuli Tengah	25.3
26	Toba	24.8
27	Binjai	21.7
28	Serdang Bedagai	20.0
29	Medan	19.9
30	Asahan	18.9
31	Tebing Tinggi	17.3
32	Pematangsiantar	15.0
33	Deli Serdang	12.5
Sumatera Utara		25.8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi 2021

Selain capaian Indikator diatas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan target Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%) dan Jumlah

warga negara pada kondisi kejadian jluar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%). Capaian SPM kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Capaian SPM Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2021

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa dan Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32
Capaian Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	100	73,85	95	68,34	62	60,65
2	Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa	65	70,59	61	79,83	80	76,87

Sumber : Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provsu, 2021

c. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Selain Rumah Sakit jiwa, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai Rumah Sakit Umum Haji. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Dalam menjalankan roda organisasi RSU Haji Medan berpedoman kepada

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 61 tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja RS Haji Medan.

Bila dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit yaitu tingkat pemakaian sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan indikator pemanfaatan tempat tidur (BOR; bed occupancy rate) di rumah sakit di Sumatera Utara masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 60%-80%. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Haji dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Capaian Indikator Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Haji (%)	55	46	60	27	62	40
2.	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji (hari)	5	4	5	4	5	5
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	-	-	-	-	80	85

Sumber : Rumah Sakit Haji Medan Provsu 2022

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Konstruksi

Pada tahun 2021 kemantapan jalan Provinsi menurun menjadi 76,37 persen dari tahun 2020 sebesar 82,10 persen dan dari tahun 2019 sebesar 82,19 persen sementara persentase jembatan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi, meningkat pada tahun 2020 sebesar 99,10 persen selanjutnya terjadi penurunan. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 10,88 persen dan 11,22 persen. Hal ini disebabkan adanya skema kerjasama yang dilakukan dengan badan wilayah jasa konstruksi Provinsi Aceh dan pihak swasta sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga ahli konstruksi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan. Capaian Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34
Kondisi Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	82,19	82,10	76,37
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	83,71	99,10	84,15
3.	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	10,71	10,88	11,22

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, 2022

- **Irigasi dan Air Baku**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, baik kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten menunjukkan total luasan irigasi adalah 500.415 Ha (2.147 DI). Daerah Irigasi Permukaan sebanyak 2.010 Daerah Irigasi dengan luasan 420.405 Ha (84,01%), Daerah Irigasi Rawa sebanyak 51 Daerah Irigasi dengan luasan 78.871 Ha (15,76%) dan Daerah Irigasi Air Tanah sebanyak 86 Daerah Irigasi dengan luasan irigasi adalah 1.139 Ha (0,23%).

Kondisi Jaringan Irigasi secara keseluruhan saat ini masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi baik yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air, pengendali kelebihan air, maupun pengamanan terhadap kerusakan, sehingga dirasakan saat ini setiap selesai dilakukan perbaikan pada daerah irigasi selalu rentan terhadap kerusakan masa berikutnya. Faktor yang mempengaruhi kerusakan pada jaringan irigasi tersebut adalah untuk daerah irigasi didataran tinggi jaringan irigasinya pada umumnya terletak pada lereng-lereng bukit yang sangat rawan terhadap longsor, dan untuk daerah irigasi di dataran rendah terjadi sedimentasi yang sangat tinggi yang terbawa oleh sungai akibat kondisi Daerah Aliran Sungai yang sudah rusak.

Sementara itu indikator kapasitas daya tampung sumber air baku dalam bentuk waduk/embung/situ (M3) di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tahun 2019. Penyediaan air baku bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air untuk penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, kebutuhan air rumah tangga (air minum dan air bersih) dan keperluan lainnya. Kegiatan penyediaan air baku selama periode tahun 2019-2021 dengan melakukan rehabilitasi waduk atau embung yang ada. Tidak tercapainya target pembangunan embung untuk penyediaan air baku disebabkan kesulitan kabupaten/kota dalam penyediaan lahan. Capaian Indikator Irigasi dan Air Baku dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.35
Indikator Irigasi dan Air Baku 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	76,94	76,95	76,95
2	Cakupan Akses Minum Perpipaian (%)	32,26	32,26	32,26
3	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaian (Sambungan Rumah/SR)	29.086	29.086	29.086
4	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	255.000	254.560	254.550
5	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	82,43	83,28	84,00
6	Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%)	53,48	57,45	55,00
7	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	32.000	35.000	40.000

Sumber : Dinas Dinas Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata ruang Provsu, 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Cakupan layanan akses air minum layak dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan air minum layak sudah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dan proses pengolahan sesuai dengan syarat kesehatan yang layak, hal ini menggambarkan ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan air minum di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk indikator cakupan akses air minum perpipaian di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami perubahan atau masih stagnan sebesar 30,26% dari 2019 sampai 2020. Hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan Provinsi dalam penanganan air minum perpipaian. Begitu juga dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaian (Sambungan Rumah/SR) yang tidak mengalami perubahan (stagnan) dari tahun 2019. Tujuan dari sambungan rumah untuk air limbah adalah terkendalinya pembuangan Air Limbah Domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Drainase perkotaan merupakan kumpulan sistem jaringan saluran drainase, situ-situ, dan sumur-sumur resapan yang berada sepenuhnya di dalam batas administrasi Pemerintah Kota atau di dalam batas ibu kota Pemerintahan Kabupaten. Pengelolaan drainase dalam peningkatan layanannya sebaiknya memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Dapat dilihat dari tabel, untuk Cakupan Penduduk Yang Terlayani

Sistem Jaringan Drainase Skala Kota (KK) mengalami capaian yang stagnan dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

- Penataan Ruang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2021, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan mewujudkan keserasian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga kemudian rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor.

Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	70	50	80
2.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	50	55	60

Sumber : Dinas Dinas Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata ruang Provsu, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa:

1. Kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan mengalami peningkatan kinerja di tahun 2021 disebabkan karena adanya implementasi kebijakan yang baik kepada semua pihak yang terkait.
2. Untuk ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital ini juga mengalami peningkatan yang disebabkan karena penyelenggaraan penataan ruang yang tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah saja, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut serta berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan pemerintah melalui kemudahan akses dalam mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi.

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya agar setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada tahun 2019 capaian persentase indikator rasio rumah layak huni sebesar 94.10 % dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 95.77 %. Untuk tahun 2021 capaian persentase indikator rasio rumah layak huni juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 69.50 %, peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk melakukan fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,10	95,77	69,50
2.	Pengurangan luas Permukiman Kumuh (Ha/tahun)	88	28,4	16,27
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	3.491	482	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPS

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan. Pola penanganan yang dimaksud meliputi pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang terdiri dari :

- 1) Prasarana Perumahan, antara lain: a) jalan; b) drainase; c) air minum; d) sanitasi; e) air limbah; f) persampahan.
- 2) Sarana Perumahan, antara lain: a) sarana perniagaan/perbelanjaan; b) sarana pelayanan umum dan pemerintahan; c) sarana pendidikan; d) sarana kesehatan; e) sarana peribadatan; f) sarana rekreasi dan olah raga; g) sarana pemakaman; h) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan i) sarana parkir.
- 3) Utilitas Umum Perumahan, antara lain: a) jaringan listrik; b) jaringan telepon; c) jaringan gas; d) jaringan transportasi; e) pemadam kebakaran; dan f) sarana penerangan jasa umum.

4. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.38
Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	65	97	68	90.25	92	96.51
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	45	59	60	31.25	65	100

Sumber : Satpol PP Provsu 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,51 % menjadi 96,51 dari 92,00 % capaian tahun 2020. Begitu juga halnya dengan Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2020 capaian kinerja dicapai sebesar 31,25 % dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 100%. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat meningkat.

b. Penanggulangan Bencana

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera yang memiliki ibu kota provinsi di Kota Medan. Secara geografis, wilayahnya terbagi menjadi 3 kelompok kawasan yaitu, pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur. Provinsi ini menjadikan perkebunan sebagai perekonomian utama yang dikelola

oleh perusahaan swasta maupun negara. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, penduduk Sumatera Utara pada bulan September 2020 sebanyak 14,80 juta jiwa (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021). Penduduk Sumut menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah bencana puting beliung, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Sumatera Utara memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 143.83.

Ancaman bencana di Sumatera Utara adalah Gempa bumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ektrim, gelombang ektrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39
Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	33	33	33	33	33
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	4	3	3	3
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	2	2	2	4	4
Indeks Resiko Bencana	145	145.18	134.4	145.18	145	145.83

Sumber : BPBD Provinsi Sumatra Utara, 2021

Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena : 1) Bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan; 2) Kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh; 3) Pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk tahun 2021 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas dengan upaya antara lain pembentukan tim terpadu, penetapan pelaksanaan pembangian zona penanggulangan bencana mendorong peningkatan kapasitas dari seluruh kab/kota dengan pelatihan-pelatihan untuk menghadapi bencana, maka target tahun 2021 sebesar 145,00

terrealisasi menjadi 143,83 yang artinya Sumatera Utara turun dari wilayah kelas risiko tinggi menjadi kelas risiko sedang.

Indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.40
Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara 2021

NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO	NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO
1	KOTA GUNUNGSITOLI	215.6	TINGGI	18	HUMBANG HASUNDUTAN	130.0	SEDANG
2	MANDAILING NATAL	214.8	TINGGI	19	DELI SERDANG	128.1	SEDANG
3	NIAS UTARA	214.0	TINGGI	20	KOTA PADANGSIDIMPUAN	128.0	SEDANG
4	NIAS BARAT	210.8	TINGGI	21	SERDANG BEDAGAI	124.6	SEDANG
5	NIAS	210.7	TINGGI	22	DAIRI	119.4	SEDANG
6	TAPANULI TENGAH	191.2	TINGGI	23	TAPANULI UTARA	118.0	SEDANG
7	NIAS SELATAN	187.9	TINGGI	24	KARO	117.1	SEDANG
8	TAPANULI SELATAN	176.4	TINGGI	25	SAMOSIR	114.0	SEDANG
9	ASAHAN	167.2	TINGGI	26	KOTA TANJUNG BALAI	114.0	SEDANG
10	SIBOLGA	167.2	TINGGI	27	PAKPAK BHARAT	112.0	SEDANG
11	LABUHAN BATU UTARA	155.2	TINGGI	28	TOBA SAMOSIR	107.2	SEDANG
12	PADANG LAWAS	154.0	TINGGI	29	KOTA BINJAI	103.2	SEDANG
13	LABUHAN BATU	151.2	TINGGI	30	KOTA TEBING TINGGI	100.0	SEDANG
14	BATU BARA	143.2	SEDANG	31	KOTA MEDAN	93.8	SEDANG
15	PADANG LAWAS UTARA	138.0	SEDANG	32	PEMATANG SIANTAR	91.2	SEDANG
16	LANGKAT	137.2	SEDANG	33	SIMALUNGUN	80.1	SEDANG
17	LABUHAN BATU SELATAN	131.2	SEDANG				

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
<13	1	RENDAH
13 - 144	2	SEDANG
> 144	3	TINGGI

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Tahun 2021

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB :
 - Indeks Bahaya, 2012
 - Indeks Jiwa Terpapar, 2012
 - Indeks Kerugian (Rupiah), 2012
 - Indeks Kerusakan Lingkungan (Ha), 2012
 - Indeks Kapasitas Daerah, 2021
- Peta Dasar, BIG
- Batas Administrasi BIG Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibunlinmas Provinsi

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan

memenuhi pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi. Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa. Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100 %.

Tabel 2.41
Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%

5. SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial melalui upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dan dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Masyarakat Sumatera Utara, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan

Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.42
Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti (%)						
2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar (%)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0.10

Sumber : Dinas Sosial Provsu 2022

Selain indikator diatas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target SPM bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis. Melalui tabel di bawah ini akan tergambar proses realisasi pencapaian SPM dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dalam tabel di bawah ini tergambar persentase target pencapaian SPM tahun 2020-2021 dan realisasi pencapaiannya pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Indikator SPM Sosial 2019-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam panti.	100 %	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam panti.	100 %	100 %	100 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2019	2020	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	284,63 %

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang ada di dalam panti semuanya mendapatkan pelayanan. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem “panti” dan “luar panti”. Sistem panti memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

2.1.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Seiring bertambahnya jumlah penduduk Sumatera Utara, penduduk usia kerja juga mengalami tren yang cenderung meningkat. Pada Agustus 2021, jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 10,87 juta jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja sebesar 69,10%. Sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 475 ribu jiwa, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020, yang tercatat sebanyak 508 ribu jiwa penganggur.

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara, beberapa program/kegiatan strategis telah dicanangkan, seperti Fasilitasi Kerja Sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi melalui Bursa Kerja Online. Pencapaian pelaksanaan Program/kegiatan strategis tersebut dapat diukur dengan capaian indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	0,005	0,01	93,94
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (%)	78,13	80,00	46,99
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	0,66	0,70	0,52
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan (%)	7,49	8,24	95,44

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas tahun 2021 capaian tenaga kerja yang telah bersertifikat kompetensi pamencapai 93,94 persen, dan capaian tenaga kerja yang ditempatkan baik didalam maupun luar negeri mencapai 46,99 persen. Sedangkan capaian perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak hanya sebesar 0,52 persen menurun jika dibandingkan tahun 2020. Namun capaian indikator perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan meningkat pesat mencapai 95,44 persen.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2019-2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender) (%)	50	73	60	98	76	72,34
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/100.000)	15	5/100.000	4	5/100.000	10/100.000	6/100.000
3	Rasio kekerasan terhadap Anak (/100.000)	20	11/100.000	10	12/100.000	16/100.000	12/100.000

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju %)	-	-	-	-	67	51

Sumber : Dinas PPPA 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 lebih baik, namun pada persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender) (%), masih belum mencapai target tahun 2021 sebesar 76 persen, untuk itu perlu perhatian khusus agar target yang telah ditentukan bisa tercapai.

3. PANGAN

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 83,77 poin menjadi 85 poin, hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan diversifikasi pangan di Sumatera Utara.

Tabel 2.46
Kondisi pangan di Sumatera Utara Tahun 2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,60	83,77	85
2	Produksi Daging (ton)	258.090,53	218.083,96	250.557,03
3	Produksi Telur (ton)	541.234,15	470.179,22	507.406,70
4	Produksi susu (ton)	3.489,84	5.150,72	5.234,96

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat produksi daging dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi, untuk tahun 2020 produksi daging sebesar 218.083,96 Ton mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 258.090,53 Ton, dan pada tahun 2021 produksi daging kembali meningkat menjadi 250.557,03 Ton. Begitu juga dengan produksi telur juga mengalami fluktuasi dapat dilihat untuk tahun 2020 Produksi Telur sebesar 470.179,22 Ton turun dibandingkan produksi pada tahun 2019 yang sebesar 541.234,15 Ton namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 507.406,70 Ton, dan untuk

produksi susu dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan terutama tahun 2020-2021 dikarenakan selama masa pandemi permintaan susu di masyarakat meningkat.

Tabel 2.47
Rincian Produksi Daging

NO	KOMODITI	TAHUN		
	DAGING (TON)	2019	2020	2021*)
1	Sapi	14.153,16	12.986,16	13.286,02
2	Kerbau	1.738,61	1.687,26	1.682,81
3	Kambing	1.118,44	848,87	843,26
4	Domba	605,80	499,33	513,34
5	Babi	49.123,96	11.685,83	12.170,99
6	Kuda	41,82	47,05	47,20
7	Ayam Buras	18.504,90	16.247,38	16.934,02
8	Ayam Ras Petelur	18.512,51	19.062,63	19.227,00
9	Ayam Ras Pedaging	151.596,60	153.757,92	183.043,63
10	Itik	2.141,63	2.220,75	2.312,11
11	Kelinci	4,93	6,53	7,23
12	Puyuh	49,27	86,31	82,75
13	Merpati	6,26	-	-
14	Itik Manila	457,75	409,28	406,67
JUMLAH		258.055,64	219.545,30	250.557,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2021

*) Angka Sementara

Dari Tabel Rincian Produksi Daging diatas dapat dilihat produksi daging sapi tahun 2021 sebesar 13.286,02 Ton meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 12.986,16 Ton namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 14.153,16 Ton, ini disebabkan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi permintaan daging sapi menurun yang berdampak pada produksi daging sapi, untuk produksi daging kambing terus mengalami penurunan produksi dikarenakan masyarakat yang telah beralih dari memelihara kambing menjadi memelihara domba yang lebih mudah dalam perawatannya sehingga produksi daging domba meningkat. Untuk Produksi daging babi terjadi penurunan drastis pada tahun 2019-2020 disebabkan oleh penyakit *Hog Cholera* yang menyerang babi sehingga menyebabkan banyak ternak babi yang mati, namun untuk tahun 2021

produksi daging babi sudah mulai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 ini dikarenakan penyakit *Hog Cholera* sudah dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Tabel 2.48
Peta Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Utara

Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Tahun 2021					
Peringkat	Kabupaten/Kota	IKP	Peringkat	Kabupaten/Kota	IKP
1	Deli Serdang	85,66	18	Asahan	74,1
2	Kota Medan	85,02	19	Kota Sibolga	71,27
3	Serdang Bedagai	83,23	20	Pakpak Bharat	71,12
4	Karo	83,22	21	Tapanuli Tengah	70,19
5	Simalungun	81,77	22	Padang Lawas	69,99
6	Kota Binjai	81,49	23	Kota Tebing Tinggi	69,41
7	Toba	81,27	24	Padang Lawas Utara	68,56
8	Dairi	80,71	25	Mandailing Natal	67,31
9	Pematang Siantar	79,63	26	Nias Utara	66,6
10	Langkat	78,8	27	Nias	65,29
11	Tapanuli Utara	77,7	28	Nias Selatan	63,54
12	Samosir	77,6	29	Nias Barat	61,29
13	Batu Bara	76,15	30	Kota Padangsidimpuan	60,72
14	Humbahas	75,51	31	Kota Tanjung Balai	54,3
15	Labuhan Batu Utara	74,49	32	Kota Gunungsitoli	45,67
16	Labuhan Batu	74,48	33	Labuhan Batu Selatan	54,15
17	Tapanuli Selatan	74,16	34	Sumatera Utara	72,25

Sumber: badan ketahanan pangan: indeks ketahanan pangan 2021

Berdasarkan tabel diatas mengenai Peringkat dan peta Indeks Ketahanan Pangan dapat dilihat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki skor terbaik yaitu Kabupaten Deli Serdang (85,66), Kota Medan (85,02), Kabupaten Serdang Bedagai (83,23), Kabupaten Karo (83,22), dan Kabupaten Simalungun (81,77), sedangkan 5 Kabupaten/Kota yang memiliki skor terendah yaitu Kabupaten Nias Barat (61,29), Kota Padangsidimpuan (60,72), Kota Tanjung Balai (54,30), Kota Gunungsitoli

(45,67), dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (54,15) banyaknya Kota yang memiliki skor rendah pada Indeks Ketahanan Pangan dikarenakan lahan pertanian di Kota yang tidak luas dan bergantung pada Kabupaten sekitar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga dapat dilihat rata-rata nilai Indeks Ketahanan Pangan untuk Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan skor 72,25 atau berada pada peringkat 23 secara nasional yang meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan skor 71,84.

Tabel 2.49
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2021

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	83,82	18	Banten	74,38
2	Jawa Tengah	82,73	19	Jambi	74,18
3	DI Yogyakarta	81,43	20	Kalimantan Tengah	73,68
4	Sulawesi Selatan	80,82	21	Kep. Bangka Belitung	73,22
5	Gorontalo	80,52	22	Kalimantan Utara	73,02
6	Kalimantan Selatan	80,29	23	Sumatera Utara	72,25
7	Jawa Timur	79,70	24	Aceh	71,63
8	Sumatera Barat	79,55	25	Kalimantan Barat	71,32
9	Sulawesi Utara	78,30	26	Bengkulu	70,32
10	DKI Jakarta	78,01	27	Sumatera Selatan	69,55
11	Lampung	77,96	28	Nusa Tenggara Timur	67,35
12	Jawa Barat	77,79	29	Riau	66,84
13	Kalimantan Timur	77,46	30	Kepulauan Riau	63,26
14	Sulawesi Tenggara	76,64	31	Maluku Utara	59,58
15	Sulawesi Tengah	75,73	32	Maluku	58,70
16	Nusa Tenggara Barat	75,67	33	Papua Barat	46,05
17	Sulawesi Barat	75,49	34	Papua	35,48

Berdasarkan Peta Indeks Ketahanan Pangan 2021, rangking Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara turun dari sebelumnya Rangking ke 16 pada tahun 2019 (69,81); rangking 21 tahun 2020 (71,84); dan pada tahun 2021 menjadi rangking 23 (72,25). Secara nilai mengalami peningkatan tetapi secara rangking mengalami penurunan, artinya beberapa daerah mengalami peningkatan terhadap ketahanan dan keragaman pangannya.

4. LINGKUNGAN HIDUP

Pada IKLH 2021 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan

perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (Benchmark). Selain itu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan:

- 1) Luas tutupan hutan (*Forest cover index*) dan perubahan tutupan hutan (*Forest performance index*)
- 2) Kondisi tutupan tanah (*Soil condition index*). Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan
- 3) Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (*Water health index*)
- 4) Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian) dan Kondisi habitat (*Land habitat index*). Tingkat fragmentasi hutan/habitat.

Nilai IKLH Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

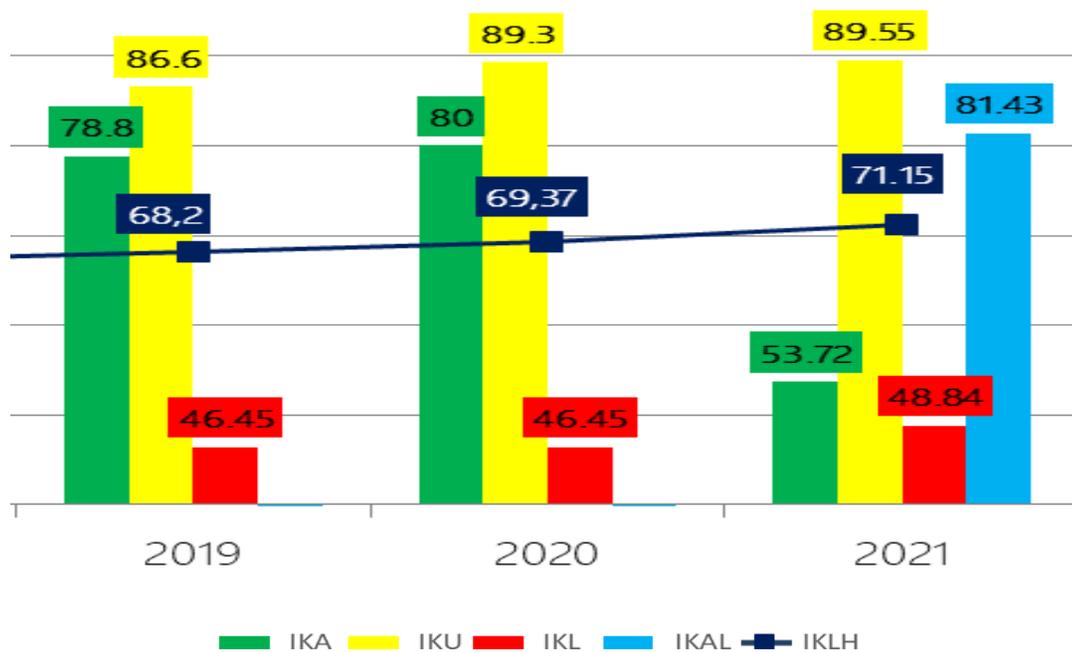
Tabel 2.50
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	78,8	80	53,72
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,6	89,30	89,55
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46,45	46,45	48,84
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	NA	NA	81,43
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,2	69,37	71,15

Sumber : Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Utara

- Catatan : 1. IKA (Indeks Kualitas Air) ; Indeks semakin tinggi, semakin baik
 2. IKU (Indeks Kualitas Udara); Indeks semakin tinggi, semakin baik
 3. IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan); Indeks semakin tinggi, semakin baik
 4. IKAL (Indeks Kualitas Air Laut); Indeks semakin tinggi, semakin baik
 5. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) ; Indeks semakin tinggi, semakin baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan baik dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan lahan. Untuk indeks kualitas air laut, dihitung mulai tahun 2021 dengan memperhatikan parameter yang dibutuhkan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk lebih detail terlampir disampaikan grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2021.



Grafik 2.36
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

- Timbulan Sampah

Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah daerah tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2020 yang mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 22% di tahun 2020. Namun kenyataannya produksi sampah di Sumatera Utara per Februari 2020 mencapai 10.091 ton per hari atau 3,69 juta ton per tahun, tetapi yang terkelola di Sumatera Utara baru 11%. Pada 2019, Pemprov telah membangun satu unit Pusat Daur Ulang (PDU) di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang. PDU ini akan mengubah sampah menjadi kompos, biogas dan bahan bakar untuk produksi. Teknologi briket dan eco enzyme adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang potensinya sangat besar. Karena, 60% sampah di Sumut adalah sampah organik yang harusnya dapat dimanfaatkan menjadi lebih bernilai atau lebih dikenal dengan konsep *circular economy*.

- Penurunan Emisi GRK (Ton Co2Eq)

Berikut adalah tabel kondisi Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2Eq) di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2019 – 2021.

Tabel 2.51
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton Co2Eq)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021

Total Emisi GRK (Juta ton Co2Eq)	Tahun		
	2019	2020	2021
	22,06	22,07	24,99

Sumber : <https://pep.pprk.bappenas.go.id>. data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 24,99 Juta Ton Co2Eq dari target 64 Juta Ton Co2Eq dari masing-masing sektor sesuai pergub 36 Tahun 2012. Tetapi masih diperlukan penanganan yang lebih optimal sehingga mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga mencapai target yang diharapkan.

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.52
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	84	91.78	87	88.89	92	85.32
Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	84	91.78	87	98.91	99.2	95.83
Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 10-18 Tahun	71	75.33	76	78.63	95	85,93
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada semua Individu yang perceraianya dilaporkan	100	100	100	100	100	100
Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Admuduk	-	-	-	-	70	30%
Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi untuk Pelayanan Publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK	-	30%	-	32%	70	65.30
Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3Dok

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pemanfaatan Data Kependudukan	-	30%	-	32%	70%	Target 38 dari 49 OPD. Tercapai 32 (65.30%) OPD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian berada dibawah target provinsi sumatera utara yang telah di tetapkan di dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, dan terdapat 4 (empat) target yang telah memenuhi target tahun 2021.

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa. Capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang aktif	-	-	-	19	56	34
Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	26	27	36.22
Jumlah BUMDES maju	-	-	-	21	40	25
Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	4	6	7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian pada tahun 2021 tidak tercapai hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja penyelenggaraan yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota selain itu untuk BUMDES maju masih kurangnya antusias daripada masyarakat dan OPD Kabupaten dalam meningkatkan perekonomian di desa melauai pengembangan BUMDES yang ada di desa.

7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.54
Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2019-2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,86	3,04	2,84	3,04	2,98	2,60
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR) (%)	59,2	45,42	59,39	49,60	50	40,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)(%)	12,5	12,1	11,5	15,2	14,8	29,6

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, ada dua indikator yang mengalami penurunan yaitu Total Fertility Rate (TFR) dari 3,04 menjadi 2,60 dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR) dari 49,60 persen menjadi 40,5. Data ini menunjukkan bahwa tren pengguna kontrasepsi modern cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya TFR. Masa pandemi Covid-19 turut berimbas dalam pelaksanaan layanan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi. kondisi ini terbukti dengan angka unmet need (kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi) meningkat. Pentingnya Peran Kontrasepsi Modern Untuk Menyukkseskan Program Keluarga Berencana dan Meningkatkan Kesehatan Reproduksi agar yang sebetulnya harus dilayani, bisa terlayani.

8. PERHUBUNGAN

Capaian Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55
Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi	35,06	35,06	47,33

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu, 2022

Data tersebut merupakan data pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Provsu melakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di 1 (satu) kota yaitu Kota Gunung Sitoli dan 11 (sebelas) Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat, Batubara, Asahan, Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Nias Selatan. Sehingga persentase kabupaten/kota yang terlayani kebutuhan fasilitas keselamatannya tumbuh sebesar 47,33%.

Sedangkan terkait terminal angkutan penumpang, hingga tahun 2021 jumlah terminal angkutan penumpang Tipe B yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/758/KPTS/2021 tentang Penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 November 2021 sebanyak 13 (tiga belas) Terminal Tipe B yaitu:

Tabel 2.56
Terminal Tipe B yang Merupakan Kewenangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Terminal Tipe B	Kabupaten/Kota
1.	Terminal Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
2.	Terminal Kabanjahe	Kabupaten Karo
3.	Terminal Sijambi	Kota Tanjung Balai
4.	Terminal Sosorsaba Parapat	Kabupaten Simalungun
5.	Terminal Perdagangan	Kabupaten Simalungun
6.	Terminal Ikan Paus Binjai	Kota Binjai
7.	Terminal Bahorok/ Bukit Lawang	Kabupaten Langkat
8.	Terminal Pasar X/ Tanjung Beringin	Kabupaten Langkat
9.	Terminal Kota Pinang	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10.	Terminal Gunung Tua	Kabupaten Padang Lawas Utara
11.	Terminal Labura	Kabupaten Labuhanbatu Utara
12.	Terminal Samosir	Kabupaten Samosir
13.	Terminal Faekhu	Kota Gunungsitoli

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu Tahun 2022

Hingga saat ini telah diserahkan sebanyak 4 (empat) Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Sumatera Utara yaitu:

Tabel 2.57
Terminal Tipe B Yang Sudah Diserahkan ke Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Terminal Tipe B	Kabupaten/Kota
1.	Terminal Kabanjahe	Kabupaten Karo
2.	Terminal Bahorok/Bukit Lawang	Kabupaten Langkat
3.	Terminal Pasar X/Tanjung Beringin	Kabupaten Langkat
4.	Terminal Sijambi	Kota Tanjung Balai
5.	Terminal Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2021 (data diolah)

9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian clean government dan good government melalui e-government. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58
Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara	61%	61%	-
2	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	89%	74%	89 %
3	Rasio sistem pelayanan berbasis online	20%	44%	57 %

Sumber : Dinas Kominfo Provsu, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Sumatera Utara tidak ada mengalami kenaikan capaian dari tahun 2018, hal ini disebabkan Kelompok Informasi Masyarakat banyak yang sudah tidak aktif lagi di kabupaten/kota. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terdapat di kabupaten/kota sebanyak 193 kelompok tersebar di 103 Kecamatan yang berada di 20 Kabupaten/kota. Untuk tahun 2021 Indikator pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat pada Perubahan RPJMD tidak

diusulkan lagi karena Indikator ini merupakan bagian dari Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk pencapaian indikator rasio sistem pelayanan berbasis online pada tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 41 % dan realisasi capaian kinerjanya yaitu 44%. Adapun pencapaian ini diperoleh dari jumlah aplikasi yang terhubung di Smart Province sebanyak 19 OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu, Badan Kepegawaian Daerah Provsu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provsu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provsu, Biro Administrasi Pembangunan Provsu, Biro Hukum Setdaprovsu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, Dinas Perkebunan Provsu, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, Dinas Pendidikan, Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, Dinas Perumahan dan Pemukiman Provsu dan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Iidrem. Sedangkan Tahun 2021 ada penambahan OPD sebanyak 3 OPD yaitu Dinas Perhubungan Provsu, Dinas Lingkungan Hidup Provsu dan Dinas Tenaga Kerja Provsu, sehingga jumlah OPD yang terhubung di Smart Province menjadi 22 OPD

Indikator ini juga merupakan ukuran kinerja Pemprovsu dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait Sistem pemerintahan berbasis Elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

10. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sektor Koperasi dan UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Beberapa strategi Pemerintah dalam mengembangkan UMKM dengan peningkatan akses pembiayaan, kemudahan dalam perizinan, intensif fiskal dan inovasi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk-produk UMKM.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan pemberdayaan sektor Koperasi dan UMKM, dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator kinerja dibawah ini :

Tabel 2.59

Capaian Indikator Kinerja sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah) (jumlah UMKM)	1.117	1.000	276
2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya (%)	60,31	1,5	7,87
3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya (%)	2,00	2,10	8,79
4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan (%)	-	-	-
5	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Jumlah UMKM)	64	-	164
6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (%)	39,86	-	187,9
7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	23,46	-	19,24

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu, 2021

Persentase koperasi aktif pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini didukung dengan adanya program pemulihan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi ini dianggap masih belum maksimal, disebabkan oleh masih belum maksimalnya pemasaran produk koperasi, lemahnya pengelolaan koperasi baik dari sisi permodalan, serta akses informasi pasar maupun kualitas SDM pengelola koperasi. Permasalahan UMKM antara lain akses permodalan diharapkan akan dapat diatasi dengan pembentukan Jamkrida, akses UMKM ke marketplace dan berorientasi *go ekspor go digital* diharapkan akan terus meningkatkan kinerja UMKM Sumatera Utara.

11. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga tahun 2021 mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.60
Indikator Penanaman Modal

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor PMDN (Proyek)	525	594	732
2	Jumlah Investor PMA (Proyek)	424	581	246
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	14,289	9,85	14,51
4	Jumlah Nilai Investasi PMA (Rp. Triliun)	4,490	9,18	6,56
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	18.50	20,11	7.474
6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	10.93	10,0	807
7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	24.34	66	37,0

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara disinyalir berjalan dengan baik, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah investor PMDN yang tumbuh sebesar 732 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 14.51 Triliun, akan tetapi investor PMA mengalami penurunan pada tahun 2021 setelah sempat meningkat di tahun 2020, dengan jumlah sebesar 246 proyek (lebih kecil dari tahun 2020 sebanyak 581 proyek) dengan nilai investasi sebesar Rp. 6.56 Triliun (lebih kecil dari tahun 2020 sebesar 9.18 Triliun).

12. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	21	12.6	23.5	17.8	26.31	26.31
Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	54.9	54.9	56.86	53.7	58.82	58.82
Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	88	70	90	71	45.04	45.04

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu data diolah, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya Covid-19 sehingga terjadi keterbatasan penyelenggaraan kegiatan, sementara pada tahun

2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

13. STATISTIK

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Untuk Capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.62
Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Data Statistik sektoral	69%	71%	87%

Sumber : Diskominfo Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2020 sebesar 71% telah melampaui dari target yang ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari jumlah data sektoral pembangunan Sumatera Utara yang telah dihimpun dari 34 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara., Untuk Tahun 2021 adanya peningkatan pencapaian data Statistik Sektoral sebesar 87% artinya jumlah data sektoral pembangunan Sumatera Utara yang dihimpun dari 35 OPD dililingkungan Pemprovsu.

14. PERSANDIAN

Setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.63
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan
Pengamanan Informasi dan Persandian

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi	10%	10%	20%

Sumber : Diskominfo Provsu , 2021

Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah diberikan Pemahaman Persandian dan Keamanan Informasi untuk Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Kominfo Provsu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat, sedangkan Tahun 2021 OPD yang diberikan pemahaman Persandian dan Keamanan Informasi bertambah sebanyak 8 OPD yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Koperasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian di Tahun 2021 jumlah OPD yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi berjumlah 13 OPD.

Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

15. KEBUDAYAAN

Provinsi Sumatera Utara terkenal dengan kekayaan budayanya. Didukung oleh berbagai jenis etnis yang tinggal di Sumatera Utara, khasanah budaya dan adat istiadat yang ada sangat beragam. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengembangan dan kelestarian budaya yang telah ada.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan Pemajuan Kebudayaan adalah “Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan”. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Sumatera Utara, dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, dan Penetapan Cagar Budaya Provinsi. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.64
Indikator Kebudayaan

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	55	6	3
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10	2	11
3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	NA*)	NA*)	7

Keterangan : *) Indikator baru sesuai dengan P.RPJMD Povsu 2019-2023

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan jumlah penyelenggaraan. Pada tahun 2021, penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya hanya terlaksana 3 kali, hal ini disebabkan pembatasan pergerakan sosial masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pelestarian dan Penetapan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya mengalami Perkembangan yang berfluktuasi, tahun 2021 jumlah benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah dilestarikan sebanyak 11 (benda/situs/Kawasan cagar budaya) antara lain : Kawasan Cagar Budaya Masjid Azizi, Kawasan Cagar Budaya Makam Tengku Amir Hamzah, Situs Benteng Putri Hijau, Kawasan Cagar Budaya Desa Bawomaoluo, Situs Cagar Budaya Sopo Godang, Bangunan Cagar Budaya Balai Ujung Tanjung, Bangunan Cagar Budaya Rumah adat Marga Silaen, Situs Papan Tinggi, Situs Batu Mejan Sibiangsa, Bangunan Cagar Budaya Rumah adat Tumori, dan situs Megalith Tuado.

16. PERPUSTAKAAN

Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi instrumen kajian IPLM adalah pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Capaian Indikator perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.65
Indikator Perpustakaan

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9.75	9.75	9.75	9.75	11	12.50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022

17. KEARSIPAN

Kearsipan atau *Records Management* adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi. Sistem kearsipan dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dianggap penting bagi suatu organisasi. Efektif atau tidaknya suatu sistem kearsipan tergantung pada rancangan sistem itu. Rancangan sistem mengidentifikasi dan menseleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta menerapkan cara pengaturan dan pencarian Kembali. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.66
Indikator Kearsipan, 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	4	20	4.62	6,12	47	47
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	50	15.432	60	65	71	71

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja kearsipan pada tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

2.1.3.3. URUSAN PILIHAN

1. PARIWISATA

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, lama kunjungan wisata (*length of stay*), kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Utara, dan jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui empat pintu masuk yaitu Bandar Udara Kualanamu, Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan, dan Bandar Udara Silangit pada tahun 2021 mencapai 240 orang, mengalami penurunan sebesar -99 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 44.400 orang.

Lama tinggal atau lama kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diterima suatu kabupaten/kota yang mengandalkan pendapatan daerahnya dari industri pariwisata. Semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata (DTW), semakin banyak uang yang akan dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Lama tinggal wisatawan (*length of stay*) baik wisatawan mancanegara di Provinsi Sumatera Utara tercatat 1,30 hari dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 6,22 persen pada tahun 2021.

Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.67
Indikator Pariwisata

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	258.822	44.400	240
2	Lama Kunjungan Wisata	1,38	1,15	1,30
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7,48	6,66	6,22
4	LPE Pariwisata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum)	7,34	-11,02	10

Keterangan : *) Indikator baru sesuai PRPJMD Provsu Tahun 2019-2023
Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata BRS BPS Sumatera Utara 2022

Dari data diatas penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara disebabkan oleh:

- a. Pembatasan pergerakan sosial akibat pandemi Covid-19
- b. Kurang optimalnya aksesibilitas menuju kawasan wisata dan sarana-prasarana penunjang pariwisata
- c. Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya sadar wisata dan sapta pesona di Masyarakat
- d. Kurang optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif

2. PERTANIAN

Peningkatan Produksi pangan terutama komoditi padi/beras merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Komoditi padi/beras ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keamanan/ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Capaian Jumlah Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.68
Indikator Pertanian Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1.	Produksi Tanaman Pangan			
1.1	a. Padi (ton GKG)	4.693.563	4.200.112	3.926.768
1.2	b. Jagung (ton pipilan kering)	1.960.424	1.965.444	1.727.166
1.3	c. Kedele (ton)	9.627	4.003	1.463
2.	Produktivitas Tanaman Pangan			
2.1	a. Padi (ton/Ha)	4,66	5,10	5,18
2.2	b. Jagung (ton/Ha)	6,14	6,12	6,31
2.3	c. Kedele (ton/ha)	1,73	1,56	1,71
3	Produksi Tanaman Hortikultura			
3.1	a. Bawang Merah (ton)	18.072	29.222	53.766
3.2	b. Cabe (ton)	154.008	193.862	208.663
3.3	c. Sayur-sayuran (ton)	1.130.462	1.270.084	1.469.937
3.3	d. Buah - buahan (ton)	1.107.154	1.249.380	1.467.473
4	Produktivitas Tanaman Hortikultura			

No	Indikator	2019	2020	2021
4.1	a. Bawang Merah (ton)	8,05	9,55	12,40
4.2	b. Cabe (ton)	9,61	10,48	12,25

Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura, 2021

Produksi tanaman pangan mengalami penurunan akibat penurunan luas lahan pertanian dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain padi, kedelai juga belum dapat memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, hal ini terjadi karena kondisi lahan yang belum mendukung dan stabilitas harga yang belum terjamin. Untuk kebutuhan tanaman hortikultura seperti bawang merah, buah-buahan, cabe, sayuran secara trend masih memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, tetapi untuk bawang putih masih mengalami kekurangan sehingga masih memerlukan impor dari daerah lain.

Selain indikator diatas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumatera Utara (Sumut) masih terus melakukan verifikasi terhadap data luas lahan baku sawah yang ada di Sumut. Pada tahun 2021 luas lahan baku sawah tercatat 349.379,7 hektare dan mengalami penurunan dari tahun 2020 tercatat 368.830 hektare. Luas itu berbeda dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Potensi Baku Lahan Sawah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.69
Potensi Baku Lahan Sawah

No	Kab/Kota	2019		2020	2021	
		ATR/BPN	SP Lahan BPS	Kab/Kota	Perubahan Lahan Eksisting	Laporan SP Lahan
1	Nias	5.903,8	6.070,9	6.070,9	6.070,9	-
2	Mandailing Natal	11.581,0	22.053,0	22.053,0	22.053,0	21.999
3	Tapanuli Selatan	12.377,3	13.924,0	13.924,0	13.924,0	14.296
4	Tapanuli Tengah	8.533,4	13.877,0	13.877,0	13.877,0	13.877
5	Tapanuli Utara	20.535,3	18.803,0	18.803,0	18.803,0	18.803
6	Toba Samosir	17.083,7	17.438,0	17.438,0	17.438,0	19.419
7	Labuhan Batu	16.244,2	18.071,0	16.244,2	16.244,2	18.071
8	Asahan	6.538,8	8.521,0	6.538,8	6.538,8	8.299
9	Simalungun	25.342,7	30.946,0	30.946,0	30.946,0	30.749
10	Dairi	5.694,2	6.399,0	6.399,0	6.399,0	6.399

No	Kab/Kota	2019		2020	2021	
		ATR/BPN	SP Lahan BPS	Kab/Kota	Perubahan Lahan Eksisting	Laporan SP Lahan
11	Karo	14.518,5	10.223,0	14.472,0	14.472,0	10.750
12	Deli Serdang	33.992,1	33.992,0	33.992,1	33.992,1	33.992
13	Langkat	19.442,6	34.038,0	34.038,0	22.425,0	24.682
14	Nias Selatan	8.603,2	8.834,0	8.834,0	8.834,0	9.073
15	H. Hasundutan	11.837,2	13.620,0	13.620,0	13.620,0	11.626
16	Pakpak Barat	1.121,3	1.336,0	1.121,3	1.121,3	338
17	Samosir	7.289,2	7.428,0	7.289,2	7.289,2	6.530
18	Serdang Bedagai	28.017,0	28.173,0	28.173,0	28.016,0	-
19	Batubara	12.059,7	16.226,9	16.226,9	12.758,6	-
20	Pd. Lawas Utara	6.854,0	18.225,0	18.225,0	18.225,0	17.212
21	Padang Lawas	5.732,0	9.636,0	9.636,0	5.423,8	5.514
22	Lab. Batu Selatan	174,5	442,9	214,7	214,7	245
23	Lab. Batu Utara	11.992,6	13.003,0	13.003,0	13.003,0	13.003
24	Nias Utara	7.172,8	7.377,0	7.172,8	7.172,8	-
25	Nias Barat	1.812,8	2.330,0	2.330,0	2.330,0	-
26	Sibolga		-			-
27	Tanjung Balai	72,7	72,0	72,7	72,7	73
28	Pematang Siantar	1.519,7	1.683,0	1.519,7	1.519,7	1.519,7
29	Tebing Tinggi	255,6	230,2	230,2	230,2	230,3
30	Medan	927,5	1.029,0	927,5	927,5	991,5
31	Binjai	1.208,4	1.208,4	1.208,4	1.208,4	-
32	P. Sidempuan	3.066,2	3.166,0	3.066,2	3.066,2	3.066,3
33	Gunung Sitoli	1.163,5	1.551,6	1.163,5	1.163,5	1.506
SUMATERA UTARA		308.667,58	369.927,9	368.830,2	349.379,7	292.264

Sumber : Dinas TPH 2022

Dari data luas lahan sawah di atas dapat kita lihat bahwa perbedaan perhitungan luas lahan yang diterbitkan ATR BPN sangat jauh, hal ini mempengaruhi luas panen dan produksi lahan pertanian. Sehingga perlu dilakukan pendataan ulang lahan pertanian dan intensifikasi lahan pertanian untuk pemanfaatan lahan yang ada.

3. PERKEBUNAN

Dari luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha sebesar 1.133.290,25 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Dimana jika kita melihat data yang disajikan pada tabel dibawah produksi untuk 5 (lima) komoditi ini terus mengalami peningkatan yaitu dari 6.526.594,94 pada tahun 2016 menjadi 7.572.816,00 pada tahun 2020 dengan kontribusi sektor perkebunan pada tahun 2020 sebesar 21,33 persen.

Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut:

Tabael 2.70
Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	3,96%	0,04%	3,3 %
2	Produksi	7.569.995,70	7.572.816,00	8,035.345.18
	K. Sawit/TBS (Ton)	6.860.095,45	7,151,006.12	7,456,618.18
	Karet (Ton)	309.976,12	324,024.91	310,018.00
	Kopi Arabika (Ton)	64031	70,666.65	71,588.00
	Kopi Robusta (Ton)	8090	10,107.50	9,283.00
	Kelapa (Ton)	98132	105,011.66	100,036.00
	Kakao (Ton)	34.795,06	43,016.44	36,310.00
	Komoditi perkebunan lainnya (ton)	44,190.34	44,809.00	51,492.00
2	Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)	39,445.02	39,910.14	
	1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	18.273,20	18.263,87	
	2. Karet (kg/Ha/tahun)	1.144,76	1,144.85	
	3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	778,80	779,37	
	3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	778,80	779,37	
	4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	1.096,36	1,099.38	
	5. Kakao (kg/Ha/tahun)	947,55	957,71	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)	16,001.27	16,462.07	
3	Luas Areal	1,132,129.58	1,133,290.25	
	1. K. Sawit (Ha)	439.315	440.003,00	1.386.924,48
	2. Karet (Ha)	369.391,00	369.392,00	461.023,40
	3. Kopi Arabika (Ha)	77.765,00	77.834,00	79.288,64
	3. Kopi Robusta (Ha)	17.609,00	17.643,00	17,778
	4. Kelapa (Ha)	110.345,00	110.464,00	110.464,00
	5. Kakao (Ha)	54.314,00	54.412,00	54.602,40
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	63,390.58	63,542.25	
4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	20,53	21,33	

Sumber : Dinas Perkebunan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa sawit, kopi arabika, kopi robusta dan kelapa secara umum terus mengalami peningkatan kecuali komoditi karet dan kakao yang mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini lebih dipengaruhi oleh menurunnya harga

karet dunia yang menyebabkan menurunnya minat petani untuk tetap mempertahankan tanamannya.

Permasalahan utama pada sektor perkebunan adalah umur tanaman perkebunan di Sumatera Utara sudah tidak lagi muda, sehingga diperlukan adanya peremajaan pada tanaman perkebunan melalui replanting. Selain itu tanaman perkebunan rakyat di Sumatera Utara khususnya kelapa sawit belum memiliki standar ISPO. Hal ini perlu menjadi perhatian Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

4. KEHUTANAN

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018). pada tahun 2018 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 825.754,60 Ha, namun pada tahun 2019 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 586.195,81 Ha. Sampai dengan tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 586.196,14 Ha.

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2020 turun menjadi 59.895 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Sementara itu Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 0.81 persen mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,63%. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.71
Indikator Kehutanan

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	276.336	275.861	275.233
2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	60.500	59.895	58.500
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0,84	0,63	0,81

Sumber : Dinas Kehutanan Provsu 2021

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pegunungan Bukit Barisan, yang memiliki wilayah Cekungan air tanah, pegunungan dan wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah kita ini memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi, potensi hydro, Potensi biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka dan potensi limbah ternak, semua potensi tersebut dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kondisi kelistrikan sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) per Maret 2022 adalah:

- Beban puncak Sumatera Bagian Utara : 2.027 M
- Beban Terlayani : 2.207 MW
- Daya Mampu Pembangkit : 2.473 MW
- Transfer Sumatera Bagian Utara ke Bagia Selatan : 40 MW
- Cadangan Operasi : 468 MW
- Cadangan Putar : 151 MW
- Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara sendiri :
- Beban Puncak : 1.625 MW
- Daya Mampu Pembangkit : 1.862 MW

Tabel 2.72
Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Rasio Elektrifikasi	98,8	99,82	99,83
2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	98,22	98,66	98,50

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Ratio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Ratio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 98.80% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 99.83%, Ratio Elektrifikasi ini merupakan gabungan dari Ratio Elektrifikasi PLN dan Non PLN. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 98.22% dan pada tahun 2021 menjadi 98.50%

Ratio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara merupakan agregat dari Ratio Elektrifikasi Kabupaten dan Kota. Dari 33 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

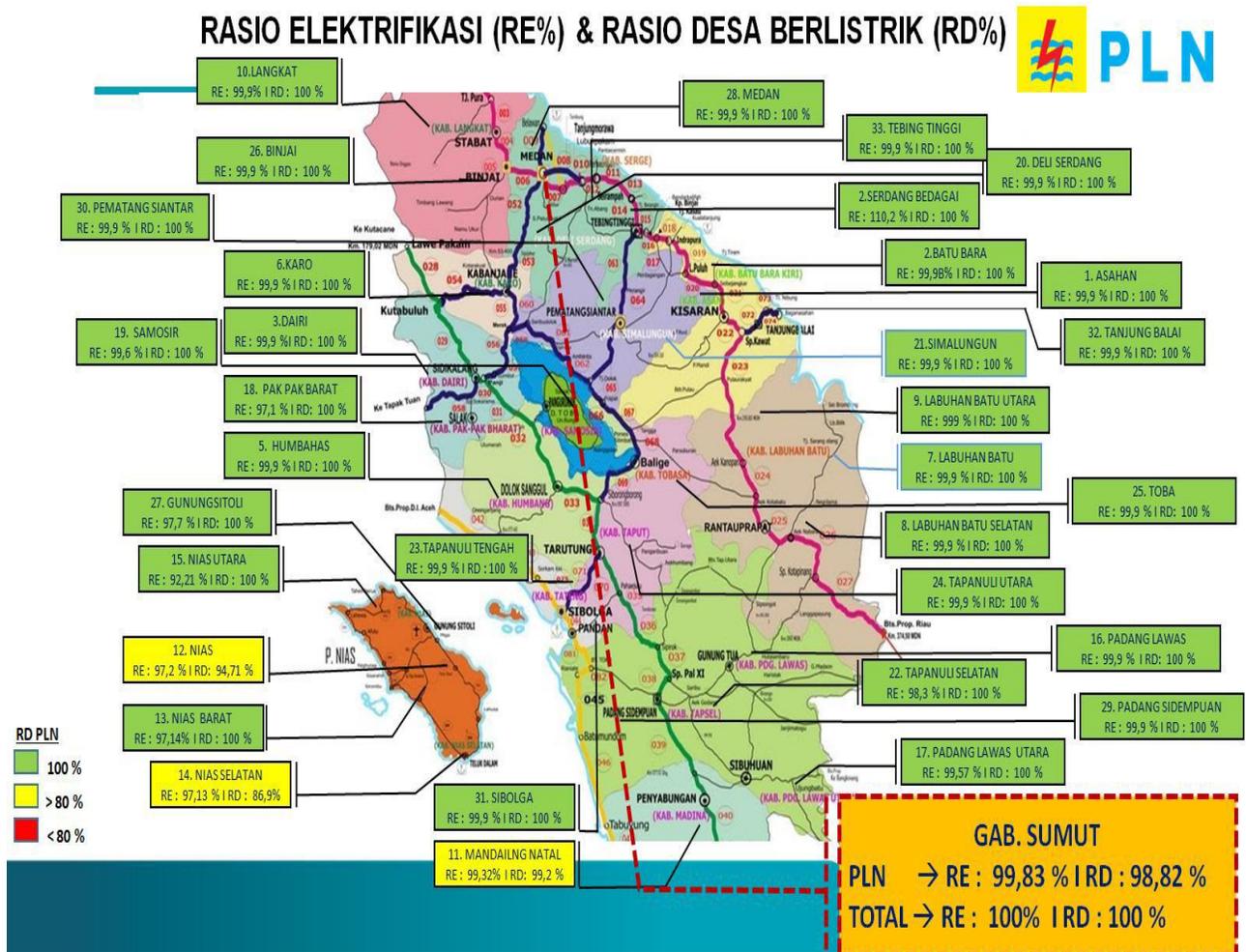
sudah semua berada di atas 90%, dimana yang paling rendah adalah Kabupaten Nias Utara hanya sebesar 92.91% disusul oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar 97.13%. Pada Tabel di bawah dapat dilihat secara jelas Ratio Elektrifikasi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2021:

Tabel 2.73
Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten/Kota	Re (%) Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Deli Serdang	109.78	99.99	100.00	99.99
2	Kabupaten Serdang Bedagai	110.23	99.96	100.00	100.00
3	Kabupaten Langkat	104.68	100.00	100.00	99.90
4	Kabupaten Karo	93.76	99.71	100.00	99.95
5	Kabupaten Dairi	99.42	100.00	100.00	99.99
6	Kabupaten Pakpak Barat	79.63	91.10	78.09	97.10
7	Kabupaten Simalungun	104.13	99.82	100.00	99.90
8	Kabupaten Batubara	92.59	99.74	100.00	99.98
9	Kabupaten Asahan	103.73	99.99	100.00	99.90
10	Kabupaten Labuhan Batu	113.09	99.88	100.00	99.99
11	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	88.81	99.93	100.00	99.99
12	Kabupaten Labuhan Batu Utara	72.80	99.88	100.00	99.99
13	Kabupaten Tapanuli Utara	88.51	99.77	100.00	99.90
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	101.37	100.00	100.00	99.90
15	Kabupaten Toba	104.55	91.88	100.00	99.90
16	Kabupaten Samosir	97.08	82.15	100.00	99.60
17	Kabupaten Tapanuli Tengah	97.60	84.24	100.00	99.90
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	84.53	81.28	99.11	98.30
19	Kabupaten Padang Lawas Utara	68.67	99.51	100.00	99.57
20	Kabupaten Padang Lawas	79.15	99.27	100.00	99.90
21	Kabupaten Mandailing Natal	87.24	100.00	100.00	99.32
22	Kabupaten Nias	41.83	99.74	87.21	97.27
23	Kabupaten Nias Selatan	43.43	99.98	79.21	97.13
24	Kabupaten Nias Utara	41.93	99.46	71.14	92.21
25	Kabupaten Nias Barat	44.92	100.00	78.39	97.14
26	Kota Medan	112.71	100.00	100.00	99.99
27	Kota Binjai	114.57	99.96	100.00	99.99
28	Kota Tebing Tinggi	111.19	100.00	100.00	99.99
29	Kota Pematang Siantar	111.19	100.00	100.00	99.99
30	Kota Tanjung Balai	114.61	99.66	100.00	99.99
31	Kota Sibolga	112.25	99.95	100.00	99.90
32	Kota Padang Sidempuan	116.31	100.00	100.00	99.99
33	Kota Gunung Sitoli	109.26	99.87	73.66	97.79
	Provinsi Sumatera Utara	100.73	99.11	99.82	99.83

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

Secara rinci dapat terlihat pada gambar dibawah Ratio Elektrifikasi dan Ratio Desa Berlistrik untuk tahun 2021:



Tabel 2.74
Rasio Elektrifikasi dan Ratio Desa Berlistrik Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

6. PERDAGANGAN

Pembangunan Perdagangan dalam Perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga kompetitif, penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan serta pemerataan pendapatan. Sektor Perdagangan saling berkaitan dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri, dan perdagangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi.

Capaian Indikator Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Perdagangan

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	8,00	-1,94	3,62
2	Ekspor Non Migas (Juta US\$)	7.663,174	8.084,221	11.874,67

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2021

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu tercatat sebesar 3,62, kondisi ini menunjukkan bahwa telah mulai pulihnya demand dan perputaran ekonomi global. Nilai Freight On Board (FOB) atau Nilai Ekspor komoditas Non Migas Sumatera Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 11.874,67 juta US\$, mengalami kenaikan sebesar 3.790,45 juta US\$ jika dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 8.084,22 juta US\$.

7. PERINDUSTRIAN

Industri manufaktur bisa dikatakan sebagai salah satu sektor utama di Sumatera Utara. Sektor ini telah menjadi penopang perekonomian terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan.

Capaian Indikator Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.76
Indikator Perindustrian

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	1,23	-0,84	1,23
2	Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	-5,11	NA	-5,11
3	Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	9,01	NA	9,01

Sumber : Disperindag Provsu

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat Pada Tahun 2021 Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar 1,43%, Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang tercatat sebesar -0,84 %.

Untuk nilai Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang Pada Tahun 2020 (Data Sementara), Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi -7,53 % jika dibandingkan Tahun 2019 yang tercatat sebesar -5.11%. Untuk nilai Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 (Data Sementara) mengalami pertumbuhan negative yaitu sebesar -15,64% jika dibandingkan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 9,01%.

Laju pertumbuhan Industri, Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang serta Pertumbuhan Industri Mikro Kecil mengalami penurunan, kondisi tersebut diasumsikan terjadi karena :

1. Pandemi Covid-19
2. Sarana dan Prasarana Produk IKM yang belum menggunakan technology terbaru (up to date)
3. Masih rendahnya Daya Saing Produk IKM dibanding barang impor
4. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal
5. Promosi dan Pemasaran Produk IKM dan Industri yang belum optimal

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019, produksi perikanan tangkap mencapai 540.421,7 ton. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pada produksi perikanan tangkap menjadi 420.419,50 ton. Tetapi di tahun 2021 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 4,38% yaitu 439.657,60 ton. Untuk perikanan budidaya juga mengalami peningkatan sampai tahun 2019 sebesar 246.908,3 ton, tetapi terus mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 227.235,27 ton dan pada tahun 2021 sebesar 214.135,64 ton sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.77
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	540.421,7	420.419,65	439.657,60
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	246.908,3	227.235,27	214.135,64

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 787.330 ton mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 647.654,92 ton. Tetapi pada tahun 2021 produksi perikanan Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 653.793,24 ton atau sekitar 0,93%.

Peningkatan produksi perikanan di Sumatera Utara pada tahun 2021 dikarenakan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 439.657,60 ton atau 1,53 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 433.032,24 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap tahun 2021 dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan sebagai stimulus akibat dampak Covid-19 dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa

nelayan berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya. Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa:

1. Asuransi nelayan diberikan kepada 10.000 nelayan yang tersebar di 22 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
2. Bantuan alat penangkapan ikan
3. Bantuan mesin kapal
4. Bantuan kapal perikanan
5. Pengadaan Rumah Ikan
6. Restocking Perairan umum
7. Bantuan sampan dayung/solu
8. Bantuan Coolbox

Bantuan-bantuan tersebut yang diberikan kepada nelayan Sumatera Utara tersebut telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap. Diharapkan dengan anggaran yang meningkat di tahun berikutnya, nelayan penerima bantuan juga dapat meningkat sehingga produksi perikanan tangkap lebih meningkat. Untuk perikanan budidaya, walaupun terjadi penurunan di tahun 2021 tetapi realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 214.135,64 ton atau 106,18 % telah mencapai dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

Selanjutnya data jumlah kapal perikanan sebagai berikut:

- KM < 5 GT : 13.416 unit
- KM 6-30 GT : 5.563 unit
- KM > 30 GT : 180 unit
- Motor Tempel : 8.992 unit dan
- Perahu tanpa motor : 9.757 unit

2.1.3.4. UNSUR PENUNJANG

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan akan bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78
Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	80	78	85	85	90	95
Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	-	-	-	-	100	100

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2021

2. KEUANGAN

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2021, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.79
Indikator Keuangan Provsu

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	NA	NA	23,63
5	Persentase Laporan Aset Daerah yang Disusun	NA	NA	100

No	Indikator	2019	2020	2021
6	Persentase SK Gubsu Atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota.	100	100	100

Sumber : BPKAD Provsu

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator keuangan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan P. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, pada indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Penetapan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Persentase Laporan Aset Daerah yang Disusun dan Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota tercapai. Pada Indikator Persentase Tanah Milik Pemprovsumu yang Disertifikasi belum mencapai target yang ditentukan pada P. RPJMD Tahun 2019 – 2023 yaitu 43,93%. Selain itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/9/KPTS/2022 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat – 2023 Nomor 34 yaitu Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah (GWPP), sampai dengan tahun 2020 diketahui 23 datau 70 persen dari 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3. PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.80
Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	44,05	42.,82	45,62
2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	-4,72	-5,80	13,01
3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun sebelumnya	1,15	-9,49	24,30
4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	42,34	9,00	-45,61
5	Persentase Kenaikan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	-3,13	25,05	-4,77

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2021 adalah 45,62 persen masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada P. RPJMD tahun 2019 – 2023 yaitu 53%. Pada Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya dan Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun sebelumnya sudah melampaui target yang ditentukan pada P.RPJMD Tahun 2019 – 2023. Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya mengalami tidak mencapai target 2%, bahkan tercatat mengalami penurunan -45,61 persen demikian juga pada indikator Persentase Kenaikan Pajak Rokik dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 4,77 persen hal ini diperkirakan sebagai dampak naiknya cukai rokok sehingga mempengaruhi jumlah konsumsi masyarakat.

4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.81
Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam)	-	-	-	-	9 JP	9JP
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen)	-	17.49	-	19.2	22.22	19.2
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	33.33%	-	19.44%	-	24%	24%

Sumber : BPSDM Provsu 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen) masih berada dibawah target yang telah ditetapkan sementara Rata-Rata Lama Pegawai menadapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam) telah tercapai.

- KEPEGAWAIAN DAERAH

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem Merit adalah

kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.82
Indikator Kepegawaian Daerah

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Sistem Merit (Poin)	-	-	-	97.5	250	263.5 (B)

Sumber : BKD Provsu 2021

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dimana pada tahun 2021 capaian nilai sistem merit adalah 263.5 (B) dan telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian pengembangan (Research & Development) didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.83
Indikator Penelitian dan Pengembangan

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	20	20	20	7	12	12
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	20	20	20	20	33	40
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	15	15	20	66	25	61
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	50	50	50	50	40	50

Sumber : Balitbang Provsu, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator penelitian dan pengembangan pada tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

6. BADAN PENGHUBUNG

Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.84
Indikator Badan Penghubung

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Nilai Kepuasan Pelayanan	-	-	80,62%

Sumber : Badan Penghubung Provsu, 2021

Capaian indikator untuk nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2021 telah mencapai angka sebesar 80,62 persen, telah melebihi target sebesar 70 persen yang diperoleh dari hasil kuisioner.

7. PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.85
Indikator Pengawasan 2019-2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakiip \geq B	-	-	73	80	80	93,88
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80	81,67	82	83,64	75	78,96
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-	-	100	100	100	100

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 3 terdefinisi	Level 3 terdefinisi	Level 3,25	Level 2 Berkembang (2,929)
6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 menuju level 3	Level 2 plus	Level 2 plus	Level 3	Level 2 Plus
7	Pengaduan Masyarakat	50	52,4	55	74,5	68	77,8
8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit				10	20	NA

Sumber : Inspektorat Provsu 2021

2.1.3.5. UNSUR PENDUKUNG

1. SEKRETARIAT DEWAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.86
Capaian Indikator Sekretariat Dewan 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepuasan dan fasilitasi sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Setwan Provsu 2021

2. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat daerah (setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.87
Capaian Indikator Sekretariat Daerah 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021		OPD
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian batas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2.7	2.783	2.7	2.792	2.8	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan	70%	-	70%	-	70%	86	Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	70%	-	70%	-	70%	70	Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	100%	-	100%	-	100%	100%	Biro Hukum
Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	100%	-	100%	-	100%	100%	Biro Hukum
Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	100%	-	100%	-	100%	100%	Biro Hukum
Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah	100%	-	100%	-	100%	99.01	Biro Perekonomian
Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	100%	-	100%	-	100%	100	Biro Perekonomian
Presentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		-		-	100%	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terbitnya Peraturan/Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%	-	100%	-	100%	100	Biro Administrasi Pembangunan
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran	100%	-	100%	-	100%	100	Biro Administrasi Pembangunan

Indikator	2019		2020		2021		OPD
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu							
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	B	B	B (62.79)	B	B (63.89)	Biro Organisasi
Indeks Pelayanan Publik	2,99 (C)	3,00 (C)	3,51 (B)	3,68 (B)	3,80 (B)	3.80	Biro Organisasi
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
Nilai capaian pelaporan kinerja	10	11.64	11	9.11	12	11.75	Biro Organisasi
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100%	-	100%	-	100%	100	Biro Umum
Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Provsu	100%	-	100%	-	100%	100	Biro Umum
Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	-	-	-	-	100%	100%	Biro Administrasi Pimpinan
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100%	100%	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber : Seketariat Daerah Provsu 2021

2.1.3.6 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Pelapor Pemilih Cerdas	300 org	400 org	350 org	-	400 org	450
Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	20	31	20	85	30	74
Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumut	-	6.5%	6.3%	6.5	6.1%	6.5%
Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9		9	10	9	18
Masyarakat yang menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan (org)	1.300 org	1.300 org	1.100	-	260	1450

Sumber : Bakesbangpol Provsu 2022

Dari data yang diperoleh bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, untuk tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang terdendam berada di Kota Medan dengan

Tingkat Partisipasi 45,80 Persen dan yang Tertinggi ada di Pak – Pak Bharat dengan Tingkat Partisipasi 88,9 Persen, untuk Tingkat Partisi masyarakat Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2020 secara kumulatif adalah sebesar 64,42%. Tahun 2021 dikarenakan tidak ada Pemungutan Pemilihan Suara maka data diteruskan/ disamakan dengan keadaan Tahun 2020, diharapkan untuk berikutnya lebih ditingkatkan kegiatan pendidikan politik, pembinaan ormas ormas dan Forum strategis, pendidikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan cipta kondisi yang baik apalagi menjelang persiapan tahun politik tahun 2023.

Belum turunnya perhitungan angka prevalensi pengguna narkoba di Sumatera Utara menandakan masih menjadi catatan penting kita untuk lebih menambah lagi peran dan upaya pencegahan dan memberi pemahaman kepada masyarakat akan dampak negative dan bahaya narkoba, bahkan pendampingan kepada mantan penggunanya agar tidak kembali lagi menggunakan narkoba dengan memberi pelatihan atau lifeskill gratis.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.063.964 rupiah/kapita/bulan, Pengeluaran penduduk untuk konsumsi tertinggi ada di Kota Medan 1.559.944 rupiah/kapita/bulan dan terendah di Kabupaten Nias sebesar 604.497 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2019. Secara rata-rata, konsumsi beras di Sumatera Utara mencapai 7,28 kg/kapita/bulan. Perkembangan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.89
Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara (rupiah/kapita/bulan)

Indikator	2018	2019	2020*
Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara	1.001.709	1.063.964	1.063.964

Sumber : BPS 2020 *) Angka Sementara

Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.063.964 rupiah/kapita/bulan. Nilai ini naik dari 1.001.709 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018 dan 909.818 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2017. Jika dilihat dari trennya, pertumbuhan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 s.d. 2019 terus meningkat. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pengeluaran sebesar 6,21 persen terhadap tahun 2018.

Tren pengeluaran yang meningkat di Sumatera Utara terjadi di sebagian besar kabupaten/kota. Meskipun demikian, ada 8 Kabupaten Kota yang mengalami penurunan pengeluaran untuk konsumsi pada tahun 2019. Diantaranya adalah di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Asahan. Seperti halnya dengan tahun 2018, pada tahun 2019 pengeluaran per kapita sebulan penduduk di hampir semua kota di Sumatera Utara menempati posisi papan atas. Sedangkan Kota Gunungsitoli menempati posisi 21 dari 34 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Dan pengeluaran penduduk di Kota Gunungsitoli juga menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yang berada di Pulau Nias. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran per kapita sebulan di kota besar lebih tinggi jika dibandingkan wilayah Kabupaten.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

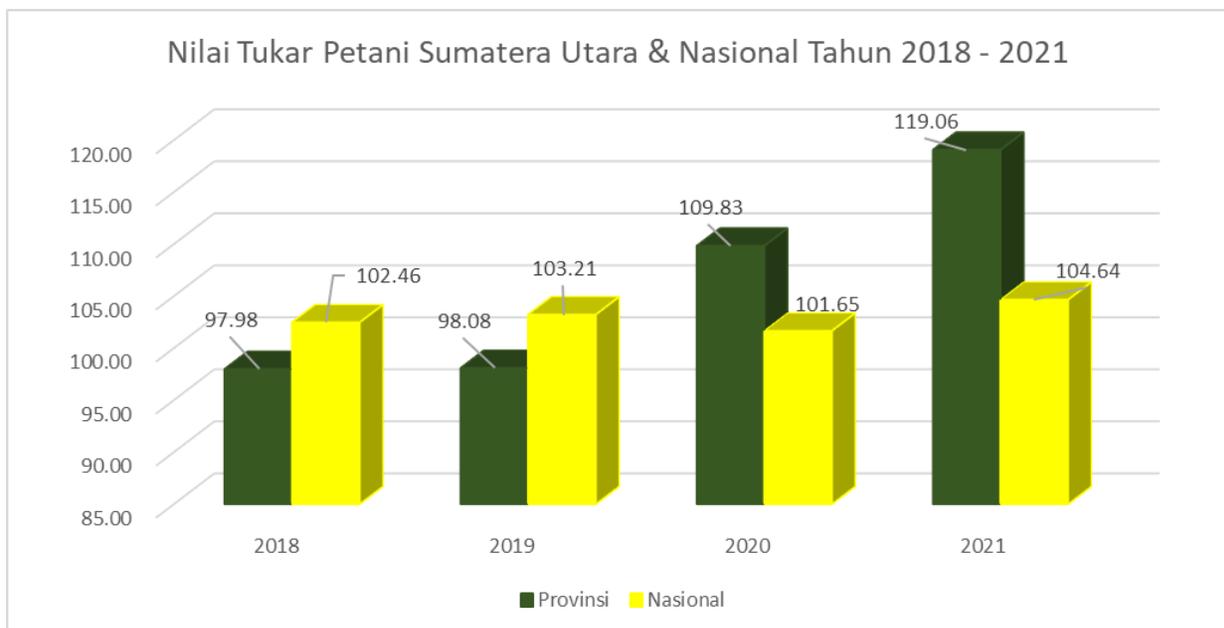
Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara, Nilai NTP dari tahunan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019, dimana pada tahun 2019 Nilai Tukar Petani hanya tumbuh sebesar 98,08 poin hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 119.06 poin. Dimana sektor yang paling signifikan mengalami peningkatan adalah sektor perkebunan yaitu dari pada tahun 2019 sebesar 94,73 poin menjadi 160.10 pada tahun 2021. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 - 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Nilai Tukar Petani	98,08	109.83	119.06
	- Peternakan	114.91	98.74	102.45
	- Pangan	93.16	96.90	95.68
	- Hortikultura	92.87	97.28	91.60
	- Perikanan	103.42	99.52	106.08
	- Perkebunan	94.73	125.05	160.10

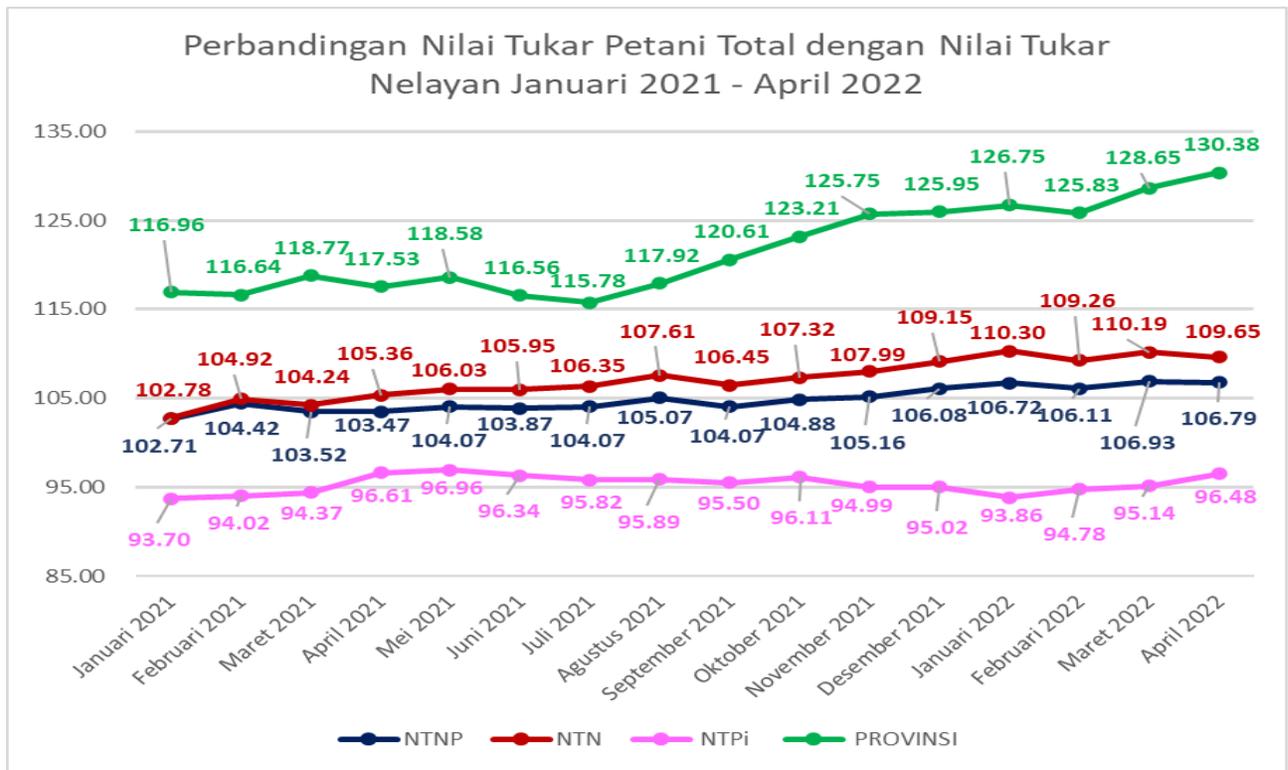
Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2022

Jika dibandingkan dengan nasional selama empat tahun terakhir Nilai Tukar Petani Sumatera Utara pada tahun 2019 berada di bawah Nilai Tukar Petani Nasional, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 Nilai Tukar Petani Sumatera Utara berada di atas Nilai Tukar Petani Nasional yaitu 109,83 poin pada tahun 2020 dan 119,06 poin pada tahun 2021 untuk Sumatera Utara sedangkan untuk Nasional sebesar 101,65 pada tahun 2020 dan 104,64 pada tahun 2021.



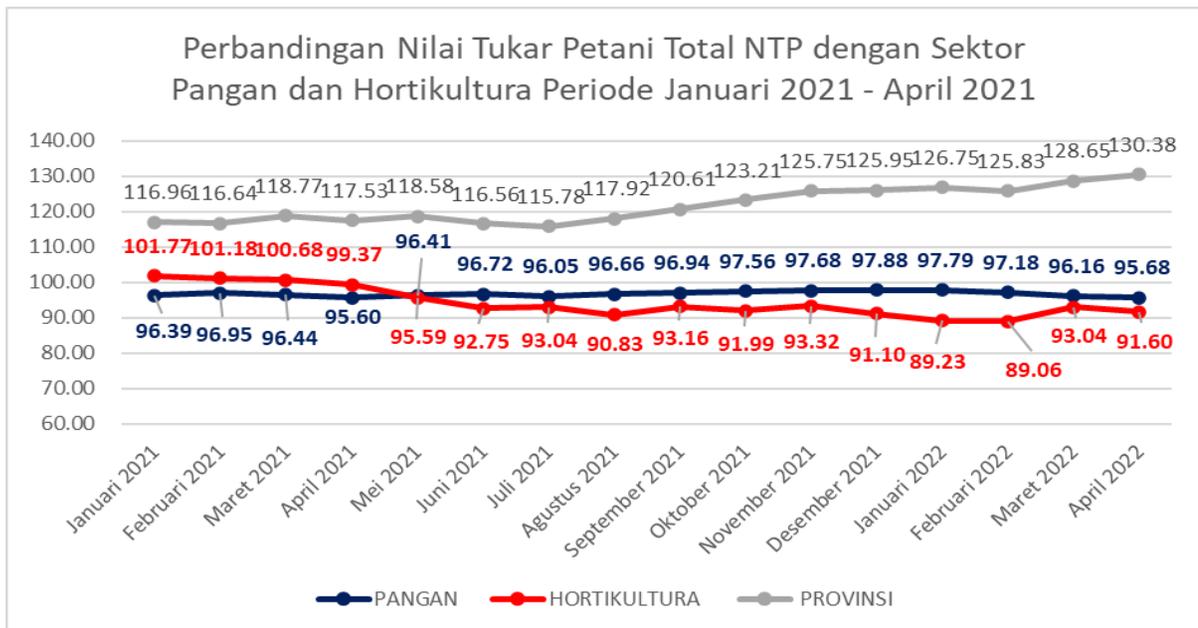
Tabel 2.91
Perbandingan NTP Sumatera Utara dengan NTP Nasional

Secara keseluruhan Nilai Tukar Petani berada di atas poin 100, tetapi jika kita melihat secara sektor masih ada yang di bawah poin 100, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



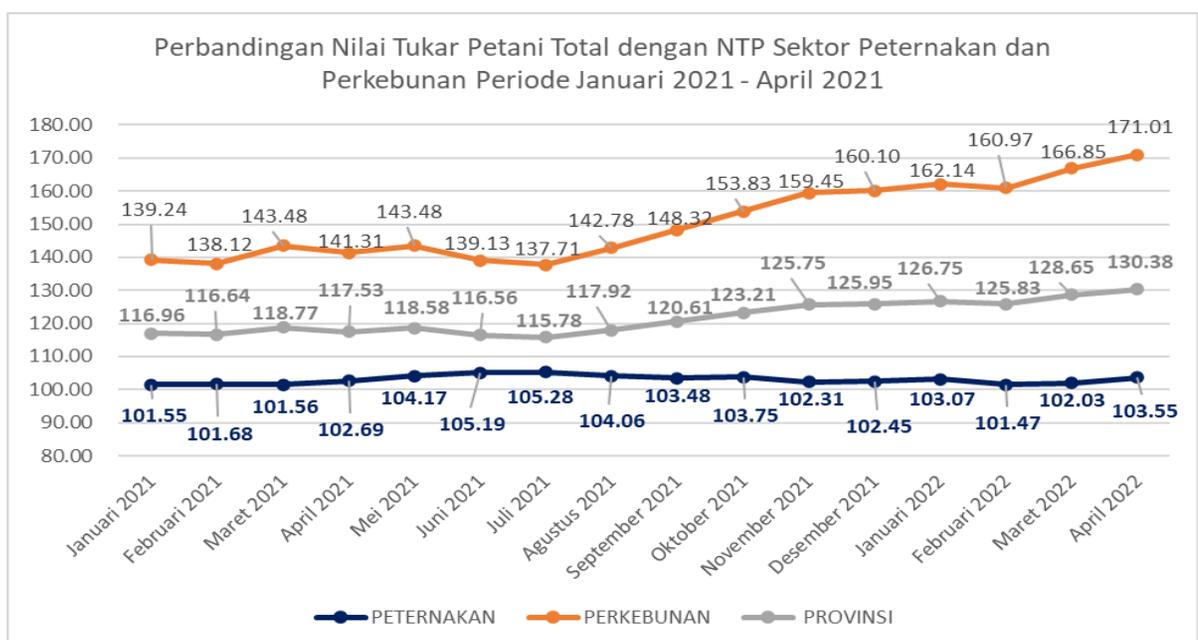
Grafik 2.37
Perbandingan Nilai Tukar Petani Total dengan NTP Sektor Perikanan
Januari 2021 - April 2022

Terlihat dari grafik di atas Nilai Tukar Nelayan masih berada di bawah Nilai Tukar Petani secara keseluruhan, hal ini dikarenakan masih rendahnya Nilai Tukar Nelayan Budidaya, dimana pada Januari 2021 sebesar 93.70 dan April 2022 meningkat menjadi 96.48 poin namun masih berada di bawah rata-rata Nilai Tukar Nelayan secara keseluruhan. Jika dirata-ratakan Nilai Tukar Nelayan sebesar 95.35 poin selama periode Januari 2021 - April 2022. Rendahnya Nilai Tukar Nelayan Budidaya disebabkan biaya produksi perikanan budidaya yang jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi perikanan tangkap. Namun jika kita melihat secara keseluruhan Nilai Tukar Nelayan sampai dengan April 2022 berada di atas poin 100 yaitu sebesar 106.79 poin dari 102.71 poin pada Januari 2021.



Tabel 2.92
Perbandingan Nilai Tukar Petani Total dengan NTP Sektor Pangan dan Hortikultura Januari 2021 - April 2022

Sumatera Utara merupakan daerah pertanian dimana kontribusi terbesar PDRB Provinsi Sumatera Utara masih ditopang oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun hal ini tidak sejalan dengan kesejahteraan petani khususnya di sektor pangan dan hortikultura, dimana sektor pangan dan hortikultura selalu berada di bawah poin 100 yaitu untuk sektor pangan sebesar 96.39 poin pada Januari 2021 turun menjadi 95.68 poin April 2022. Sedangkan untuk sektor hortikultura juga masih berada di bawah poin 100 yaitu sebesar 91.60 poin pada April 2022 turun dari 101.77 pada Januari 2021.



Tabel 2.93
Perbandingan Nilai Tukar Petani Total dengan NTP Sektor Peternakan dan Perkebunan Januari 2021 - April 2022

Sedangkan untuk sektor Perkebunan dan Peternakan terus berada di atas poin 100 selama periode Januari 2021 - April 2022, penyokong utama Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara adalah sektor Perkebunan dimana pada Januari 2021 sektor perkebunan berada pada 139.24 poin dan pada April 2022 jauh meningkat menjadi 171.01 poin. hal ini disebabkan meningkatnya harga komoditi sektor perkebunan khususnya kelapa sawit.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah, capaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.94
Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	82,19	82,10	76,37
2	Rasio Elektrifikasi	99,11	98,8	
3	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81,82	83,28	84,00
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	73,90	76,95	76,95
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	76,96	-	82,02

Sumber : Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi, Dinas ESDM dan Dinas SDA, CK, TR

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2020 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.704; 1.015; dan 850. Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95
Angka Kriminalitas

No	Indikator	2019	2020*	2021
1	Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara	2,40 (per 1000 orang)	37.050 kasus	33.392 kasus

Sumber : BPS Provsu/ Kesbang Pol/Poldasu

*) Tingkat Kriminalitas berdasarkan jumlah tindak pidana

Tingkat kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan dibanding periode tahun 2020. Untuk jumlah tindak pidana (JTP) yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 37.051 kasus, turun menjadi 33.392 kasus di tahun 2021. Menurunnya jumlah kasus kejahatan di tahun 2021 ini cukup berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Di mana selama pandemi kegiatan masyarakat yang cukup banyak berkurang.

2. Jumlah Dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.96
Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	20	20	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	49,47	58,47	

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sejak tahun 2018-2020 tidak ada perubahan, namun persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 58.47 persen dari tahun 2019 sebesar 49.47 persen. Peningkatan persentase PAD tersebut diperoleh dari peningkatan wajib pajak.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Pada tahun 2021, Penduduk usia kerja di Sumatera Utara berjumlah 10.870 ribu orang pada Agustus 2021, atau mengalami peningkatan sebesar 167 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara.

Tabel 2.97**Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara**

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	10.532	10.703	10.870
2	Angkatan Kerja (ribu orang)	7.411	7.350	7.511

Sumber : BPS Provsu, Agustus 2020

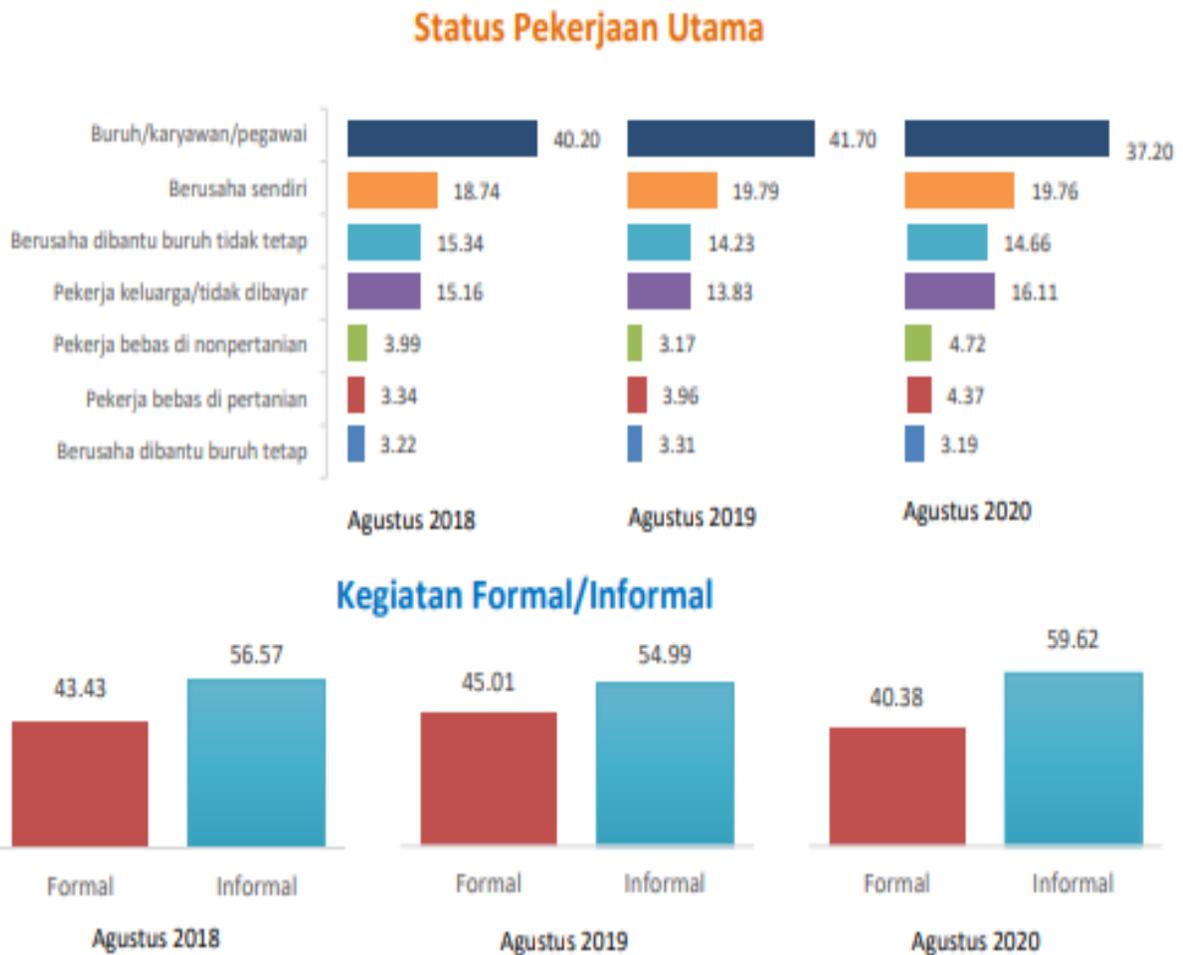
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 161 ribu orang dibandingkan Agustus 2020, dimana jumlah Angkatan kerja tahun 2021 tercatat sejumlah 7,5 juta orang. Komposisi Angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 7,04 juta orang bekerja dan 475 ribu orang menganggur.

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2021 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 37,28 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,39 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 4,18 juta orang (59,33 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 2,86 juta orang (40,67 persen).

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2018–Agustus 2020

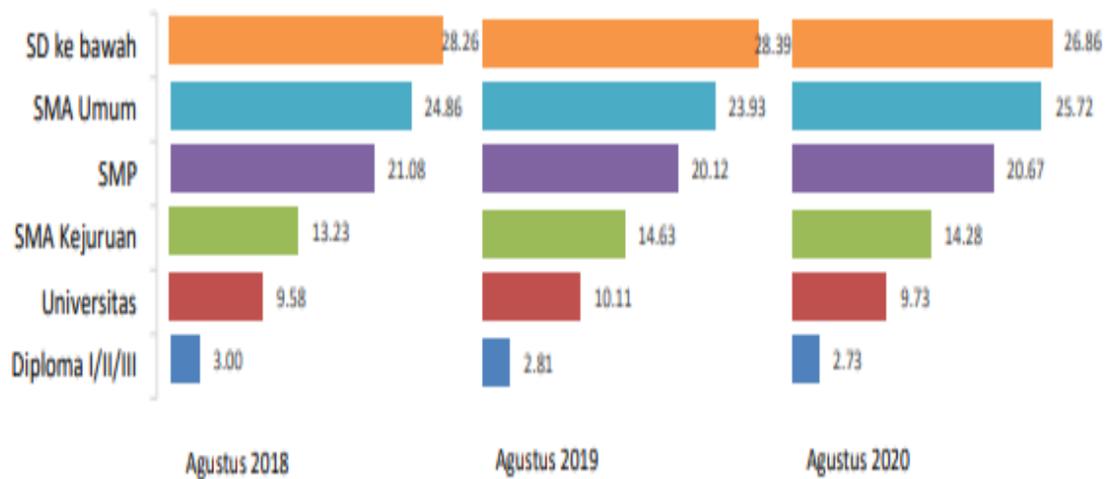


Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2021

Tabel 2.98
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.



Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Tabel 2.99
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020

Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (1,53 persen poin), Universitas(0,38 persen poin), SMA Kejuruan (0,35 persen poin) dan DI/II/III (0,08 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, dan SMP mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 1,79 persen poin.

2.1.4.5. Indikator Lain yang mendukung Aspek Daya Saing

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 untuk itu telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah 62.07 dengan kategori “B” Capaian Reformasi Birokrasi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.100
Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B

Sumber : Biro Organisasi Provsu

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2019 sebesar 67,65 dalam skala 0 sampai 100, berada dibawah IDI Nasional sebesar 74,92. Capaian IDI Sumatera Utara ini masuk pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 4,00 poin (dari 76,54 menjadi 72,54), (2) Hak-Hak Politik turun 1,02 poin (dari 62,61 menjadi 61,59), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi Naik 19,43 poin (dari 51,69 menjadi 71,12). Perkembangan IDI Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.101
Perkembangan IDI Sumatera Utara

No	Indikator	2019	2020	2021*
1	Indeks Demokrasi Indonesia	67.65	65.13	NA

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021

*) Data Belum Rilis

3. Indeks Resiko Bencana Daerah (IRB)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam Menyusun penjelasan peta risiko.

Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan Tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Jika dilihat dari perkembangan daerah Pulau Sumatera, maka rata kelas resiko dinyatakan

tinggi termasuk Sumatera Utara, sedangkan kelas Resiko sedang berada pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, capaian Indeks Resiko Bencana di Wilayah Sumatera dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.102
Indeks Resiko Bencana Indonesia 2021

NO	PROVINSI	IRBI 2020	IRBI 2021	STATUS
1	ACEH	153.58	149.99	▼
2	BALI	130.23	124.19	▼
3	BANTEN	154.87	149.08	▼
4	BENGKULU	162.00	157.14	▼
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	140.92	126.34	▼
6	DKI JAKARTA	64.02	60.43	▼
7	GORONTALO	126.64	123.06	▼
8	JAMBI	138.64	135.32	▼
9	JAWA BARAT	145.81	134.94	▼
10	JAWA TENGAH	132.99	125.73	▼
11	JAWA TIMUR	126.42	125.86	▼
12	KALIMANTAN BARAT	138.49	138.69	▲
13	KALIMANTAN SELATAN	144.81	141.66	▼
14	KALIMANTAN TENGAH	132.70	130.75	▼
15	KALIMANTAN TIMUR	154.02	153.28	▼
16	KALIMANTAN UTARA	153.62	157.03	▲
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	161.54	160.98	▼
18	KEPULAUAN RIAU	116.40	114.71	▼
19	LAMPUNG	146.64	145.42	▼
20	MALUKU	160.35	160.84	▲
21	MALUKU UTARA	145.57	146.63	▲
22	NUSA TENGGARA BARAT	128.05	122.33	▼
23	NUSA TENGGARA TIMUR	140.89	142.52	▲
24	PAPUA	122.90	122.38	▼
25	PAPUA BARAT	144.05	146.46	▲
26	RIAU	147.27	142.41	▼
27	SULAWESI BARAT	166.49	164.85	▼
28	SULAWESI SELATAN	159.49	154.87	▼
29	SULAWESI TENGAH	144.96	146.07	▲
30	SULAWESI TENGGARA	157.72	157.90	▲
31	SULAWESI UTARA	139.47	133.29	▼
32	SUMATERA BARAT	149.53	147.36	▼
33	SUMATERA SELATAN	139.24	137.31	▼
34	SUMATERA UTARA	145.18	143.83	▼

Sumber : BPBD Provsu

2.1.5. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan

perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan LRT Mebidang

Pembangunan Jalur LRT dan Monorel Mebidang akan direncanakan dibagi ke dalam 4 (empat) fase dengan jarak yang berbeda-beda, dengan total jarak 51,16 KM, jarak monorel terdapat di SP. Kayu Besar-Batang Kuis-Sultan Serdang. Jalur LRT dan Monorel Mebidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.103
Jalur LRT Dan Monorel Mebidang

FASE	JALUR	JARAK
I	Stasiun Pusat - Cirebon - Sisingamangaraja - Tj. Morawa - Sp Kayu Besar (LRT)	21,7 Km
II	Sp Kayu Besar - Batang kuis - Sultan Serdang (MONOREL)	9,4 Km
III	Binjai - Megawati - Mencirim - Diski - Gatot Subroto - Kapten Maulana Lubis - Raden saleh - Stasiun Pusat	20,45 Km
IV	Marelan - Veteran - P Braya - Yos Sudarso - Glugur - Stasiun Pusat	11,61 Km
TOTAL		53,16 Km

2. Proyek Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara

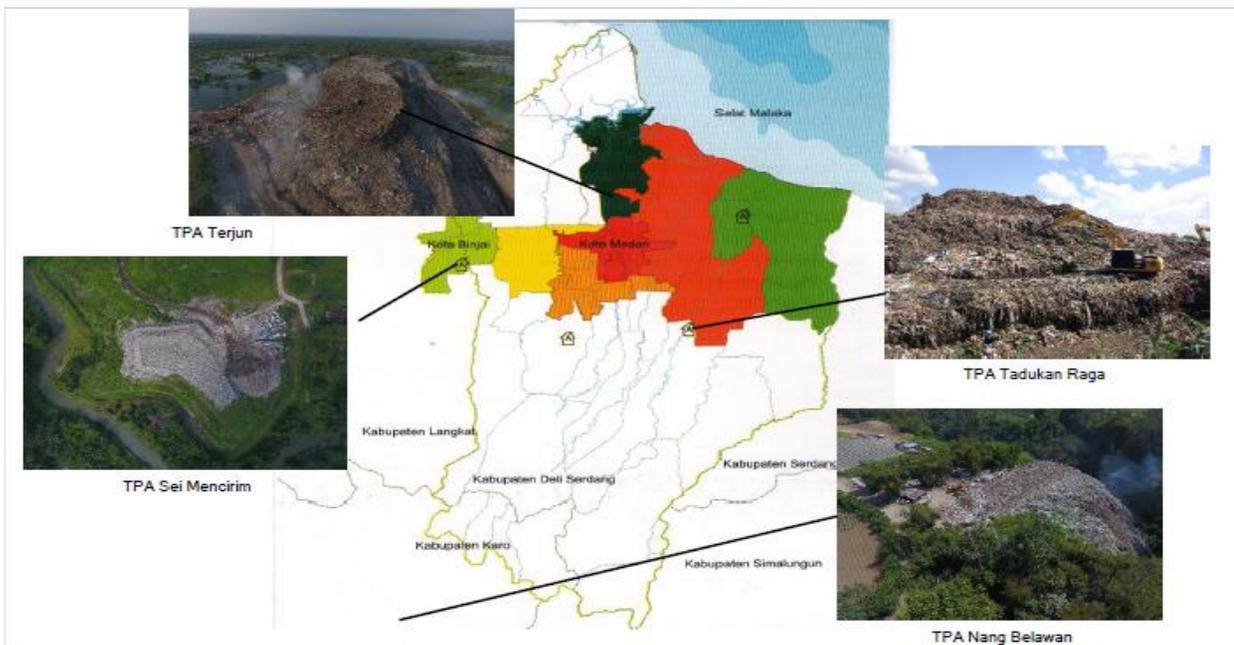
Konsep Pembangunan yang direncanakan adalah didaerah Sport Center ada pusat Kesehatan, pusat komersil dan expo center dan tempat hiburan, konsep pembangunan sebagai berikut :



Gambar 2. 2.
Konsep Pembangunan Sport Center

3. Perencanaan Proyek Waste to Energy

Proyek ini direncanakan akan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) daerah Medan, Binjai, Deli serdang dan Karo (Mebidangro). Dimana kondisi saat ini sampah yang dihasilkan per hari adalah 3827,61 Ton/Hari dimana sampah yang paling banyak ada di Kota Medan 2500 Ton/hari, kemudian Deli Serdang 638 Ton/Hari, Kota Binjai 132,61 Ton/hari dan Karo 557 Ton/hari, rencana Lokasi TPA ini di Desa Limau Mungkur STM Hilir, Deli Serdang, konsep pembangunan adalah sebagai berikut:

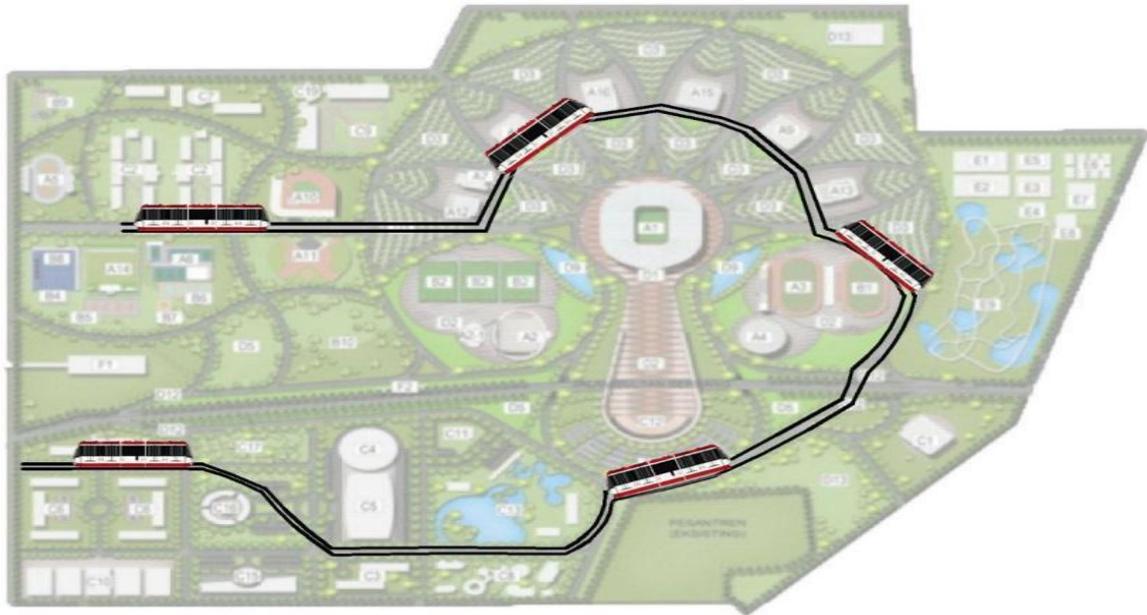


Gambar 2. 3.
Konsep Pembangunan TPA MEBIDANGRO

4. Perencanaan Pembangunan Monorel di Sport Center Sumatera Utara

Rencana kedepan akan di bangun Monorel di area sport centre Sumatera Utara, rencana pembangunannya adalah sebagai berikut:

RUTE MONOREL SPORT CENTER



Gambar 2. 4.
Rencana Pembangunan Monorel

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penerapan standar pelayanan minimal di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

- Jenis Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan Menengah
 - b. Pendidikan Khusus
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun.
 - b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas
- Realisasi
 - a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun adalah 78,65 persen.
 - b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas 16,55 persen.

b. Urusan Kesehatan

- Jenis Pelayanan Dasar
 - a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - a. Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%).
 - b. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%).
- Realisasi
 - a. Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 15.179.342 orang (100%).
 - b. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 85.381 orang (100%).

c. Urusan Pekerjaan Umum

- Jenis Pelayanan Dasar
 - a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas (100%).
 - b. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (100%).
- Realisasi
 - a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas (61,04%).
 - b. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (36,99%).

d. Urusan Perumahan Rakyat

- Jenis Pelayanan Dasar
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

- Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan :
 - ❖ Pada saat masa pasca bencana;
 - ❖ Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - ❖ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administrasi kabupaten/ kota.
- Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - ❖ Pada saat masa pasca bencana;
 - ❖ Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - ❖ Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
 - Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
 - ❖ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - ❖ Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - ❖ Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- c. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung :
 - Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun target dan capaian SPM Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.

Untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi di Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan, namun untuk sub indikator mendukung dengan dilakukan pembangunan Penataan Kawasan Permukiman Relokasi Korban Bencana di Kabupaten Mandailing Natal berupa Pekerjaan Jalan Paving Blok, Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang berada pada Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Indikator ini belum dilakukan karena tidak terdata masyarakat yang harus difasilitasi.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

- Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi.

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa.

- .Realisasi

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100 %.

f. Urusan Sosial

- Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2); Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM (Pasal 3 Ayat 1 sub j, k, l, m, dan n) Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), bahwa Jenis SPM Sosial Provinsi:

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - 4) Penyediaan Alat Bantu
 - 5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
 - 6) Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - 7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - 8) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - 9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
 - 1) Pengasuhan
 - 2) Penyediaan Makanan
 - 3) Penyediaan Sandang
 - 4) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - 5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
 - 6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - 7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - 8) Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
 - 9) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 10) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 11) Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - 4) Penyediaan Alat Bantu
 - 5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
 - 6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - 7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - 8) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas

- 9) Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 12) Pemulasaraan
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - 4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
 - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - 6) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - 7) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 - 8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
 - 9) Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 10) Pemulangan ke Daerah Asal
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
- 1) Penyediaan Permakananan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 5) Pelayanan Dukungan Psikososial

Sesuai Permensos No.9 Tahun 2018, maka Sarana dan Prasarana yang wajib ada di dalam panti adalah sebagai berikut :

- a. Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur.
- b. Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek ketrampilan, dan ruang kesenian.
- c. Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus.

- d. Tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan
 - e. Peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang peralatan teknis.
 - f. Alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan
 - g. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya melaksanakan 5 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut 5 jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial secara bertahap tahun 2019 - 2023 yang meliputi :

Tabel 2.104
Target SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	1.047
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	510
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	173
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1.880

- Realisasi

Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang sosial. Dinas

Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.

Adapun capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.105
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	OPD
SPM Pendidikan					
1	Pendidikan menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	96,10 %	78,65 %	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	349,4 %	16,55 %	
SPM Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	977.949 Orang (100%)	15.179.342 org (100%)	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	85.381 org (100%)	
SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	61,04%	61,04%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	36,99%	37,12%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
SPM Urusan Perumahan Rakyat					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	OPD
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100	5.351 jiwa (100%)	Satpol PP
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	1.077 (100%)	1.047 (100%)	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	540 (100%)	510 (100%)	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	203 (100%)	173 (100%)	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	165 (100%)	135 (100%)	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1.910 (100%)	1.880 (100%)	

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021

Capaian Kinerja Program/Kegiatan RKPD Provsu dan Realisasi Keuangan Tahun 2021. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja tahun 2021 diketahui bahwa Program dari masing-masing Perangkat Daerah merupakan penunjang dalam keberhasilan Perangkat Daerah mencapai Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama. Pencapaian program merupakan kumpulan dari hasil pencapaian kegiatan dan pencapaian kegiatan merupakan hasil pencapaian dari sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada pada APBD Tahun 2021, berikut ini disajikan capaian kinerja Program per OPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106
REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

Tabel 2.106
REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

No.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN		
		JLH	REALISASI	%	JLH	REALISASI	%	JLH	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1.	Dinas Pendidikan	4	4	100	60	55	91,67	145	134	92,41	6.020.744.771.968	5.583.507.896.700,32	92,73
2.	Dinas Perumahan dan Permukiman	4	4	100	13	12	92,31	29	27	93.10	58,818,268,513	55,635,560,304	94.59
3.	Dinas SDA & CKTR	8	8	100	11	11	100	52	52	100	194,641,429,125.	173,275,286,388	89.02
4.	Dinas PPPA	7	7	100	20	20	100	38	38	100	15,288,206,000.	12,105,137,894	79.17
5.	Dinas Kesehatan	5	5	100	16	16	100	84	84	100	1,099,979,104,808.	995,638,640,093	90.51
6.	Dinas PPKB	4	4	100	12	12	100	33	33	100	15,410,173,000,000	11,625,241,528	75.43
7.	RSU Haji	2	2	100	11	10	91	33	11	30	178,813,177,949	102,154,633,174	57.12
8.	RS Jiwa	10	3	30	46	23	50	165	73	44.24	68,386,281,000	64,737,502,992	94.66
9.	Dinas Sosial	7	7	100	19	19	100	112	112	100	124,647,972,549	111,014,159,373	89.06
10.	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	100	21	19	90,48	66	44	66.67	39,699,236,198	34,677,075,940.	87.35
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	100	17	15	88,24	91	83	91.21	37,738,092,200	35,563,739,478.	94.24
12.	Dinas Perkebunan	5	5	100	12	12	100	30	30	100	39,463,007,278	36,912,247,699	93.54
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	100	20	19	95	43	38	88.37	69.996.457.568	65.452.822.651,61	93,51
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	7	7	100	17	17	100	35	35	100	102,120,410,585.	94,684,979,848.	92.72
15.	Badan Kesbangpol	6	6	100	11	11	100	30	30	100	27,943,779,240	25,619,519,935	91.68
16.	Sekretariat Dewan	2	2	100	11	11	100	30	30	100	421,476,711,100	349,514,822,435	82.93
17.	Inspektorat	3	3	100	12	12	100	45	45	100	37,250,528,510	32,114,004,311	86.21
18.	Dinas PMD	4	4	100	8	8	100	20	20	100	25,401,152,365	23,054,931,285	90.76
19.	Dinas Catatan Sipil	5	5	100	9	9	100	17	17	100	16,406,644,000	14,814,407,140	90.30
20.	Dinas Perkebunan	5	5	100	12	10	83,33	30	30	100	39,463,007,278	36,912,247,699.00	93.54

No.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN		
		JLH	REALISASI	%	JLH	REALISASI	%	JLH	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
21.	Biro Administrasi Pimpinan	1	1	95	8	8	93,50	19	19	89,52	15,123,190,859	14,300,207,967	94.56
22.	Biro Hukum	2	2	100	7	7	100	12	12	100	3,884,518,250	3,296,633,565	84.87
23.	Biro Otda	2	2	87	8	7	87,37	18	17	91.07	8,038,779,683	6,907,911,913	85.93
24.	Biro Organisasi	2	2	100	9	9	100	18	18	100	3,333,909,010	3,128,161,191	93.83
25.	Biro Umum	2	2	100	9	9	100	22	22	100	268.485.288.327	262.384.256.245	97,73
26.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	100	7	7	100	14	13	92,86	5.647.268.337	5.165.949.908	91,48
27.	Biro Kesra	2	2	100	5	4	80	12	10	83,33	324.837.448.423	293.597.774.626	90,38
28.	Biro Administrasi Pembangunan	3	3	100	5	3	60	11	10	90,91	3.265.852.124	3.079.214.053	94,29
29.	Satpol PP	1	1	100	20	11	55	33	47	70,21	47.760.366.176	47.760.366.176	88,06
30.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	3	100	13	12	92,30	32	31	96,87	196.486.218.923	182.762.335.675	93,01
31.	Dinas Tenaga Kerja	7	7	100	24	25	62,50	103	29	28,16	50.025.740.352	46.847.361.485	93,65
32.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	5	100	13	13	100	35	35	100	161.537.427.490	152.263.119.728	94,26
33.	Dinas PMP2PTSP	5	5	100	13	13	100	24	24	100	27.086.159.110	24.330.752.056	89,83
34.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5	5	100	12	12	100	27	27	100	23.649.537.090	21.647.394.340	91,53
35.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	9	100	43	43	100	82	80	97,56	44.344.130.829	42.319.145.413	95,43
36.	Dinas Perhubungan	2	2	100	28	16	57,14	21	18	85,71	64,026,974,751	56,792,663,329	88,70
37.	Dinas Pendidikan	3	3	100	11	10	90,90	52	43	82,69	6.020.744.771.968	5.583.507.896.700,32	92,73
38.	Dinas Kehutanan	4	4	100	17	15	88,24	45	41	91,11	153.126.798.596	99.059.987.024	64,59
39.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	9	100	18	17	94,44	42	42	100	104.412.234.045	93.910.464.885,92	89,94
40.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	9	9	100	18	18	100	43	43	100	78,074, 067,066	70,008,254,833	89,67
41.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	100	7	7	100	29	22	75,86	3.955.719.987	2.844.062.900	71,90

No.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN		
		JLH	REALISASI	%	JLH	REALISASI	%	JLH	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
42.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6	100	10	10	100	21	21	100	71.708.538.151	65.660.675.177	91,57
43.	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	100	9	8	88,89	40	24	60	24.947.712.721	27.990.469.387	89,13
44.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
45.	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	2	100	11	11	100	51	34	66,67	19.833.938.000	18.254.042.126	95,58
46.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3	3	100	8	7	87,50	28	27	96,43	284.977.098.684	358.385.077.869	79,52
47.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	100	15	15	100	83	83	100	2.659.960.360.858	2.526.568.688.227	94,99
48.	Dinas Koperasi dan UKM	6	6	100	11	11	100	19	19	100	49.081.419.814	45.693.702.295	93,10
49.	Dinas Komunikasi dan Informasi	5	5	84,95	12	10	83,33	26	26	100,00	54.546.846.291	42.969.112.813	78,77

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Triwulan IV Tahun 2021 bahwa dari 49 (Empat Puluh Sembilan) Perangkat Daerah predikat kinerja sangat tinggi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu dengan pelaksanaan Program sebesar 100 (Seratus) persen, Kegiatan sebesar 100 (Seratus Persen), Sub Kegiatan sebesar 97,56 Persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.319.145.413, dari pagu anggaran sebesar Rp. 44.344.130.829,- atau sebesar 95,43 persen.
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Triwulan IV Tahun 2021 bahwa dari 49 (Empat Puluh Sembilan) Perangkat Daerah predikat kinerja yang sangat rendah adalah Rumah Sakit Jiwa dengan pelaksanaan Program sebesar 30 (Tiga Puluh) persen, Kegiatan sebesar 50 (Lima Puluh) persen, Sub Kegiatan sebesar 44,24 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.737.502.992,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 68.386.281.000,- atau sebesar 94,66 %.Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Keberhasilan dari misi ditunjukkan oleh indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target terukur. Akibat perubahan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta pandemik COVID-19, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Penyesuaian ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan. Berikut ini hasil capaian kinerja Pembangunan berdasarkan target yang ditetapkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2021.

Tabel 2.107
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	STATUS	2021		Status	
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pendidikan	Poin		68,65-69,15	68.76	Tercapai
2	Indeks Kesehatan	Poin		75,65-76,15	75.74	Tercapai
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)		57	59	Melebihi target
4	Indeks Infrastruktur	Poin		0.71	0.71	Tercapai
5	Indeks Demokrasi	Poin		65,53	N/A	Belum ada Rilis data BPS
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		(64.00) (B)	62.08 (B)	Belum Tercapai
7	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen		91	96,51	Melebihi target
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin		69,02	69.37	Melebihi target

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2023 ditunjukkan oleh capaian IKU perangkat daerah. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan bidang urusan pemerintah tingkat dampak (impact) Provinsi Sumatera Utara 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.108
IKU Perangkat Daerah/IKK

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,00-4,00	2.67	Seluruh Perangkat Daerah
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	55-57	59	Seluruh Perangkat Daerah
3	Laju Inflasi	Persen	2,5	1,71	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Gini	Poin	0,313	0,314	Seluruh Perangkat Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL				
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8.00 - 9.00	8.49	Seluruh Perangkat Daerah
2	Jumlah Penduduk Miskin	oran	1.315.000	1.273.000	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.50 - 72.00	72	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.73	90.73	Dinas PP PA
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	92,54	67.79	Dinas PP PA
6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,68	9,45	Dinas Pendidikan
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,27	Dinas Pendidikan
8	APK SM Sederajat	Persen	99,14	106.07	Dinas Pendidikan
9	APM SM Sederajat	Persen	82,61	72.52	Dinas Pendidikan
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,34	69.23	Dinas Kesehatan
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,04	72	Dinas Tenaga Kerja
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.75-6.00	6.91	Dinas Tenaga Kerja
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA				
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Benda/ situs/ kawasan	5	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	58,82	58.82	Dinas Pemuda dan Olahraga (IKU UTAMA OPD)
4	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	45,04	45.04	Dinas Pemuda dan Olah Raga (IKU UTAMA OPD)
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				
B.1.1	PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	97,4	96.80	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	58,7	49.46	Dinas Pendidikan
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	95,02	94.33	Dinas Pendidikan
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	44,1	41.34	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	2,44	2.28	Dinkes
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	12,24	8.78	Dinkes
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	93.49	89.18	Dinkes
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	29.5	25.8	Dinkes
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	80	60.65	Rumah Sakit Jiwa Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	62	76.87	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	62	40	Rumah Sakit Haji Medan
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	5	5	Rumah Sakit Haji Medan
2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	85	Rumah Sakit Haji Medan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1	PEKERJAAN UMUM				
3.1.1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	76,37	82.27	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	86,29	84.06	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	15	10.88	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.4	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	56,92	54.84	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.5	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	57,17	82.82	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.6	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	61.26	61.05	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.7	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	41.81	37.12	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.2	PENATAAN RUANG				
3.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
3.2.1	Akses Rumah Layak Huni	Persen	58.69	67.44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.2.2	Persentasi Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	16.27	16.27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.2.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
4.1	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	65	100	Satpol PP
4.2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	92	96.51	Satpol PP
4.3	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	Orang	400	450	Bakesbangpol
4.4	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Jumlah Ormas	30	74	Bakesbangpol
4.5	Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumut	Persen	6.10%	6.50%	Kesbangpol
4.6	Perbaiki Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat	9	18	Kesbangpol

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
4.7	Masyarakat yang menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan (org)	Orang	260	1450	Kesbangpol
4.8	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33	33	BPBD
4.9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	3	100%	BPBD
4.10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	-	0	100%	BPBD
4.11	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145,83	BPBD
5	Sosial				
5.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti (%)	Persen	100	100	Dinas Sosial
5.2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar (%)	Persen	0.11	0.1	Dinas Sosial
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
1,1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,27	93.94	Dinas Tenaga Kerja
1,2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	-	46.99	Dinas Tenaga Kerja
1,3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	7,72	0.52	Dinas Tenaga Kerja
1,4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	50,12	95.44	Dinas Tenaga Kerja
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	Persen	86	72.34	Dinas PP dan PA
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	10/100.000	6/100.000	Dinas PP dan PA
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/100.000	16/100.000	12/100.000	Dinas PP dan PA
2.4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	67	51	Dinas PP dan PA
3	PANGAN				
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,68	85	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
3.2	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	115,23	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.3	Produksi Daging (ton)	Ton	221.354,76	178.454,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.4	Produksi Telur (ton)	Ton	477.231,91	429.021	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.5	Produksi susu (ton)	Ton	5.227,98	1.731,24	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4	LINGKUNGAN HIDUP				
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	poin	69,02	69.37	Dinas Lingkungan Hidup
4.2	Indeks Kualitas Udara	poin	87,09	89.03	Dinas Lingkungan Hidup
4.3	Indeks Kualitas Air	poin	53,71	69.37	Dinas Lingkungan Hidup
4.4	Indeks Kualitas Lahan	poin	47,42	46.45	Dinas Lingkungan Hidup
4.5	Indeks Kualitas air laut	poin	72,51	81.43	Dinas Lingkungan Hidup
4.6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO ₂ eq	26,56	-22.07	Dinas Lingkungan Hidup
5	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
5.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	92	85.32	Disdukcapil
5.2	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	99.2	95.83	Disdukcapil
5.3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	95	85.93	Disdukcapil
5.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	Disdukcapil
5.5	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen	100	100	Disdukcapil
5.6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya di laporkan	Persen	100	100	Disdukcapil
5.7	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	30	30	Disdukcapil
5.8	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	70	65.30	Disdukcapil
5.9	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Dokumen	3	3 dok	Disdukcapil
	Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase	70	65.30	Disdukcapil
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
7.1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	Persen	56	34	Dinas Pemdes
7.4	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	27	26.22	Dinas Pemdes
7.5	Persentase BUMDes Maju	Persen	40	25	Dinas Pemdes
7.6	Persentase Desa Mandiri	Persen	6	7	Dinas Pemdes
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	-	2,98	2,6	Dinas PP dan KB
8.3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)	Persen	50	40.5	Dinas PP dan KB
8.6	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	14,8	29.6	Dinas PP dan KB
8	PERHUBUNGAN				
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	45,29	39.92	Dinas Perhubungan
9.2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Persen	50	33,33	Dinas Perhubungan
9.3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Persen	90,29	71,99	Dinas Perhubungan
9.4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Persen	90	8,35	Dinas Perhubungan
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	87	61	Diskominfo
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Persen	55	31	Diskominfo
10	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
11.3	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Jumlah UMKM	200	276	Dinas Koperasi dan UKM
11.4	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Persen	2	7,87	Dinas Koperasi dan UKM
11.5	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Persen	100	8,79	Dinas Koperasi dan UKM
11.6	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	Persen	2	-	Dinas Koperasi dan UKM
11.7	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Jumlah UMKM	20	164	Dinas Koperasi dan UKM
11.8	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persen	25	187,9	Dinas Koperasi dan UKM
11.9	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persen	30	19,24	Dinas Koperasi dan UKM
11	PENANAMAN MODAL				
12.1	Investor PMDN (Proyek)	Proyek	215	594	DPM&P2TSP
12.2	Investor PMA (Proyek)	Proyek	342	581	DPM&P2TSP

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	18,75	9.85	DPM&P2TSP
12.4	Nilai Investasi PMA (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	16,25	9.18	DPM&P2TSP
12.7	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Persen	12.375	66	DPM&P2TSP
12.8	Lama Proses Perizinan				DPM&P2TSP
	- PMDN	Hari			
	- Sektoral	Hari			
12.9	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	1.17	1.17	DPM&P2TSP
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	26,31	26.31	Dinas Pemuda dan Olah Raga (IKU UTAMA OPD)
13.2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	58,82	58,82	Dinas Pemuda dan Olahraga (IKU UTAMA OPD)
13.3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	45,04	45.04	Dinas Pemuda dan Olah Raga (IKU UTAMA OPD)
13	STATISTIK				
14.1	Data Statistik Sektoral	Persen	69	71	Diskominfo
14	PERSANDIAN				
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	10	20	Diskominfo
15	KEBUDAYAAN				
16.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	0,3	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	PERPUSTAKAAN				
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11	12,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17	KEARSIPAN				
17.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	47	47	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jiwa	71	71	Dinas Perpustakaan dan Arsip
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1	PARIWISATA				
1.1	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7,02	7.02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2	Kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah	75	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1.15	1.15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.4	Destinasi wisata yang difasilitasi	Persen	8	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN				
	Pertanian				
2.1	Produksi Tanaman Pangan				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	3.906.872	4.200.112	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1.597.073	1.965.444	
	3. Kedele (ton)	Ton	4.052	4.003	
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5,17	5.1	
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6,21	6.12	
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1,58	1.56	
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	17.775	29.196	
	2. Cabe (ton)	Ton	179.103	193.862	
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	1.018.568	1.270.084	
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1.206.338	1.249.380	
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	8,08	9.55	
	2. Cabe (ton)	Ton	10,13	10.48	
	Perkebunan				
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		2,65%	2.36	Dinas Perkebunan
2.6	Produksi		7.953.702,74	7.784.411,00	Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	Ton	7.355.475,90	7.178.053,00	
	2. Karet (ton)	Ton	326.826,00	310.016,00	
	3. Kopi Arabika (ton)	Ton	71.586,92	67.469,00	
	3. Kopi Robusta (ton)	Ton	10.360,46	9.128,00	
	4. Kelapa (ton)	Ton	101.745,60	99.992,00	
	5. Kakao (ton)	Ton	36.223,00	35.696,00	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	51.484.86	48.057.00	
2.7	Laju pertumbuhan Produktifitas sektor perkebunan (%)	Persen	2,02%	-	Dinas Perkebunan
2.8	NTP Perkebunan	Persen	100,01%	160,10%	Dinas Perkebunan
2.9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	10,58%	-	Dinas Perkebunan
3	KEHUTANAN				
3,1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	58.5	59.895	Dinas Kehutanan
3,2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0,86	0,63	Dinas Kehutanan
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
4,1	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	99.82	Dinas ESDM
4,2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	98,83	98.5	Dinas ESDM
4,3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	75,82	26.97	Dinas ESDM
5	PERDAGANGAN				

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	2,97	3,62	Disperindag
5.3	Ekspor Non Migas	(Juta U\$)	7.995,50	11.874,67	Disperindag
6	PERINDUSTRIAN				
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	0,61	1,43	Disperindag
6.2	Pertumbuhan Industri			N/a	Disperindag
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Persen	1,48	NA	Disperindag
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	8,28	NA	Disperindag
7	TRANSMIGRASI				
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun		47.84	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen	6,4	6.22	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.3	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	634.701,24	439.658	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	433.032,24	336.335,72	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	201.669	146.603	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.6	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	46,91	47.84	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	102	109,15	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	103	95,02	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.9	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	25	11.345	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.10	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²)	m ²	52.031	230	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.11	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	Ha	39	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
B.3	FOKUS LAYANAN unsur penduduk				
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1,1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	80	95	Bappeda
1,2	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	Persen	100	100	Bappeda
2	KEUANGAN				
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	BPKAD
2,2	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	-	10,89	10,89	BPKAD
2,3	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2,4	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
2,5	Persentase tanah milik pemprov su yang disertifikasi	Persen	43,93	29.63	BPKAD
2,6	Persentase Jumlah Barang milik daerah yang disusun	Persen	100	100	BPKAD
2,7	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	100	100	BPKAD
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				
3,1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	53		BP2RD
3,2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	8,89%	106,72%	BP2RD
3,3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	1,20%	103,57%	BP2RD
3,4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	2%	62%	BP2RD
3,5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	10,80%	95.45%	BP2RD
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
3,1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	9 JP	9 JP	BPSDM
3,2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	22,22%	19.2 %	BPSDM
3,3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formall	Persen	24%	24	BPSDM
4	KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	Persen	12	12	Balitbang
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	33	40	Balitbang (IKU UTAMA BALITBANG)
	Penerapan SIDA:				
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	Persen	25	61	Balitbang
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	40	50	Balitbang (IKU UTAMA BALITBANG)
6	PENGAWASAN				
6,1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota se-Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	Inspektorat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
6,2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakisip \geq B	%	80	93.88	Inspektorat
6,3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	75	78.96	Inspektorat
6,4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	Inspektorat
6,5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level	Level 3,25	Level 2 Berkembang (2,929)	Inspektorat
6,6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 3	Level 2 Plus	Inspektorat
6,7	Pengaduan Masyarakat	%	68	77.8	Inspektorat
6,8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	%	20	NA	Inspektorat
7	PENGHUBUNG				
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	70	77.42	Badan Penghubung
8	SEKRETARIAT DEWAN				
8.1	Persentase capaian tingkat kepuasan dan fasilitasi sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	Setwan
9	SEKRETARIAT DAERAH				
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	Persen	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2.8	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.3	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.4	Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan	Persen	70	86	Biro Kesejahteraan Rakyat
9.5	Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Persen	70	70	Biro Kesejahteraan Rakyat
9.6	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100	100	Biro Hukum
9.7	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100	100	Biro Hukum
9.8	Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	Persen	100	100	Biro Hukum
9.9	Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	100	100	Biro Perekonomian
9.10	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	100	100	Biro Perekonomian
9.11	Presentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
9.12	Terbitnya Peraturan/Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dokumen			Biro Administrasi Pembangunan
9.13	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	Persen	100%		Biro Administrasi Pembangunan
9.14	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,80 (B)	3.80 (B)	Biro Organisasi
9.15	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	Biro Organisasi
9.16	Nilai capaian pelaporan kinerja	Bobot	12	11.75	Biro Organisasi
9.17	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtangaan Pimpinan		100%	100%	Biro Umum
9.18	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	Persen	100%	100%	Biro Umum
9.19	Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	Persen	100%	100%	Biro Administrasi Pimpinan
9.20	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	Biro Administrasi Pimpinan
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
1.1.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	88,00	46,81	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
1.2.	NTP	Poin	109,92	109.83	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
	NTP Tanaman Pangan	Persen	100.66	96.9	Dinas TPH
	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	100,01	125.05	Dinas Perkebunan
	NTP Hortikultura	Persen	101.03	97.28	Dinas TPH
	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	102	101.45	DKP
	NTP Peternakan	Persen	115.23	98.73	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
2.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,7	0,71	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.2	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	83,03	76,37	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
2.3	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	86,29	84,15	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
2.4	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	99	Dinas ESDM
2.5	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	57,17	56.51	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
2.6	Akses Rumah Layak Huni	Persen	58.69	67.44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Fokus Iklim Berinvestasi				
3.1	Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara	Persen	-	33.392 kasus	Kesbangpol
3.2	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	1.17		DPM&P2TSP
4	Fokus Sumber Daya Manusia				
4.1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)				
4.2	Angkatan Kerja (ribu orang)				
5	Dukungan Terhadap Daya Saing				
5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	(64.00) BB	B	Biro Organisasi,
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara	Persen		N/A	Bakesbangpol
5.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	82,17	72,39 (Baik)	Bakesbangpol (data dari kemenag)
5,5	Indeks Resiko Bencana Daerah	Poin	127	145,83	BPBD
6	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
1	Pendidikan				
1.1	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	100	97.65	Dinas Pendidikan
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	100	16.55	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan				
2.1	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	100	100	Dinas Kesehatan
2.1	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100	100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2021	
1	2	3	4	5	6
3.1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas		61.26	61.04	SDACKTR
3.2	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional		41.48	37.12	SDACKTR
4 Perumahan Rakyat					
4.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		0	-	Perkim
4.2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		0	-	Perkim
5 Trantibumlinmas					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi		5.350 jiwa	5.351 jiwa (100%)	Satpol PP
6 Sosial					
	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Persen	100	100	Dinas Sosial
	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti			100	Dinas Sosial
	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti			100	Dinas Sosial
	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti		100	100	Dinas Sosial
	Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persen	100	100%	Dinas Sosial

2.3. Realisasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara

Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara dari Pilar 1 sampai Pilar 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.109
Capaian Indikator SGDs Sumatera Utara

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
					2020	2021	2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1	Persentase Penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan	BPS	Persen	8,87	8,04	8,49
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringin Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	75,00	85,00	77,02
			1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial	Persen	100%	100%	100%
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH	Dinas Sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	431.968	1.818.020	1,805278
	1.4	Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan makro.	1.4.1 (a)	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	Persen	100,00	100,00	75
			1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	Persen	93,00	94,00	70
			1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas PP dan KB	Persen	59,2	59,57	49.60
			1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	Persen	89,23	90,02	76.95
				Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	Meter	255.725	270.539	254560

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
			Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	Persen	50	75	64,26	
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	Sumbangan Rumah (SR)	29350	29550	29350	
		1.4.1.(f)	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ha	135	405	16,27	
		1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	69,07	69,59	72,53	
		1.4.1.(j)	Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	Disdukcapil	Persen	71	81	85,93	
		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	0,18	PM	0,18	
	1.5	Pada Tahun 2030, membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Lokasi	5	5	15
			1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial	KK	-	1000	1000
			1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial, BPBD	Orang	0	40	40
			1.5.1. (e)	Indeks Resiko Bencana	BPBD	Angka	145	127	145,18
			1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Dokumen	0	0	0
			1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Dokumen	1	1	1
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap	2.1.1 *	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Persen	PM	PM	PM
			2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Persen	19,2	18,3	19,2*

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
	makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Persen	5,2	4,8	5,2*		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Persen	14,0	13,5	14,0*		
		2.1.2 *	Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Desa Kelurahan	43	43	7	
		2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	19,2	18,3	16,5	
				Dinas Kesehatan	Persen	5,2	4,8		
						Dinas Kesehatan	Persen	14,0	13,5
		2.1.2 *	Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Desa Kelurahan	43	43	43	
		2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1 *	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun/Balita	Dinas Kesehatan	Persen	31,50	28,50
	2.2.1.(a)			Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah dua Tahun/Baduta	Dinas Kesehatan	Persen	29,5	29,30	25,84
	2.2.2.			Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	Dinas Kesehatan	Persen	80,00	84,00	80,00*
	2.2.2.*			Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen			7,9
	2.2.2. (a)			Prevalensi anemia pada Ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	29	25	29*
	2.2.2.(b)			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	53,00	59,00	50
	2.2.2.(c)			Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Persen	83,77	94,8	85
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 *	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	per 100.000 Kelahiran Hidup	243	93,49	89,18

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs	
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021	
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL								
		3.1.2 *	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	75
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1 *	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	2,048	-	0,14
		3.2.2. *	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	910	-	1.996
		3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	1,365	2,4	2,28
		3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI)	Dinas Kesehatan	Persen	83,00	89,00	70
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS	Dinas Kesehatan	Persen	< 0,5	< 0,5	0,21
		3.3.2 *	Kejadian TB per 1.000 orang / Case Notification Rate (CNR) Program TB per 100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100 ribu penduduk	185	341	150
		3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100.000 penduduk		301	150
		3.3.3. *	Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0,08	0,06	0,15
		3.3.3. (a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten/ Kota	27	33	21
		3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Persen/KK	48,48 (16)	78,79 (26)	72,72 (24)
		3.3.5 *	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Orang	Filariasis (2) Kusta (209)	Filariasis (-) Kusta (229)	Filariasis (-) kusta (105)/ 0,71 per 100.000 penduduk
		3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	PM	PM

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	22,1	21,1	29,73
			3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persen	29,1	28,9	13.31
			3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Dinas Kesehatan	Persen	68,2	68	68,2*
			3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	33	33/21	21
	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN/Kesbangpol	Persen	PM	PM	6.5
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Dinas PP dan KB	Persen	19	17	19*
			3.7.1. (a)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	Dinas PP dan KB	Persen	59,2	59,57	40.5
			3.7.1. (b)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PP dan KB	Persen	32	36	25.03
			3.7.2 *	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Dinas PP dan KB	Persen	PM	PM	27.7
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas PP dan KB	Persen	2,86	2,82	2.85
	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1. (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas PP dan KB	persen	12,50	10,50	12.4
			3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Persen	0,075	0,084	0,075*
			3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persen	75,00	85,00	77,02
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persen	90,00	94,00	94,11

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
		Public Healt, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	97,03	97,28	106.07
	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.a	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	97,03	97,28	106.07
	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	Dinas Pendidikan	Persen	69,07	69,59	72.53
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik./ Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan	Persen	94,26	94,93	94.33
	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1 *	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PP dan PA	Persen	50	70	25

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER		5.2.1 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP dan PA	Per 100.0000		6	6	
		5.2.1.a	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10,000)	Dinas PP dan PA	Persen	7	4	2	
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.a	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Dinas PP dan PA	Persen	60	78	8/100.000
			5.3.1 *	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas PP dan PA	Kasus	1013	900	953
			5.3.1.a	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas PP dan KB	Usia	22,02	22,2	22,2
			5.3.1.b	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas PP dan KB	Usia	25	23	27.7
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1.c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	97,03	97,28	106.07
	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas PP dan PA	Persen	13	23	13.13
			5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas PP dan PA		36.02	53.90	53.95
			5.5.1 (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas PP dan KB	Persen	12,50	10,50	12.4
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas PP dan KB	Persen	21	28	60

Goals/Tujuan	Target TPB		Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs	
						Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021	
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI									
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1 *	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	Persen	100	100	99,82
			7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	KWH/Kapita	244,26	700	772,3
	7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1 *	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM/BPS	Persen	32%	34%	34%
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1.a	PDB Per Kapita	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar	36.18	36	36.67
	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1 *	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja/BPS	Persen	5,62	107	1,39
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	48,02	PM	47,53
			8.3.1.a	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja/BPS	Persen	45,00	42,07	40,67
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 *	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja	Rupiah / Per bulan	2.499.423,06	2.645.152	2.499.423,06
			8.5.2 *	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	6,91	5,40	6,33
			8.5.2. (a)	Tingkat Setengah Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja	Persen	10,43	6,92	9,67

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
	8.8	Melindungi hak - hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Tenaga Kerja	Perusahaan	257		362
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1 *	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen		8,99	6.22
			8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Orang		370.000	230
			8.9.1.b	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Orang		370.000	230
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 (a)	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	Persen	81.19	86,29	82.10
			9.1.2.b	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Persen	NA	71,01	NA
	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 *	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	18,09	20,15	18,09
			9.2.1.a	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	-0,84	3,93	-0,84
			9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	8,26	11,24	8,26
	9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih	9.4.1.a	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	22.07	NA	24.99

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
		dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
	9.5	Memperkuat riset ilmiah meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1 *	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Penelitian	Tercapai	Penelitian dan Pengembangan	Hasil-hasil penelitian dan inovasi belum seluruhnya dijadikan sebagai bahan kebijakan oleh pemangku kepentingan	Melakukan monitoring tentang hasil - hasil penelitian dan inovasi untuk dimanfaatkan oleh OPD Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1 *	Indeks Gini	BPS	Persen	0,315	0.314	
			10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dispemdes	Desa	-	-	-
			10.1.1 (c)	Jumlah Desa Tertinggal	Dispemdes	Desa	1.831	1650	1612
			10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dispemdes	Desa	9	12	16
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dispemdes/BPS	Persen	1,6	1,8	1,9
		10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dispemdes/BPS	Persen	PM	PM	PM	
	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besa	10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Dinas Sosial	Persen	-	100% (5926 orang)	92% (5800 orang)
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	BPKAD/BPS	Persen	0,12046	0,12295	0,12666
	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	Orang		12.000	12.000

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
		inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN									
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Sumbangan Rumah (SR)	29550	29550	76,95
			6.1.1.(b)	Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	m ³	20000	20000	20000
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Persen	90,02	90,02	90,02
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Sumbangan Rumah (SR)	29550	29550	90,02
			6.2.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Sumbangan Rumah (SR)	29550	29550	29550
			6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan / (monev.stbn.kemkes.go.id)				
			6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	%	1,43	1,43	1,43
	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Dokumen	2	2	2

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
		6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisas	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang / BMKG	Unit		101	101	
		6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Buah		1	1	
		6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BPHP, BPSKL, Dinas Kehutanan	Ha	880	970	970	
		6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Kegiatan		4		
	6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1 (a)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas Kehutanan, BPDAS	BPDASW U	275333	276.116	275.233
			6.6.1. (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas Kehutanan, BPDAS	DAS	71	71	71
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)		ha	135 ha	135 ha	

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi Baseline	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	
					2020	2021	2021	
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL								
		11.1.1 (a)	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman	Persen	93,72	93,72	
	11.2	Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada pada situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	Persen	9,00	9,00
	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1 *	Indeks Resiko Bencana	BPBD	Persen	127	145.8

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.6.1 (a)	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten / kota (TPA Regional)	Dinas Lingkungan Hidup / SDACKTR	ton/tahun	126.693,87	916.981	119.958,45
TUJUAN 12 POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4	Pada tahun 2020 mencaoai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, disepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	Perusahaan	123	40	93
			12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Lingkungan Hidup	Ton/tahun	289.071,14	43.000	485.266,91
	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	Ton/tahun	NA	NA	NA
	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-prakter berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	126	40	100
	13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1
TUJUAN 14 : EKOSISTIM LAUTAN	14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1. (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPPN	2	2	2

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
	14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	7	7	7
	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1 *	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	34		34
			14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jiwa		14.000 Jiwa	14.000 Jiwa
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Dinas Kehutanan, BPKH	Ha	3.055.795	3.055.795	3055795
			15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	BPKH ,Dinas Kehutanan	%	41,25	± 41,25	41,25
	15.,2	pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1. (b)	Luas Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas Kehutanan/Balai Besar Konservai Sumber Daya Alam	Ha	360123.12	368.697.38	368.697.38
			15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan	KPH	16 KPH dan 1 UPT Tahura	16 KPH dan 1 UPT Tahura	16 KPH dan 1 UPT Tahura
	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	BPDAS, BBKSDA, Dinas Kehutanan	Persen	0,88	0,93	0,93
PILAR EMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA									
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Angka Kriminalitas yang tertangani	Kesbangpol	Jumlah	247.218	21.143	Menunggu Rilis dari BPS

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi	Target SDGs	Capaian SDGs		
					Baseline 2020	Tahun Berjalan 2021	Tahun Berjalan 2021		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Rasio kekerasan terhadap Anak	Dinas PP dan PA	Point	16	15,8	12
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) / Opini BPK	BPKAD	Predikat	WTP	WTP	WTP
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi	Predikat	B	BB	B
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif disetiap tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas PP dan PA	Persen	13	24	13.13
			16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	Persen	12,5	14	10,4
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas PP dan PA	Persen	95	90	85.93
			16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Disdukcapil	Persen	95	90	85.93
			16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran / (Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur)	Disdukcapil	Persen	81,51%	85,75%	85,75%

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, permasalahan yang muncul juga berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang disajikan pada Bab 2 dokumen ini. Mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan konsumen ke arah gaya hidup sehat dan pembangunan berkelanjutan. maka permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pembangunan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kualitas Pendidikan
- 2) Belum meratanya layanan kesehatan
- 3) Belum optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata
- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- 7) Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga
- 8) Belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa Permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.110
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas pendidikan	Belum meratanya akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, 2. keterbatasan kemampuan biaya pendidikan dan informasi bantuan pendidikan, 3. belum selarasnya penerapan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja (link and match) 4. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik produktif di bidang keahliannya masih kurang 5. pembangunan dan pengembangan sarana

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>dan sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa masih belum memadai</p> <p>6. Pembangunan perpustakaan sekolah belum merata pengembangan sarana prasarana perpustakaan sekolah</p> <p>1. rendahnya minat baca</p>
2	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Fasilitas dan kualitas layanan kesehatan belum memenuhi standar	<p>1. Masih rendahnya mutu sarana pelayanan kesehatan</p> <p>2. Belum optimalnya pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>3. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan</p> <p>4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan pendekatan <i>contiuum of care</i></p> <p>5. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan stunting</p> <p>2. Masih lemahnya pengelolaan system Jaminan Kesehatan (JKN)</p>
3	Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja	<p>3. Rendahnya kualitas tenaga kerja</p> <p>4. Masih kurangnya system informasi bursa kerja</p> <p>5. Masih rendahnya pertumbuhan sektor UMKM dan IKM</p> <p>6. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana latihan kerja</p>
4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	Belum optimalnya pengelolaan di sektor agraris	<p>5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi.</p> <p>7. Masih minimnya penyuluh pertanian</p>
5	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<p>1. Belum optimalnya promosi pariwisata</p> <p>2. Penurunan jumlah pengunjung wisatawan akibat pandemi covid-19</p> <p>3. SDM terkait pengembangan pariwisata masih terbatas</p> <p>6. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata</p>
6	Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan prestasi olahraga	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	<p>1. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun Perangkat Daerah belum dikendalikan dengan baik dan bersistem</p> <p>2. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal</p> <p>3. Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum maksimal</p> <p>6. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat</p>
7	Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	Kurangnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga belum	<p>1. Belum maksimalnya kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>2. Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Perlindungan dan jaminan social belum optimal</p> <p>7. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga</p>
8	Belum optimalnya	Rendahnya Kuantitas dan	<p>1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih</p>

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah	Kualitas Infrastruktur pembangunan daerah	masih minim pengembangan 2. Belum maksimalnya 3. penataan Kawasan permukiman kumuh 4. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik 5. Belum meratanya akses komunikasi masyarakat 4. Belum optimalnya pelayanan persampahan

2.1.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.111
Identifikasi Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		
A.1	PELAYANAN DASAR		
1	PENDIDIKAN		
1.1	APK SM Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi Sekolah dan Fasilitas Sekolah); - Tidak tersambungannya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industry; - Masih kurangnya SDM Tenaga Pendidik/ Guru SMK yang mempunyai kompetensi yang baik serta produktif di bidang keahliannya; - Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa; - Belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (distance learning) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jangkauan Kewilayahan; - Perencanaan kebutuhan guru antar wilayah; - Akses ekonomi keluarga; - Standarisasi guru dan sekolah; - Identifikasi sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) - Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan fokus pada program keahlian yang sesuai dengan industri pendukung
1.2	APM SM Sederajat		
1.3	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4		
1.4	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi		
1.5	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4		
1.6	Persentase Guru SMK bersertifikasi		
2	KESEHATAN		
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak - Masih rendahnya status gizi masyarakat - Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan - Mengoptimalkan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) - Penurunan kasus gizi buruk, gizi kurang, wasting (kurus), dan stunting (pendek dan sangat pendek) - Menurunkan kejadian penyakit menular dan tidak menular
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)		
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup		
2.4	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan surveilans dan deteksi dini penyakit - Pemerataan tenaga kesehatan promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - Mengoptimalkan pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan - Meningkatkan mutu sarana pelayanan kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
3.1	PEKERJAAN UMUM		
3.1.1 3.1.2	Tingkat Kemantapan Jalan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kondisi jaringan jalan dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan sentra-sentra produksi di Sumatera Utara - Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan jalan - Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan antara lain pembebanan berlebihan dan bencana alam - Masih rendahnya kualitas kompetensi pelaku jasa konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi - Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan Kawasan strategis provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan memelihara infrastruktur jalan dan jembatan (konektivitas) menuju kawasan wisata, Pesisir Pantai Timur, Sentra Produksi, Daerah Perkotaan dan Daerah Tertinggal; - Membangun Infrastruktur jalan dan jembatan melalui sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). - Melakukan Optimalisasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan untuk memastikan jalan tetap fungsional
3.2	PENATAAN RUANG		
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanganan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air, layanan jaringan irigasi permukaan dan rawa. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal - Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan konservasi SDA dalam rangka kelangsungan keberadaan (kelestarian) daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air - Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui peningkatan OP dan Rehabilitasi Irigasi; - Peningkatan Pemanfaatan embung sebagai reservoir air bersih;

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari OPD Pengelola Sumber Daya Air, TKPSDA Wilayah Sungai, Komisi Irigasi, dan P3A/GP3A/IP3A. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip good governance sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat; - Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. - Cakupan pelayanan persampahan masih belum optimal - Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi yang banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan konservasi sumber daya air, peningkatan kesadaran masyarakat tentang resiko kerawanan banjir, longsor dan abrasi pantai serta mitigasi bencana; - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Sumber Daya Air; - Pengembangan Sistem Informasi SDA melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Penerapan pola hidup bersih dan sehat; - Peningkatan kualitas dan infratraktur pengolahan limbah. - Penyusunan dokumen pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.1 4.2 4.3	Akses Rumah Layak Huni Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan RTRW daerah belum mengakomodir tuntutan pengembangan wilayah, - Masih banyak penduduk yang menempati rumah tidak layak huni - Distribusi akses rumah layak huni di Sumatera Utara masih 53.55 persen; - Terapat Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara (Luas 10 s/d 15 Ha) sejumlah 1.310, 30 Ha pada 108 Desa / Kelurahan di 24 Kabupaten/Kota - Pembangunan Rumah Baru Oleh Developer Tidak Terhubung ke Fasilitas Umum Yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Memanfaatkan Sumber Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan CSR) - Meningkatkan Koordinasi dengan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi - Perencanaan pada Kawasan kumuh - Penanganan Secara Menyeluruh dan Terpadu Pada Kawasan Yang Sesuai Kewenangan Pemerintah, Kelompok Masyarakat dan Individu - Pembangunan PSU Permukiman - Sosialisasi dan penyadaran Publik Penyediaan Rumah Baru Serta Infrastruktur Permukimannya

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat masyarakat yang Tinggal di Kawasan Rawan Bencana Alam - Rencana Pembangunan dan Penataan Kawasan Oleh Pemerintah di Kawasan Permukiman Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Relokasi Warga Terdampak
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
5.1 5.2	<p>Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan</p> <p>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</p>	<p>Tingkat pelanggaran hukum masih cukup tinggi. Belum optimalnya penegakan Perda. Upaya penegakan Perda masih bersifat represif, yang menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat; Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.</p>	<p>Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dan pengusaha</p> <p>Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; Meningkatnya koordinasi antar instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan;</p>
5.3 5.4 5.5 5.6	<p>Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)</p> <p>Indeks Resiko Bencana</p>	<p>Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.</p>	<p>Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan bencana dan peringatan dini;</p> <p>Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan terutama di wilayah rawan bencana.</p>
6	SOSIAL		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Belum maksimalnya penanganan fakir miskin Belum optimalnya penanganan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat; Masih belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; menurunnya jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.	Pemberdayaan sosial fakir miskin dan kelompok rentan sosial ekonomi lainnya Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan dan Pengemis). Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di lingkungan sosial PMKS Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya
6.2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar		
B	URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR		
1	TENAGA KERJA		
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Balai Latihan Kerja. - Masih kurangnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja; - Belum maksimalnya penempatan tenaga kerja yang efektif - Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Balai Latihan Kerja - Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja. - Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; - Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja dan penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ketenagakerjaan;
1.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan		
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan; - Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; - Belum optimalnya kontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak melalui kabupaten/kota layak anak; - Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data terpilah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan; - Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan; - Menciptakan provinsi layak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak anak; - Pemanfaatan data terpilah
2.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)		
2.3	Rasio kekerasan terhadap Perempuan		
2.4	Rasio kekerasan terhadap Anak		
2.5	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)		
3 PANGAN			
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan ; Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan); Rendahnya pengawasan pangan yang beredar; Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu; Rendahnya kualitas SDM petani; Sistem pemasaran belum efisien dan berkeadilan (harga masih ditentukan pedagang); Minimnya jumlah penyuluh pertanian. persediaan yang belum bisa memenuhi kebutuhan	Ketersediaan pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas; Peningkatan penyuluhan pengembangan diversifikasi pangan dan gizi; Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian; Pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan perkarangan; Peningkatan sistem jaringan irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air.
3.2	Produksi Daging (ton)		
3.3	Produksi Telur (ton)		
3.4	Produksi susu (ton)		
4 LINGKUNGAN HIDUP			
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan air limbah dan sumber air	Penanaman bibit tanaman teduh dan tanaman hias di perkotaan;
4.2	Indeks Kualitas Udara		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
4.3 4.4 4.5 4.6	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air laut Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Semua komponen lingkungan mengalami penurunan kualitas, Sedangkan status mutu sungai-sungai lainnya didominasi cemar ringan; Kadar-kadar pencemar udara ambien masih berada dibawah baku mutu. Namun derajat keasaman air hujan terlihat semakin mengarah ke asam; Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca terus meningkat; Perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali, perubahan penutupan lahan tersebut telah mempengaruhi indeks tutupan lahan Sumatera Utara.	Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup; Peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup; Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30%.
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan; Belum maksimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Kurangnya sosialisasi pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik.	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil; Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Sosialisasi Pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota; Sosialisasi pentingnya tertibnya administrasi kebutuhan data pribadi masyarakat.

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
6.7	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya di laporkan		
6.8	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk		
6.9	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis		
7.0	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Pemanfaatan Data Kependudukan		
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
7.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Belum Optimanya kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat desa; Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat desa; Belum optimalnya pembinaan terhadap BUMDES maju Kurangnya akses pelayanan dasar pada desa mandiri	Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat desa; Peningkatan Badan Usaha Milik Desa Peningkatan Desa Mandiri
7.2	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		
7.3	Jumlah Bumdes Maju		
7.4	Jumlah Desa Mandiri		
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB mandiri; Pandemi covid 19 mempengaruhi akses terhadap layanan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);	Penguatan program Keluarga Berencana; Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan/ GDPK Kabupaten/Kota; Pengembangan Kampung KB.
8.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)		
8.3			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (stake holder dan masyarakat) dalam pengembangan program dan kegiatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Sumatera Utara.	
9	PERHUBUNGAN		
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum maksimal dan merata;	Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata;
9.2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Belum maksimalnya penyerahan asset terminal tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi;	Pembangunan simpul yang modern dan berkualitas, terintegrasi dengan Kawasan pariwisata dan integrasi antar moda
9.3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)	Pengembangan jaringan trayek angkutan jalan ke kawasan strategis dan pelayanan lintas penyeberangan antar kawasan
9.4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Belum maksimalnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah. (konektivitas jaringan)	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Belum optimalnya penyebaran informasi publik	Meningkatkan penyebaran Informasi public secara berkala di dukung oleh peningkatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi (SDM TIK) serta peningkatan kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok lainnya.
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Belum optimalnya pengintegrasian TIK dalam mendukung Sistem Pemerintah yang berbasis Elektronik; Belum maksimalnya pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif; Belum optimalnya fasilitas teknologi IT dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik;	Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara yang didukung dengan pengintegrasian data sebagai upaya mewujudkan 'Satu Data'. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
			akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
11.1	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk go digital. Belum optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM khususnya di daerah-daerah destinasi wisata Masih rendahnya kualitas produk UMKM untuk memasuki pasar ekspor Masih kurangnya akses permodalan UMKM	Onboard produk UMKM dalam e-catalogue; Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreativitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berwirausaha; Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM; Fasilitasi Akses Permodalan UMKM;
11.2	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya		
11.3	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya		
11.4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan		
11.5	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan		
11.6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi		
11.7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan		
12	PENANAMAN MODAL		
12.1	Investor PMDN (Proyek)	Belum optimalnya dukungan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam penerbitan regulasi kemudahan berinvestasi	Peningkatan Standar Pelayanan Adm. atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif; Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi; Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi; Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur;
12.2	Investor PMA (Proyek)		
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	Belum optimalnya integrasi sistem layanan perizinan terpadu	
12.4	Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)		
12.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT	
12.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)		Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik lengkap dan mudah diakses.
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Masih kurangnya tenaga keolahragaan yang bersertifikat dan pemanduan bakat (talent scouting); Belum maksimalnya pembinaan dan apresiasi kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi; Belum optimalnya upaya peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan; Belum optimalnya sinkronisasi antara organisasi olahraga dengan sekolah dalam hal pembibitan, dan pembinaan prestasi olahraga pelajar/ atlet pelajar yang menjadi cikal bakal atlet nasional di masa depan; Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertanding yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih.	Peningkatan pembinaan ketenagaolahragaan yang bersertifikat; Fasilitasi kepada atlet dalam hal meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri; Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi; Meningkatkan komitmen organisasi kepemudaan dalam melaksanakan UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
13.2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi		
	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)		
14	STATISTIK		
14.1	Data Statistik Sektoral	Masih minimnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral; Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan statistik sektoral.	Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan SDM di bidang Statistik.
14.2	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		
14.3	Rasio sistem pelayanan berbasis online		
15	PERSANDIAN		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung persandian dan keamanan informasi; Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi;	Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan di bidang Persandian.
16	KEBUDAYAAN		
16.1 16.2 16.3 16.4j	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan Belum maksimalnya penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata; Belum optimalnya pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan	Peningkatan sertifikasi SDM Kebudayaan Identifikasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Benda, Cagar Budaya dan Situs Budaya agar kelestariannya bisa terpelihara; Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah. Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah
17	PERPUSTAKAAN		
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Masih kurangnya koleksi buku terutama buku-buku best seller y Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan layanan per informasi/ digital/ E-Library; Belum optimalnya gerakan pasyarakat minat baca melalui baca serta dan promosi gerakan literasi di Sumatera Utara Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan (Pu Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan di Sumatera Utar Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas Pojokbaca/ Reading c meningkatkan indeks minat baca Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan p	Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku- buku best seller yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan perpustakaan; Pengembangan Perpustakaan Digital (e-Library); Sosialisasi dan Promosi Gerakan Literasi Nasional di Provinsi; Mengubah pola pikir masyarakat tentang perpustakaan melalui promosi-promosi yang kreatif secara berkelanjutan.

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
18	KEARSIPAN		
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara; Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi; Belum optimalnya penataan Kearsipan berbasis digital di OPD Pemprov;su; Belum dimilikinya pedoman tata cara kearsipan yang diberlakukan secara baku	Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		
B	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.1	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya; Belum optimalnya industri pengolahan perikanan; Belum optimalnya pengawasan UU fishing; Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah; Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan; Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil.	Kesinambungan sumber daya ikan; Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; Pengembangan atau inovasi penerapan teknologi kelautan dan perikanan secara pasif dan efektif; SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten; Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik; Dukungan investasi dari para pelaku usaha ; Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
1.2	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)		
1.3	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
1.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
1.5	Tingkat Konsumsi Ikan		
1.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1.7	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		
1.8	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)		
1.9	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²)		
2.0	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)		
2	PARIWISATA		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
2.1 2.2 2.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan Wisata	Perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata akibat Pandemi Covid-19. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara disebabkan pembatasan pergerakan sosial akibat Pandemi Covid-19 Kurang optimalnya aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat Kurang optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Kurang optimalnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan budaya	Peningkatan Implementasi Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) di kawasan objek wisata; Pengembangan objek wisata baru antara lain Desa Wisata, Ekowisata dan Wisata Budaya; Peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi di kawasan pariwisata; Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sertifikasi pelaku pariwisata, sosialisasi, pelatihan dan knowledge sharing; Peningkatan Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event, pameran, media sosial, dan media cetak-elektronik; Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN		
	Pertanian		
2.1 2.2 2.3	Produksi Tanaman Pangan 1. Padi (ton GKG) 2. Jagung (ton pipilan kering) 3. Kedele (ton) Produktivitas Tanaman Pangan 1. Padi (ton/Ha) 2. Jagung (ton/Ha) 3. Kedele (ton/ha) Produksi Tanaman Hortikultura 1. Bawang Merah (ton) 2. Cabe (ton) 3. Sayur-sayuran (ton)	Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Belum Mencukupi Kebutuhan Pemanfaatan Ketersediaan Air Ketersediaan Saprodi Dan Alsintan Masih Terbatas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan SDM Pertanian Masih Relatif Rendah	Memaksimalkan UPT Perbenihan dalam menghasilkan benih sumber, Menumbuhkembangkan penangkar-penangkar benih dan Fasilitasi Benih ke Kelompok Tani melalui bantuan Pemerintah Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Pompanisasi dan Embung Fasilitasi Sarana Produksi ke Kel. Tani melalui Bantuan Pemerintah, Pembangunan sarana berupa Rumah Kompos dan Penambahan Sarana alat mesin pertanian Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengaturan Pola Tanam dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
2.4	4. Buah - buahan (ton) Produktivitas Tanaman Hortikultura		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian dan Peningkatan Keterampilan Petani dan Kelompok Tani
2.5	1. Bawang Merah (ton) 2. Cabe (ton) 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Produksi Daging (ton) 3. Produksi Telur (ton) 4. Produksi susu (ton)		
Perkebunan			
2.6	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	Belum optimalnya pemanfaatan hasil perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi; Belum optimalnya kelembagaan petani; Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal; Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/konvensional; Masih rendahnya Mutu hasil produk perkebunan; Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil; Masih rendahnya kualitas dan SDM pertanian.	Penguatan peran kelembagaan Pertanian; Pelatihan bimbingan bidang Pertanian/Perkebunan dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui teknologi yang sesuai; Peningkatan pembangunan infrastruktur/jalan daerah Produksi Perkebunan; Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi yang melayani sentra-sentra Produksi Pertanian demi meningkatkan kualitas dan kuantitas Produksi Pertanian; Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian guna menciptakan benih unggul menuju kualitas dan produktifitas hasil pertanian yang tinggi.
2.7	Produksi		
	1. K. Sawit (ton) 2. Karet (ton) 3. Kopi Arabika (ton) 4. Kopi Robusta (ton) 5. Kelapa (ton) 6. Kakao (ton) 7. Komoditi perkebunan lainnya (ton)		
2.8	Laju pertumbuhan Produktifitas sektor perkebunan (%)		
2.9	NTP Perkebunan		
3.0	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB		
3 KEHUTANAN			
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	Masih kurangnya penanganan pelestarian hutan dan lahan kritis; Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara;	Meningkatnya penetapan tata batas Kawasan Hutan di Provsu; Penetapan regulasi terkait fungsi Kawasan Kehutanan;
3.2	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)		
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
		<p>Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain; Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan; Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Belum adanya Peraturan Daerah terkait pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Utara.</p>	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap konservasi serta upaya menanam dan memelihara pohon secara terus-menerus; Menetapkan Perda terkait Pengelolaan Hutan.</p>
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
<p>4.1 4.2 4.3</p>	<p>Rasio Elektrifikasi Persentase Desa yang teraliri Listrik Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda</p>	<p>Tidak meratanya Rasio Elektrifikasi di Sumatera Utara Potensi Energi Alternatif yang belum dimanfaatkan sepenuhnya; Masih rendahnya Pemanfaatan energi baru terbarukan; Belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam di Sumatera Utara</p>	<p>Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral geologi dan air tanah Meningkatkan pengelolaan energi dan energi baru terbarukan Meningkatkan pengelolaan mineral dan batubara</p>
5	PERDAGANGAN		
<p>5.1 5.2</p>	<p>Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK Ekspor Non Migas</p>	<p>Belum maksimalnya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas; Kurang optimalnya kualitas produk yang memenuhi standard ekspor; Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha ekspor Kurang optimalnya promosi dagang baik di dalam negeri maupun luar negeri Masih rendahnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; Belum optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;</p>	<p>Peningkatan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; Peningkatan kualitas produk ekspor; Peningkatan SDM pelaku usaha ekspor Peningkatan promosi dagang dan perluasan akses pasar ekspor. Peningkatan pemasaran dan sosialisasi penggunaan produk Dalam Negeri Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
6	PERINDUSTRIAN		
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri dan industri yang bernilai tambah;	Peningkatan sektor industri bernilai tambah;
6.2	Ekspor Non Migas	Belum optimalnya kualitas produk industri kecil menengah;	Peningkatan kualitas produk industri kecil menengah melalui peningkatan sarana dan prasarana dan sertifikasi produk industri kecil menengah;
6.3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Belum optimalnya kualitas SDM pelaku industri kecil menengah;	Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah melalui pelatihan dan pendampingan pelaku industri kecil menengah;
6.4	Pertumbuhan Industri - Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang - Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Belum optimalnya promosi produk industri kecil menengah; Masih rendahnya informasi berbasis digital Belum optimalnya penerapan teknologi industri dan sustainable industry (green industry);	Peningkatan promosi dan perluasan pasar produk industri kecil menengah melalui marketplace dan penyelenggaraan event/pameran nasional dan internasional ; Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; Pengendalian Implementasi Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara terutama dalam penerapan green industry.
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
8.1	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;	Kesinambungan sumber daya ikan;
8.2	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Belum optimalnya industri pengolahan perikanan;	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
8.3	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Belum optimalnya pengawasan UU fishing;	Pengembangan atau inovasi penerapan teknologi kelautan dan perikanan secara pasif dan efektif;
8.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah;	SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten;
8.5	Tingkat Konsumsi Ikan	Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan;	Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik;
8.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil.	Dukungan investasi dari para pelaku usaha ;
8.7	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
8.8	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)		
8.9	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²)		
8.10	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
B	URUSAN PENUNJANG		
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1.1	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	Belum optimalnya kelengkapan dan pemanfaatan data informasi dalam rumusan analisis perencanaan pembangunan daerah; Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dan target capaian prioritas pembangunan daerah.	Kurangnya SDM Perencana; Belum semua Perangkat Daerah menginput kelengkapan data ke dalam aplikasi; penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
1.2	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah		
2	KEUANGAN		
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah; Perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Perlu melakukan optimalisasi retribusi daerah, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD; perlu ditingkatkan kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis IT; Masih lemahnya inventarisir dan pengawasan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Peningkatan kapasitas SDM otoritas pajak; Kerjasama pertukaran data dan informasi perpajakan dengan pemerintah pusat maupun institusi lainnya; Peningkatan tarif pajak dan retribusi daerah; Penggunaan teknologi informasi dalam pajak; Keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan.
2.2	Penetapan APBD		
2.3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban		
2.4	Persentase tanah milik pemprov yang disertifikasi		
2.5	Persentase laporan Aset daerah yang disusun		
2.6	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota		
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
3.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Belum memadainya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah;	Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem e-samsat Paten yang merupakan amanat koordinasi, supervise dan pencegahan KPK;
3.2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
3.3 3.4 3.5	<p>Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya</p> <p>Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya</p> <p>Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya</p>	<p>Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah hal ini terutama penyediaan sarana dan prasarana di tempat pembayaran pajak;</p> <p>Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;</p> <p>Belum optimalnya penegakan hukum;</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemungut pajak dan retribusi daerah;</p> <p>Kebutuhan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dituntut semakin cepat untuk memenuhi permintaan masyarakat.</p> <p>Kondisi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pembelian kendaraan bermotor menurun yang berdampak kepada menurunnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat;</p> <p>Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan;</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin Electronic Data Capture (EDC), maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh mitra Payment Point Online Bank (PPOB);</p>
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
3.1 3.2 3.3	<p>Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan</p> <p>Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan</p> <p>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal</p>	<p>Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis digital;</p> <p>Masih banyak jumlah ASN Provinsi Sumatera Utara yang belum mengikuti Diklat Manajerial, Diklat Pemerintahan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;</p> <p>Masih belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pendukung pelatihan /diklat</p> <p>Masih diperlukan optimalisasi kualitas dan kuantitas pendidik kediklatan</p> <p>Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholders terkait untuk peningkatan distribusi pemerataan diklat dan pelatihan terutama terkait pemenuhan demand diklat sesuai dengan perkembangan zaman 4.0</p>	<p>Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>Peningkatan optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi;</p> <p>optimalisasi penataan Kearsipan berbasis digital di OPD Pemprov;</p> <p>Peningkatan fasilitas, mutu dan kualitas tenaga pendidik kediklatan.</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
		Penguatan koordinasi yang optimal antar lintas OPD dan kabupaten/kota terkait identifikasi kebutuhan diklat prioritas yang dibutuhkan serta mekanisme alokasi penganggaran yang dibutuhkan (mekanisme kontribusi)	
4	KEPEGAWAIAN DAERAH		
4.1	Nilai Sistem Merit		
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.1	Persentase Implementasi Rencana	Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang disampaikan kepada perangkat daerah; Belum efektifnya sosialisasi terhadap hasil penelitian Balitbang kepada Perangkat daerah/pemangku kepentingan; Belum melakukan koordinasi/belum melibatkan Perangkat Daerah dalam hal memantau sejauh mana hasil kelibangan yang telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian
5.2	Kelibangan		
5.3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan		
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah		
6	PENGAWASAN		
6.1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Inspektorat Provinsi; Masih belum adanya Kendali Mutu dan Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis; Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas.	meningkatkan standar operasional pemeriksaan
6.2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip \geq B		
6.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		
6.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen KemendagriI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		
6.5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
6.6 6.7 6.8	Level kapabilitas APIP Inspektorat Pengaduan Masyarakat Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit		
7	PENGHUBUNG		
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	- Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat Peningkatan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
8	SEKRETARIAT DEWAN		
8.1	Persentase capaian tingkat kepuasan atas fasilitasi sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat	Persamaan persepsi dalam menyikapi masalah-masalah pembangunan.
9	SEKRETARIAT DAERAH		
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Persentase penyelesaian batas daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Persentase Kerjasama yang difasilitasi Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah; Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT; Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani; Masih belum maksimalnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT.	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
<p>9.7</p> <p>9.8</p> <p>9.9</p> <p>9.10</p> <p>9.11</p> <p>9.12</p> <p>9.13</p> <p>9.14</p> <p>9.15</p> <p>9.16</p> <p>9.17</p> <p>9.18</p> <p>9.19</p> <p>9.20</p>	<p>Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.</p> <p>Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM</p> <p>Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah</p> <p>Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah</p> <p>Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu</p> <p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</p> <p>Indeks Pelayanan Publik</p> <p>Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah</p> <p>Nilai capaian pelaporan kinerja</p> <p>Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan</p> <p>Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu</p> <p>Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan</p> <p>Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah</p>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	4	5
C	Unsur Pemerintahan Umum		
1.1 1.2 1.3	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas Jumlah Pembinaan Ormas Aktif Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan belum optimalnya penyelenggaraan ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Sosialisasi dan pemahaman wawasan kebangsaan terhadap masyarakat Sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba Kampung bers

2.5. Isu Strategis

Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok diatas juga berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP. Maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Belum Terpenuhinya Pemenuhan Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan.**

Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah, perlunya menjamin mutu dan peningkatan tata kelola pendidikan. Selain itu Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya perlu penguatan dan penyelarasan penerapan kurikulum Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja dalam mendukung implementasi program “*link and match*” yang memungkinkan skill tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya.

2. **Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Rendahnya akses kesehatan serta belum maksimalnya penanganan Kekurangan Gizi bagi ibu hamil dan anak, disisi lain penyakit menular dan tidak menular saat ini mulai meningkat. Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan melaksanakan gaya hidup sehat melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) perlu ditingkatkan

3. **Belum optimalnya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan**

Kurangnya Kompetensi Tenaga Kerja sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Belum maksimalnya Bantuan usaha produktif dan akses permodalan, serta kurangnya pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha.

4. **Belum optimalnya peningkatan daya saing melalui sektor agraris**

Masih sulit mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha sektor agraris, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah menjadi hal yang penting untuk peningkatan daya saing yang saat ini belum

maksimal. Selain itu dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian masih kurang serta banyaknya penduduk atau tenaga kerja di sektor agraris memerlukan Perlindungan bagi tenaga kerja di sektor agraris.

5. Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

Digitalisasi Promosi Pariwisata melalui media sosial sebagai sarana mempromosikan suatu objek wisata belum maksimal serta Penataan Kawasan Wisata berbasis tematik (agro, eko dan wisata) serta cagar budaya masih kurang. di Provinsi Sumatera Utara Standarisasi Layanan Pariwisata dan SDM Pariwisata untuk meningkatkan kepuasan pengunjung belum berjalan dengan maksimal dan masih banyak kendala.

6. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya mendorong Ketercapaian Reformasi Birokrasi (RB) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Daerah.. Peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan agar sasaran dengan indikator-indikator yang dijadikan acuan pengukuran terhadap keberhasilan capaian program bisa terlaksana. untuk mewujudkan *good governance* perlu ada reformasi dalam birokrasi yang menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik.

7. Belum Optimalnya Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga

- a. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum tertangani, Masalah kesejahteraan sosial yang utama adalah Kemiskinan, belum meratanya bantuan kepada masyarakat miskin serta pelayanan dasar mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar didalam panti yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di dalam panti belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Selain masalah sosial peningkatan sarana dan prasarana olahraga juga belum optimal dalam rangka persiapan PON 2024
- c. Kondusifitas sosial politik dan Persiapan awal pilpres dan pilkada serentak

8. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Pengembangan wilayah yang saat ini dihadapi yakni penurunan ketimpangan antar wilayah, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, pengelolaan urbanisasi, dan pemanfaatan ruang. Pembangunan Infrastruktur ke depan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, memenuhi prasarana dasar, dan mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan.

2.6. Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semakin terkendali, ditandai dengan penurunan angka kasus positif dan aktif, yang diikuti penurunan persentase keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19. Sampai 7 September 2021, tercatat kasus positif kumulatif di Sumut telah mencapai 99.854, meningkat 448 kasus dibanding hari sebelumnya. Sedangkan kasus sembuh mencapai 80.727 atau bertambah 1.717 kasus. Dengan demikian, kasus aktif turun 1.309 kasus, sehingga jumlah kasus aktif kumulatif di Sumut menjadi 16.608. Indikator penting lainnya adalah positivity rate Covid-19 Sumut yang terus menurun hingga 8,31 persen, lebih kecil dari capaian nasional yang masih berkisar 10,51 persen.

Dengan tren yang terus konsisten, dimungkinkan positivity rate Sumut akan terus menurun hingga di bawah standar WHO, yaitu di bawah 5 persen

2.7. Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2023

Permasalahan pembangunan dan isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2023 merupakan cakupan dari prioritas pembangunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Pada tabel berikut dapat dilihat konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2023.

Tabel 2.112
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Permasalahandan Isu Strategis pada RKPD 2023

PRIORITAS PROVSU	PERMASALAHAN RKPD 2023	ISU STRATEGIS RKPD 2023
1. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	1. Belum optimalnya kualitas Pendidikan	1. Sarana dan prasarana pendidikan serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah , Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya perlu penguatan dan penyesuaian penerapan kurikulum Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja dalam mendukung implementasi program “link and match” yang memungkinkan skill tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	2. Belum Optimalnya Derajat kesehatan masyarakat	2. Pemenuhan akses melalui peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, Penanganan kekurangan gizi bagi ibu hamil dan anak, Penanganan penyakit menular dan tidak menular, Penguatan PHBS, Belum meratanya SDM Kesehatan,
3. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	3. Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Bantuan usaha produktif dan akses permodalan, pemberian insentif dan Kemudahan berusaha
4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	4. Peningkatan Produktifitas dan nilai tambah, Peningkatan sarana dan prasarana usaha pertanian, Perlindungan bagi tenaga kerja di sektor agraris
5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata	5. Digitalisasi Promosi Pariwisata, Penataan Kawasan Wisata berbasis tematik(agro, eko dan wisata) serta cagar budaya, Standarisasi layanan Pariwisata dan SDM Pariwisata

PRIORITAS PROVSU	PERMASALAHAN RKPD 2023	ISU STRATEGIS RKPD 2023
<p>6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi</p> <p>7. Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat dan Olahraga</p> <p>8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan</p>	<p>6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p> <p>7. Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan prestasi olahraga</p> <p>8. Belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah</p>	<p>6. Akuntabilitas Kinerja, layanan kinerja</p> <p>7. Perlindungan sosial terhadap masyarakat, Pemenuhan SPM Panti, Peningkatan sarana dan prasarana pada sektor olahraga, Bantuan olahraga untuk persiapan PON, Kondusifitas sosial politik dan Persiapan awal pilpres dan pilkada serentak, FKUB,</p> <p>8. Konektifitas Peningkatan kualitas infrastruktur</p>

BAB III**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH****3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perbaikan ekonomi Sumatera Utara berlanjut dan mencatat pertumbuhan 3,90% (yoy) pada triwulan I-2022. Akselerasi ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan penurunan kasus COVID-19, pelonggaran restriksi mobilitas, berlanjutnya akselerasi vaksinasi serta belanja pemerintah yang meningkat di akhir tahun. Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat 2,61% (yoy) telah keluar dari zona kontraksi. Aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran menunjukkan perbaikan. Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, menguatnya harga komoditas, dan kontinuitas jaring pengaman sosial dari pemerintah.

Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 1,71%, cenderung berada pada batas bawah rentang sasaran $3\% \pm 1\%$. Rendahnya inflasi dipengaruhi akibat masih belum pulihnya permintaan masyarakat terutama dari kebijakan pembatasan mobilitas secara proporsional yang diberlakukan pada periode Natal dan Tahun Baru. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2022 diperkirakan tetap rendah dan berada di dalam rentang sasaran inflasi $3\% \pm 1\%$, namun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Terus menurunnya kasus COVID-19 seiring dengan penanganan kesehatan dari Pemerintah diperkirakan dapat menjaga pemulihan perekonomian terus berlanjut. Tekanan inflasi terutama berasal dari meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan membaiknya pendapatan dan perekonomian, tren peningkatan harga komoditas dunia yang berdampak pada komoditas domestik strategis, dan potensi peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi. Peningkatan inflasi Tahun 2023 diperkirakan masih terkendali dan mengarah pada rentang sasaran inflasi Provinsi Sumatera Utara.

Perekonomian Sumatera Utara pada Tahun 2023 diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi seiring dengan akselerasi program vaksinasi dan tercapainya target *herd immunity* serta aktivitas yang kembali normal. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan restrukturisasi kredit UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran social safety net bagi masyarakat terdampak melalui APBD.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Menurut laporan Global Economic Prospects terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat. Perang di Ukraina telah memicu krisis kemanusiaan yang membutuhkan penyelesaian damai. Pada saat yang sama, kerusakan ekonomi akibat konflik akan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan global yang signifikan pada tahun 2022 dan menambah inflasi. Harga bahan bakar dan makanan telah meningkat pesat, sehingga memukul populasi rentan di negara-negara berpenghasilan rendah. Pertumbuhan global diproyeksikan melambat dari perkiraan 6,1 persen pada 2021 menjadi 3,6 persen pada 2022 dan 2023. Ini adalah 0,8 dan 0,2 poin persentase lebih rendah untuk 2022 dan 2023 daripada yang diproyeksikan pada Januari. Di luar 2023, pertumbuhan global diperkirakan akan turun menjadi sekitar 3,3 persen dalam jangka menengah. Kenaikan harga komoditas akibat perang dan meluasnya tekanan harga telah menyebabkan proyeksi inflasi 2022 sebesar 5,7 persen di negara maju dan 8,7 persen di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang—1,8 dan 2,8 poin persentase lebih tinggi dari yang diproyeksikan Januari lalu. Upaya multilateral untuk menanggapi krisis kemanusiaan, mencegah fragmentasi ekonomi lebih lanjut, menjaga likuiditas global, mengelola tekanan utang, mengatasi perubahan iklim, dan mengakhiri pandemi sangat penting. Prediksi ini disampaikan IMF dalam laporan terbarunya World Economic Outlook Update edisi April 2022.

Pemulihan ekonomi global yang berlangsung termasuk di Indonesia dibayangi tiga fenomena utama pada beberapa waktu terakhir. Pertama, normalisasi kebijakan negara maju yang mulai terindikasi dari kenaikan suku bunga AS. Kedua, dampak luka memar yang berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi, antara lain terhadap pemulihan di sektor dunia usaha dan upaya transformasi di sektor riil untuk mendorong daya saing dan produktivitas, serta transisi ke ekonomi hijau dan keuangan yang berkelanjutan. Ketiga, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada pemulihan ekonomi global berupa kenaikan harga-harga komoditas global, baik energi dan pangan yang berdampak pada inflasi sejumlah negara. Dampak lainnya adalah gangguan dalam mata rantai perdagangan global yang mempengaruhi distribusi dan volume perdagangan serta pertumbuhan pada ekonomi global, serta pada jalur keuangan dimana terjadi pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (*safe haven asset*) sehingga dapat berdampak pada stabilitas eksternal dan nilai tukar.

International Monetary Fund (IMF) menilai pelemahan ekonomi global setahun ke depan akan dipengaruhi risiko penyebaran Covid-19 varian Omicron,

gangguan rantai pasokan, volatilitas harga energi, inflasi, ketegangan geopolitik, serta ancaman bencana alam terkait perubahan iklim. Kendati demikian, World Bank (WB) meramalkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara akan tetap stabil bahkan meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) India tahun 2023 diproyeksikan stabil seperti tahun 2022, yakni di level 9 persen. China diproyeksikan tumbuh dari 4,0-5,0 persen menjadi 5,3 persen, Indonesia tumbuh dari 4,6-5,1 persen menjadi 5,1 persen, Vietnam tumbuh dari 4,0-5,3 persen menjadi 6,5 persen, Thailand tumbuh dari 2,6-2,9 persen menjadi 4,3 persen, Malaysia tumbuh dari 4,8-5,5 persen menjadi 4,5 persen, Filipina diproyeksikan tumbuh dari 4,9-5,7 persen menjadi 5,7 persen. Ada juga beberapa negara yang diramalkan mengalami penurunan PDB namun tetap terhitung cukup kuat di skala global, yaitu Malaysia tumbuh dari 4,8-5,5 persen menjadi 4,5 persen. Untuk menghadapi tantangan ekonomi tahun 2023, IMF mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan penanganan pandemi, mengencarkan vaksinasi Covid-19, memperkuat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi untukantisipasi bencana perubahan iklim, serta menjaga likuiditas melalui kerja sama internasional. Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia tahun 2022 sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini. Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat di tahun 2023. Berikut proyeksi beberapa lembaga Ekonomi Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi dunia:

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023						
	WB		ADB (APR 22)		OE (APR 22)	
	2022 (APR 22)	2023 (JAN 22)	2022	2023	2022	2023
World	-	3,2	-	-	3,4	3,2
Major Economies	-	2,3	-	-	3,1	2,3
 Amerika Serikat	-	2,6	3,9	2,3	3,1	2,0
 Euro Area	-	2,1	3,3	2,6	2,9	2,7
 Jepang	-	1,2	2,7	1,8	2,4	2,3
Emerging Markets	-	4,4	-	-	3,7	4,3
 China	4,0 – 5,0	5,3	5,0	4,8	4,8	5,4
 Indonesia	4,6 – 5,1	5,1	5,0	5,2	5,7	5,7
 Vietnam	4,0 – 5,3	6,5	6,5	6,7	7,1	8,3
 Thailand	2,6 – 2,9	4,3	3,0	4,5	4,8	6,4
 Malaysia	4,8 – 5,5	4,5	6,0	5,4	6,1	6,4
 Filipina	4,9 – 5,7	5,7	6,0	6,3	6,8	5,8
 Brazil	-	2,7	-	-	0,9	1,4
 India	-	6,8	7,5	8,0	7,3	5,8

Keterangan:  Penurunan dari proyeksi periode sebelumnya
 Peningkatan dari proyeksi periode sebelumnya

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan dan East Asia and The Pacific Economic Update April 2022, Asian Development Outlook (ADO) ADB Apr 2022, OE Database Januari dan April 2022

3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 persen di 2023. “Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0 persen, sedangkan

Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, sebut Febrio, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 189.491,36 miliar; Industri Pengolahan sebesar Rp. 167.886,09; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 162.578,56; Konstruksi sebesar Rp. 115.754,38. Sedangkan atas dasar harga konstan, angka nilai tersebut mencapai Rp. 547.651,82 miliar tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 141.601,18 miliar; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 98.560,07 miliar; Industri Pengolahan sebesar Rp. 97.928,00; Konstruksi sebesar Rp. 68.300,49.

Pada triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 225.419,47 miliar tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 51.623,02 miliar; Industri Pengolahan sebesar Rp. 44.156,66 miliar; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 42.272,40 miliar; Konstruksi sebesar Rp. 29.631,49 miliar. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut Harga Konstan mencapai Rp. 138.880,29 miliar tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 36.306,41 miliar; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 25.200,48 miliar ; Industri Pengolahan sebesar Rp. 24.473,35 miliar; Kontruksi sebesar Rp. 16.959,45 miliar; Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.2
PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				Harga Konstan (Milyar Rupiah)			
		2019	2020	2021	TW.I 2022	2019	2020	2021	TW.I 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164.152,76	173.074,95	189.491,36	51.623,02	133.726,02	136.327,03	1 141.601,18	36.306,41
2	Pertambangan dan Penggalian	10.160,53	10.373,47	10.710,15	2.744,37	7.099,79	6.936,06	7.069,09	1.768,53
3	Industri Pengolahan	152.246,63	156.503,61	167.886,09	44.156,66	97.362,10	96.548,31	97.928,00	24.473,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	908,22	932,38	986,94	259,05	728,79	751,85	788,92	203,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	796,70	831,19	870,54	219,92	516,23	535,77	555,17	139,47
6	Konstruksi	113.764,69	110.146,70	115.754,38	29.631,49	69.212,03	66.843,31	68.300,49	16.959,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	150.489,01	153.226,38	162.578,56	42.272,40	96.936,19	95.120,46	98.560,07	25.200,48
8	Transportasi dan Pergudangan	40.566,53	36.409,27	35.869,85	9.466,23	25.786,50	22.492,59	21.676,36	5.634,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.379,42	17.692,13	17.663,47	4.543,34	13.209,12	11.985,59	11.888,96	3.024,86
10	Informasi dan Komunikasi	17.139,67	18.467,11	20.094,28	5.297,55	15.375,56	16.323,91	17.386,19	4.505,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	23.344,41	23.529,58	25.545,12	6.993,21	15.138,89	15.334,76	16.017,94	4.237,24
12	Real Estate	40.942,91	42.704,93	43.912,94	11.222,63	22.792,55	23.149,98	23.728,14	6.005,42
13	Jasa Perusahaan	8.667,23	8.692,10	8.847,57	2.337,08	4.950,74	4.717,73	4.711,10	1.217,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29.461,86	30.147,21	30.457,51	7.209,39	17.736,89	17.803,30	18.174,36	4.314,34
15	Jasa Pendidikan	14.767,59	15.489,68	16.017,36	4.042,88	10.924,95	11.091,33	11.429,92	2.883,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.155,28	8.374,06	8.499,17	2.186,11	5.207,26	5.079,18	5.092,08	1.301,65
17	Jasa Lainnya	4.665,51	4.593,54	4.685,66	1.214,13	2.810,24	2.705,20	2.743,87	704,55
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		799.608,95	811.188,31	859.870,95	225.419,47	539.513,85	533.746,36	547.651,82	138.880,29

Sumber : BPS Sumut, 2022

Ekonomi Sumatera Utara tahun 2021 tumbuh sebesar 2,61 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 3,63 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen; dan Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar 0,14 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2010 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,63 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,81 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 0,14 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,99 persen;

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,03 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 50,79 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 38,83 persen; Komponen PMTB sebesar 30,56 persen; Komponen PK-P sebesar 6,81 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,73 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86

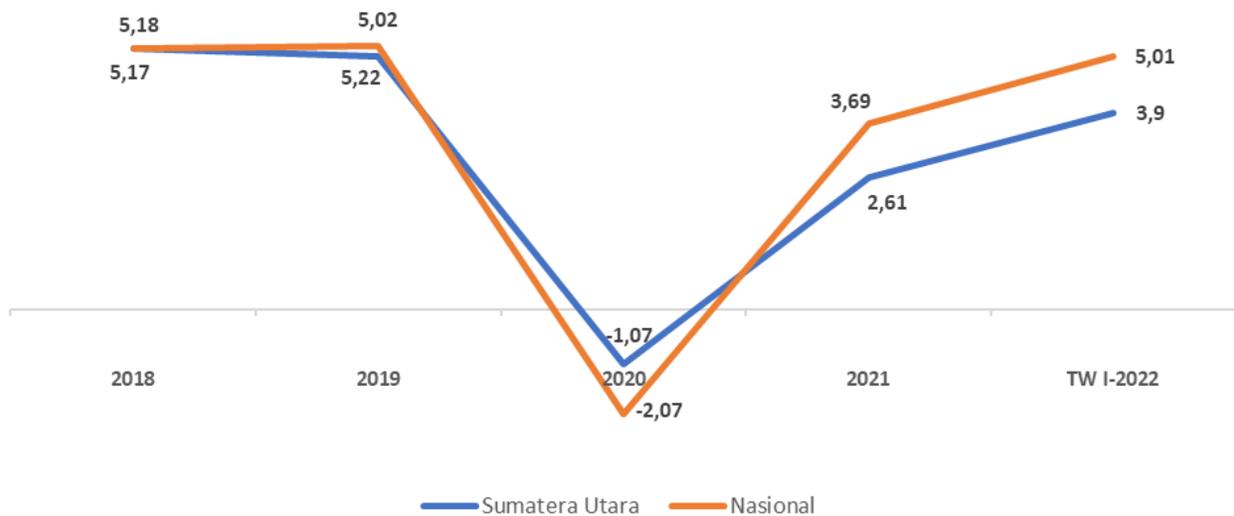
persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 29,57 persen.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			TW I 2022	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021		2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,13	1,95	3,87	1,29	20,53	21,34	22,04
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	0,03	1,27	1,28	1,25
C.	Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	0,12	19,04	19,29	19,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,01	0,11	0,11	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	0,00	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	0,31	14,23	13,58	13,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	-1,87	3,62	1,00	18,82	18,89	18,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	0,23	5,07	4,49	4,17
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	0,09	2,42	2,18	2,05
J.	Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	0,23	2,14	2,28	2,34
K.	Jasa Keuangan dan Ausransi	1,92	1,29	4,46	0,22	2,92	2,90	2,97
L.	Real Estat	4,84	1,57	2,50	0,14	5,12	5,26	5,11
M,N.	Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	0,06	1,08	1,07	1,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	0,37	2,08	-0,01	3,68	3,72	3,54
P.	Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	0,08	1,85	1,91	1,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	0,07	1,02	1,03	0,99
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,03	0,58	0,57	0,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,22	-1,07	2,61	3,90	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumut, 2021

Gambar 3.1
Laju Perekonomian Sumut Tahun 2018 s/d Triwulan I-2022 (persen)



Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	53,67	52,22	50,79
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,96	0,93	0,86
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	7,18	6,88	6,81
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	30,85	30,64	30,56
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	1,44	1,90	1,73
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-2,05	-10,31	15,09	33,41	33,18	38,83
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,84	-14,87	18,34	27,51	25,73	29,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,22	-1,07	2,61	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumut, 2021

3.1.4. Proyeksi Perekonomian Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terjadinya herd immunity serta aktivitas ekonomi yang berangsur pulih. Meskipun Jika skenario perang di Ukraina berlangsung berkepanjangan

hingga tahun 2023, beberapa negara mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Asumsi:

1. Kondisi geopolitik imbas perang Rusia Ukraina menyebabkan sanksi terhadap Rusia yang berdampak terhadap pasokan sumber daya energi global;
2. Tingkat keyakinan konsumen Eropa dan pasar keuangan terpengaruh. Konflik antara Rusia dan Barat diperkirakan meningkat akibat perang yang berkepanjangan.

Dengan asumsi di atas maka ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,00-6,00% dengan nilai tengah 5,50%.

Sebagai pembandingan dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2022 tercatat sebesar 3.30-4.30 % dan Tahun 2023 tercatat sebesar 4.50-5.50%.
2. Berdasarkan hasil rakortek Tahun 2022, Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,6 %;
3. Berlanjutnya recovery pertumbuhan ekonomi, kenaikan permintaan domestik dan eksternal, percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi.
4. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah dan lanjutan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,00-6,00% dengan nilai tengah 5,50%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)					
	Realisasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	TW I 2022	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	3,87	1,29	3.40 - 4.40	4.40-4.80
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	0,03	2.50 - 3.50	3.50-3.90
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	0,12	2.80 - 3.80	4.00-4.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,01	3.80 - 4.80	5.40-5.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,62	0,00	3.50 - 4.50	5.00-5.40
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	0,31	3.30 - 4.30	4.50-4.90
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	3,62	1,00	3.80 - 4.80	5.80-6.20
H. Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	0,23	3.40 - 4.40	5.40-5.80
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	0,09	4,60 - 5.60	5.60-6.00
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	0,23	5.70 - 6.70	6.70-7.10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	0,22	4.00 - 5.00	5.00-5.40
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	0,14	2.90 - 3.90	3.90-4.30
M,N. Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	0,06	2.00 - 3.00	3.00-3.40
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	8,11	0,73	2,08	-0,01	4.50 - 5,50	5.50-5.90
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	0,08	3,00 - 4,00	4.00-4.40
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	0,07	3.00 - 4.00	4.00-4.40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,03	3.50 - 4.50	4.50-4.90
PDRB	5,22	-1,07	2,61	3,90	4,00-5,00	5,00-6,00

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2022, Data diolah

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2021 dan 2022, Sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong

konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga. Tabel di berikut ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

Tabel 3.6
Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Pengeluaran ADHK (Persen)					
	KONDISI AWAL (REALISASI)				TARGET	
	2019	2020	2021	TW I 2022	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	1,78	3,60 - 4,60	4,60-5,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,04	1,60- 2,60	2,60-3,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	-0,09	3,10 - 4,10	4,10-4,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	1,78	2,60 – 3,60	3,60-4,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-2,05	-10,31	15,09	5,72	9,70 - 10,70	15,30-15,60
7. Impor Luar Negeri	-3,84	-14,87	18,34	5,26	4,60 - 5,60	4,00-4,40
P D R B	5,22	-1,07	2,61	3,90	4,00-5,00	5,00-6,00

Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2022

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama antara lain:

- a. Sektor pertanian melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (SITANTRI); bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
- b. Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
- c. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;

- d. Sektor investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
2. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan integral perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber - sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (*money follow program priority*). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah dan juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut

secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal APBN dan APBD telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari sisi penerimaan pajak, retribusi dan juga revitalisasi dan restrukturisasi BUMD;
2. Optimalisasi Kerjasama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam membiayai pembangunan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan infrastruktur yang ada sementara anggaran yang tersedia terbatas;
3. Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis. Pinjaman daerah dilakukan dengan mempertimbangkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman.

3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diperkirakan membaik dan bergerak positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 pasca pandemi Covid-19. Kemampuan keuangan daerah tidak terlepas dari ruang fiskal yang tersedia dari neraca pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pajak secara massif, dan optimalisasi serta ekstensifikasi retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU, & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Struktur keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 menggambarkan APBD Provinsi Sumatera Utara terus yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa komponen Pendapatan dan

Belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19 tersebut.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**	% Pertumbuhan			
I	PENDAPATAN DAERAH	13.079,60	12.916,36	14.034,04	12.011,63	13.300,06	(1,25)	8,65	(14,41)	10,73
1.1	Pendapatan asli daerah	5.761,27	5.531,24	6.402,71	6.819,01	8.101,94	(3,99)	15,76	6,50	18,81
1.2	Pendapatan Transfer	7.300,65	7.347,75	7.518,18	5.093,35	5.093,35	0,65	2,32	(32,25)	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	17,68	37,37	113,14	99,27	104,77	111,39	202,73	(12,26)	5,54
II	BELANJA DAERAH	13.440,44	12.653,61	12.428,20	12.649,63	13.600,06	(5,85)	4,52	(4,35)	7,51
2.1	Belanja Operasi	8.814,41	8.287,01	9.509,00	7.649,15	7.664,75	(5,98)	14,75	(19,56)	0,20
2.2	Belanja Modal	1.335,26	1.497,94	1.141,20	1.952,88	2.161,68	12,18	(23,82)	71,12	10,69
2.3	Belanja tidak terduga	21,30	1.150,69	0,81	45,70	50,00	5.302,52	(99,93)	5.573,01	9,41
2.4	Belanja Transfer	3.269,48	1.717,96	2.574,38	3.001,89	3.723,63	(47,45)	49,85	16,61	24,04
III	SURPLUS / DEFISIT	(360,84)	262,75	1.259,11	(638,00)	(300,00)	(172,82)	207,76	(178,90)	(52,98)
3.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	981,17	336,60	499,35	750,00	450,00	(65,69)	48,35	50,20	(40,00)
3.1	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	283,84	100,00	210,50	112,00	150,00	(64,77)	110,50	(46,79)	33,93
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	336,48	499,35	1.097,49	-	-	48,40	119,78	(100,00)	-

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : * Data Tahun 2022 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 16 Tahun 2022

** Data Tahun 2023 berdasarkan Proyeksi RPJMD

Dari tabel di atas sebagaimana tersaji, tercatat realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 1,25 persen dibanding Tahun Anggaran 2019. Penurunan ini terjadi pada awal masa Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi sisi Pendapatan Daerah di antaranya kebijakan yang membatasi pergerakan orang dan barang sehingga dari sisi pergerakan ekonomi masyarakat juga turut melambat yang mengganggu tingkat pendapatan masyarakat. Namun pada tahun 2021 Pendapatan Daerah meningkat sebesar 8,65 persen sejalan dengan pemulihan ekonomi di masyarakat sebagai dampak positif upaya - upaya pemerintah yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Pada tahun anggaran 2022 penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 14,41 persen dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada alokasi Pendapatan Transfer khususnya pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebut di atas yang menyebabkan berkurangnya alokasi Dana Transfer pada Tahun Anggaran 2022 lebih kurang sebesar 30,39 persen dibanding Tahun Anggaran 2021. Namun dari komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6,50 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 dan pada tahun anggaran 2023 komponen ini juga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 18,81 persen dari Tahun Anggaran 2022 optimisme ini diharapkan akan mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sehingga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 10,73 persen dari tahun anggaran 2022.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,77% dari total penerimaan Pendapatan Daerah. Adapun Pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain PAD yang sah. Demikian pula pada tahun anggaran 2023 penerimaan pendapatan asli

daerah diproyeksikan sebesar 60,92% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target Pendapatan Daerah, diantaranya adalah kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional, Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, Estimasi pemasaran industri otomotif Nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Sumatera Utara, Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Sejalan dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2019-2021 dan target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 serta asumsi Pendapatan Tahun Anggaran 2023, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023* (Dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH	13.079,60	12.916,36	14.034,04	12.011,63	13.300,06	(1,26)	8,65	(14,41)	10,73
4.1	Pendapatan asli daerah	5.761,27	5.531,24	6.402,71	6.819,01	8.101,94	(4,16)	15,76	6,50	18,81
4.1.2	Pajak daerah	5.058,44	5.071,60	5.730,57	6.227,77	7.336,83	0,26	12,99	8,68	17,81
4.1.3	Retribusi daerah	38,41	30,22	27,13	68,42	78,42	(27,10)	(10,22)	152,18	14,62
4.1.4	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	436,28	242,31	384,48	354,76	456,27	(80,05)	58,67	(7,73)	28,61
4.1.5	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	228,13	187,11	261,53	168,06	230,43	(21,92)	39,24	(35,49)	37,11
4.2	Pendapatan Transfer	7.300,65	7.347,75	7.518,18	5.093,35	5.093,35	0,64	2,32	(32,25)	-
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.300,65	7.347,75	7.518,18	5.093,35	5.093,35	0,64	2,32	(32,25)	-
4.2.1.01	Dana bagi hasil pajak	381,30	426,45	674,43	423,23	428,80	10,59	58,15	(37,25)	1,32
4.2.1.01	Dana bagi hasil bukan pajak	-	42,23	123,20	67,84	62,27	100,00	191,74	(44,94)	(8,21)
4.2.1.02	Dana alokasi umum	2.713,75	2.474,47	2.463,69	2.463,69	2.463,69	(9,67)	(0,44)	-	-
4.2.1.03	Dana Alokasi Khusus	4.205,59	4.404,60	4.256,87	2.122,76	2.122,76	4,52	(3,35)	(50,13)	-
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	15,83	15,83	-	-		-

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-		-				
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	17,68	37,37	113,14	99,27	104,77	52,69	202,73	(12,26)	5,54
4.3.1	Hibah	17,68	27,50	70,62	74,27	74,27	35,71	156,80	5,16	-
4.3.3	Lainnya		9,87	42,52	25,00	30,50	100,00	330,66	(41,20)	22,00

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : * Data Tahun 2022 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 16 Tahun 2022

** Data Tahun 2023 berdasarkan Proyeksi RPJMD

Untuk komponen Pendapatan Daerah yang merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya. Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa komponen Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah rata-rata lebih besar dibanding dengan komponen Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, akan tetapi pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan pendapatan asli daerah sedikit lebih tinggi dibandingkan pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan usaha pemerintah daerah untuk menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang ada berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan asli daerah.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa komponen Pajak Daerah rata-rata kurun waktu Tahun Anggaran 2019-2021 memberikan kontribusi terbesar dibanding komponen Pendapatan Asli Daerah yang lainnya dengan komposisi rata-rata sebesar 89,66 persen. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sisi komponen pajak daerah ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 8,68 persen pada tahun 2022 dan akan terus meningkat sebesar 17,81 persen pada tahun 2023.

Demikian juga Pendapatan Transfer merupakan komponen yang terbesar pada penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 – 2021, dan diproyeksikan masih akan menjadi komponen pendukung utama pada Tahun Anggaran 2022 - 2023 dimana alokasi Dana Transfer kelompok Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan, hal ini didukung oleh pengelolaan alokasi dana DAK yang juga terus optimal untuk dilaksanakan.

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen

pendapatan sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang las, nyata dan bertanggungjawab serta mencapai kemandirian daerah dalam pembiayaannya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya melalui:

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran;
- b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d) Menyesuaikan besaran dan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- f) Melakukan penagihan piutang pajak untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah;
- g) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan asset/barang milik daerah untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan peraturan tentang pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
- h) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara

optimal dalam satu tahun anggaran;

- i) Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;
- j) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD penghasil pendapatan;
- k) Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- l) Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
- m) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak;
- b) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- c) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN;
- d) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana bagi hasil (DBH).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.3.1. Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas adalah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2022.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d Tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
II	BELANJA DAERAH	13.440,44	12.653,61	13.225,39	12.649,63	13.600,06	(5,85)	4,52	(4,35)	7,51
2.1	Belanja Operasi	8.814,41	8.287,01	9.509,00	7.649,15	7.664,75	(5,98)	14,75	(19,56)	0,20
2.2	Belanja Modal	1.335,26	1.497,94	1.141,20	1.952,88	2.161,68	12,18	(23,82)	71,12	10,69
2.3	Belanja tidak terduga	21,30	1.150,69	0,81	45,70	50,00	5.302,30	(99,93)	5.573,01	9,41
2.4	Belanja Transfer	3.269,48	1.717,96	2.574,38	3.001,89	3.723,63	(47,45)	49,85	16,61	24,04

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : * Data Tahun 2022 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 16 Tahun 2022

** Data Tahun 2023 berdasarkan Proyeksi RPJMD

Pada Tabel 3.9 di atas terlihat bahwa Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian terhadap alokasi Belanja Daerah yang disebabkan turunnya Pendapatan Daerah, hal ini juga tidak terlepas dari situasi pandemi covid-19 yang melanda sepanjang Tahun 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terjadi kenaikan Belanja Daerah sebesar 4,52% yang sejalan dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah sebagai dampak pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemic covid – 19. Pada Anggaran 2022 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 12,65 Triliun yang terbagi dalam 4 kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi adalah belanja yang peruntukannya adalah untuk gaji, insentif, asuransi ASN se Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar 60,47 persen dari Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diproyeksikan akan sebesar 56,36 persen pada Tahun Anggaran 2023, hal ini terus akan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN dimasa mendatang.

Selain itu, pada komponen Belanja Daerah juga terdapat alokasi Belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal juga merupakan bagian dari belanja pembangunan daerah yang dialokasikan untuk mendongkrak target dan capaian pembangunan daerah dan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan akan membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,16 Triliun.

Belanja Tidak Terduga pada komponen Belanja Daerah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang pada Tahun Anggaran 2022 disiapkan sebesar Rp. 45,70 Miliar dan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 50 Milliar.

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Belanja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Alokasi Belanja Pegawai di atas sudah mengakomodir rencana penambahan Pegawai ASN di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan Mandatory Spending**, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- 2. Pencapaian Visi Misi (Kegiatan Strategis daerah), memastikan alokasi** anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah serta pencapaian visi misi daerah;
- 3. Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional**, yaitu alokasi belanja daerah yang ditujukan kepada program kegiatan yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
- 4. Pemenuhan SPM**, memastikan alokasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing sektor pembangunan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
- 5. Alokasi belanja daerah untuk pemulihan pasca covid-19** Dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19 ditengah masyarakat serta belanja stimulan pemerintah untuk menangani kebutuhan sarana prasarana kesehatan, jaminan pengaman sosial dan stimulus ekonomi.
- 6. Pembiayaan Pembangunan Kontrak Tahun Jamak** ditujukan untuk Pendanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat yang pelaksanaannya dilakukan melalui pembiayaan

pembangunan tahun jamak (Multi years) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atau bersifat Tahun Jamak (Multi Years). Penganggaran Tahun Jamak sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini diarahkan untuk pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Pembangunan Pusat Kawasan Olahraga (*Sport Centre*), dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan.

3.3.2. Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena selisih jumlah Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022*	2023**
6.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	981,17	336,60	499,35	750,00	450,00	(65,69)	48,35	50,20	(40,00)
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	981,17	336,60	499,35	750,00	450,00	(65,69)	48,35	50,20	(40,00)
6.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	283,84	100,00	210,50	112,00	150,00	(64,77)	110,50	(46,79)	33,93
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	283,84	100,00	210,50	112,00	150,00	(64,77)	110,50	(46,79)	33,93
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		697,32	236,60	288,85	638,00	300,00	(0,92)	(62,15)	(96,99)	(73,93)

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : * Data Tahun 2022 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 16 Tahun 2022

** Data Tahun 2023 berdasarkan Proyeksi RPJMD

Pada Tabel 3.10 di atas, perkiraan penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 berada pada besaran angka Rp. 750 Miliar atau 5,93 persen terhadap Belanja Daerah, hal ini akan terus menjadi perhatian dalam penggunaan Belanja Daerah yang telah ditetapkan akan terserap sepenuhnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui kolaborasi pendanaan pembangunan melalui skema Kerjasama KPBU, obligasi daerah, hibah dan pinjaman daerah yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan memperkuat peran fiskal keuangan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah baik pada sektor infrastruktur ataupun sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang diarahkan pada proyek kegiatan strategis daerah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memiliki *return of revenue* untuk menutupi pinjamannya sehingga tidak terlalu membenani APBD.

Peningkatan Belanja Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah melalui pinjaman dengan Lembaga Keuangan dan Kerjasama dengan Lembaga lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, komponen Penyertaan Modal (Investasi) Daerah yang dilakukan kepada BUMD dan BUMN adalah selain untuk mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada komponen Pendapatan Asli Daerah juga dalam rangka pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat melalui badan usaha yang dimiliki, Prioritas investasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah tetap menjaga mayoritas saham pada PT Bank Sumut, serta mendorong peningkatan kinerja BUMD untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran, yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

- 1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
- 2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

3.4. Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Konsep otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati, Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, Berbagai jenis penerimaan daerah kemudian dikumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD dan BUMN yang memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk dividen maupun pajak dan retribusi, BUMD juga berperan dalam menciptakan tambahan lapangan kerja dan menjadi salah satu stakeholder dalam mencapai target-target pembangunan daerah lainnya.

Sebagai bagian dari dunia bisnis, BUMD juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip pasar baik sebagai consumer maupun produser, Kondisi pasar secara umum akan mencerminkan persaingan menuju sempurna, Untuk itu, BUMD harus dikelola dengan efektif, efisien, penuh kehati-hatian dan akuntabel.

Terdapat 6 (enam) BUMD Provinsi Sumatera Utara, yaitu PT. Bank Sumut, PT. Dhirga Surya, PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Pembangunan Prasarana, PDAM Tirtanadi, PD. Aneka Industri dan Jasa, selain itu Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penyertaan modal pada 2 (dua) BUMN yang terdapat di Sumatera Utara yaitu PT. Kawasan Industri Medan dan PT. Bangun Asuransi Askrida.

Tabel 3.11
Realisasi Deviden BUMD/BUMN
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Deviden)		
		2019	2020	-/+ (%)
1	PT. Bank Sumut	409,145,056,001	188,037,661,330	-54.04
2	PT. Perkebunan Sumatera Utara	2,706,000,000	-	-
3	PT. Pembangunan Sarana Prasarana Sumut (PT. PPSU)	300,000,000	1,118,597,653	272.87
4	PT. Dirgasurya	145,000,000	-	-
5	PDAM Tirtanadi Provsu	20,000,000,000	48,461,724,366	142.31
6	PD. Aneka Industri dan Jasa (AIJ)	-	-	-
7	PT. Kawasan Industri Medan (BUMN)	3,819,291,087	4,623,456,681	21.06
8	PT. Asuransi Bangun Askrida (BUMN)	169,595,681	67,716,826	-60.07
Total		436,284,942,769	242,309,156,856	-44.46

Sumber : BPKAD

Kinerja BUMD secara keseluruhan masih perlu membenahan dalam rangka memaksimalkan kontribusinya terhadap PAD. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10 di atas. PT. Bank Sumut yang merupakan BUMD dengan deviden terbesar dibanding dengan BUMD lainnya, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mempertahankan besaran saham mayoritas dari Rp. 2,25 Triliun nilai saham PT Bank Sumut, sebesar Rp. 1,06 Triliun atau 47,19% adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sisanya sebesar 39,92% adalah milik pemerintah kabupaten se Sumatera Utara dan 12,89% milik kota se Sumatera Utara, meskipun secara statistik untuk deviden tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi geliat keuangan PT Bank Sumut.

Disisi lain, untuk BUMD yang berkinerja rendah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai program dan kebijakan dalam menyehatkan dan mengembangkan BUMD menjadi mandiri, kuat dan adaptif sebagai *Agent of Development*. Serta mampu memberikan layanan produk maupun jasa yang berkualitas dan merata kepada masyarakat, juga sebagai kontributor bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023*
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
4.1	PAD	5.761,27	5.531,24	6.402,71	6.819,01	8.101,94
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	416,28	242,31	384,48	354,76	456,27
	Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD	7,23%	4,38%	6,00%	5,20%	5,63%

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : * Data Tahun 2022 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 16 Tahun 2022

** Data Tahun 2023 berdasarkan Proyeksi RPJMD

Pada tabel 3.12 di atas, rata-rata persentase kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pendapatan atas penyertaan modal pada BUMD dan BUMN di lingkungan Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (proyeksi) berkontribusi sebesar 5,69%.

Upaya untuk meningkatkan kinerja BUMD untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan peningkatan kapasitas layanan BUMD sehingga mendorong peningkatan profit, untuk peningkatan kapasitas modal melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam Penyusunan RPJMN 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005 –2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dan selanjutnya ditetapkan menjadi tujuh prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023 meliputi antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020–2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 meliputi antara lain:

- (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan Indikator
 - (a) pertumbuhan ekonomi,
 - (b) tingkat pengangguran terbuka,

- (c) rasio gini, dan
 - (d) penurunan emisi gas rumah kaca
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator
- (a) indeks pembangunan manusia, dan
 - (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Target sasaran dan indikator pembangunan Nasional Tahun 2023

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,3 – 5,9 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi: 5,3- 6,0 (%)
3. Ratio Gini (Nilai) menjadi : 0,375 – 0,378
4. Penurunan Emisi GRK menurun menjadi : 27,02 (%)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,31-73,49
6. Tingkat Kemiskinan: 7,5 - 8,5 (%)
7. Nilai Tukar Petani/NTP: 103 – 105 (Nilai)
8. Nilai Tukar Nelayan/ NTN : 106 – 107 (Nilai)

4.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana yang telah tertuang dalam PRPJMD Tahun 2019 – 2023 merupakan periode akhir dari PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki visi **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”**

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperilaku kemanusiaan, dan beradab.

Visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah Tahun 2023 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tinjauan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Sumatera Utara Tahun 2023

NO	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35
		1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.96
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	
1.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.81		
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,75-76,25
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.50
			3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB (ADHB) Perkapita	Juta (Rp)

NO	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	
		3.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	75,12
		3.2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, ilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	109,92
		3.3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7.18
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78
		4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	78.55
				Rasio Elektrifikasi	Persen	100
				Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	62.92		
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi	Poin	65,75
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai(Kategori)	(75,00)B
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	-	73.89
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	BB (72.00)
		Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,20 (A-)		
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan	Persen	97
		4.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75

NO	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Persen	69,38
		5.1 Meningkatkan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Persen	53,91
		5.2 Meningkatkan Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	NA	73,74
		5.3 Meningkatkan kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Persen	87,29
		5.4 Meningkatkan kualitas Lahan	Indeks Kualitas lahan	Juta Ton CO2eq	48,03

Penetapan tujuan dan sasaran pada ke tiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-6,00 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,25 – 72,75
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8.80 - 7.80 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 6,30-5,30 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO2eq

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

4.2.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 telah memicu krisis kesehatan sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia terus merespon dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada

periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023. Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”. Penetapan tema tersebut mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan

untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
- b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
- c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
- d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut dengan dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi kesehatan nasional; dan
- MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.

4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
- MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
 - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Arah kebijakan pembangunan dengan tujuan pencapaian pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2023, meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam pembangunan lima tahunan (PRPJMD 2019-2023), pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 54 (lima puluh empat) Kegiatan Strategis daerah (KSD). Delapan prioritas pembangunan dan lima puluh empat kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, **merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP)**, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu

- a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
 - b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
 - c. Pembangunan kampung beasiswa *scholarships booth* sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
 - d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha/ industri melalui :
 - 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 2) *Teaching factory* atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;
 - e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);
 - f. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- Sumatera Utara;
 - g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
 - h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode *training of trainer* (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (*testing, tracing, treatment*), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;

- c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
 - d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;
 - e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;
 - f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
 - g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
 - b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;
 - c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
 - d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;

- b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
 - c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ;
 - 1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;
 - 2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;
 - 3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.
 - b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;
 - c. Digitalisasi promosi pariwisata;
 - d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu:

- a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
 - b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
 - c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
 - c. Layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
 - d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;
 - e. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
 - g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
 - h. Pembangunan *sports centre* di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
 - i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu:
- a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;

- b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
- c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
- d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
- e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
- f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
- g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co₂ (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
- h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

4.2.3. Arah Kebijakan & Sasaran Pembangunan 2019-2023

Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan melalui akselerasi pencapaian target pembangunan **Provinsi Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat** Kebijakan pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial yaitu:

- a. **Tematik** dimaknai bahwa tema RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 memiliki tema pembangunan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. **Holistik** artinya penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif muloi dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang diarahkan untuk menjawab tuntutan kinerja daerah tahun 2023;
- c. **Integratif** dimaknai bahwa upaya keterpaduanh pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran kementerian/ Lembaga

daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan sasaran prioritas pembangunan dicapai melalui berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;

- d. **Spasial** dapat diartikan bahwa Penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah .

Perumusan Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah akan menjadi arahan bagi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2023. Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah tersebut sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022, masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan ekonomi dampak Covid-19 serta peningkatan produktivitas mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan ketajaman prioritas pembangunan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023** adalah **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**

Arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 diarahkan pada "Akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah PRPJMD Tahun 2019-2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	1. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	1. Peningkatan Layanan dan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata, dukungan biaya serta informasi bantuan pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan minat baca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi siswa/i kurang mampu; 3. Pembangunan kampung beasiswa/scholarships booth (wadah informasi beasiswa)/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1, S2, S3; 4. Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/ vokasi dengan dunia usaha dunia industry; 5. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e-library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; 6. Pemberian motivasi pada siswa/I menengah atas dan kejuruan seSumatera Utara; 7. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan, spiritual, emosional dan intelektual; 8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
			2. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	2. Memperkuat Peran perempuan dan kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Misi 3: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan percepatan penanganan pandemic covid-19, memperkuat kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan serta pembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penanganan kesehatan pandemic covid-19; 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara; 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Lansia; 4. Penurunan Prevalensi Stunting di Sumatera Utara; 5. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dalam rangka rehabilitasi narkoba; 6. Peningkatan pemberdayaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS); 7. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; 8. Peningkatan layanan kesehatan bergerak.
		3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	4. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	4. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja 2. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja 3. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja sehingga berdaya saing dan produktif 4. Pengembangan serta perluasan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja
			5. Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan 6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi daging sapi dan domba; 2. Mempertahankan swasembada beras dan jagung; 3. Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				7. Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian	Peningkatan capaian produksi perikanan tangkap 4. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya 5. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi 6. Pembangunan infrastruktur Pertanian 7. Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak
			6. Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	8. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya; 3. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba; 4. Digitalisasi promosi pariwisata; 5. Pelestarian budaya daerah.
		Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	7. Meningkatnya Infrastruktur Kualitas	9. Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur Jalan 10. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciptakarya, Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penataan Ruang 11. Pengembangan Infrastruktur jaringan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik	1. Penanganan jalan strategis Provinsi dalam kondisi baik yang meliputi Jalan Strategis Akses Kawasan Wisata dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi; 2. Fasilitasi masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan penegakan hukum dan kelembagaan; 3. Optimalisasi jalan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor agraris; 4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Regional 5. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Air Minum 6. Pembuatan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					<p>Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas</p>
	<p>Misi 2: Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik Dengan Adanya Pemerintahan Yang Bersih Dan Dicintai, Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Adil Dan Terpercaya, Politik Yang Beretika, Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Memiliki Kohesi Sosial Yang Kuat Serta Harmonis</p>	<p>2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang baik dan Bersih</p>	<p>8. Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)</p>	<p>12. Peningkatan kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan dan bebas diskriminasi</p>	<p>1. Meningkatkan pemahaman politik dan memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan kerukunan antara umat beragama dan masyarakat;</p> <p>3. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah</p>
			<p>9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima</p>	<p>13. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan public yang prima</p>	<p>1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dukungan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 33 Kabupaten/Kota dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;</p> <p>2. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik</p>
	<p>Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan Karena Terbebas Dari Judi, Narkoba, Prostitusi Dan Penyelundupan, Sehingga Menjadi Teladan Di Asia Tenggara Dan Dunia</p>	<p>4. Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban</p>	<p>10. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	<p>14. Meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dan upaya menghasilkan prestasi daerah melalui penguatan sektor olahraga.</p>	<p>1. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda;</p> <p>2. Pelayanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;</p> <p>3. Peningkatan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas)</p>

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 5. Pencapaian SPM Bidang Sosial; 6. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan fasilitas olahraga dalam rangka PON 2024; 7. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi; 8. Pembangunan sport center
	<p>Misi 5: Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan Karena Ekologinya Yang G Terjaga, Alamnya Yang Bersih Dan Indah, Penduduknya Yang Ramah, Berbudaya, Berperikemanusiaan Dan Beradab</p>	5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	11.Meningkatnya kualitas air	15.Meningkatkan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) sumber air (danau, sungai, waduk dan sumber air lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan baku mutu kualitas air limbah, 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemnataan kualitas air 3. Penegakkan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3 4. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup 5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3R 6. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik 7. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Meningkatnya kualitas udara	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			12.Meningkatnya kualitas tutupan lahan	16.Meningkatkan penanganan pencemaran dan kerusakan lahan dan mengurangi alih fungsi lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 2. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut 3. Peningkatan kualitas kawasan lindung akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali
			13.Menurunnya emisi gas rumah kaca	17.Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan

Perumusan isu strategis Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi Pembangunan Tahun 2023 akan dilaksanakan dengan beberapa konsep.

1. Kebijakan Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Gagasan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Inovasi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dalam upaya bersama untuk melakukan penyelesaian permasalahan masyarakat sekaligus pencapaian keberhasilan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

2. Money Follows Program Priority

Penerapan pola money follows program priority yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas dan keberhasilan pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

3. Gagasan 3-SP

Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan Dan Sukses Pencapaian Inovasi perubahan *design* perencanaan dengan menentukan terlebih dahulu target-target keberhasilan dari penerjemahan visi dan misi Gubernur pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menentukan strategi dan arah kebijakan perencanaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan serta melakukan penguatan sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah melalui pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (PRPJMD Tahun 2019-2023), yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Belum optimalnya kualitas Pendidikan	Sarana dan prasarana pendidikan serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah , Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan bagi	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan

NO	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
		siswa miskin berprestasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya perlu penguatan dan penyesuaian penerapan kurikulum Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja dalam mendukung implementasi program “link and match” yang memungkinkan skill tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya	
2	Belum Optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan akses melalui peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, Penanganan kekurangan gizi bagi ibu hamil dan anak, Penanganan penyakit menular dan tidak menular, Penguatan PHBS, Belum meratanya SDM Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3	Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Bantuan usaha produktif dan akses permodalan, pemberian insentif dan Kemudahan berusaha	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	Peningkatan Produktifitas dan nilai tambah, Peningkatan sarana dan prasarana usaha pertanian, Perlindungan bagi tenaga kerja di sektor agraris	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
5	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata	Digitalisasi Promosi Pariwisata, Penataan Kawasan Wisata berbasis tematik(agro, eko dan wisata) serta cagar budaya, Standarisasi layanan Pariwisata dan SDM Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Akuntabilitas Kinerja, layanan kinerja	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
7	Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan prestasi olahraga	Perlindungan sosial terhadap masyarakat, Pemenuhan SPM Panti, Peningkatan sarana dan prasarana pada sektor olahraga, Bantuan olahraga untuk persiapan PON, Kondusifitas sosial politik dan Persiapan awal pilpres dan pilkada serentak, FKUB	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8	Belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah	Konektifitas Peningkatan kualitas infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah menyelaraskan pembangunan daerah yang tertuang didalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 hingga ke dalam ke dalam bentuk dukungan pada Prioritas pembangunan Daerah. Dukungan daerah tersebut dapat dilihat bentuk sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 berikut ini:

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2023

NO	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sumatera Utara	Keterangan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja • Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris • Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata • Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan 	PP.3 PP.4 PP.5 PP.8
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan 	PP.8
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan • Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat • Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga 	PP.1 PP.2 PP.7
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi • Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga • Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan 	PP.6 PP.7 PP.1
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan 	PP.8
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan 	PP.8
7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi • Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga 	PP.6 PP.7

Tabel 4.5
Dukungan Program Prioritas Terhadap Visi, Misi, Tujuan/Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah	
<p>Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau</p> <p>Misi 3: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri</p>	1. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan					
	1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Prioritas Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dinas Pendidikan
					Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Dan Arsip
						Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Dan Arsip
					Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Perpustakaan Dan Arsip
						Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Perpustakaan Dan Arsip
					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Harapan Lama Sekolah Indeks Pembangunan Gender (IPG)					

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan
	1.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan			1. Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perlindungan Anak
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					4. Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan				
	2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
						Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
					2.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
						Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
						Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RS. Jiwa
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RS. Jiwa
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	RS. Haji

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RS. Haji
						Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RS. Haji
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RS. Haji
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RS. Haji
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		PDRB Perkapita				
	3.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi dan UKM

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembang Ekspor	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT						
	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
					Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT						
	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Dinas Tenaga Kerja
					Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
	3.2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Dinas Tanaman

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
							Pangan dan Hortikultura
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provins	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	enanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Dinas Perkebunan
					Program Pengendalian Dan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dinas Perkebunan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT						
	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penanggulangan Bencana Pertanian		
				Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Dinas Perkebunan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
				Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dinas Kehutanan
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Dinas Kehutanan
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Dinas Kehutanan
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dinas Kehutanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT								
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah	
					Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,	
4	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi		Indeks Infrastruktur					
	4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Rasio Elektrifikasi		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dinas ESDM
						Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dinas ESDM
					Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Dinas ESDM
					Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang	Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan H	

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
			dilayani oleh Jaringan Irigasi	berwawasan lingkungan Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
5	1	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola	Indeks Demokrasi				
	2		Indeks Reformasi Birokrasi				

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT						
	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemerintahan yang baik dan Bersih					
5.1.	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Peningkatan Kemasyarakatan dan Olahraga 	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol
	5.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	• Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
						Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPKAD
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
						Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
						Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda	
			Indeks Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	BKD	
						Pengembangan Kompetensi ASN	BKD

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKD
						Mutasi dan Promosi ASN	BKD
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	BPSDM
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BPSDM
6	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan				
	6.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga 	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
						Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	BPBD
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provin	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Pant	Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Dinas Sosial
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Dinas Sosial
						Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Dinas Sosial
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Kominfo
7	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH				
	5.1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SdA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
				berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
						Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
	5.3	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dinas Kehutanan
						Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Dinas Kehutanan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
	Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
	5.4	Meningkatnya kualitas Lahan	Indeks Kualitas lahan		Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah Di TPA/TPSTRegional	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Sumatera Utara Dalam Dukungan Terhadap Rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas

4.3.1. Dalam Dukungan Terhadap Rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara turut serta mengambil langkah dan kebijakan di bidang sektor UMKM, pariwisata, infratraktur, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dengan beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

I. Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas Ekonomi Masyarakat

1. Penguatan Stimulus Ekonomi

a. Penguatan Sektor UMKM

- Program Bantuan Stimulus Ekonomi Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi (permodalan dan alih usaha) kepada pelaku KUMKM Terdampak
- Program Penguatan digitalisasi pada sektor UMKM, pasar tradisional, dan pada berbagai transaksi
- Program Pendampingan dan stimulus usaha UMKM agar dapat melaksanakan diversifikasi usaha antara lain; Pengadaan Masker Handmade, Pengadaan Masker Handmade Kain, Pengadaan Hand Sanitizer Tradisional Ukuran 60 ml
- Program Penguatan Ketersediaan Bahan Pokok dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat

b. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan

c. Penguatan Sektor Pariwisata, Industri dan Investasi

Dalam masa pemulihan pasca pandemic covid-19 secara bertahap dilakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang sangat terpuruk antara lain:

- Penerapan Protokol Kesehatan Pada Sektor Pariwisata (Cleanliness, Health, Safety, Environment) Sebagai Respon Adaptasi Pandemi Covid-19
- Penguatan Destinasi Wisata Unggulan (Geopark Kaldera Toba) dan Penciptaan Destinasi Wisata Baru Termasuk Desa-Desa Wisata
- Promosi Pariwisata Dengan Target Wisatawan Domestik

- Peningkatan SDM Pariwisata
- Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas pada Kawasan Pariwisata
- Pengembangan Pariwisata Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
- Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Pariwisata
- Optimalisasi KSPN Danau Toba

2. Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial

Melalui Bantuan Jaring Pengaman Sosial

3. Transformasi Digital Bidang Ekonomi, strategi peningkatan Kebijakan dengan Pemulihan ekonomi terhadap sektor-sektor pembangunan untuk menudukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi antara lain:

- UMKM dan IKM Digital
- Inkubasi Ekonomi Kreatif Digital
- Kampung Digital Tematik Ekonomi
- Digitalisasi Industri 4.0
- Digitalisasi Promosi Pariwisata
- Digitalisasi Promosi Investasi
- Digitalisasi Pengelolaan BUMD
- Digitalisasi Sektor Pertanian
- Digitalisasi Sektor Kelautan Perikanan
- Digitalisasi Sektor Kehutanan
- Digitalisasi Sektor Perkebunan
- Perencanaan Pembangunan Digital Ekonomi Terintegrasi (Diginomi Sumut)

4. GGP, Blue Economic, PPRK, Gambut & Mangrove, Mitigasi & Adaptasi Iklim, P3TB

- Green Ekonomi adalah suatu Gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan dengan tujuan Tujuan Green Ekonomi atau Ekonomi Hijau adalah perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

- *Blue Economy* adalah konsep yang mendorong penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut.
- Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah sebuah paradigma pembangunan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah dan optimalisasi eksploitasi SDA.
- Perencanaan PRK bertujuan untuk mendukung iklim investasi hijau, memperkuat integrasi lintas sektor dalam pengambilan keputusan serta menjadikan Indonesia sebagai leader dalam pembangunan rendah karbon.
- Pengelolaan Gambut Berkelanjutan
 - Restorasi Gambut
 - Pengelolaan Gambut Berbasis Khg
 - Implementasi KLHS
 - Penyusunan Dokumen RPPEG

4.3.2. Kebijakan Dan Dukungan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Terhadap Indikator Makro meliputi:

1. Pembangunan Ekonomi Dan PDRB Perkapita

No	Kebijakan Pembangunan	Sasaran	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1.	Penetapan Regulasi, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Penguatan Kelembagaan pada Sektor Ekonomi	1.TPD Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 2.Tim Pokja TPPE Provinsi 3.Tim Pokja SITANTRI/Provinsi 4.Tim Pokja PSTB Provinsi dan Kab se-Kawasan Danau Toba	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Bappeda)	Bappeda
2.	Strategi Meningkatkan Daya Saing Agraris melalui Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dengan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan, Perternakan dsb	a. Pendampingan dan pembinaan kelompok tani nelayan b. Pembangunan PLTS Terintegrasi dengan Pertanian di Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, PLTMH 1 unit PLTS Terpusat c. Pemberian Bantuan Sapi, Kambing dan Domba d. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (buah coolbox, rumah ikan dan benih ikan untuk restocking); e. Ketersediaan sarana usaha perikanan (alat penangkapan ikan, sampan bermotor untuk nelayan perairan umum daratan dan sampan dayung/solu untk perairan umum daratan) f. Penyediaan Perikanan Budidaya (benih ikan nila; benih ikan lele; benih ikan mas; benih ikan gurame; benih ikan	b. Stimulus ekonomi dalam bentuk Bantuan Hibah Barang/Benih/Pupuk bagi kelompok tani pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan (Pembangunan PLTMH dan PLTS Terpusat) d. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perumahan e. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan f. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan g. Program Pengelolaan dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Kebijakan Pembangunan	Sasaran	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		kerapu; benur udang; pakan ikan 30.790 kg) a. Penentuan lokasi rencana pembangunan Pelabuhan	h. Sub Kegiatan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.	Strategi Meningkatkan Daya Saing Pariwisata melalui Peningkatan Destinasi Pariwisata, Promosi dan Pelatihan Pemandu Wisata serta Penerapan CHSE	a. Penataan Destinasi Wisata sebanyak 3 Kawasan (Danau Toba, Tangkahan Bukit Lawang, dan Kepulauan Nias) b. Pelaksanaan Event Internasional, Jungle Trail, DPSP Danau Toba Rally, Sport Tourism Event Pelatihan Sadar Wisata dan Sertifikasi Pemandu Wisata	a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata b. Program Pemasaran Wanita c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

2. Penurunan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
1.	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Program penyediaan Pengembangan UMKM 5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	a. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK); b. Pelatihan Peningkatan Produktivitas (P3) ; c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan; d. Jumlah UMKM yang diberdayakan untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
			e. Peta potensi investasi dan integrasi perijinan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizanan Sumatera Utara (Siplayani Sumut) di 33 kab /kota Provsu

3. Penurunan Angka Kemiskinan

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
1.	Penetapan Regulasi, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) serta Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemabngunan Daerah/ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bappeda)	TKPK Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2.	Strategi menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial; serta dukungan daerah terhadap bantuan perlindungan sosial masyarakat miskin dari pusat	a. Program Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial) c. Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Sosial dan Kesejahteraan)	a. Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandang pengemis, dan PMKS lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dalam panti b. Fakir miskin yang ditangani c. Masyarakat kurang mampu
3.	Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan skills, akses modal (Koperasi UMKM),	a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (Dinas Koprasi dan UKM)	a. Jumlah KUMKM yang diberdayakan untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
	akses perkerjaan (Bursa Kerja); Potensial produktivitas dan inklusi (Bumdes)	<ul style="list-style-type: none"> b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja) c. Program Administrasi Pemerintahan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan kepada KUMKM b. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) c. Jumlah BUMDES yang akan difasilitasi
4.	Strategi meminimalkan cluster kantong kemiskinan melalui pembangunan jalan, infrastruktur, transportasi, akses layanan sanitasi, air bersih dan kesehatan dsar; sinergitas pemerintah daerah sampai ke level perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (Dinas Kesehatan) b. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (Dinas Bina Marga Konsruksi) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Masyarakat Miskin Peserta JKN b. Presentase Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 75%

4. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
1.	Pemeretaan akses dan peningkatan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Pendidikan (Dinas Pendidikan) b. Program Pembinaan Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Arsip) 	Peningkatan Rata – rata Lama Sekolah sebesar 9,58 tahun dan Harapan Laam Sekolah sebesar 13.71 tahun yang berada diatas capaian Nasional Pada tahun 2021
2.	Peningkatan derajat kualitas kesehatan	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Umur Harapan Hidup sebesar 69,53 Tahun
3.	Peningkatan daya beli masyarakat (purchasing power parity)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 	Pengeluaran Perkapita sebesar 10,49 Juta/Org/Tahun

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
		4. Program program Pengembangan UMKM 5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara ELEktronik	

5. Penurunan Indeks Gini Dan Menjaga Tingkat Inflasi

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran	Perangkat Daerah
1.	Pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja	a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja b. Program penempatan tenaga kerja	Meningkat pertumbuhan jumlah wirausaha baru, usaha mikro kecil dan menengah	Dinas Tenaga Kerja
2.	Memperkuat Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan kesempatan kerja	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Angkatan kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
3.	Peningkatan pembinaan UMKM dan IKM	1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro 2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan mutu produk UMKM dan IKM yang berdaya saing	Dinas Tenaga Kerja
4.	Menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi)	1. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Program perekonomian dan pembangunan	Terjaganya stabilitas harga haraga barang dipasaran	

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran
1.	Peningkatan Pola Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup) b. Program Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah
2.	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	a. Program Pengelolaan Hutan (Dinas Kehutanan)	Tercegahnya Kerusakan Hutan dan Lahan dari bahaya api hutan dan lahan

Selain itu sinkronisasi perencanaan tidaklah cukup berhenti disini. Harus ada pengawalan yang baik antara perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat pusat maupun daerah. Unsur dominan yang mempengaruhi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran diantaranya

a. Pemerintah

Selain adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan.

b. DPRD

Dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjaringan aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses.

c. Gubernur

Dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. Perangkat Daerah

Dikarenakan adanya usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.

e. Masyarakat

Dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dan bantuan.

f. Lain-lain

Mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran

Usulan kegiatan prioritas daerah berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Usulan-usulan ini mencerminkan upaya-upaya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. Tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah

4.4. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (PRPJMD Tahun 2019-2023), mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah terutama berkaitan dengan isu pemulihan dampak pandemi Covid-19. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Keselarasn Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara
Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Indikator Sasaran (Makro) Pembangunan	Target Sasaran Daerah	Target Sasaran Nasional untuk Sumatera	Target Sasaran Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00-6,00	4,7-5,2	5,3 – 5,9
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,25-72,75	70,48- 77,01	73,31 – 73,49
3	Persentase Kemiskinan	8,80-7,80	8,2-8,6	7,5 – 8,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,30-5,30	-	5,3 – 6,0
5	Indeks Gini	0,309	-	0,375 – 0,378
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	35,55	-	27,02

Tabel 4.7
Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan 	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dinas ESDM
		2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;				Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dinas ESDM
	3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;	5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT)	4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) Penyediaan air untuk pertanian; 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dinas SDA CKTR
		5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Dinas SDA CKTR
		6) Pengembangan waduk multiguna.				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dinas SDA CKTR
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dinas SDA CKTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Supervisi Pembangunan/Perin gkatan/Perluasan/Pe rbaikan SPAM	Dinas SDA CKTR

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Penyediaan Air Minum	Lintas Kabupaten/Kota		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Dinas SDA CKTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas SDA CKTR
				Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan ketersediaan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		<p>pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;</p> <p>3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;</p> <p>4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya</p> <p>5) Pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan</p> <p>6) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.</p>			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Sarana Pendukungnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		pengelolaan ruang laut; 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan					
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	
	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar Akses Pembiayaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di	1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, 2) Kemaritiman, dan non agro yang		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	sektor riil, dan industrialisasi	terintegrasi hulu-hilir; 3) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan Kawasan industri terutama di luar Jawa; 4) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan 5) Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 6) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 7) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk 8) Reformasi ketenagakerjaan 9) Pengembangan industri halal					

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari (satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi		
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Dinas Tenaga Kerja
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja
						Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Kewenangan Daerah Provinsi	Kemudahan Penanaman Modal	
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) Pengelolaan impor; 4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi					
					Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing ekonomi	1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan 5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital					
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PN2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan 1) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, 2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 3) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 4) Peningkatan kualitas anak,	1. percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2. integrasi sistem administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan 4) pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1) sistem jaminan sosial nasional; 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3) kesejahteraan sosial.					
		peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; 2) percepatan					Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	perempuan dan pemuda 5)Pengentasan kemiskinan 6)Peningkatan produktivitas dan daya saing	perbaiki gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan				Strategis Pariwisata Provinsi	
		peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4) penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.					
		memenuhi hak dan perlindungan anak; 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan 3) kualitas pemuda		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2)				Pelaksanaan Pembangunan	Dinas Perumahan dan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosia				Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Permukiman
PN3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perumahan	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah	
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll)	Dinas Kesehatan	
						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Dinas Kesehatan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah	
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	
						Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	
								Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					dalam (satu) Provinsi	Menengah dan Pendidikan Khusus	
	Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
	Pengentasan Kemiskinan			Program Perlindungan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Dan Jaminan Sosial	Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dinas Pemuda dan Olahraga

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BPSDM
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BPSDM
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi		Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang	BPSDM

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah		
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan			
				Manajerial dan Fungsional		Kompetensi dan Sumber Belajar			
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	BPSDM		
PN4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat		
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Inspektorat
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		pembentukan karakter;	Program Penataan Organisasi		Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi
		4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;			Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Organisasi
		6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan	revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4)					

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Peradaban Dunia	pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.					
	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	<p>penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan</p>	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Spiritual	Biro Kesra
						Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesra

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.	Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Arsip

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4) keselamatan dan keamanan transportasi; 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6) waduk multipurpose	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		dan modernisasi irigasi.					
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
	Infrastruktur Ekonomi	konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pembangunan Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Gedung Terminal	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan
	Infrastruktur Perkotaan	transportasi perkotaan; dan 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
						Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dinas Sumber Daya Air, Cipta

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Sistem Penyediaan Air Minum	Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Karya dan tata Ruang
	Energi dan Ketenagalistrikan	keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	transformasi digital,	penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PN6.Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.					
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	penanggulangan bencana; 2) peningkatan ketahanan iklim.			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan Rendah Karbon	pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan 3) pengembangan industri hijau.		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Persampahan Regional	Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
				Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Dinas Kehutanan
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dinas Kehutanan
					Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	BPBD

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	BPBD
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi;	penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol
	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Badan Kesbangpol

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	reformasi birokrasi dan tata kelola	penguatan implementasi manajemen ASN; - 35 - 2) transformasi pelayanan publik; 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1) Penguatan keamanan dalam negeri; 2) Penguatan keamanan laut; dan 3) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Badan Kesbangpol

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Penanganan Konflik Sosial		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Badan Kesbangpol

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						Penanganan Konflik di Daerah	
				Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Inspektorat
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
				Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
						Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Organisasi
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD

RPJMN			RPJMD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKD
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKD
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Bappeda
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda

4.3. DUKUNGAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4.3.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Pada Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebesar 74,6 % tercapai dari 134 indikator yang terdiri dari 1) Pilar sosial sebanyak 25 Target, 63 Indikator dan 43 Indikator tercapai; 2) Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 16 Target, 32 Indikator dan 25 Indikator tercapai; 3) Pilar Pembangunan Lingkungan sebanyak 17 Target, 31 Indikator dan 28 Indikator tercapai dan 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 5 Target, 8 Indikator dan 4 Indikator tercapai.

Permasalahan/kendala dalam pencapaian TPB/SDGS tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak target-target dari indikator TPB/SDGs yang tidak tercapai sehingga dibutuhkan updating/ perubahan target baik pada dokumen TPB/SDGs maupun Perubahan Dokumen RPJMD;
2. Keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah) serta belum tersedianya data untuk beberapa indikator global SDGs;
3. Kerjasama Aktif Multi Sektor dalam bentuk : Advokasi dan Diseminasi; Fasilitasi Program; Peningkatan Kapasitas; serta, Dukungan Pendanaan ;
4. Dalam Pencapaian target dari seluruh Indikator TPB/SDGS dibutuhkan keterlibatan dari seluruh sektor tidak hanya dari Pemerintah melainkan dari OMS, Filantropi dan Business/ Dunia Usaha Dunia Industri serta Perguruan Tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen dan regulasi yang langsung mengikat kepada Filantropi dan Business/ Dunia Usaha Dunia Industri untuk bersinergi dalam pencapaian target TPB/SDGs di Daerah;
5. Dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data indikator;
6. Dibutuhkan optimalisasi dalam pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk percepatan pencapaian target SDGs adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2020 dan Tahun 2021, dimana dari 17 Tujuan dan 134 Indikator pada Dokumen RAD TPB/SDGS Provinsi Sumatera Utara yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdapat 74,6 Persen Target yang tercapai pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Universitas dan Akademisi untuk membangun Pusat SDGs (SDGs Center) Universitas Sumatera Utara sebagai wadah dan media *mainstreaming* TPB/SDGs di berbagai bidang keilmuan, media *transfer of knowledge and insights*, inovasi serta pendalaman kajian/analisis untuk implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan daerah.
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan peningkatan kapasitas kepada seluruh *stakeholders* untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah melalui sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi SDGs.

4.3.2. Kemiskinan

a. Kemiskinan Ekstrem

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin yaitu dari 8,49 persen pada September 2021 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 4,88 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 di daerah perkotaan sebesar 8,76 persen, dan di daerah pedesaan sebesar 7,98 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin, sedangkan daerah pedesaan berkurang sebesar 0,28 poin jika dibandingkan September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp. 561.004,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 423.760,- (75,54 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 137.244,- atau sekitar 24,46 persen.

Pada periode September 2021 – Maret 2022, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

menunjukkan adanya penurunan. P1 turun dari 1,450 pada September 2021 menjadi 1,365 pada Maret 2022, dan P2 turun dari 0,382 menjadi 0.343. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berkurang. Selanjutnya P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, turunnya indeks ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran semakin baik atau merata

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pasal 4 ayat 2, menyatakan bahwa TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem serta berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/1682/Bangda dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2022 serta menindaklanjuti Arahan Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Republik Indonesia, Kemudian pada pasal 9 dan 11 Permendagri 53 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Gubernur Membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kemiskinan Ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan "**Absolute Poverty Measure**" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Lokasi dan sebaran masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yaitu tinggal di kawasan hutan atau daerah terisolasi, berada di wilayah sengketa, bertempat tinggal di daerah yang bukan hunian (kolong jembatan, rumah liar)

kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem tingkat pendapatan rumah tangga sangat rendah atau tidak ada pendapatan tidak memiliki pendidikan dan keterampilan sangat rendah atau tidak sekolah (pendidikan formal dan informal) rendahnya tingkat kesehatan dan tidak cukup memiliki akses ke fasilitas kesehatan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja sanitasi dan lingkungan hunian buruk.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Yang menyatakan Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 di fokuskan pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota:

1. Kabupaten Asahan yaitu 3,81 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 27,95 ribu jiwa),
2. Kabupaten Langkat 4 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 41,84 ribu jiwa
3. Kota Medan yaitu 2,61 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 59,82 ribu jiwa.
4. Kabupaten Simalungun yaitu 4,86 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 42,32 ribu jiwa
5. Kabupaten Nias Selatan yaitu 6,72 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 21,62 ribu jiwa.
6. Kabupaten Nias Barat yaitu 7,54 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 6,55 ribu jiwa.
7. Kabupaten Nias Utara yaitu 10,59 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 14,68 ribu jiwa.

Pada lampiran II Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait juga dinyatakan perluasan Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eksstrem tahun 2023-2024 di fokuskan pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kabupaten Nias	14. Kabupaten Serdang Bedagai
2. Kabupaten Mandailing Natal	15. Kabupaten Batu Bara
3. Kabupaten Tapanuli Selatan	16. Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Kabupaten Tapanuli Tengah	17. Kabupaten Padang Lawas

5. Tapanuli Utara	18. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
6. Kabupaten Toba Samosir	19. Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Kabupaten Labuhan Batu	20. Kota Sibolga
8. Kabupaten Dairi	21. Kota Tanjung Balai
9. Kabupaten Karo	22. Kota Pematang Siantar
10. Kabupaten Deli Serdang	23. Kota Tebing Tinggi
11. Kabupaten Humbahas	24. Kota Binjai
12. Kabupaten Pakpak Bharat	25. Kota Padangsidimpuan
13. Kabupaten Samosir	26. Kota Gunung Sitoli

TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi *Leading Sector* Pengentasan Kemiskinan (Ekstrem) yang melibatkan seluruh sektor OPD hingga pihak external seperti Perguruan Tinggi, masyarakat, OMS, CSR dan sebagainya. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Secara Komprehensif Dan Kolaboratif Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, Stakeholders Terkait Serta Masyarakat Melalui Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin, Pengembangan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil, Sinergi Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Arahan Presiden terkait Kemiskinan Ekstrem pada Rapat Terbatas TNP2K pada tanggal 4 Maret 2020 adalah :

1. Agar Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%;
2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa;
3. Validasi data agar mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*);
4. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran;
5. Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selanjutnya Arahan Wakil Presiden terkait Kemiskinan Ekstrem pada Rapat Pleno TNP2K pada tanggal 25 Agustus 2021 adalah :

1. Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas merumuskan “Manajemen Pengendalian Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem termasuk memastikan konvergensi dan Ketepatan Sasarannya;

2. Menko Bidang PMK mengkoordinasikan Percepatan Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pemuktakhiran DTKS yang terpadu (DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial), serta memastikan konvergensi program dan anggaran bansos;
3. Menko Bidang Perekonomian agar mempertajam program pemberdayaan, demikian pula program infrastruktur penunjang air bersih, sanitasi dan perumahan;
4. Kementerian Keuangan, Bersama Kementerian terkait, menindaklanjuti Pembangunan Sosial Registry;
5. Kementerian Sosial agar segera menuntaskan pemuktakhiran DTKS dengan menggunakan teknologi terbaik untuk menjamin akurasi dan kekinian data;
6. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, mengkonsolidasikan program dan anggaran K/L dan Pemda guna menghindari tumpang-tindih dan duplikasi;
7. Para Menteri dan Kepala Lembaga agar memastikan semua program dan kegiatan yang dikelola dapat diprioritaskan pada 212 Kabupaten/Kota Tahun 2022;
8. Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi dengan Sekretariat TNP2K untuk melengkapi daftar program dan kegiatan, termasuk melengkapi informasi penting lainnya, seperti lokus dan kriteria penerima manfaatnya. Jika sekiranya belum tercatat dalam daftar yang telah dibuat oleh Sekretariat TNP2K.

Peran Pemerintah Daerah melalui TKPK dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagai berikut :

1. Memastikan penanggulangan kemiskinan Ekstrem menjadi prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program daerah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem;
2. Mensinergikan program penanggulanagan kemiskinan ekstrem dari pemerintah daerah dan desa dengan program Kementrian/Lembaga untuk dapat diimplementasikan secara konvergen di tingkat desa dan menjangkau rumah tangga sasaran;

3. Melibatkan unsur non-pemerintahan (Pihak, Swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan unsur lainnya) dan memfasilitasi Sumber daya Non-Pemerintah (dana, Inovasi, dan lainnya) untuk dapat berperan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah;
4. Bersama aparat kecamatan/desa, fasilitator lokal dan perguruan tinggi melakukan monitoring pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.

Terdapat 3 (tiga) Pilar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pilar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

PILAR 1 Komitmen Pemerintah	PILAR 2 Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran		PILAR 3 Pemantauan dan Evaluasi
	Tingkat Pusat	Tingkat Daerah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Akomodasi penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP 2022-2024 (Bappenas) 3. Penetapan regulasi tentang prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan lokasi wilayah prioritas (Kemenko PMK, KSP, TNP2K) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimum) dan STPD (Standar Teknis Pelayanan Dasar) untuk urusan wajib (Seluruh KL) 2. Pengalokasian APBN (DAK, Transfer ke daerah dan Dana desa dan Dana Insentif Daerah (Kemenkeu) 3. Pedoman Penyusunan RPKD dan APBD (Kemendagri) 4. Pemutakhiran DTKS untuk penetapan sasaran (Kemensos) 5. Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial afirmasi lansia, Penyandang disabilitas, dan Program Lambahan (Kemensos, Bappenas, Kemenkeu) 6. Mendorong pelibatan sektor non-Pemerintah swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah daerah terhadap program nasional terkait cakupan penerima, Volume bantuan dan manajemen pelaksanaan (Bappeda) 2. Kreasi Program Komplemeter/i nsiatif daerah terkait penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis sector unggulan daerah (Lintas OPD) 3. Penguatan Kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait (Bappeda) 4. Penguatan Kemitraan pemerintah daerah dengan sektor non-pemerintah dan swasta local (BUMD, KADIN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan indikator/rujukan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem (BPS) 2. Menyusun mekanisme pemantauan yang dilakukan secara berkala (KSP, SETWAPRES) 3. Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten (KEMENDAGRI)

PILAR 1 Komitmen Pemerintah	PILAR 2 Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran		PILAR 3 Pemantauan dan Evaluasi
	(KemenBUMN, KADIN) 7. Edukasi Masyarakat (Kemenkominfo) 8. Akses Pelayan Dasar Kesehatan (Kemensos) 9. Akses Pelayanan Dasar Pendidikan (Kemendikbud)		

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah sebagaimana tertuang didalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
Provinsi Sumatera Utara

NO	ISU	STRATEGI
1.	Penguatan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Penyusunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023, Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2021-2022, serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) tahun 2021.
2.	Penguatan Regulasi	Pengesahan SK Gubernur Sumatera Utara terkait tim TKPK Provinsi dan Lintas <i>Stakeholders</i> tahun 2021-2024 Nomor 188.44/336/KPTS/2021 tahun 2021-2024 sesuai dengan amanat Permendagri nomor 53 tahun 2020.
3.	Penguatan Regulasi	Peningkatan Kapasitas TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota terutama dalam Fungsi pembinaan, sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan dokumen RPKD, RAT, dan LP2KD.
4.	Penguatan Regulasi	Pemprov Sumatera Utara melalui OPD lintas sektor pada TKPK Provinsi akan terus berkomitmen ke depannya untuk bersinergi dalam penyusunan basis data identifikasi masyarakat rentan miskin agar tidak menjadi miskin bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Sosial, BPS Provinsi Sumatera Utara, TNP2K RI serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya terutama dalam perbaikan data DTKS diaplikasi SIKS-NG pusat. agar memperbaiki pendataan penduduk dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin (40% orang-orang termiskin), melalui : <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan, verifikasi, Validasi, usulan data masyarakat rentan miskin yang diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial. • Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Sosial Provsu sebagai Wakil Sekretaris TKPK Provinsi ke depannya akan membangun system aplikasi pendukung terintegrasi dalam proses pemutakhiran data DTKS Kabupaten/Kota, sehingga Provinsi dapat bersinergi dengan efektif dan efisien dengan Kabupaten/Kota untuk proses pengumpulan data mutakhir, filterisasi data yang diperlukan sesuai dengan jenis Program

NO	ISU	STRATEGI
		Perlindungan Sosial serta updating data secara reguler untuk mendukung DTKS sebagai sumber referensi data dalam penanganan masyarakat miskin.
5.	Penguatan Regulasi dan Pendataan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Pemprov Sumatera Utara melalui OPD lintas sektor pada TKPK Provinsi Sumatera Utara akan terus berkomitmen ke depannya untuk menyusun basis data yang akurat dan relevan melalui usaha peningkatan kapasitas TKPK Daerah /Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi, validasi serta pemutakhiran usulan data masyarakat miskin DTKS ke Pusat melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial, dan meningkatkan sinergitas TKPK Kabupaten/Kota untuk proses pengumpulan dan updating data kemiskinan secara reguler untuk mendukung DTKS sebagai sumber data dalam penanganan masyarakat miskin serta akan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran coverage data pada aplikasi SIKS-NG tersebut
6.	Penguatan Regulasi dan Pendataan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Pemprov Sumatera Utara melalui TKPK Provinsi akan berkoordinasi dan bersinergi dengan TNP2K RI dan Kementerian/Lembaga terkait dalam usaha percepatan penyusunan instrument spesifik pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mengukur/menilai keberhasilan program/kegiatan tersebut dalam usaha penanggulangan kemiskinan.
7	Menurunkan beban pengeluaran	a. Bantuan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lansia dan Penyandang Disabilitas, b. Jaminan Sosial c. Perlindungan Sosial d. Subsidi e. Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatkan Pendapatan	a. Peningkatan Kapasitas serta Pernerdayaan Masyarakat miskin melalui pendampingan, Bumdes, Koperasi dan UMKM b. Pelatihan dan Perluasan akses pekerjaan (Kegiatan Pelatihan Padat Karya, Prakerja, Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya yang miskin dan marginal) c. Perluasan akses Modal dan Asuransi (Asuransi Tani, Ternak, dan Nelayan) d. Perluasan transfer asset (lahan, Sarana Produksi, dan ternak) e. Perluasan akses dan informasi pasar melalui digitalisasi.
9	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	a. Perluasan dan pemerataan akses layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan air bersih). b. Perluasan konektivitas wilayah (pembangunan jalan dan sarana transportasi, dan akses rumah layak huni serta akses air minum dan jaringan irigasi) c. Peningkatan komitmen dan sinergitas pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa (Pendataan masyarakat miskin serta penguatan peran TKPK Daerah).

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat

PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, masyarakat miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah:

- a. Menyediakan alokasi dana penyertaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan PKH,
- b. Memberikan informasi, edukasi dan pemahaman tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai;
- c. Menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan PKH;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Bansos PKH

c. Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO)

Konsep Program/kegiatan integrasi Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) Adalah konsep penanggulangan kemiskinan daerah yang bersifat inklusif dengan melibatkan lintas OPD Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi pada implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah tingginya tingkat kemiskinan yang tidak memiliki pekerjaan di Sumatera Utara. Sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan karena kesulitan berwirausaha dan memperoleh pekerjaan. Untuk itu diciptakanlah suatu kegiatan sebagai solusinya pemecahan masalah tersebut yaitu dengan peningkatan wirausaha dan pelatihan skill pada kelompok masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk menciptakan wirausaha dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga diperoleh manfaat berkurangnya

tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat miskin.

4.3.3. Penurunan Prevalensi Stunting

Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Arahan Presiden pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari Tahun 2022 yaitu :

1. Tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 3% melalui intervensi spesifik dan sensitif, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penguatan implementasi di Posyandu;
2. BKKBN sebagai Ketua Pelaksana TPPS perlu didukung oleh Kementerian/Lembaga lain
3. Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran, didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi
4. Alokasi anggaran Tahun 2022 melalui APBN dan APBD perlu dioptimalkan
5. Perlu dipastikan RAN PASTI digunakan sebagai pedoman.
6. Difokuskan pada daerah yang prevalensi stunting-nya tinggi

Provinsi Sumatera Utara mencatat penurunan stunting yang cukup signifikan; dari 30,07% pada tahun 2019 menjadi 25,8% pada tahun 2021. Namun masih berada dibawah capaian Nasional yang tercatat sebesar 24,4%. Adapun sebanyak 22 (dua puluh dua) Kabupaten/ Kota yang tingkat prevalensi stuntingnya masih diatas Provinsi Sumatera Utara, yaitu: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias, Kota

Padangsidempuan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Gunung Sitoli dan Kota Tanjung Balai.

Dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/801/KPTS/2021 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan *stunting*;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;
3. Membentuk atau memanfaatkan Tim Koordinasi yang sudah ada untuk penurunan *stunting* Kampanye dan promosi penurunan *stunting* dengan pendekatan Behavior Change Communication (BCC);
4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan *stunting* Kab/ Kota;
5. Penguatan kapasitas sumberdaya Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar Kabupaten/ Kota;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan *stunting* yaitu memonitoring pelaksanaan 8 (delapan) Aksi penurunan *stunting* terintegrasi di Kab/Kota;
8. Penilaian kinerja Kab/ Kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan *stunting* dan
9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan *stunting*

4.3.4. Pembangunan Daerah Tertinggal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah yang ditetapkan tertinggal. Sebaran daerah tertinggal itu berada di sejumlah Provinsi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Dengan adanya Perpres ini maka Kemendes PDTT bakal merumuskan kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal,

disebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Kabupaten Nias
2. Kabupaten Nias Selatan
3. Kabupaten Nias Utara
4. Kabupaten Nias Barat

Dukungan pemerintah terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu:

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Sumatera Utara;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan *stakeholder* lainnya dalam penentuan program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di kepulauan Nias;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan di daerah tertinggal yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

4.3.5. Pengarusutamaan Gender

Pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK nomor 119/2009, diperbaharui dengan PMK nomor 104/2010 dan diperbaharui dengan PMK nomor 93/2011. Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun

Gender Budget Statement (Lembar ARG)¹¹ atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Program Pengarusutamaan Gender adalah :

1. Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) di Provinsi Sumatera Utara
2. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender
3. Pembentukan Focal Point PUG yaitu aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing
4. Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

4.3.6. Bantuan Hibah Kepada BUMDes

Desa merupakan aset yang penting dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat Desa untuk membangun wilayahnya. Hal ini dikarenakan pembangunan dan pengembangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan lapangan kerja, berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Kebijakan nasional yang menjadikan sektor pariwisata sebagai masa depan Indonesia tidak terlepas dari potensi alam Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pantai, laut, pegunungan, suku, dan bahasa serta budaya. Salah satu potensi pariwisata yang patut dikembangkan adalah Desa Wisata yang merupakan perpaduan dari Desa dan Pariwisata. Namun pembangunan dan pengembangan

Desa Wisata ini selayaknya ditunjang dengan data dan informasi dalam perencanaan serta sarana dan prasarana yang terstandardisasi.

Desa Wisata merupakan suatu bentuk penyesuaian antara akomodasi, atraksi dan fasilitas pendukung lainnya yang disajikan pada suatu struktur yang menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karenanya, Desa Wisata harus memiliki konsep yang matang agar menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Walaupun hanya sebagai salah satu produk wisata alternatif, pembangunan dan pengembangan Desa Wisata harus direncanakan secara komprehensif dan holistik agar tujuan dari konsep pembangunan dan pengembangan Desa Wisata yang berkesinambungan tercapai yakni keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya masyarakat lokal.

Pengembangan Desa Wisata juga dapat mempercepat kemajuan Desa dari Desa Tertinggal menjadi berkembang yang pada akhirnya mampu menjadi Desa Mandiri. Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan juga adanya peran dari Lembaga/Instansi/Badan Usaha yang bisa membantu dari segala sektor dalam pengembangan Desa Wisata. Di samping itu, pengembangan desa wisata juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat di Desa dari lembaga-lembaga yang ada di Desa termasuk di dalamnya lembaga yang mengelola potensi Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan visinya “Sumatera Utara yang maju, aman dan martabat” dan misinya yaitu “Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, bermartabat dalam politik; bermartabat dalam pergaulan dan bermartabat dalam lingkungan untuk mewujudkan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Membangun Desa Menata Kota”.

Bantuan Hibah diberikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 90 antara lain menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan :

- a. Memberikan Hibah dan/atau akses permodalan.
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada pasal 3 ayat (1) huruf e menyebutkan “Belanja Hibah diberikan kepada Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia”. Dan Bumdes merupakan salah satu lembaga yang berbadan hukum yang berhak mendapat hibah.

Dalam rangka pengembangan desa wisata tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan Hibah Berupa Uang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Instansi yang memiliki tugas pokok dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat Desa melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan dan memberi wewenang secara proposional kepada Masyarakat dan Desa, ikut serta dalam melaksanakan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDes. Hibah dimaksud dikelola oleh BUMDes yang ada di Desa Wisata yang peruntukannya diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penerima bantuan hibah adalah BUMDes antara lain desa yang berada di Kawasan pariwisata maupun Kawasan lain yang memiliki kepentingan strategis pembangunan Sumatera Utara serta layak secara administrasi serta teknis setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

4.4. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA UTARA

4.4.1. Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (MEBIDANGRO)

- Mempunyai Landasan Hukum Dalam Perpres 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (Medan, Binjai, Deli Sedang Dan Karo) Tanggal 20 September 2011
- Metropolitan Mebidangro Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sekaligus Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)
- RTR bertujuan menciptakan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang aman, nyaman, produktif, berdaya, saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
- Menciptakan lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS; Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- Pembangunan Light rail Transit
- Jalan Tol Kota Medan
- Pembangunan waduk lau si memey
- Revitalisasi jalan medan-berastagi
- SPAM Regional (2200 I/detik)
- TPA Regional
- Sport Centre

4.4.2. PEMBANGUNAN RUSUNAWA KEK SEI MANGKEI

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah, salah satunya ialah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran UU 23/2014. Berikut isi Lampiran Terkait Kewenangan atas Penyediaan Pemukiman:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	
Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan
Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR		Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)

Merujuk pada Permen PUPR No. 1 Tahun 2018 Permen PUPR No.1/2018 adalah *peraturan yang berlaku bagi pembangunan Rumah Susun yang memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah pusat melalui APBN. Namun, deskripsi penerima manfaat dalam peraturan ini dapat dijadikan rujukan untuk untuk penentuan kebutuhan khusus untuk penyediaan rusun khusus* dan sebagai referensi, penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada:

1. Pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
2. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
3. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini sudah memiliki 13 (tiga belas) tenant dari beberapa investor yang sangat membutuhkan pelayanan dasar dan salah satunya ialah penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Menyikapi kebutuhan dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisiasi untuk melakukan penyediaan lahan disekitar KEK Sei Mangkei dan direncanakan untuk pembangunan Rusunawa bagi pekerja dan sekaligus diperuntukkan bagi relokasi masyarakat korban bencana maupun relokasi masyarakat terdampak program pembangunan Provinsi.

Selanjutnya diinformasikan bahwa Lahan tersedia dengan luasan 3.3 Ha

yang secara legal sudah menjadi asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kondisi lahan di atasnya sudah terbangun 1 (satu) Tower Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Optimalisasi lahan diupayakan untuk pengembangan Rusunawa/Apartemen dan hotel (Mix Used) serta bangunan pendukung lainnya yang kesemuanya pembangunan dilaksanakan melalui Skema KPBU.

Skema KPBU Rusunawa Terintegrasi disekitar KEK Sei Mangkei menjadi penting mengingat kondisi pekerja Sei Mangkei yang sangat membutuhkan perumahan yang dekat dengan area bekerja, rasa nyaman dan aman serta efefitas waktu juga produktivitas semakin meningkat sementara saat ini para pekerja bertempat tinggal jauh dari KEK Sei Mangkei.

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia– Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Pada tahun 2023 Pengembangan Wilayah Sumatera di Tahun 2023 diarahkan pada mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pengembangan wilayah tersebut dengan menggunakan :

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;

2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
3. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
4. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

4.4.3. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

- Pengembangan KEK Sei Mangkei tahap I seluas 104 Ha dan telah masuk pada tahap II, dengan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan seperti gedung pusat inovasi, jalan poros ROW 62 (3,4Km), jalan ROW 34 E (0,4Km), jalur KA (2,95 Km), Tank Farm (2 x 3.000 ton CPKO dan 1 x 5.000 ton CPO), Dry Port (2.300 TEUs, Tahap I), jaringan pipa gas 75 MMSCFD, jaringan listrik 150 KV/ 60 MVA, Unit pengolahan dan jaringan air minum (WTP) 250 m³/jam, Unit pengolahan dan jaringan limbah industry maupun domestik (WWTP) 250 M³/jam
- Dukungan fasilitas Perkotaan terhadap pengembangan KEK Sei Mangkei dan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei antara lain: penyediaan air minum, air limbah, persampahan, akses jalan permukiman, listrik, pasar, Rumah Sakit dan Sekolah Kejuruan dan fasilitas komersial (Hotel, SPBU, pertokoan
- PT. Kawasan Industri Nusantara (Pt. Kinra) merupakan anak perusahaan PTPN III yang menjadi Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei;

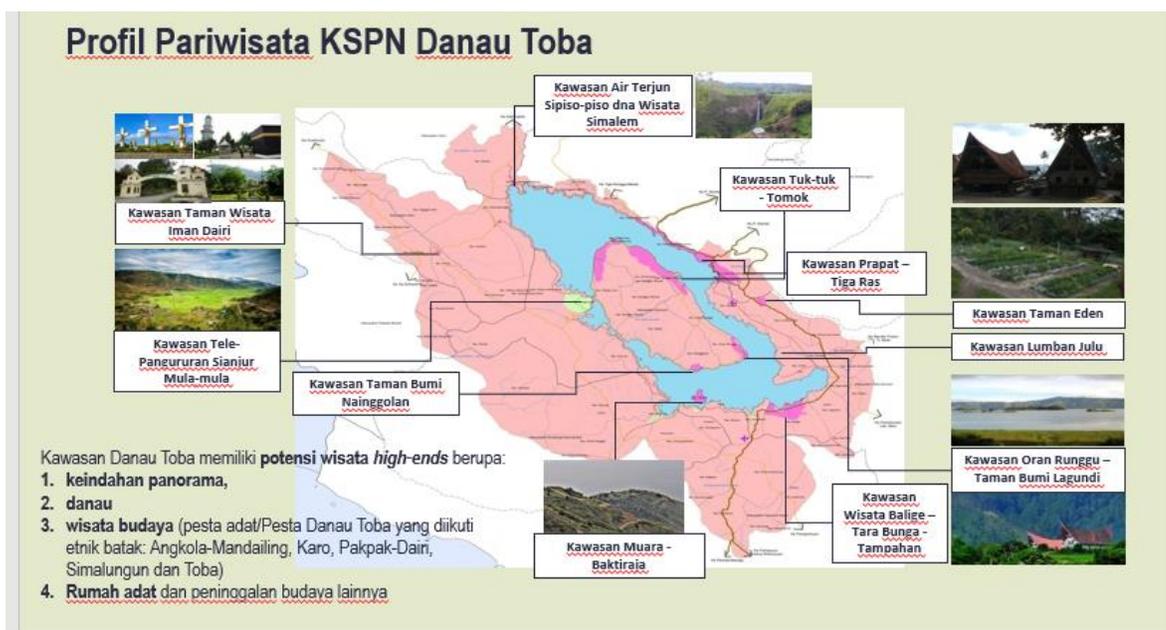
4.4.4. KSPN Danau Toba

- Merupakan daerah tujuan pariwisata sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 serta bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN)

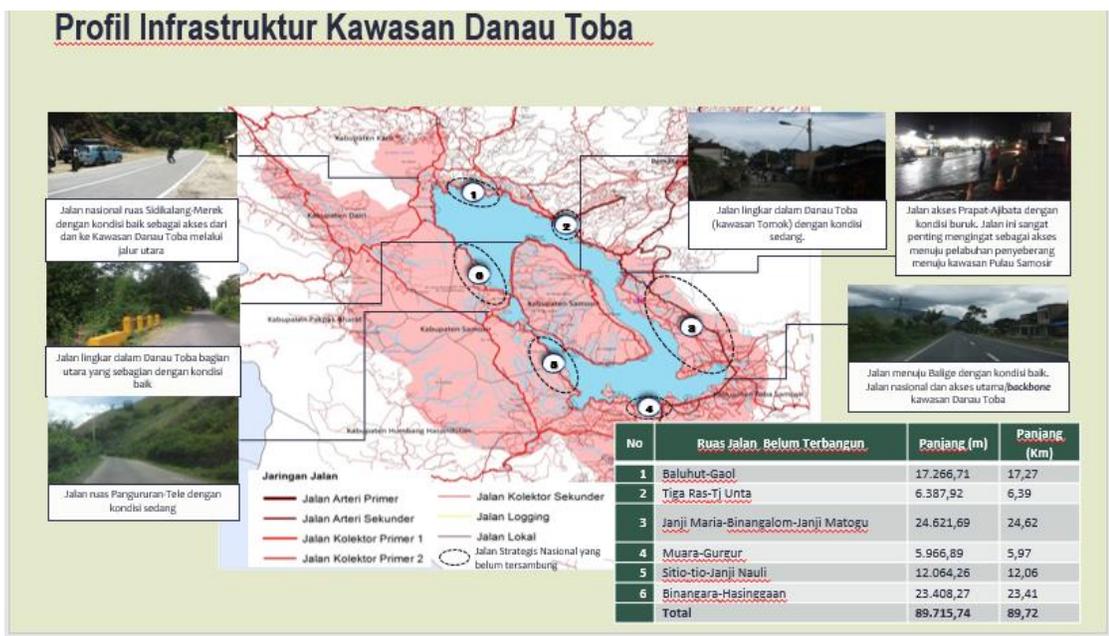
Danau Toba berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2014 Telah disahkan oleh Presiden per tanggal 13 Agustus 2014;

- Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Danau Toba telah diterbitkan Perpres No 49 Tahun 2016 pada tanggal 13 Juni 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dengan tugas utama Badan Otorita Danau Toba (BPODT) adalah sebagai Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas.
- Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai salah satu Geopark/Taman Bumi yang menggunakan konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan dengan penamaan Geopark Nasional Kaldera Toba.

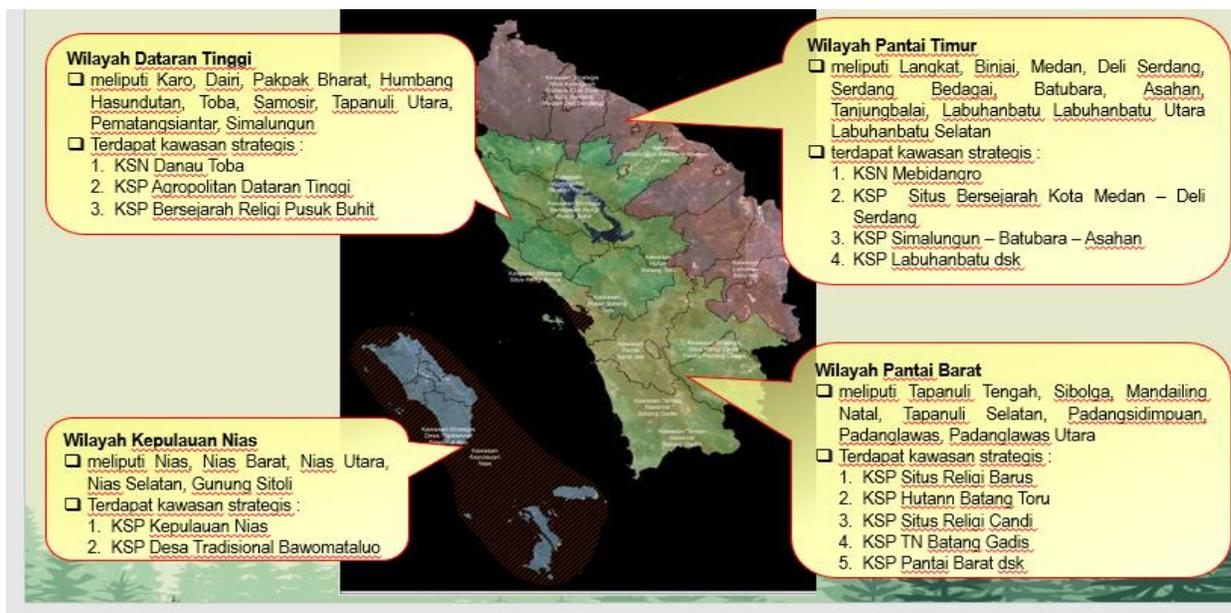
Gambar 4.2
Profil Pariwisata KSPN Danau Toba

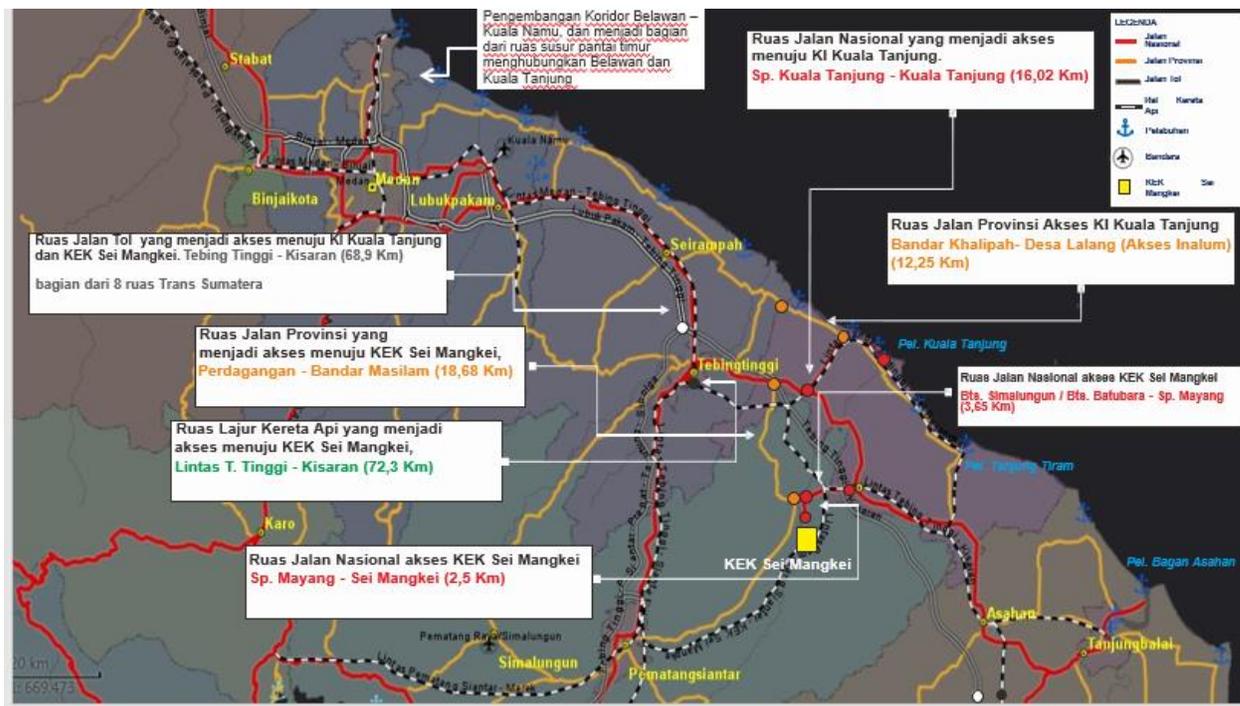


Gambar 4.3
Profil Infrastruktur Kawasan Danau Toba



Gambar 4.4
Pembagian Regionalisasi Wilayah Pengembangan (WP)





Gambar 4.5
Konektivitas Jalur Kereta Api



Gambar 4.6
Pengembangan Sistem Perkotaan



4.4.5. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rencana kegiatan pada Perangkat Daerah. Usulan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah antara lain meliputi :

1. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan;
2. Pembangunan sarana prasarana pencegah banjir;
3. Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;
4. Pembangunan sarana keagamaan;
5. Peningkatan keterampilan pemuda dan penciptaan lapangan kerja baru;

6. Peningkatan produksi pertanian, termasuk produktivitas petani, perbaikan saluran irigasi, pembangunan embung, penyediaan bibit/benih unggul dan membatasi alih fungsi lahan pertanian;
7. Peningkatan produksi peternakan, perikanan
8. Pembangunan bidang pariwisata;
9. Upaya penanggulangan dan pengelolaan sampah.

Tabel 4.10
Rekap Usulan Per Fraksi

No	Fraksi	Jumlah Usulan
1.	DEMOKRAT	310
2.	GERINDRA	315
3.	GOLKAR	809
4.	HANURA	355
5.	NASDEM	983
6.	NUSANTARA	454
7.	PAN	522
8.	PDI PERJUANGAN	1733
9.	PKS	329
Total		5810

Tabel 4.11
Rekap Usulan Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Usulan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	1979
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	627
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	168
8	Dinas Kehutanan	14
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	237
10	Dinas Kesehatan	11
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	335
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	139
13	Dinas Lingkungan Hidup	22
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	72
16	Dinas Pendidikan	269
17	Dinas Perhubungan	17
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69
19	Dinas Perkebunan	33

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Usulan
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	204
21	Dinas Sosial	168
22	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	694
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	543
24	Dinas Tenaga Kerja	32
25	Satuan Polisi Pamong Praja	14
Total		5768

Tabel 4.12
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Dokumen RKPD Provsu Tahun 2023

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Dolok	2 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Sungai Kanan	20 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Medan Polonia	1 Kelurahan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Normalisasi Sungai	Medan Selayang	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Petisah	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Polonia	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Benteng Penahan Banjir	Medan Johor	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Tuntungan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Benteng Penahan Banjir	Medan Tuntungan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Tuntungan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Drainase	Silangkitang	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rantau Utara	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Sanitasi MCK Individu (Jamban)	Rantau Utara	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Pangkalan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Drainase	Torgamba	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Medan Belawan	1000 liter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Benteng Penahan Banjir	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Medan Belawan	1000 orang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Medan Belawan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Labuhan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Medan Labuhan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Benteng Penahan Banjir	Medan Labuhan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Benteng Penahan Banjir	Medan Labuhan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Marelan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Medan Amplas	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Medan Amplas	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Denai	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Medan Denai	1000 orang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Benteng Penahan Banjir	Medan Marelan	1000 orang	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Medan Marelan	1000 orang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Labuhan	1000 orang	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	4.000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Drainase	Medan Petisah	1 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Drainase	Medan Helvetia	2 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Normalisasi Sungai	Aek Natas	4.000 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Normalisasi Sungai	Aek Natas	4.000 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Perbaikan tanggul kiri	Aek Natas	5.000 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Aek Natas	500 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Sipispis	7 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Sipispis	1 UNIT	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Sipispis	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Sipispis	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Sipispis	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan sarana air minum di pemukiman rawan air	Sipispis	7 ITEM	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Dolok Masihul	1 PAKET	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Perbaungan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Perbaungan	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Perbaungan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Normalisasi Sungai	Sei Bamban	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Padang Hulu	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Benteng Penahan Banjir	Bandar Khalifah	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Sei Rampah	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1 permohonan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Normalisasi Sungai	Seluruh Kecamatan	1 permohonan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Perkuatan Tebing Sungai	Pantai Labu	1 permohonan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Tembung	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Medan Tembung	50 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Labuhan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Labuhan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Denai	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Denai	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Tembung	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	100 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	13 titik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	550 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Marelan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Labuhan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1 kilometer	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Marelan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Seluruh Kecamatan	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Medan Tembung	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Tembung	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	75 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Medan Deli	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	200 meer	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	675 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Perjuangan	70 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	550 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	285 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Perjuangan	140 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Medan Perjuangan	19 m2	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	80 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	671.3 meter kubik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	77 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	180 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	86 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	125 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Jalan Lingkungan	Medan Deli	50 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Drainase	Seluruh Kecamatan	250 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	800 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Deli	65 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	100 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	200 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	250 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	220 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	65 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Perjuangan	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Medan Belawan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Sanitasi MCK Individu (Jamban)	Medan Belawan	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Gapura	Medan Belawan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	30 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Timur	60 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Timur	35 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Jalan Lingkungan	Medan Area	165 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Jalan Lingkungan	Medan Area	98 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Labuhan Deli	52 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Percut Sei Tuan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Seluruh Kecamatan	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Seluruh Kecamatan	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pagar Merbau	100 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pancur Batu	100 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Bangun Purba	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Patumbak	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Patumbak	100 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Pagar Merbau	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	STM Hilir	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	STM Hilir	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Deli Tua	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Drainase	Deli Tua	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Pancur Batu	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Sunggal	100 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Drainase	Sunggal	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Sunggal	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Lubuk Pakam	100 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tanjung Morawa	1 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Tanjung Morawa	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Tanjung Morawa	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Johor	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Medan Selayang	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Adian Koting	5 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Benteng Penahan Banjir	Muara	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Adian Koting	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tiganderket	1 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Tiganderket	1 Unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Kabanjahe	1 Unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Kabanjahe	1 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1 Unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Kabanjahe	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kabanjahe	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabanjahe	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Peningkatan Drainase	Kabanjahe	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Simpang Empat	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Drainase	Tigapanah	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Kabanjahe	30 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tanjung Balai	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tinggi Raja	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tinggi Raja	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tinggi Raja	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tinggi Raja	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tinggi Raja	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tinggi Raja	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tinggi Raja	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Tinggi Raja	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tinggi Raja	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tinggi Raja	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Tinggi Raja	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Tinggi Raja	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Setia Janji	1000 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Setia Janji	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Setia Janji	1000 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Setia Janji	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Setia Janji	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Setia Janji	1000 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Setia Janji	1500 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Setia Janji	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Setia Janji	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan tebing pencegah longsor	Seluruh Kecamatan	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Air Joman	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Tanjung Balai	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Air Joman	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Joman	1500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sumur Bor	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Tanjung Balai	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sumur Bor	Tanjung Balai	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Tanjung Balai	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Tanjung Balai	3000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan sarana air minum di pemukiman rawan air	Silau Laut	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan embung	Sitelu Tali Urang Julu	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Salak	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Sitelu Tali Urang Julu	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Silima Pungga Pungga	350 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Silima Pungga Pungga	400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Silima Pungga Pungga	1 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Sidikalang	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Silima Pungga Pungga	400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Lae Parira	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Lae Parira	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Silima Pungga Pungga	240 KK	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Mardingding	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Laubaleng	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Merek	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan embung	Munte	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Juhar	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Juhar	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Juhar	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Juhar	100 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Seluruh Kecamatan	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Juhar	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Juhar	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	307 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	200 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	60 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	300 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	1 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	3 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	1 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	4 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	2 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	28 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	2 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	2 lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Siantar Barat	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Siantar Timur	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Siantar Sitalasari	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Siantar Martoba	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1.500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Siantar Selatan	2.000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Siantar Barat	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Gunung Maligas	400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Ujung Padang	3.000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perkuatan Tebing Sungai	Ujung Padang	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Huta Bayu Raja	1.200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jawa Maraja Bah Jambi	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tanah Jawa	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panombeian Pane	1.000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panombeian Pane	400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panombeian Pane	1.000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tanah Jawa	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Gunung Maligas	2.5000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Seluruh Kecamatan	1.142 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Girsang Sipangan Bolon	2.000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Pematang Bandar	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Benteng Penahan Banjir	Batang Lubu Sutam	100 1	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Normalisasi Sungai	Sei Rampah	1 permohonan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Angkola Timur	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sapirook	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Padang Bolak	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Padangsidimpuan Hutaimbaru	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sapirook	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Toilet Umum	Arse	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Angkola Sangkunur	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Pembangunan Toilet Umum	Angkola Sangkununur	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Batang Toru	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Luahagundre Maniamolo	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Pulau-Pulau Batu	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Ulususua	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Ulususua	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Break Water / Bronjong	Ulususua	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Break Water / Bronjong	O'o'u	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	O'o'u	35 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	O'o'u	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan tebing pencegah longsor	Seluruh Kecamatan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Seluruh Kecamatan	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Toma	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Toma	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Toma	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Toma	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehab Waduk.	Gido	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	20 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Gunungsitoli	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Gunungsitoli	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Break Water / Bronjong	Angkola Sangkunur	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Angkola Timur	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Drainase	Sayur Matinggi	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Break Water / Bronjong	Sayur Matinggi	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Sayur Matinggi	5 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Drainase	Sayur Matinggi	1 kecamatan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sayur Matinggi	1 kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Balige	1 Unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Tarutung	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Tarutung	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Tarutung	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Tarutung	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Adian Koting	1200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Siatas Barita	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Sarudik	4000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Pandan	2500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Balige	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Balige	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tarutung	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Tarutung	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Siatas Barita	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adian Koting	2300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adian Koting	2275 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adian Koting	1050 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adian Koting	1100 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adian Koting	2400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adian Koting	1400 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Sipoholon	2450 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tarutung	2450 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tarutung	2200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Sipoholon	2050 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Pematang Bandar	80 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Pematang Bandar	50 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Pematang Bandar	60 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tarutung	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tarutung	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tarutung	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Jalan Lingkungan	Tarutung	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Simpang Empat	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Simpang Empat	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Simpang Empat	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Teluk Dalam	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Bandar Pasir Mandoge	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
Golkar	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Salapian	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
Golkar	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Bahorok	5 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Drainase	Kualuh Selatan	1 lokasi	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Kualuh Selatan	2 titik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Panai Hulu	100 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Panai Hulu	2 titik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Drainase	Bilah Hilir	10 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Bilah Hilir	2 titik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Break Water / Bronjong	Pangkatan	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pangkatan	100 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Rantau Selatan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Rantau Selatan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Break Water / Bronjong	Rantau Selatan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Benteng Penahan Banjir	Rantau Utara	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan tebing pencegah longsor	Rantau Selatan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Benteng Penahan Banjir	Rantau Utara	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Benteng Penahan Banjir	Rantau Utara	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Break Water / Bronjong	Rantau Utara	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pintu Air Penahanan Banjir	Rantau Utara	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Benteng Penahan Banjir	Rantau Selatan	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Rantau Utara	10 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Girsang Sipangan Bolon	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Girsang Sipangan Bolon	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Siantar Marihat	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Siantar Marihat	50 orang	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Sarana Prasarana Olahraga	Siantar Marihat	1 set	Dinas Pemuda dan Olahraga	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Program Keluarga Harapan (PKH)	Siantar Marimbun	1 paket	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Siantar Marimbun	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pengadaan Ambulance	Siantar Timur	2 unit	Dinas Kesehatan	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Program Bantuan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Siantar Martoba	1 paket	Dinas Tenaga Kerja	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Girsang Sipangan Bolon	1 paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Siantar Marimbun	1 paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Dolok Pardamean	1 paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Siantar	1 paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Siantar Barat	1 paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Panombeian Pane	1 paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Girsang Sipangan Bolon	2 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Girsang Sipangan Bolon	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Siantar Marihat	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Sosial Lainnya	Kotapinang	1 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Medan Belawan	1 Permohonan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Ulu Sosa	485000000 Renovasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Huta Raja Tinggi	871740000 Renovasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Lubuk Barumon	292700000 Renovasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Sosopan	350000000 Renovasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Kota Kisaran Barat	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Kota Kisaran Timur	1 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Kota Kisaran Timur	1 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Teluk Dalam	3 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Lima Puluh	1 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Air Putih	1500 m	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medang Deras	2000 m	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Lima Puluh Pesisir	5 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Drainase	Lima Puluh Pesisir	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Sei Dadap	2000 m	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Drainase	Silau Laut	2000 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Air Putih	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medang Deras	1 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Sei Suka	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Pulo Bandring	2 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Ternak	Bandar Pasir Mandoge	1000 Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Lima Puluh Pesisir	500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PAN	Pembangunan Jembatan	Datuk Lima Puluh	30 m	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Seluruh Kecamatan	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Simpang Empat	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Simpang Empat	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Air Joman	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Sei Suka	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Medang Deras	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Padang Bolak	500 juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Jalan	Halongonan Timur	3 Miliyar	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Selesai	1 p	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Pupuk	Selesai	1 paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Binjai Utara	1 p	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sapi	Lima Puluh	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sapi	Sei Kepayang	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Medang Deras	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pengadaan Media Pendidikan SMA	Sei Kepayang Barat	1 Paket	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Tanjung Tiram	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Benteng Penahan Banjir	Datuk Bandar	55 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NUSANTARA	Benteng Penahan Banjir	Datuk Bandar	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Sei Kepayang Timur	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Air Batu	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Bibit Tanaman	Kota Kisaran Barat	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pemberantasan Narkoba	Datuk Bandar	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Sei Tualang Raso	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Medang Deras	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Medang Deras	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Normalisasi Sungai	Medan Johor	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Johor	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pemberantasan Narkoba	Medan Petisah	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Medan Petisah	1 Paket	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 3R	Medan Polonia	1 Paket	Dinas Lingkungan Hidup	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Polonia	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Polonia	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Medan Barat	1 Paket	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera utara	Medan Barat	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembangunan Damparit	Medan Barat	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PKS	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Seluruh Kecamatan	1 permohonan	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
PKS	perbaikan dan pengaspalan jalan	Seluruh Kecamatan	1 permohonan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Medan Polonia	1 Permohonan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Sunggal	1 Permohonan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Panei	5 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Ternak	Siantar	30 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Pulau Rakyat	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Pulau Rakyat	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Aek Ledong	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Aek Ledong	1 Paket	Satuan Polisi Pamong Praja	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Rehab Jalan.	Aek Kuasan	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Seluruh Kecamatan	5 milyar	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Seluruh Kecamatan	5 milyar	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Sei Bingei	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Sei Bingei	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Sei Bingei	601929200 rupiah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Binjai Barat	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GOLKAR	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Binjai Barat	1 Paket	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Binjai Barat	1 Paket	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pemberantasan Narkoba	Binjai Barat	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner	Binjai Selatan	1 Paket	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Binjai Selatan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Binjai Selatan	1 Paket	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembah Sorik Marapi	2000000000 Rupiah	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Seluruh Kecamatan	2000000000 Rupiah	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Alat Kesenian Budaya	Panyabungan Selatan	1 Paket	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Batahan	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Peningkatan Drainase	Batahan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pemberantasan Narkoba	Panyabungan	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Panyabungan	1 Mesjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Huta Bargot	1 Sekolah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Huta Bargot	1 Sekolah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Siabu	1500000000 Rupiah	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Huta Bargot	500 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GERINDRA	Benteng Penahan Banjir	Huta Bargot	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pemberantasan Narkoba	Huta Bargot	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pengadaan Ambulance	Huta Bargot	1 Mobil	Dinas Kesehatan	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Panyabungan Selatan	1 Mesjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Perkuatan Tebing Sungai	Batang Natal	150 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Panyabungan	50 Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pengadaan Bibit	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Barumun	1 Mesjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Barumun	1 Mesjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Sosa	1 Sekolah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Sawit Seberang	150 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Kursi Roda	Hinai	1 kursi	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Pemberantasan Narkoba	Binjai Timur	9 kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Tanjung Pura	1 permohonan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Seluruh Kecamatan	100 mesin	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Seluruh Kecamatan	100 mesin	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	100 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Sarana Prasarana Olahraga	Seluruh Kecamatan	200 alat	Dinas Pemuda dan Olahraga	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PKS	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Seluruh Kecamatan	1000 Orang	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Pembangunan Break Water / Bronjong	Binjai Kota	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Binjai Utara	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PKS	Bantuan Sapi	Hinai	50 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	STM Hilir	10 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya	STM Hilir	192 m2	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sibiru-biru	5000 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya	STM Hulu	2 ruang kelas	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Namorambe	250 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Namorambe	2 unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Hampanan Perak	1 unit	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Seluruh Kecamatan	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Seluruh Kecamatan	1000 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Hampanan Perak	1000 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Hampanan Perak	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Hampanan Perak	3500 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Pancur Batu	350 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Pancur Batu	1000 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
HANURA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Pancur Batu	1250 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Seluruh Kecamatan	5000 meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Peningkatan Drainase	Tanjung Morawa	1000 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Besitang	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Besitang	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Gebang	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Hamparan Perak	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Secanggang	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Tanjung Pura	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Binjai Barat	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Seluruh Kecamatan	1 PAKET	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Perbaikan tanggul kiri	Sibiru-biru	5 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Sarana Prasarana Olahraga	Seluruh Kecamatan	50 set	Dinas Pemuda dan Olahraga	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Bibit Tanaman	Seluruh Kecamatan	1000 buah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sibolangit	1 set	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Bibit Ternak	Seluruh Kecamatan	500 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Pembangunan Laboratorium komputer beserta perabotnya	Sibolangit	20 set	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GOLKAR	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Ujung Padang	200 juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Pupuk	Perbaungan	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Perbaungan	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Sei Rampah	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Benteng Penahan Banjir	Sei Rampah	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Tebing Tinggi	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Medan Labuhan	1 Masjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	238 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Tembung	30 UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Tembung	127 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pemberantasan Narkoba	Medan Tembung	1 Wilayah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Alat Kesenian Budaya	Sibolga Kota	100 Unit	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Bibit Ternak	Salapian	20 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Bibit Ternak	Salapian	50 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Bibit Ternak	Salapian	20 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Deli	1 unit	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Deli	1 Unit	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Marelan	1 Kilometer	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Marelan	100 Meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Marelan	100 Meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Marelan	200 Meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Marelan	300 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Marelan	200 Meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Perjuangan	25 Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembuatan Rumah Sampah (Pupuk Kompos)	Medan Perjuangan	10 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 3R	Medan Labuhan	100 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 3R	Medan Belawan	50 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Area	100 Meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Program Keluarga Harapan (PKH)	Medan Area	67 KK	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Area	30 Usaha	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Area	200 Meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Area	30 Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pemberantasan Narkoba	Medan Denai	66 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pengadaan lampu penerangan di permukiman warga.	Medan Denai	100 Unit	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Denai	1000 Meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Medan Denai	54 Usaha	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Denai	100 Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Timur	30 umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Marelan	150 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Perbaikan/renovasi Sekolah	Medan Timur	1 sekolah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Perbaikan/renovasi Sekolah	Medan Marelan	1 sekolah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Medan Amplas	1 Masjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Medan Deli	1 Masjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Medan Marelan	1 Masjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Medan Deli	1 Masjid	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Medan Area	40 KK	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pemberantasan Narkoba	Medan Amplas	30 KK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Amplas	100 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Medan Amplas	40 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Peningkatan Drainase	Medan Deli	200 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera utara	Medan Deli	40 KK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	perbaikan dan pengaspalan jalan	Medan Deli	1 kilometer	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Rehabilitasi Jembatan	Medan Deli	15 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Medan Deli	1 sekolah	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Medan Deli	50 KK	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Medan Deli	40 KK	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Medan Deli	35 KK	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Kelitbangan yang mendukung bidang Sosial dan Kependudukan	Medan Deli	30 KK	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dolok Sanggul	2 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Sijamapolang	1.5 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tarabintang	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Lintong Nihuta	2 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Sijamapolang	1 lokasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Dolok Sanggul	1 lokasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Tambahan Modal Pembudidaya Ikan	Parlilitan	10.000 ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Bibit Tanaman	Tarabintang	5.000 kg	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Bibit Ternak	Tarabintang	5000 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pollung	1000 Jiwa	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Onan Ganjang	1000 Jiwa	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Pupuk	Lintong Nihuta	1000 kg	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Lintong Nihuta	3 unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Lintong Nihuta	100 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
HANURA	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pakkat	7 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan sarana air minum di pemukiman rawan air	Palipi	1 Paket	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	Sitio-tio	1 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Bantuan Ternak	Pakkat	10 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	Palipi	300 m	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan embung	Dolok Sanggul	200 ha	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	Dolok Sanggul	500 m	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
HANURA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pakkat	1000 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Percut Sei Tuan	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Tanjung Morawa	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	perbaikan dan pengaspalan jalan	Kutalimbaru	1 Km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Batang Kuis	1 Paket	Satuan Polisi Pamong Praja	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Percut Sei Tuan	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Benteng Penahan Banjir	Percut Sei Tuan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Batang Kuis	1 Paket	Dinas Sosial	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Sunggal	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Sosial Lainnya	Tanjung Morawa	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NUSANTARA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Hamparan Perak	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	STM Hilir	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Tanjung Morawa	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Galang	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NUSANTARA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Beringin	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Seluruh Kecamatan	1 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Silaen	1 paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pengadaan Perangkat / Rambu-rambu Jalan	Balige	1 paket	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehab Jalan.	Balige	3 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Ruang Belajar Sekolah	Balige	3 unit	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bibit Tanaman Perkebunan	Nassau	1 paket	Dinas Perkebunan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Silaen	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Silaen	1 paket	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Laguboti	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jembatan	Siantar Narumonda	1 paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Laguboti	500 m	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Silaen	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jalan	Nassau	30 km	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Pengadaan lampu penerangan di permukiman warga.	Porsea	30 unit	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Porsea	1500 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Parmaksian	15 m	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Jalan Lingkungan	Balige	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Medan Timur	1 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Medan Area	1 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Seluruh Kecamatan	500 Juta	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sosial Lainnya	Seluruh Kecamatan	500 juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pengadaan Mobiler Sekolah	Tanjung Balai Utara	5 Miliar	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Silimakuta	1 Rumah Ibadah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Pematang Sidamanik	1 Rumah Ibadah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Panombeian Pane	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Sekolah / Lembaga / Yayasan Pendidikan	Lahusa	500472670 juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Rehab Jalan.	Lahomi	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Pupuk	Amandraya	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Amandraya	233675000 Juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Tuhemberua	167000000 Juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Aramo	150000000 Juta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
GOLKAR	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Lahomi	1000000000 Milyar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembuatan Gapura Obyek Wisata	Lolowau	500000000 Juta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Pupuk	Amandraya	10 Ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Break Water / Bronjong	Amandraya	25 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Tambahan Modal Pembudidaya Ikan	Amandraya	1000000000 Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Onohazumba	5000000000 Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Lolowau	2500000000 Juta	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Idanogawo	2000000000 Milyar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Rehab Jalan.	Alasa Talumuzoi	5000000000 Milyar	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Medan Selayang	50 KEPALA KELUARGA	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pintu Air Penahanan Banjir	Medan Selayang	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Medan Selayang	300 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Medan Selayang	500 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya	Torgamba	120 M2	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Onan Ganjang	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Dolok Sanggul	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehab Jalan.	Dolok Sanggul	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dolok Sanggul	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Tarabintang	1 Paket	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tarabintang	400 meter	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jalan	Tarabintang	250 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan jaringan irigasi	Tarabintang	700 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tarabintang	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehab Jalan.	Tarabintang	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Penambahan Guru	Tarabintang	6 Paket	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	Dolok Sanggul	3 Km	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Ternak	Dolok Sanggul	3 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Pakkat	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	perbaikan dan pengaspalan jalan	Lintong Nihuta	2500 meter	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Lintong Nihuta	7 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Pupuk	Gunungsitoli Idanoi	100 Ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jalan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Ma'u	1 Paket	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Ma'u	100 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Normalisasi Sungai	Gunungsitoli	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Ulugawo	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Rehab Jalan.	Gunungsitoli Selatan	1 Paket	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Lotu	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Bawolato	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Bawolato	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Idanogawo	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Drainase	Laguboti	1 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Laguboti	1 paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Wampu	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Padang Tualang	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Sei Lapan	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Batang Serangan	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Pandan	60.000 meter	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata.	Seluruh Kecamatan	4 Keg	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata.	Seluruh Kecamatan	1 Keg	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata.	Seluruh Kecamatan	7 Keg	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata.	Barus	1 Kegiatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Seluruh Kecamatan	4 Sekolah	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Pembangunan Jalan	Sosorgadong	100 %	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Program Bantuan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Seluruh Kecamatan	1 Keg	Dinas Tenaga Kerja	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Ulu Pungkut	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Kotanopan	1 paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya	Kotanopan	1 paket	Dinas Pendidikan	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Tambangan	1 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Bantuan Bibit Tanaman	Puncak Sorik Marapi	1 paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pematang Bandar	30 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Tapian Dolok	1 Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Tapian Dolok	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Bibit Ternak	Dolok Batu Nanggar	30 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Perbaikan/renovasi Sekolah	Dolok Batu Nanggar	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Panei	15 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Panombeian Pane	15 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Panombeian Pane	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Panei	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Panei	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Pupuk	Panei	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
NASDEM	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Dolok Panribuan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dolok Panribuan	15 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pengadaan Bibit	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Bibit Ternak	Dolok Panribuan	30 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Dolok Panribuan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan tebing pencegah longsor	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Dolok Panribuan	1 Paket	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Validasi Mitra Bappeda
NASDEM	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Pematang Sidamanik	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Percut Sei Tuan	1 set	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Percut Sei Tuan	350 meter	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Percut Sei Tuan	3 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Binjai	1000 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Binjai	1300 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PAN	Jalan Lingkungan	Secanggang	1200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	650 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	250 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Hinai	250 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Hinai	800 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	100 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Wampu	200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Hinai	200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Tanjung Pura	500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Secanggang	300 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Secanggang	250 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Drainase	Secanggang	300 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Padang Tualang	200 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Wampu	500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	1000 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PAN	Pembangunan Drainase	Binjai	3000 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Stabat	2500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Drainase	Hinai	1000 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Hinai	2000 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	450 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Tanjung Pura	2700 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Binjai	300 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Gebang	800 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Besitang	1000 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Bahorok	1500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Berandan Barat	500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tanjung Pura	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan Break Water / Bronjong	Stabat	1500 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Secanggang	400 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Secanggang	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Hinai	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Stabat	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Stabat	10 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Stabat	1500 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Sei Lapan	500 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Binjai	500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Binjai	500 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Pembangunan tebing pencegah longsor	Tanjung Pura	3500 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Jalan Lingkungan	Secanggang	500 METER	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Wampu	1500 METER	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Medan Timur	5 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Medan Kota	2 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Perbaikan tanggul kiri	Medan Labuhan	5 km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan jaringan irigasi	Raya	400000000 pembangunan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Raya	300000000 renovasi	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Bantuan Untuk Rumah Ibadah	Raya	120000000 renovasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan Drainase	Raya	200000000 pembangunan	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Perbaikan tanggul kiri	Silau Laut	1 paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Tigapanah	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sumur Bor	Tigapanah	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Tigapanah	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Merek	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Merek	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Tigapanah	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Sumur Bor	Tigapanah	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Kabanjahe	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Kabanjahe	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Kabanjahe	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan jaringan irigasi	Merek	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Merek	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Mardingding	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Mardingding	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Mardingding	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Mardingding	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Laubaleng	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Bantuan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi	Laubaleng	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)				
PDI PERJUANGAN	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehab Waduk.	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Kelitbangan yang mendukung bidang Inovasi dan Teknologi	Munte	1 Paket	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Munte	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan jaringan irigasi	Juhar	1 Km	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehab Waduk.	Juhar	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tigabinanga	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Normalisasi Sungai	Tigabinanga	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan Sumur Bor	Siborong-Borong	4 JET PUMP	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan Sumur Bor	Adian Koting	3 JET PUMP	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tarutung	3 TITIK	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan Sumur Bor	Siborong-Borong	3 JET PUMP	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
DEMOKRAT	Pembangunan Sumur Bor	Siborong-Borong	3 JET PUMP	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Meranti	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Sei Dadap	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Air Batu	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda

Fraksi	Usulan	Lokasi	Volume	OPD Tujuan Awal	Keterangan
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Pulau Rakyat	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembangunan Drainase	Kota Kisaran Barat	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Meranti	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Bandar Pulau	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PDI PERJUANGAN	Peningkatan Drainase	Bandar Pasir Mandoge	1 Paket	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembuatan Sakuran Air (Drainase)	Medan Marelan	20 KM	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GERINDRA	Pembangunan Pintu Klep	Medan Marelan	2 KM	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Fanayama	1000 kubik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Somambawa	1000 kubik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Amandraya	3000 kubik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
PAN	Tembok penahan tanah/talud sungai.	Mazino	2000 kubik	Dinas SDA, Cipta Karta dan Tata Ruang	Validasi Mitra Bappeda
GOLKAR	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Ajibata	500 Kartu Keluarga	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda

4.5. Inovasi Dalam Proses Perencanaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas capaian keberhasilan pembangunan Sumatera Utara perlu adanya dukungan berupa inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah. Inovasi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi koordinator perencanaan pembangunan di daerah.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 dan terus mengalami pengembangan ke tingkat yang lebih baik sampai dengan tahun 2023, diantaranya yaitu:

1) Pengembangan Inovasi Aplikasi Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA)

Dalam keterkaitannya dengan tugas BAPPEDA sebagai Organisasi Pemerintah Daerah perencanaan pembangunan diperlukan suatu sistem yang mengimplementasikan proses perencanaan komprehensif sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, memberikan kemudahan pada pelaporan dan konsolidasi data serta memudahkan konsistensi pengelolaan data perencanaan pembangunan, diharapkan melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Pengendalian Terpadu Terintegrasi bagi proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di Bappeda dan OPD lain, terkait dengan proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi.

Pengendalian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui pembangunan **Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA)** yang dapat digunakan untuk proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan daerah serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, yang memiliki ruang lingkup antara lain: Pengendalian proses perencanaan; Pengendalian proses penganggaran;

Pengendalian proses pelaksanaan; dan Pengendalian proses pelaporan/evaluasi.

➤ **Tujuan**

Tujuan adanya aplikasi Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring pengendalian/evaluasi yang mempedomani RPJMD sebagai koridor arah pembangunan daerah
2. Pemantauan indikator RPJMD guna penentuan prioritas pembangunan dan penetapan lokus pembangunan daerah berbasis perencanaan kewilayahan
3. Kemudahan, kecepatan dan konsistensi dalam membantu proses penyusunan dokumen yang terstruktur

➤ **Manfaat**

Manfaat adanya aplikasi Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data perencanaan pembangunan.
2. Konsistensi dokumen usulan program, kegiatan sampai dengan indikator mulai dari RPJMD sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
3. Ketersediaan data dalam bentuk rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat guna kepentingan fungsi kontrol perencanaan pembangunan daerah.

2) Aplikasi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)

Kolaborasi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui pembangunan aplikasi **Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)** yang dapat digunakan untuk proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan daerah serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, yang memiliki ruang lingkup antara lain: Pengendalian proses perencanaan; Pengendalian proses penganggaran; Pengendalian proses pelaksanaan; dan Pengendalian proses pelaporan/evaluasi.

Diharapkan dengan berjalannya aplikasi **Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)** dapat juga meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

➤ **Tujuan aplikasi ini adalah sebagai berikut:**

1. Konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring pengendalian/evaluasi yang mempedomani RPJMD sebagai koridor arah pembangunan daerah;
2. Pemantauan indikator RPJMD guna penentuan prioritas pembangunan dan penetapan lokus pembangunan daerah berbasis perencanaan kewilayahan;
3. Kemudahan, kecepatan dan konsistensi dalam membantu proses penyusunan dokumen yang terstruktur

➤ **Manfaat**

Manfaat adanya aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data perencanaan pembangunan.
2. Konsistensi dokumen usulan program, kegiatan sampai dengan indikator mulai dari RPJMD sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
3. Ketersediaan data dalam bentuk rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat guna kepentingan fungsi kontrol perencanaan pembangunan daerah.
4. Diharapkan dengan berjalannya aplikasi **Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)** dapat juga meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

3) Pengembangan Kegiatan Inovasi dan Kreatif Daerah (SITANTRI)

Pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara menambahkan inovasi baru berupa SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED FARMING*)

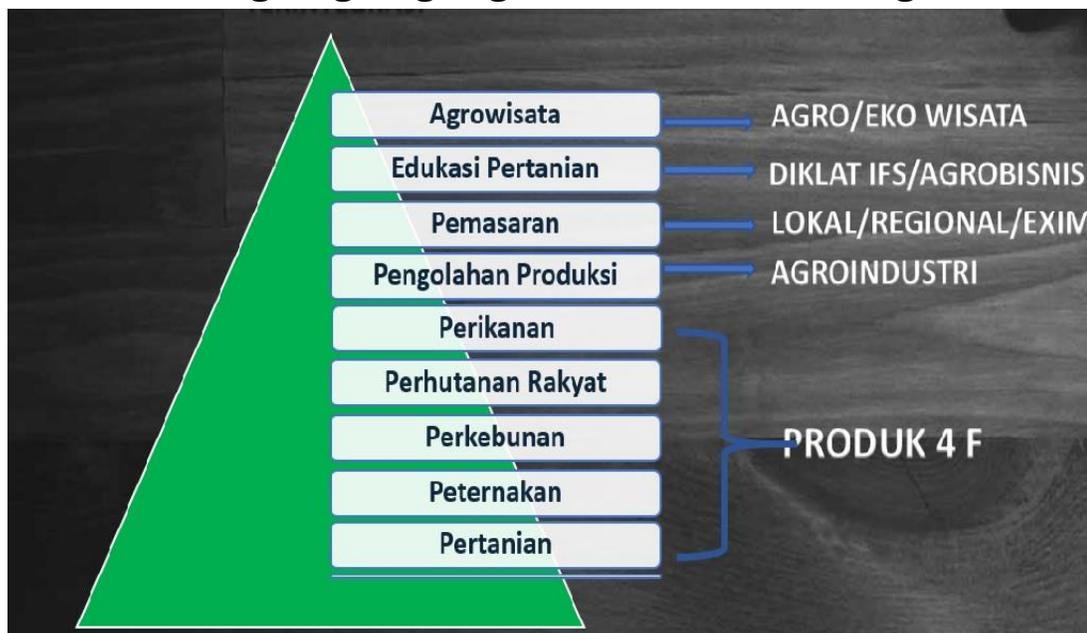
SYSTEM/IFS). Sistem Pertanian Terintegrasi (Integrated Farming System/IFS)

Merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan sub sektor pertanian (tanaman, ternak, ikan) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumberdaya (lahan, manusia, faktor tumbuh), kemandirian, kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Maksud dan tujuan pembangunan SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED FARMING SYSTEM/IFS*) adalah :

1. Mendukung berkembangnya diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agribisnis;
2. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, mendukung pembangunan ramah lingkungan, bersih dan hijau (*clean and green*) serta program pengembangan pertanian organik;
3. Kegiatan utama adalah integrasi tanaman dan ternak dengan kelengkapan seperti unit pengolah kompos, pengolah pakan, instalasi bio urine dan biogas;
4. Dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan target peningkatan pendapatan petani.

Gambar 4.7
Ruang Lingkung Kegiatan Pertanian Terintegrasi



Ragam Sistem Pertanian Terintegrasi (fokus komoditi) ditujukan pada:

1. Pertanian Terintegrasi Berbasis Tanaman
 - tanaman pangan atau hortikultura
 - tanaman perkebunan
2. Pertanian Terintegrasi Berbasis Ternak
 - ternak ruminansia
 - ternak unggas
3. Pertanian Terintegrasi Berbasis Perikanan
4. Pertanian Terintegrasi Berbasis Agroforestry
5. Pertanian Terintegrasi Berbasis Agroindustry

Gambar 4.8
Konsep Sitantri



Gambar 4.9
Pola Sitantri



4) Percepatan Digital Ekonomi

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi dengan membangun sinergi melalui kolaborasi dengan multipihak yang melibatkan Perangkat Daerah dan *stakeholders* lainnya dalam bentuk aliansi strategis untuk menjembatani informasi dan komunikasi dengan membangun kanal/saluran berbasis digital agar dapat memudahkan dalam proses saling-tukar menukar informasi antar sesama anggota aliansi dan dengan masyarakat yang diberi nama DIGINOMI pada url <https://diginomi.sumutprov.go.id/>.

Pembangunan kanal/portal ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Jangka pendek membentuk Aliansi Strategis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Digital antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan perencanaan program pembangunan ekonomi digital dan terbangunnya *portal/dashboard* sebagai media/kanal untuk saling berbagi informasi dan media konsultasi perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

- b. Jangka menengah meningkatnya literasi digital yang ditujukan ke Perangkat Daerah dan *stakeholders* dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi digital terintegrasi dan tersusunnya kerangka bisnis proses Datawarehouse perencanaan pembangunan ekonomi terintegrasi;
- c. Jangka panjang terbangunnya pusat data dan informasi tentang Ekonomi Digital dalam bentuk Datawarehouse terintegrasi di Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan digital ekonomi.

5) Bijak Pintar Pembangunan

Pembangunan Manusia merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan global, nasional dan pembangunan daerah dengan indikator makro pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada kondisi pembangunan manusia yang belum optimal yang ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara yang masih berada di bawah capaian nasional serta kondisi capaian pembangunan manusia yang belum merata di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga perlu optimalisasi dan langkah-langkah strategis, inovatif, dan terobosan lebih dari sekedar *business as usual*. Oleh sebab itu, salah satu terobosan yang diaplikasikan adalah Kebijakan Komprehensif dan Terintegrasi Pembangunan dengan didukung oleh Aplikasi Digital (Bijak Pintar Pembangunan) yang berfokus pada Pembangunan Manusia.

Inisiasi dan konsep inovasi Bijak pintar Pembangunan adalah:

1. Rumusan Perencanaan Kebijakan Sinkron, Komprehensif dan terintegrasi Pada Sektor Pembangunan Manusia.
2. Rumusan Perencanaan Kebijakan Yang Kolaboratif Dan Sinergis Dengan Melibatkan Berbagai Stakeholder.
3. Lokus Prioritas yang Tepat
4. Inovasi Program dan Kegiatan yang optimal dalam sektor Pembangunan Manusia
5. Aplikasi yang akan meningkatkan optimalisasi perencanaan pembangunan
6. Pencapaian Indikator Pembangunan Manusia yang optimal

Pengembangan dalam inovasi ini adalah penerapan pada indikator makro yang lain yaitu indikator kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan,

pengangguran, pendapatan perkapita, inflasi, dan emisi gas rumah kaca. Pada akhirnya seluruh Kebijakan terkait indikator Makro Pembangunan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang akan menjadi regulasi yang kokoh dalam pelaksanaan kebijakan.

6) Paket Keras (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas) Perkembangan Penambahan Fitur KIOSK)

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah semakin berkembang luas dan seolah-olah menjadi kebutuhan bagi berbagai sector termasuk sektor pemerintahan. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik adalah dimana pengurusan administrasi, mudah, otomatis dan *paperless*, *e-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies* atau e-gov disebut sebagai pemerintahan digital merupakan penggunaan teknologi informasi yang dibuat oleh institusi atau lembaga pemerintahan sesuai United Nation Development Program (dalam Indrajit, 2005). Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Menurut Inpres tersebut, pengembangan e-government ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien di berbagai sektor publik. Pada Provinsi Sumatera Utara penerapan e-government sudah mulai di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundang sekurang-kurangnya meliputi Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penggajian, Pembinaan, Kedudukan hak, Tanggung jawab. Kewajiban dan Larangan sanksi, Penghargaan, Pemberitahuan dan Pensiun merupakan Sub sistem dari sistem Kepegawaian secara nasional. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Dengan ketentuan tanggung jawab yang cukup variatif maka Badan Kepegawaian Daerah Mengembangkan sebuah Aplikasi berbasis Website <http://simpegbkd.sumutprov.go.id/> sebagai wujud dari penerapan e-government. Aplikasi tersebut diberi nama PAKET KERAS

(Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas). Program berbasis digital ini merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Didalam aplikasi ini juga terdapat fitur – fitur Layanan kepegawaian Online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi serta meminimalkan penggunaan kertas (*paperless*).

1. Tujuan Inovasi Daerah: meningkatkan efisiensi proses administrasi pada pelayanan kepegawaian dan meminimalisir penggunaan kertas dalam proses administrasi layanan kepegawaian.
2. Sasaran: yang di targetkan oleh inovasi ini adalah seluruh ASN yang ada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Manfaat Yang Diperoleh: Dengan adanya inovasi PAKET KERAS maka proses administrasi pelayanan kepegawaian pegawai dapat dilakukan secara Online, mudah dan cepat.
4. Keuntungan Inovasi: Keuntungan yang diperoleh dengan adanya inovasi PAKET KERAS yaitu dapat dihematnya biaya proses layanan administrasi pegawai dari segi pencetakan dan penggandaan dokumen maupun segi biaya Transportasi karena dalam paket keras dokumen yang digunakan adalah dokumen digital yang dapat di lampirkan secara Online

7) SIJAMILA “Sistem Informasi Jalan Milik Anda” dan SIPEJABAT “Sistem Informasi Penanganan Jalan yang Bermartabat”.

d. Tujuan Inovasi

- Untuk memudahkan masyarakat sebagai pengguna jalan dalam memberikan informasi mengenai kondisi jalan dan jembatan Provinsi di Provinsi Sumatera Utara.
- Untuk memudahkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu sebagai penyelenggara jalan dan jembatan dalam menerima informasi mengenai kondisi jalan dan jembatan di ruas jalan provinsi.
- Sebagai aplikasi pengawasan dan pengendalian bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu yang terintegrasi sehingga dengan cepat dapat menangani jalan dan jembatan yang butuh penanganan lebih cepat.
- Untuk meningkatkan pelayanan publik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu.

b. Manfaat Yang Diperoleh

1. Sebagai satu media informasi untuk masyarakat dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu.
2. Mempermudah akses informasi untuk masyarakat.
3. Mempermudah pihak instansi untuk mengontrol dan mengolah data informasi.
4. Interaksi kepada masyarakat sebagai pengguna jalan dalam hal informasi public dengan Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provsu sebagai penyelenggara.

c. Hasil Inovasi

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik jalan untuk membuat laporan kerusakan/permasalahan jalan
2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan antara penyelenggara jalan dengan pihak pemanfaatan utilitas di ruang jalan
3. Memudahkan masyarakat memantau status perkembangan penanganan laporan tersebut
4. Memudahkan unsur pimpinan dinas untuk menerima aduan masyarakat dan memantau status proses penanganan
5. Memudahkan anggota di lapangan melaporkan status perkembangan penanganan laporan

Disamping inovasi yang telah disebutkan masih terdapat beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain: Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga , Replikaplikasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)/Sekolah Peduli Kependudukan (SPK), Sicekatan Kampung KB (Sistem Informasi Cepat Kinerja Temukan Masalah dan Intervensi Kampung KB) ketiga inovasi tersebut dikembangkan oleh Dinas Kependudukan Dan KB, , Pengembangan aplikasi DRUPADI (Daftar Uraian Penerbitan Pembayaran Secara Digital) Sistem Informasi Dalam Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Di Provinsi Sumatera Utara yang dikembangkan Oleh Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

Berdasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 4 (empat) zona antara lain: (1) Pantai Timur; (2) Pantai Barat, (3) Dataran Tinggi dan (4) Kepulauan Nias. Wilayah Timur dengan kondisi wilayah yang relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan Wilayah Barat merupakan dataran bergelombang, Dataran tinggi dengan kondisi wilayah yang berbukit-bukit dan pegunungan dan wilayah Kepulauan Nias merupakan wilayah kepulauan.

5.1. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 didasarkan pada kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah dan dapat memberikan dukungan terhadap 54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah pada 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan Daerah meliputi:

1. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Penyiapan lahan; Penyiapan dokumen Readinas Criteria dalam; pembangunan unit sekolah baru; Penyiapan dokumen pendukung (DED, RAB); Penyiapan akses fasilitas pendukung pembangunan unit sekolah baru (air, jalan, listrik, transportasi; Mapping identifikasi data penerima BOP intervensi siswa/i kurang mampu; Sosialisasi informasi kampung beasiswa kepada pemerintah Kabupaten/Kota; Sinergitas

dan koordinasi aktif dalam proses sinkronisasi penyelarasan kurikulum dengan DUDI, Mapping identifikasi kebutuhan tenaga kerja lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI; Kemudahan izin/regulasi dari Kabupaten/Kota dan OPD untuk akses promosi dan pemasaran produk-produk SMK; Penyediaan materi praktek ajar; Sinergitas dan koordinasi aktif dalam kegiatan *Teaching Factory*; Izin pembangunan Pojok baca; Penyediaan SDM pelayanan pojok baca di Kabupaten/Kota; Identifikasi lokus penempatan pojok baca sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota; Mempersiapkan sarana dan prasarana TIK untuk kelancaran kelas motivasi; Memprioritaskan sekolah yang akan dikunjungi oleh Gubernur/ Wakil Gubernur.

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Penyediaan sarana/prasarana 3T, penguatan Rumah Sakit Daerah, penguatan SDM dan insentif tenaga medis pada setiap Kabupaten/Kota; Penyediaan tempat pelaksanaan layanan kesehatan bergerak di wilayah kab/kota dan dukungan bantuan tenaga medis kab/kota; Penguatan pelayanan Posyandu dalam pemberian makanan tambahan, imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil dan menyusui; Peningkatan pelayanan rujukan ke RS Haji, RS. Jiwa Provinsi Sumatera Utara; Sosialisasi Germas pada Kabupaten/Kota dan komitmen penganggaran dalam kegiatan Germas; Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah melalui APBD Kabupaten/Kota dan sinkronisasi data penerima melalui Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; Penyediaan tempat pelaksanaan layanan kesehatan bergerak di wilayah kab/kota dan dukungan bantuan tenaga medis Kab/Kota.

3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Kondusifitas daerah, Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Masing-masing Kabupaten/Kota; Data dan Informasi terkait Tenaga Kerja dan pasar kerja tingkat Kab/Kota.

4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Rekomendasi lokasi kegiatan, Pembinaan dan pendampingan kelompok; Penyediaan prasarana dan sarana; Bantuan benih jagung mencapai 280.000 Ha, Alat pra panen cultivator 3.000 unit, Alat tanam jagung 4.500 unit, Corn sheller 1.500 unit, Alat angkut panen jagung 500 unit, Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani Jagung 500 orang.

5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terutama dalam pembebasan lahan sekitar; Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat; Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan Kab/Kota menuju daerah wisata; Kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan Kab/Kota; Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan Kab/Kota menuju daerah wisata; Pembangunan amenitas (toilet, musholla, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota; Pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan Kab/Kota; Promosi melalui event daerah kab/kota; Penyusunan *calender of event* Kab/Kota; Penyusunan *travel pattern* pariwisata; MoU dengan forum masyarakat melayu terkait pelestarian dan pemberdayaan forum kesultanan daerah.

6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Penguatan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih pada masing-masing Kab/Kota untuk mencapai opini WTP; Peningkatan Kualitas pelayanan Publik yang Prima di Kab/Kota; Penguatan capaian dan peningkatan kualitas SAKIP Kab/Kota.

7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;

Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: penyediaan relawan P4GN Kab/Kota dalam desa/kelurahan bersih narkoba (bersinar); Penyediaan pendamping Kab/Kota dalam kampanye bersih narkoba; Integrasi Kerjasama terkait SPBE pelaporan/pengaduan masyarakat; Kerjasama terkait penguatan infrastruktur digital dan Penguatan e-literasi; Penyediaan data identitas penduduk yang akan dan telah menjadi penghuni panti sosial Provsu; Penyediaan data identitas penduduk yang akan dan telah menjadi penghuni panti sosial Provsu; Percepatan peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024; Dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; Pendidikan dan pembinaan atlet daerah (Talent Scouting); komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI tahun 2024; peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024; Percepatan peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024; Pendidikan dan pembinaan atlet daerah (Talent Scouting); Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI tahun 2024; Penyediaan sarana/prasarana pendukung Rumah Ibadah di masing-masing Kabupaten/Kota.

8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Penentuan dan Penyediaan Lahan (Clean and Clearing) untuk Pembangunan Infrastruktur; Rekomendasi lokasi kegiatan; Pembinaan & pendampingan kelompok; Penyediaan prasarana dan sarana; berkontribusi dalam pengelolaan TPA Regional Mebidang; Peningkatan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat agar mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dengan melakukan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh; Berkomitmen atas tugas dan kewenangan yang dituangkan pada Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (SP3); Penetapan lokasi penerima manfaat (KK Miskin); Penetapan lokasi prioritas pertanian; Pemeliharaan sarana dan prasarana yang akan dibangun; pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

5.1.1 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Wilayah/Zona (Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias)

Pembangunan dengan fokus dari segi kewilayahan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi ke dalam 4 (empat) Wilayah yaitu Wilayah Pantai Timur, Wilayah Pantai Barat, Wilayah Dataran Tinggi dan kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang dan wilayah nias merupakan wilayah kepulauan.

Pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 didasarkan pada kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah dengan memprioritaskan Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan, Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, Peningkatan daya saing melalui sektor agraris, Peningkatan daya saing melalui sektor agraris, Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga dan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sebagai pedoman bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota, maka arah kebijakan pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1.1 Wilayah Pantai Timur

Wilayah Pantai Timur terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kondisi umum Wilayah Pantai Timur dapat dilihat dari 5 indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 di Pantai Timur mengalami penurunan menjadi 66.82 poin dari 72.59 poin di tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh capaian nilai komposit IPM dimana dari 3 indikator komponen IPM terdapat penurunan pada Usia Harapan Hidup yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID 19. Sementara itu jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021, hal ini juga disebabkan oleh tingginya angka pengangguran dan susahnyalah lapangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi COVID 19.

Tabel 5.1

Kondisi Makro Ekonomi Wilayah Pantai Timur 2019-2021

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			TPT			Gini Ratio			IPM			Kemiskinan					
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Jumlah (ribu orang)			Persen		
														2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Langkat	5,10	-0,86	-0,86	5,30	7,02	5,12	0,253	0,253	0,253	70,76	71,00	71,35	103.08	101.87	106.59	9.91	9.37	10.12
2	Kab. Sergei	5,25	-0,44	-0,44	4,37	5,54	3,93	0,283	0,285	0,285	70,21	70,24	70,56	48.69	49.18	51.16	7.9	7.97	8.30
3	Kab. Deli Serdang	5,23	-1,78	-1,78	5,74	9,50	9,13	0,293	0,293	0,293	75,43	75,44	75,53	84.94	86.26	92.52	3.89	3.88	4.01
4	Kab. Batubara	4,46	-0,31	-0,31	6,69	6,48	6,62	0,245	0,245	0,245	68,35	68,36	68,58	50.46	49.78	52.59	12.14	11.88	12.38
5	Kab. Asahan	5,69	0,21	0,21	6,86	7,24	6,39	0,291	0,291	0,291	69,92	70,29	70,49	70.53	66.32	69.29	9.68	9.04	9.35
6	Kab. Labura	5,37	0,27	0,27	5,84	6,82	5,74	0,289	0,289	0,289	71,43	71,61	71,87	34.76	34.86	37.13	15.5	9.53	10.02
7	Kab. Labuhan Batu	5,14	0,09	0,09	5,70	6,05	5,66	0,293	0,293	0,293	71,94	72,01	72,09	41.52	42.17	45.03	8.44	8.44	8.74
8	Kab. Labusel	5,35	0,80	0,80	4,80	4,90	4,71	0,243	0,243	0,243	71,39	71,40	71,69	30.17	28.63	30.36	8.94	8.34	8.53
9	Kota Binjai	5,54	-1,83	-1,83	6,14	8,67	7,86	0,308	0,308	0,308	75,89	75,89	76,01	15.61	15.91	16.46	5.66	5.71	5.81
10	Kota Medan	6,00	-1,98	-1,98	8,53	10,74	10,81	0,314	0,314	0,314	80,97	80,98	81,21	183.79	183.54	193.03	8.08	8.01	8.34
11	Kota Tanjung Balai	5,85	-0,47	-0,47	6,82	6,97	6,59	0,332	0,332	0,332	68,51	68,65	68,94	24.54	23.54	24.10	14.04	13.33	13.40
12	Kota Tebing Tinggi	5,25	-0,70	-0,70	8,60	9,98	8,37	0,339	0,339	0,339	75,08	75,17	75,42	16.3	16.32	17.37	9.94	9.85	10.30
Rata-rata		5.35	-0.32	-0.32	6.28	7.49	6.74	0.2902	0.2904	0.2904	72.49	72.58	72.81	58.70	698.38	735.63	9.51	9.37	10.12

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Kondisi Pendidikan di Wilayah Pantai Timur dapat dilihat dari perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sejak tahun 2019 hingga 2021 Harapan Lama Sekolah terus mengalami peningkatan, rata-rata peningkatan sebanyak 4.3 poin dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sejak tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 9.38 persen dari sebelumnya 9.50 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi sebesar 9.43 persen. Kondisi capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Wilayah Pantai Timur Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Langkat	12,75	13,05	13,24	8,8	8,65	8,66
2	Kab. Sergei	12,57	12,60	12,61	8,8	8,54	8,69
3	Kab. Deli Serdang	13,32	13,35	13,36	10,3	10,09	10,10
4	Kab. Batubara	12,52	12,63	12,64	8,5	8,06	8,07
5	Kab. Asahan	12,56	12,60	12,61	9,0	8,79	8,80
6	Kab. Labura	12,80	13,04	13,19	8,6	8,40	8,41
7	Kab. Labuhan Batu	12,60	12,73	12,74	9,1	9,24	9,25
8	Kab. Labusel	12,97	13,00	13,01	9,0	8,75	8,90
9	Kota Binjai	13,59	13,62	13,63	10,7	10,93	10,94
10	Kota Medan	14,72	14,74	14,75	11,4	11,39	11,48
11	Kota Tanjung Balai	12,47	12,50	12,62	9,5	9,44	9,45
12	Kota Tebing Tinggi	12,68	12,72	12,72	10,4	10,31	10,44
Rata-rata		12,96	13,04	13,09	9,50	9,38	9,43

Sumber : BPS Provsu 2022, data diolah

Kondisi Angka Putus Sekolah (APS) pada Wilayah Pantai Timur hingga 2021 terus membaik ditandai dengan turunnya capaian tersebut setiap tahun. Pendidikan merupakan bagian dari hak dasar anak yang wajib dipenuhi. Putus sekolah merupakan suatu permasalahan sosial dimana tidak terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Membbaiknya Angka Putus sekolah di wilayah Pantai Timur disebabkan oleh berbagai macam faktor pendorong untuk tidak memutuskan berhenti sekolah diantaranya meningkatnya minat anak sekolah/keinginan sendiri. Selain itu

faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor ekonomi keluarga, faktor sosial keluarga, perhatian orangtua, pengaruh teman sebaya, ketersediaan sumber lokal dan kebudayaan telah menjadi prioritas pemerintah dalam mengantisipasi Angka Putus sekolah melalui berbagai program dan kegiatan lintas sektor. Capaian Angka Putus Sekolah Pendidikan menengah tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3
Kondisi Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Pantai Timur

No	Kab/Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Langkat	0,55	0,55	0,09	1,06	1,06	0,11
2	Kab. Sergei	0,83	0,83	0,08	1,67	1,67	0,05
3	Kab. Deli Serdang	0,44	0,44	0,14	1,50	1,50	0,24
4	Kab. Batubara	0,78	0,78	0,04	1,39	1,39	0,03
5	Kab. Asahan	0,59	0,59	0,08	1,09	1,09	0,06
6	Kab. Labura	0,51	0,38	0,04	2,18	0,69	0,03
7	Kab. Labuhan Batu	0,38	0,51	0,04	0,69	2,18	0,03
8	Kab. Labusel	0,04	0,04	0,02	0,26	0,26	0,04
9	Kota Binjai	0,35	0,35	0,02	1,19	1,19	0,06
10	Kota Medan	0,30	0,30	0,22	0,75	0,75	0,34
11	Kota Tanjung Balai	0,36	0,36	0,01	0,18	0,18	0,01
12	Kota Tebing Tinggi	0,49	0,49	0,02	0,65	0,65	0,03
Rata-rata		0,47	0,47	0,07	0,96	0,96	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2022

Kondisi Kesehatan di Wilayah Pantai Timur dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup, kematian Bayi, Kematian Ibu dan Prevalensi Stunting. Dimana kondisi Usia Harapan Hidup pada tahun 2021 di Wilayah Pantai Timur mengalami penurunan rata-rata 63.70 tahun, sebelumnya pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari tahun 2019, penurunan UHH dipantai timur disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari Perkembangan Kematian Bayi tahun 2021 juga mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan oleh adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan meminimalisir angka kematian bayi dengan

terus melaksanakan berbagai program atau kegiatan penurunan angka kematian Bayi, capaian Jumlah Kematian Bayi tahun 2021 sebesar 16.83 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kematian ibu, pada tahun 2021 Jumlah Kematian Ibu di wilayah Pantai Timur mengalami peningkatan, peningkatan jumlah ini salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid 19 selain itu juga disebabkan oleh hipertensi dan kehamilan, pendarahan obstetrik, komplikasi non obstetrik dan komplikasi obstetrik lainnya. Sementara itu Prevalensi *Stunting* di wilayah Pantai Timur pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi rata-rata 22.2 persen. Penurunan ini terjadi karena giatnya pemerintah daerah melaksanakan aksi konvergensi untuk pencegahan dan penurunan *Stunting*.

Tabel 5.4
Kondisi Kesehatan Wilayah Pantai Timur Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Langkat	68.59	68,80	68,97	45	57	16	13	11	18	29,84	28,7	31.5
2	Sergei	66.75	68,68	68.82	68	48	25	12	0	8	24,5	23,3	20
3	Deli Serdang	71.64	71,73	71.77	55	40	23	14	12	23	23,88	22,11	12.5
4	Batubara	66.75	66,96	67.13	21	28	18	13	7	4	21,92	20,8	30.9
5	Asahan	68.11	68,26	68.37	24	10	9	15	15	15	23,07	22,01	18.9
6	Labura	69.37	69,46	69.56	24	23	6	7	7	8	29,43	27,95	30.9
7	Labuhan Batu	69.86	69,93	69.95	59	31	25	9	4	12	24,6	23,6	27
8	Labusel	68.64	68,71	68.81	11	11	16	1	5	9	33,08	32,0	27
9	Binjai	72.25	72,38	72.45	11	2	5	4	1	6	16,75	15,3	21.7
10	Medan	72.98	73,14	73.23	17	15	48	7	12	18	25,22	24,1	19.9
11	Tanjungbalai	63.02	63,27	63.44	22	23	11	7	6	9	24,21	23,2	26.1
12	Tebing Tinggi	70.76	70,87	70.95	19	16	20	1	5	8	14,5	13,5	17.3
Rata-rata		70.76	69,34	63.70	31,33	25,33	16.83	8,58	7,08	10.83	24.25	23,04	22.2

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Kondisi jalan Provinsi di Wilayah Pantai Timur sepanjang 1.027,800 Km dimana kondisi jalan mantap pada tahun 2021 di Wilayah Pantai Timur 82,72 persen atau 834 Km. Terdapat penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Apabila kita lihat pada tabel 5.5 dapat diketahui bahwa jalan provinsi dengan kemantapan terendah di Wilayah Pantai Timur berada di Kota Tebing Tinggi dengan tingkat kemantapan 57 persen yang mengalami penurunan karena terjadinya kerusakan jalan. Sementara tingkat kemantapan Jalan Provinsi tertinggi di Wilayah Pantai Timur berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu yakni mencapai 93 persen. Kondisi jalan mantap di Wilayah Pantai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Kondisi Infrastruktur Wilayah Pantai Timur Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2019	2020	2021
1	Kab. Langkat	91,01	84,00	83,00
2	Kab. Sergei	98,00	86,00	86,00
3	Kab. Deli Serdang	98,00	90,00	89,00
4	Kab. Batubara	99,00	78,00	82,00
5	Kab. Asahan	68,00	62,00	63,00
6	Kab. Labura	81,00	81,00	93,00
7	Kab. Labuhan Batu	82,00	88,00	93,00
8	Kab. Labusel	-	-	-
9	Kota Binjai	100,00	71,00	94,00
10	Kota Medan	97,00	83,00	90,00
11	Kota Tanjung Balai	100,00	72,00	80,00
12	Kota Tebing Tinggi	59,00	71,00	57,00
Rata-rata		88,45	78,72	82,72

Sumber : Bappedasu tahun 2022 (Data diolah)

Arah Kebijakan pembangunan wilayah Pantai Timur untuk mencapai prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 melalui kegiatan proyek prioritas/kegiatan prioritas pembangunan Membangun Desa Menata Kota (MDMK) sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan

- a) Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Sebanyak 11 Unit Di Zona Pantai Timur; Yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kota Medan Dan Kota Tanjung Balai;
- b) Kerjasama Link And Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI);

- c) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, Dan SLB Negeri Sebanyak 167.000 Siswa/I Prioritas Intervensi Siswa/I Miskin;
- d) Pengembangan Kampung Beasiswa Scholarships Booth Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3;
- e) Pembangunan 23 Unit Pojok Baca Dan Gerobak Baca Di 19 Lokasi Zona Pantai Timur;
- f) Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se- Sumatera Utara;
- g) Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum;
- h) Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*).

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a) Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (Testing, Tracing, Treatment);
- b) Pembangunan Ruang Isolasi; Pembelian Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Haji Medan;
- c) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan, Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap 7 Lantai Tower A;
- d) Penyediaan Ambulance Emergency Khusus Jantung;
- e) Peningkatan Layanan Kesehatan Untuk Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Penambahan Kapasitas 100 Bed;
- f) Pembangunan Gedung Isolasi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem;
- g) Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 5 Unit Bus Medis.

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan

- a) Fasilitasi 10 Kerja Sama Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri;
- b) Pencapaian Target 1.000 Umkm Dan Ikm Menuju Digitalisasi Pemasaran;
- c) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online;
- d) Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi.

4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

- a) Pencapaian Target Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 459.403,89 Ton Dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 216.996 Ton Di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan Dan Batubara;

- b) Pencapaian Target Produksi Padi Sebesar 4.064.705 Ton Dan Produksi Jagung Sebesar 1.960.940 Ton Di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara;
- c) Pengembangan Kawasan Sentra Cabai Merah Target Capaian Produksi Sebesar 190.011 Ton;
- d) Peningkatan Produksi Daging Kambing/Domba Menjadi Sebesar 1.537,50 Ton Di Kabupaten Langkat, Asahan, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan;
- e) Pencapaian Target Produksi Daging Sapi Menjadi Sebesar 17.149,75 Ton Di Kabupaten Langkat, Asahan, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara;

5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

- a) Pengembangan Desa Wisata, Desa Sampe Raya, Bukit Lawang Kabupaten Langkat;
- b) Penataan Kawasan Wisata Tangkahan;
- c) Penataan Cagar Budaya Kesultanan Langkat;
- d) Pembangunan Infrastruktur Digitalisasi Promosi Pariwisata;
- e) Lanjutan Penataan Cagar Budaya Situs Benteng Putri Hijau, Namorambe-Kabupaten Deli Serdang.

6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

- a) Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b) Pencapaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dengan Target Predikat BB;
- c) Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A-;
- d) Target Pencapaian 3 Besar Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
- e) Mempertahankan Pencapaian Tertinggi Nilai MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga

- a) Gubernur Dan Wakil Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual;
- b) Pembinaan Atlet Berprestasi Dan Tenaga Keolahragaan;
- c) Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional Xxi Tahun 2024;

- d) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah Sebanyak 4.773 Rumah Ibadah;
- e) Pembangunan Sports Centre Di Daerah Kualanamu Sebagai Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional Xxi Tahun 2024;
- f) Target Capaian Pembangunan Stadion Madya Atletik, Gor Martial Arts Dan Gor Bowling

8. Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

- a) Penanganan Jalan Zona Pantai Timur Sepanjang 164,13 Km;
- b) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Mebidang Target Capaian, Pembangunan Dan Pemanfaatan Jaringan Distribusi Utama (Jdu) Offtaker Medan;
- c) Optimalisasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Sebesar Lebih Kurang 78.000 Hektar;
- d) Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Mebidang;
- e) Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi;
- f) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Sebanyak 1.000 Unit Di 10 Kabupaten/Kota.

5.1.1.2 Wilayah Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat terdiri dari 7 Kabupaten yaitu : Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang lawas dan Kabupaten Padang lawas Utara. Kondisi umum Wilayah Pantai Barat dapat dilihat dari 5 (lima) indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Pantai Barat pada tahun 2021 mengalami kontraksi dengan rata-rata sebesar -0,49 persen lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen. Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Pantai Barat pada tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, yang tumbuh rata-rata sebesar -0,49, penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di wilayah Pantai Barat hal ini salah satunya disebabkan karena terjadinya pandemik covid-19. Pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi ada di Kabupaten Paluta dan terendah ada di Kota Sibolga.

Dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui rata-rata TPT pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 5,84

persen, kondisi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 6,91 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kawasan Pantai Barat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan TPT pada tahun 2019 dan 2018 yang tumbuh sebesar 5,38 persen dan 5,30 persen. Peningkatan terjadi hampir pada semua Kab/Kota di wilayah Pantai Barat, namun ada 3 kabupaten yang mengalami peningkatan TPT yang paling tinggi pada tahun 2020 diantaranya Kota Sibolga dengan TPT sebesar 8,00 persen, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 7,54 persen dan Kota Padangsidimpuan sebesar 7,45 persen.

Dilihat dari kondisi kemiskinan, Wilayah Pantai Barat merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 9,63 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2020 sebesar 8,75 persen, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan angka kemiskinan pada tahun 2019 dan 2018 yang tumbuh sebesar 9,65 persen dan 9,95 persen. Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan yang terendah di Kota Padangsidimpuan.

Sementara rata-rata gini ratio pada tahun 2020 sebesar 0,300, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2021 sebesar 0,316, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Gini Rasio pada tahun 2019 dan 2018 yang tumbuh sebesar 0.300 persen dan 0.301 persen, Gini ratio tertinggi terdapat pada Kabupaten Kota Padangsidimpuan, sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Mandailing Natal.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Pantai Barat pada Tahun 2021 mengalami peningkatan, rata-rata IPM adalah 70,75 poin dimana angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 71,77 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Pantai Barat pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yakni 70,44 poin menjadi 70,75 poin. IPM tertinggi terdapat pada Kota Padangsidimpuan, sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Mandailing Natal.

Capaian Indikator Makro Wilayah Pantai Barat dapat dilihat pada tabel selanjutnya

Tabel 5.6

Kondisi Makro Ekonomi Wilayah Pantai Barat 2019-2021

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			TPT			Gini Ratio			IPM			Kemiskinan					
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Jumlah (ribu orang)			Persen		
														2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kota P. Sidempuan	5,53	-0,73	-0,73	4,34	7,45	7,45	0,359	0,359	0,359	75,06	75,22	75,48	16.06	16.56	17.28	7.26	7,40	7.53
2	Kab. Padang Lawas	6,07	-1,18	-1,18	4,24	4,11	4,11	0,298	0,299	0,299	68,16	68,25	68,64	23.17	23.87	25.78	8.28	8,37	8.69
3	Kab. Tapsel	5,27	0,39	0,39	4,17	4,42	4,42	0,272	0,272	0,272	69,75	70,12	70,33	24.22	23.96	25.01	8.60	8,47	8.80
4	Kab. Madina	5,94	-0,94	-0,94	6,37	6,30	6,30	0,257	0,257	0,257	66,52	66,79	67,19	40.64	41.31	43.24	9.11	9,18	9.49
5	Kab. Paluta	5,66	1,14	1,14	3,21	3,11	3,11	0,298	0,298	0,298	68,29	69,85	70,11	26.06	26.79	28.37	9.6	9,70	9.92
6	Kota Sibolga	5,33	-1,36	-1,36	7,40	8,00	8,00	0,303	0,303	0,303	73,41	73,63	73,94	10.82	10.49	10.80	12.36	11,95	12.33
7	Kab. Tapteng	5,28	-0,76	-0,76	7,26	7,54	7,54	0,317	0,317	0,317	68,86	69,23	69,61	46.99	47.19	49.95	12.53	12,38	12.67
Rata-rata		5.58	-0,49	-0,49	5.28	5,84	5,84	0.300	0,300	0,300	70.00	70,44	70,75	26,85	190.17	200.43	9.63	9,61	9.91

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, data diolah

Kondisi Pendidikan di Wilayah Pantai Barat dapat dilihat dari perkembangan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Pada tahun 2020 untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami peningkatan, hingga 2021 capaian sebesar 9.52 persen. Dilihat dari capaian Kabupaten/Kota, kota Padangsidempuan memiliki capaian tertinggi Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 11.09 persen dan terendah ada di kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 8.84. Sementara capaian Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi juga terdapat di Kota Padangsidempuan dan terendah ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Wilayah Pantai Barat Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kota Padang Sidempuan	14,51	14,54	14.56	10,9	11,00	11.09
2	Kab. Padang Lawas	13,00	13,03	13.27	9,0	9,01	9.02
3	Kab. Tapsel	13,10	13,24	13.35	9,3	9,28	9.29
4	Kab. Madina	13,15	13,32	13.61	8,8	8,62	8.63
5	Kab. Paluta	12,42	12,87	13.04	9,3	9,37	9.38
6	Kota Sibolga	13,13	13,16	13.28	10,2	10,40	10.41
7	Kab. Tapteng	12,66	13,06	13.07	8,6	8,62	8.84
Rata-rata		13,13	13,31	13.45	8,18	9,47	9.52

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Seperti halnya dengan pantai timur, Angka Putus Sekolah di Wilayah Pantai Barat juga mengalami penurunan, hal ini terjadi karena faktor penyebab putus sekolah yang berasal dari dalam diri (internal) semakin membaik, selain itu penyebab Angka Putus Sekolah seperti ketiadaan biaya dan sarana pendidikan sudah mulai bisa diatasi dengan memberikan berbagai bantuan pendidikan kepada keluarga kurang mampu dan mempunyai anak berprestasi, pemerintah setempat juga berkomitmen untuk secara terus menerus meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah pantaitimur. Melalui Dinas Pendidikan akan terus meningkatkan akses, kualitas, dan keterjaminan pendidikan., mulai dari pendidikan dini sampai pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa miskin pada semua jenjang pendidikan akan terus ditambah. Sehingga Angka Putus Sekolah

bida diminimalisir. Konsisi Angka Putus Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.8
Kondisi Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah
Wilayah Pantai Barat Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kota Padang Sidempuan	0,10	0,10	0,04	0,90	1,57	0,04
2	Kab. Padang Lawas	0,91	0,62	0,03	1,02	0,37	0,02
3	Kab. Tapsel	1,16	0,71	0,04	2,13	0,74	0,01
4	Kab. Madina	0,57	0,58	0,06	0,80	1,03	0,04
5	Kab. Paluta	0,98	0,34	0,04	1,44	0,96	0,01
6	Kota Sibolga	0,12	0,14	0,01	0,38	0,79	0,01
7	Kab. Tapteng	0,54	0,23	0,02	2,21	1,36	0,04
Rata-rata		0,63	0,39	0,03	1,27	0,97	0,02

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2022

Kondisi Kesehatan di wilayah Pantai Barat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Prevalensi *Stunting*, dimana rata-rata Usia Harapan Hidup wilayah Pantai Barat sejak tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, hingga 2021 mencapai sebesar 66.85 tahun, kabupaten/kota dengan capaian tertinggi adalah Kota Padang Sidempuan sebesar 69.50 tahun, dan capaian terendah ada di Kabupaten Padang Lawas sebesar 67.13 tahun. Sementara untuk kematian bayi terjadi penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 meningkat Kembali menjadi rata-rata 20 bayi, dimana jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 20 orang dan terendah ada di kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 3 orang. Tingginya Kematian Bayi di wilayah Pantai Barat tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya.

Dilihat dari jumlah kematian Ibu di Kabupaten/Kota, maka kematian ibu tertinggi ada di kabupaten Padang Lawas sebanyak 9 (sembilan) orang dan terendah ada di kota Sibolga sebanyak 1 (satu) orang. Jika dilihat dari perkembangan prevalensi *stunting* dari 2019 hingga 2021 terjadi fluktuasi di wilayah pantai barat dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 menjadi sebesar rata-rata 30.34 persen, namun pada tahun 2021, terjadi peningkatan rata-rata menjadi 32.84 persen. Capaian Prevalensi *Stunting* tertinggi

ada di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 47.7 persen dan terendah ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 25.3 persen. Capaian kondisi Kesehatan wilayah pantai barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Kondisi Kesehatan Wilayah Pantai Barat

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kota P. Sidempuan	62.51	68,73	69.50	60	18	28	8	5	4	27,4	26,2	32.1
2	Kab. Padang Lawas	66.98	67,09	67.13	32	21	30	6	5	9	41,09	39,8	42.0
3	Kab. Tapsel	64.82	64.91	64.97	41	7	3	2	3	2	26,96	25,75	30.8
4	Kab. Madina	62.51	62.60	62.65	68	16	31	9	7	5	36,5	25,5	47.7
5	Kab. Paluta	67.06	67.17	67.22	4	16	17	6	1	5	45,73	44,63	33.1
6	Kota Sibolga	68.77	69.01	69.25	7	7	8	1	1	1	11,7	10,03	25.8
7	Kab. Tapteng	67.08	67.15	67.24	30	30	23	7	10	5	41,89	40,5	25.3
Rata-rata		65,68	66,67	66.85	34,57	16,43	20	6,57	4,57	2.5	33,04	30,34	32.84

Sumber: BPS Sumatera Utara 2022, data diolah

Kondisi jalan provinsi di Wilayah Pantai Barat adalah sepanjang 669.010 km. Kondisi jalan mantap pada tahun 2021 di Wilayah Pantai Barat adalah 70,57 persen atau 485 Km. Apabila kita lihat pada tabel jalan provinsi dengan kemantapan terendah di Wilayah Pantai Barat berada di Kota Sibolga dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 41 persen. Sementara tingkat kemantapan jalan provinsi tertinggi di Wilayah Pantai Barat berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 92 persen. Kondisi jalan di Wilayah Pantai Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.10
Kondisi Infrastruktur Wilayah Pantai Barat

No	Kab/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2019	2020	2021
1	Kota P. Sidempuan	76,00	66,00	75,00
2	Kab. Padang Lawas	86,00	74,00	75,00
3	Kab. Tapanuli Selatan	84,00	81,00	81,00
4	Kab. Madina	64,00	65,00	65,00
5	Kab. Paluta	70,00	65,00	65,00
6	Kota Sibolga	100,00	41,00	41,00
7	Kab. Tapteng	100,00	92,00	92,00
Rata-rata		82,85	69,14	70,57

Sumber : BPS Sumatera Utara, data diolah

Untuk mencapai prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, arah kebijakan pembangunan wilayah Pantai Barat diarahkan untuk mendukung kegiatan strategis daerah (KSD) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan

- a) Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Tahun 2022 Sebanyak 4 (empat) unit yaitu:
 - SMA Negeri 1 Angkola Julu Di Kota Padang Sidempuan;
 - SMK Negeri 1 Aek Bilah Di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - SMK Negeri 1 Suka Bangun Di Kabupaten Tapanuli Tengah; Dan
 - SMK Negeri 1 Batang Lubu Sutam Di Kabupaten Padang Lawas.Kemudian Pada Tahun 2023, Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Sebanyak 1 (Satu) Unit Di Kabupaten Mandailing Natal;
- b) Kerjasama *Link And Match* Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) / Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (Dudi) Untuk 70 Mou/Moa Kompetensi Keahlian Vokasi Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Pada Zona Pantai Barat Pada Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023;
- c) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Prioritas Siswa/I Miskin Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Sebanyak 24.366 Siswa Siswi Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 25.366 Siswa Siswi Pada Tahun 2023 Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Pada Zona Pantai Barat;
- d) Pembangunan 7 (Tujuh) Unit Pojok Baca Pada Tahun 2023 Masing-Masing 1 (Satu) Unit Di Kota Sibolga, Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal Dan Tapanuli Tengah;
- e) Penyediaan 7 (Tujuh) Unit Gerobak Baca Masing-Masing Satu Unit Pada Tahun 2023 Di Kota Sibolga, Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal Dan Tapanuli Tengah;
- f) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sebanyak 3 (Tiga) Unit Perpustakaan Desa Masing-Masing 1 (Satu) Unit Perpustakaan Desa Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Dan Kota Padangsidempuan Pada Tahun 2023;
- g) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus (Sma/Smk) Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Sebanyak 1 (Satu) Unit Di Sma Negeri 1 Kota Padangsidempuan Pada Tahun 2022. Serta Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus (Sma/Smk/Slb) Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Sebanyak 4 (Empat) Unit Masing-Masing 1 (Satu) Unit Perpustakaan Sma/Smk Di Kota Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan. Serta Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus (Sma/Smk/Slb) Sesuai Standar Nasional

Perpustakaan Sebanyak 3 (Tiga) Unit, Masing-Masing 1 (Satu) Unit Perpustakaan Slb Di Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Padang Lawas Utara Pada Tahun 2023;

- h) Gubernur Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se- Sumatera Utara;
- i) Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum;
- j) *Training Of Trainers* (Tot) 33 Orang Guru Melalui Pembelajaran Jarak Jauh Pada 33 Kabupaten/Kota.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a) Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (*Testing, Tracing, Treatment*);
- b) Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Untuk Praktek Pola Hidup Sehat Sehari Hari Dan Usaha Penurunan Prevalensi Stunting Pada Tahun 2022 Dan 2023 Di 7 Kabupaten/Kota Pada Zona Pantai Barat;
- c) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Iuran (Pbi) Provinsi Sebanyak 30.875 Jiwa Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 66.321 Jiwa Pada Tahun 2023 Pada Zona Pantai Barat;
- d) Kontribusi Premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Pbi Jkn) Pusat Sebanyak 682.367 Jiwa Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 682.367 Jiwa Tahun 2023 Di Zona Pantai Barat;
- e) Dokter Terbang Berjumlah 2 Orang Yang Terdistribusi Masing-Masing 1 Orang Di Kota Padang Sidempuan Dan Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Berjumlah 6 Orang Yang Terdistribusi Masing-Masing 1 Orang Di Kota Padang Sidempuan, Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Dan Padang Lawas Utara;
- f) Pemberian Paket Makanan Tambahan (Pmt) Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek) Sebagai Usaha Penurunan Prevalensi Stunting, Sebanyak 7.693 Orang Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 7.693 Orang 2023 Pada Zona Pantai Barat;
- g) Pemberian Paket Makanan Tambahan (Pmt) Balita Kurus Sebagai Usaha Penurunan Prevalensi Stunting, Sebanyak 12.721 Orang Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 12.721 Orang 2023 Pada Zona Pantai Barat;

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan

- a) Kerja Sama Dengan 3 Dunia Usaha Dan Dunia Industri, 2 Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi Untuk Fasilitasi Program *Link And Match* Pada Tahun 2023;

- b) Digitalisasi Pemasaran 20 Umkm Dan 5 Ikm Pada Tahun 2023 Di Zona Pantai Barat;
- c) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online;
- d) Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

- a) Pengembangan Kawasan Ternak Dan Pemberian Bantuan Ternak Serta Sarana Prasarana Pendukungnya Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Produksi Daging Sapi Sebesar 1.943 Ton, Daging Kambing/Domba Sebesar 280 Ton Sampai Tahun 2023 Di Pantai Barat;
- b) Bantuan Benih Padi, Jagung, Cabai, Bawang Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Produksi Padi Sebesar 1.015.566 Ton, Jagung 35.197 Ton, Bawang 146 Ton Dan Cabai 6.236 Ton Tahun 2023 Pantai Barat;
- c) Pemberian Stimulus Ekonomi Pengembangan Budidaya Cabai Merah Seluas 10 Ha Di Kota Padangsidempuan Pada Tahun 2022;
- d) Dalam Mendukung Pencapaian Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 21.746 Ton Dan Perikanan Tangkap Sebesar 88.844 Ton Pada Tahun 2023, Beberapa Hal Yang Dilakukan:
 - Memberikan Bantuan Benih Ikan Mas Sebanyak 80.000 Ekor Dan Pakan Ikan Sebanyak 2.000 Kg Serta Bantuan Benih Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Seperti Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 20 Unit Pada Tahun 2022 Yang Dilanjutkan Pada Tahun 2023;
 - Pemberian Asuransi Nelayan Di Tahun 2022 Sebanyak 2.050 Nelayan Dan Tahun 2023 Sebanyak 1.000 Nelayan Pada Zona Pantai Barat;
- e) Dalam Rangka Pencapaian Produksi Komoditi Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao) Sebesar 32.000,49 Ton Pada Tahun 2023 Beberapa Hal Yang Dilakukan:
 - Bantuan Benih Tanaman Kopi Sebanyak 50.000 Batang Untuk Mendukung *Agroforestry* Dan Peremajaan Kopi Desa Wisata Di Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2022;
 - Bantuan Benih Kelapa Pandan Wangi Untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat Miskin Produktif Sebanyak 300 Batang Di Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Tahun 2022;
 - Fasilitasi Pasca Panen Komoditi Perkebunan Sebanyak 3 Unit Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2022;

- Pada Tahun 2023 Diberikan Bantuan Benih Dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Di Kabupaten/Kota Se-Kawasan Pantai Barat.

5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

- a) Pelatihan Pemandu Pariwisata Di Kawasan Zona Pantai Barat;
- b) Pengembangan Desa Wisata Dan Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelola Desa Wisata Di Kawasan Zona Pantai Barat;
- c) Penataan Cagar Budaya Barus Dan Situs Bongal Di Tapanuli Tengah.

6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

- a) Pelatihan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Serta Gerakan Nasional Revolusi Mental Untuk Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara Di 7 Kabupaten/Kota Pada Zona Pantai Barat Tahun 2022 Dan Tahun 2023;
- b) Dukungan Kabupaten/Kota Zona Pantai Barat Terhadap Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Sebesar 80 Persen;
- c) Dukungan Kabupaten/Kota Zona Pantai Barat Untuk Mempertahankan Pencapaian Tertinggi Nilai *Monitoring Center For Prevention* (Mcp) Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia;

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

- a) Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual;
- b) Pelatihan Dan Pembinaan Penyusunan Grand Design Besar Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Khususnya Untuk Mendukung Persiapan Pon Xxi Tahun 2024, Untuk 70 Orang Pada Tahun 2022 Di Kabupaten Mandailing Natal;
- c) Pembangunan Gedung Olahraga (Gor) Mini Sebanyak 1 (Satu) Unit Di Kota Padang Sidempuan Pada Tahun 2023;
- d) Rehabilitasi Panti Anak Di Kota Padang Sidempuan Pada Tahun 2023;
- e) Rehabilitasi Panti Ps Gepeng Pinang Sori Di Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Tahun 2023;
- f) Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pada Tahun 2022 Sebanyak 199 Unit Di 7 Kabupaten/Kota Pada Zona Pantai Barat;

8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

- a) Pada Tahun 2022 Dan 2023 Akan Dilakukan Penanganan Jalan Di Zona Pantai Barat Sepanjang 130.70 Km Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 1. Penanganan Jalan Sepanjang 4,70 Km Di Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan Rincian :

- Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sibuluan - Aek Horsik Sepanjang 3 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-Gambo Sepanjang 1,70 Km;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 2.000 M;
2. Penanganan Jalan Sepanjang 2.50 Km Di Kota Sibolga Dengan Rincian:
- Peningkatan Struktur Jalan Ruas Jalan Provinsi Jalan Sudirman Di Kota Sibolga Sepanjang 2,50 Km;
3. Penanganan Jalan Sepanjang 22.40 Km Di Kabupaten Tapanuli Selatan Dengan Rincian:
- Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Jalan Sipirok - Simpang Tandoson Sepanjang 6 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Jalan Sipenggeng - Marancar – Sipirok Sepanjang 3 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Jalan Simpang Tandoson - Simangambat – Sipagimbar Sepanjang 1,40 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Jalan Sipagimbar - Batas Padang Lawas Utara (Tolang) Sepanjang 12 Km;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 4.000 M.
4. Penanganan Jalan Sepanjang 4,50 Km Di Kota Padangsidimpuan Dengan Rincian:
- Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Jalan Hutaimbaru - Padangsidimpuan - Batunadua (Ringroad Lintas Timur) Sepanjang 3,50 Km;
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ruas Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (Jalan By Pass Ringroad Lintas Timur) Sepanjang 1 Km;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 4.000 M
5. Penanganan Jalan Sepanjang 34,80 Km Kabupaten Padang Lawas Dengan Rincian:
- Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Ujung Batu - Batas Riau Sepanjang 3,40 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Sibuhuan - Ujung Batu Sepanjang 3,60 Km;
 - Pembangunan Ruas Jalan Sibuhuan -Panyabungan Sepanjang 7 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Binanga (Batas Paluta) - Aek Nabara Tonga Sepanjang 2,20 Km;

- Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Paringgonan – Sibuhuan Sepanjang 1,60 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Sihaporas (Batas Padang Lawas Utara) – Paringgonan Sepanjang 7 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Aek Nabara Tonga – Sibuhuan Sepanjang 5 Km;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Aliaga - Muara Tige - Batas Riau Sepanjang 5 Km;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 4.000 M;
 - Pembangunan Jembatan Aek Silendorung Di Kabupaten Padang Lawas Pada Tahun 2022 Untuk Mendukung Akses Konektivitas Antar Kabupaten/Kota.
6. Penanganan Jalan Sepanjang 34,00 Km Di Kabupaten Padang Lawas Utara Dengan Rincian:
- Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Hutaimbaru – Sipiongot Sepanjang 8 Km;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Aek Godang - Sihaporas (Batas Padang Lawas) Sepanjang 3,60 Km;
 - Pembukaan Jalan Provinsi Ruas Sipiongot - Batas Tapanuli Selatan (Tolang) Sepanjang 10 Km;
 - Peningkatan Struktur Jalan Gunung Tua - Binanga (Batas Padang Lawas) Sepanjang 2,40 Km;
 - Pembukaan Jalan Provinsi Ruas Sipiongot - Batas Labuhan Batu Sepanjang 10 Km;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 4.000 M.
7. Penanganan Jalan Sepanjang 27,80 Km Di Kabupaten Mandailing Natal Dengan Rincian:
- Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Jembatan Merah - Muara Soma Sepanjang 2 Km;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Muara Soma - Simpang Gambir Sepanjang 3,60 Km;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simpang Pulo Padang – Batahan Sepanjang 10 Km;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Muara Pungkut - Simpang Banyak Sepanjang 2,20 Km;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Natal (Setia Karya) – Batahan Sepanjang 8 Km;

- Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simpang Banyak - Batas Sumbar Sepanjang 2 Km;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 4.000 M.
- b) Pembangunan Perkuatan Tebing Dan Normalisasi Pada Wilayah Sungai Di Pantai Barat;
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Gadis Desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2022;
 - Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Tahun 2022;
 - Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sirahar Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Tahun 2022;
- c) Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Pada Lokasi :
- Relokasi Hunian Tetap Lahan Pt. Perkebunan Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2022;
 - Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan Pada Tahun 2022.
- d) Penanganan Jaringan Daerah Irigasi Di Wilayah Pantai Barat:
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Pada Daerah Irigasi Napa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Siborna Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Padang Garugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sipirok Komplek Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Roburan Maga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2022;
- e) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berlokasi Di Kabupaten/Kota :
- Kabupaten Padang Lawas Utara Sebanyak 50 Unit Di Tahun 2022;
 - Kota Padangsidempuan Sebanyak 50 Unit Di Tahun 2022;
 - Kota Sibolga Sebanyak 50 Unit Di Tahun 2022;
 - Pemasangan Jaringan Listrik Gratis Untuk Rumah Tangga Tidak Mampu Sebanyak 350 Unit Tahun 2022 Dan 300 Unit Tahun 2023 Di Zona Pantai Barat;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Sebanyak 2 Unit Di Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Mandailing Natal Tahun 2022;

Pembangunan Penerangan Umum Tenaga Surya Sebanyak 9 Unit Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.

5.1.1.3 Wilayah Dataran Tinggi

Wilayah Dataran Tinggi terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Kondisi umum wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari 5 (lima) indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Dataran Tinggi pada tahun 2021 rata-rata sebesar -0,25 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,67 persen. Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Dataran Tinggi pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2018, yang masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,05 persen, penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di wilayah Dataran Tinggi hal ini salah satunya disebabkan karena terjadinya pandemik covid-19. Pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi ada di Kabupaten Tapanuli Utara dengan capaian 1,50 persen dan terendah ada di Kota Pematang Siantar yang berkontraksi sebesar -1,89 persen.

Dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui rata-rata TPT pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3,23 persen, kondisi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 6,91 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kawasan Dataran Tinggi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan TPT pada tahun 2019 dan 2018 yang tumbuh sebesar 2,50 persen dan 2,90 persen. Peningkatan terjadi hampir pada semua Kab/Kota di wilayah Dataran Tinggi, namun ada Kota Pematang Siantar yang mengalami peningkatan TPT yang paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 11,50 persen.

Dilihat dari kondisi kemiskinan, wilayah Dataran Tinggi merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 9,18 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2020 sebesar 8,75 persen, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan angka kemiskinan pada tahun 2019 dan 2018 yang tumbuh sebesar 9,11 persen dan 8,63 persen.

Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Samosir, sedangkan yang terendah di Kabupaten Dairi.

Sementara rata-rata gini ratio pada tahun 2020 mengalami peningkatan capaian provinsi pada tahun 2020 sebesar 0,316, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Gini Rasio pada tahun 2019 dan 2018 yang tumbuh masing-masing sebesar 0.290 persen. Gini ratio tertinggi terdapat pada Kota Pematang Siantar sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Dataran Tinggi mengalami Peningkatan, rata-rata IPM 72,63, angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara yang hanya mencapai 71,77. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Pantai Barat pada tahun 2019 dan 2018 ini mengalami peningkatan dari 71,90 dan 72,46, IPM tertinggi terdapt pada Kota Pematang Siantar sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Capaian kondisi makro wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.11
Makro Ekonomi Wilayah Dataran Tinggi Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			TPT			Gini Ratio			IPM			Kemiskinan					
														Jumlah (ribu orang)			Persen		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Dairi	5,01	-0,94	-0,94	1,75	1,75	1,75	0,265	0,265	0,265	71,42	71,57	71,84	58.9	22.93	23.72	7.70	8.04	8.31
2	Kab. Toba	4,97	-0,27	-0,27	2,50	2,50	2,50	0,328	0,328	0,328	74,92	75,16	75,39	28.93	16.05	16.61	8.60	8.71	8.99
3	Kab. Karo	4,55	-0,80	-0,80	1,83	1,83	1,83	0,268	0,268	0,268	74,25	74,43	74,83	86.29	36.57	38.01	8.23	8.70	8.79
4	Kota Pematang Siantar	4,80	-1,89	-1,89	11,50	11,50	11,50	0,334	0,334	0,334	78,57	78,75	79,17	40.64	21.23	22.06	8.63	8.27	8.52
5	Kab. Humbahas	5,04	-0,13	-0,13	0,84	0,84	0,84	0,291	0,291	0,291	68,83	68,87	69,41	18.63	17.92	18.71	8.75	9.36	9.65
6	Kab. Simalungun	5,18	1,01	1,01	4,58	4,58	4,58	0,290	0,290	0,290	72,98	73,25	73,40	39.29	73.64	76.99	8.81	8.46	8.81
7	Kab. Pakpak Bharat	5,85	-0,18	-0,18	1,93	1,93	1,93	0,239	0,239	0,239	67,47	67,59	67,94	39.35	4.59	4.79 4	9.27	9.28	9.35
8	Kab. Tapanuli Utara	4,35	1,50	1,50	2,94	2,94	2,94	0,282	0,282	0,282	73,33	73,47	73,76	31.06	28.41	29.72	9.48	9.37	9.72
9	Kab. Samosir	5,58	-0,59	-0,59	1,20	1,20	1,20	0,328	0,328	0,328	70,55	70,63	70,83	29.93	15.80	16.08	12.52	12.48	12.68
Rata-rata		5.03	-0.25	2.50	3.23	3.23	3.23	0.29	0.29	0.29	72.48	72.63	72.95	373.02	237.14	246.69	9.11	9.18	9.42

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, diolah

Kondisi Pendidikan di wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari perkembangan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Jika dilihat dari capaian pendidikan pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan rata-rata peningkatan pada tahun 2021 sebesar 13.44 persen, capaian tertinggi untuk Harapan Lama Sekolah di wilayah dataran tinggi adalah Kota Pematangsiantar dan terendah ada di Kabupaten Karo, sementara capaian Rata-rata lama sekolah mengalami fluktuasi terjadi penurunan pada tahun 2020 dari rata-rata 9.76 persen tahun 2019 menjadi 8.77 pada tahun 2020, namun terjadi peningkatan pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah di wilayah dataran tinggi menjadi 9.92 persen, wilayah dengan capaian daerah tertinggi pada tahun 2021 adalah kota pematangsiantar dan terendah ada di kabupaten Pakpak Bharat. Capaian kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
di Wilayah Dataran Tinggi

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Dairi	13,07	13,10	13,11	9,6	9,58	9,59
2	Kab. Toba	13,26	13,45	13,46	10,2	10,52	10,57
3	Kab. Karo	12,73	12,76	12,77	9,8	9,79	10,00
4	Kota Pematang Siantar	14,02	14,45	14,57	11,1	11,16	11,29
5	Kab. Humbahas	13,25	13,28	13,29	9,6	9,54	9,71
6	Kab. Simalungun	12,75	12,78	12,79	9,7	9,60	9,61
7	Kab. Pakpak Bharat	13,83	13,86	13,87	9,0	9,03	9,14
8	Kab. Tapanuli Utara	13,66	13,69	13,70	9,8	9,85	9,99
9	Kab. Samosir	13,44	13,47	13,48	9,0	9,43	9,44
	Rata-rata	13,33	13,43	13,44	9,76	8,77	9,92

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, diolah

Angka Putus Sekolah di wilayah dataran tinggi juga semakin membaik, hal ini disebabkan oleh adanya komitmen dari pemerintah untuk mensinergikan informasi pendidikan serta membangun kesamaan pandangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Bidang Pendidikan serta membangun strategi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan Bidang Pendidikan. Dengan adanya komitmen ini maka Angka Putus Sekolah dapat diminimalisir, capaian Angka Putus Sekolah di wilayah dataran tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.13
Kondisi Angka Putus Sekolah Wilayah Dataran Tinggi

No	Kab/Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Dairi	0,31	0,24	0,02	0,23	1,16	0,05
2	Kab. Toba	0,35	0,18	0,03	0,51	2,15	0,04
3	Kab. Karo	0,52	0,24	0,05	1,71	1,57	0,03
4	Kota Pematang Siantar	0,57	0,06	0,04	1,43	0,67	0,08
5	Kab. Humbahas	0,96	0,17	0,02	1,76	0,51	0,01
6	Kab. Simalungun	0,74	0,89	0,12	1,31	1,10	0,06
7	Kab. Pakpak Bharat	0,12	0,44	0,01	0,52	0,32	0,00
8	Kab. Tapanuli Utara	0,55	0,32	0,03	1,54	0,86	0,02
9	Kab. Samosir	0,97	0,13	0,01	0,45	0,25	0,01
Rata-rata		0,57	0,30	0,04	1,03	0,83	0,03

Sumber: BPS Sumatera Utara 2021, data diolah

Kondisi Kesehatan di wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari capaian 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Dataran Tinggi, Usia Harapan Hidup di Wilayah Dataran Tinggi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021, pada tahun 2021 capaian Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Kota Pematangsiantar 73.77 tahun, dan terendah ada di kabupaten Pakpak Bharat 65.59 tahun. Sementara kondisi jumlah kematian bayi di wilayah dataran tinggi fluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan hingga berjumlah 232 orang dengan rata-rata 25.77 persen. Angka kematian bayi tertinggi di wilayah dataran tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 37 kematian dan terendah ada di kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 11 kematian, sementara terjadi peningkatan yang cukup drastis pada Jumlah Kematian Ibu di wilayah dataran tinggi, Kabupaten Simalungun mendominasi kematian ibu sebanyak 18 kematian, tingginya kematian ibu dan anak ini salah satunya disebabkan oleh adanya pandemic Covid 19 dan minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan, dan perencanaannya. Kurangnya pengetahuan dan juga faktor gaya hidup. Namun jika dilihat dari perkembangan Prevalensi *sunting*, sejak tahun 2019 hingga 2021 capaian di wilayah dataran tinggi terus membaik, hingga 2021 capaian prevalensi stunting di wilayah datarn tinggi adalah sebesar 27.76 persen, jika dilihat dari 9 kabupaten/kota yang ada di wilayah dataran tinggi, maka capaian tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 40.8 pesen, angka ini cukup tinggi dan melebihi angka provinsi sebesar 25.8 persen. Dan capaian prevalensi stunting terendah ada di Kota pematangsiantar sebesar 15 persen. Capaian indikator kesehatan wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Kondisi Kesehatan Wilayah Dataran Tinggi

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Dairi	68,46	69,00	69,19	47	42	42	5	6	6	38,37	37,3	34,2
2	Kab. Toba	69,93	70,08	70,29	18	21	21	7	4	4	27,94	26,8	24,8
3	Kab. Karo	71,27	71,40	71,58	12	44	44	3	6	6	27,78	26,54	25,3
4	Kota Pematang Siantar	73,33	73,55	73,77	19	17	17	5	4	4	16,7	15,4	15,0
5	Kab. Humbahas	69,06	69,27	69,51	17	25	25	5	5	5	39,53	38,4	26,7
6	Kab. Simalungun	71,07	71,22	71,37	1	1	1	4	2	2	26,63	25,45	28,0
7	Kab. Pakpak Bharat	65,59	65,74	65,96	7	10	10	1	3	3	34,57	33,4	40,8
8	Kab. Tapanuli Utara	68,46	68,63	68,76	7	50	50	4	8	8	34,6	33,4	26,7
9	Kab. Samosir	71,16	71,27	71,41	18	22	22	2	0	0	22,58	21,58	28,4
Rata-rata		62,21	62,35	70,20	11,00	21,11	21,11	3,44	3,56	3,56	25,59	24,55	27,76

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021, diolah

Kondisi Jalan Provinsi di wilayah Dataran Tinggi adalah sepanjang 1.045 Km. Jalan mantap pada tahun 2021 di wilayah Dataran Tinggi adalah 79,66 persen atau 800 Km. Terdapat penurunan sebesar 0,74 persen. Apabila kita lihat pada tabel jalan provinsi dengan Kemantapan terendah di wilayah Dataran Tinggi berada di Kabupaten Samosir dengan tingkat kemantapan 49,00 persen. Sementara tingkat Kemantapan Jalan Provinsi tertinggi di wilayah Dataran Tinggi berada di Kota Pematang Siantar yakni mencapai 100 persen. Kondisi jalan wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.15
Kondisi Infrastruktur Dataran Tinggi Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2019	2020	2021
1	Kab. Dairi	89,00	69,00	69,00
2	Kab. Toba	60,00	55,00	60,00
3	Kab. Karo	99,00	93,00	93,00
4	Kota Pematang Siantar	100,00	100,00	100,00
5	Kab. Humbahas	97,00	85,00	86,00
6	Kab. Simalungun	99,00	79,00	79,00
7	Kab. Pakpak Bharat	97,00	96,00	96,00
8	Kab. Tapanuli Utara	91,00	84,00	85,00
9	Kab. Samosir	31,00	33,00	49,00
Rata-rata		84,77	77,11	79,66

Sumber: BPS Sumatera Utara 2021, diolah

Arah kebijakan Kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, wilayah Dataran Tinggi diarahkan untuk mendukung kegiatan proyek prioritas/kegiatan prioritas pembangunan Membangun Desa Menata Kota (MDMK) sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan

- Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan dan Khusus Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) Unit Yaitu SMK Negeri Pematang Silimakuta Dan SMK Negeri Panei di Kabupaten Simalungun. Kemudian pada tahun 2023, Pembangunan Unit Sekolah Baru sebanyak 2 (dua) unit yaitu SMA Negeri Gunung Sitember di Kabupaten Dairi serta Sma Negeri Sihotang di Kabupaten Samosir;
- Kerjasama *Link And Match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk 70 Mou/Moa Kompetensi Keahlian Vokasi untuk di 9 Kabupaten/Kota pada Zona Dataran Tinggi;
- Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) untuk Prioritas Siswa/I Miskin Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri sebanyak 51.246 Siswa/I pada

Tahun 2022 dan sebanyak 52.746 Siswa/I pada tahun 2023 di 9 Kabupaten/Kota pada Zona Dataran Tinggi;

- d) Pembangunan 3 (tiga) Unit Pojok Baca pada Tahun 2022 masing-masing 1 (satu) unit di Kabupaten Pakpak Bharat, Karo Dan Toba, serta Pembangunan 5 (lima) unit Pojok Baca pada tahun 2023 masing-masing 1 (Satu) unit di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara dan Samosir;
- e) Penyediaan Gerobak Baca masing-masing Satu Unit di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023, yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir dan Toba;
- f) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi untuk instansi sebanyak 1 (Satu) unit di Kabupaten Toba pada tahun 2022, serta Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi untuk instansi sebanyak 1 (satu) unit di Kota Pematang Siantar pada tahun 2023;
- g) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebanyak 1 (Satu) unit berupa Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Desa di Kabupaten Toba pada tahun 2022;
- h) Gubernur Menyapa melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Se- Sumatera Utara;
- i) Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional dan Intelektual Dalam Kurikulum;
- j) *Training Of Trainers* (Tot) 33 Orang Guru melalui Pembelajaran Jarak Jauh pada 33 Kabupaten/Kota.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a) Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (*Testing, Tracing, Treatment*);
- b) Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Untuk Praktek Pola Hidup Sehat Sehari Hari Dan Usaha Penurunan Prevalensi Stunting Pada Tahun 2022 Dan 2023 Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;
- c) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Iuran (Pbi) Provinsi Sebanyak 35.805 Jiwa Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 82.353 Jiwa Pada Tahun 2023 Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;
- d) Dokter Terbang Berjumlah 2 Orang Yang Terdistribusi Di Kota Pematang Siantar Dan Kabupaten Pakpak Bharat Pada Tahun 2022;
- e) Pemberian Paket Makanan Tambahan (Pmt) Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek) Sebagai Usaha Penurunan Prevalensi Stunting, Sebanyak 8.799 Orang Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 8.799 Orang 2023 Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;

- f) Pemberian Paket Makanan Tambahan (Pmt) Balita Kurus Sebagai Usaha Penurunan Prevalensi Stunting, Sebanyak 15.832 Orang Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 15.832 Orang Pada Tahun 2023 Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja

- a) Kerja Sama Dengan 3 Dunia Usaha Dan Dunia Industri, 2 Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi Untuk Fasilitasi Program *Link And Match* Pada Tahun 2023;
- b) Digitalisasi Pemasaran 20 Umkm Dan 5 Ikm Pada Tahun 2023 Di Zona Dataran Tinggi;
- c) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online;
- d) Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal;

4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

- a) Fasilitasi Pasca Panen Kopi Dan Kemiri Sebanyak 4 Unit Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Simalungun, Tapanuli Utara Dan Dairi;
- b) Bantuan Benih Tanaman Kopi :
- Mendukung Optimasi Lahan, Sebanyak 50.000 Batang Di Kabupaten Simalungun Dan Tapanuli Utara;
 - Mendukung Sistem Pertanian Terintegrasi (Sitantri) Sebanyak 45.000 Batang Di Kabupaten Dairi;
 - Mendukung Peremajaan Kopi Di Desa Wisata Sebanyak 22.500 Batang Di Kabupaten Samosir;
- c) Bantuan Benih Tanaman Cengkeh Sebanyak 1.800 Batang Di Kabupaten Simalungun Dan Dairi;
- d) Bantuan Padi, Jagung, Cabai, Bawang Dan Kentang Di Seluruh Zona Dataran Tinggi;
- e) Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele Di Kabupaten Samosir, Budidaya Ikan Melalui Sistem Bioflok Di Kabupaten Dairi, Karo Dan Toba;
- f) Pengadaan Sampan Bermotor Beserta Alat Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Perairan Umum Daratan Sebanyak 14 Unit Di Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Tapanuli Utara Dan Simalungun;
- g) Pengadaan Sampan Dayung/Solu Untuk Nelayan Perairan Umum Daratan Sebanyak 40 Unit Di Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Tapanuli Utara Dan Simalungun;

- h) Pemberian Asuransi Nelayan Di Tahun 2022 Sebanyak 200 Nelayan Dan Tahun 2023 Sebanyak 300 Nelayan Pada Zona Dataran Tinggi.

5. Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

- a) Fasilitasi Tour Operator/Travel Writer, Sosialisasi Sadar Wisata Di Kabupaten Se-Kawasan Danau Toba;
- b) *Sport Tourism* (Kejurnas Rally), *Sport Tourism* (Aprc Rally) Di Kabupaten Simalungun;
- c) *Women 20 Summit Event* Di Kabupaten Simalungun;
- d) Penataan Dan Pengelolaan Geosite Sebagai Salah Satu Langkah Pemenuhan Rekomendasi Unesco Dalam Mempertahankan Status Toba *Caldera Unesco Global Geopark*;
- e) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Pariwisata Dalam Mengelola Desa Wisata (Phjd 2022) Di Kabupaten Toba Dan Dairi.

6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

- a) Pelatihan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Serta Gerakan Nasional Revolusi Mental Untuk Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi Tahun 2022 Dan Tahun 2023;
- b) Dukungan Kabupaten/Kota Zona Dataran Tinggi Terhadap Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sebesar 80 Persen;
- c) Dukungan Kabupaten/Kota Zona Dataran Tinggi Untuk Mempertahankan Pencapaian Tertinggi Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia;

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

- a) Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual;
- b) Pembangunan 1 Unit Wisma Atlet Dan Stadion Sepakbola Beserta Lintasan Atletik Pada Tahun 2022 Di Kawasan Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- c) Pelatihan Dan Pembinaan Penyusunan Grand Design Besar Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Khususnya Untuk Mendukung Persiapan Pon Xxi Tahun 2024, Untuk 90 Orang Pada Tahun 2022 Di Kabupaten Karo;
- d) Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pada Tahun 2022 Sebanyak 239 Unit Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;

- e) Bantuan Hibah Untuk Rehabilitasi Yayasan Sekolah Sebanyak 58 Unit Di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;
- f) Rehabilitasi 1 Unit Panti Eks Kusta Lao Simomo Di Kabupaten Karo, Rehabilitasi Panti Eks Kusta Hutasalem Di Kabupaten Simalungun, Rehabilitasi Lanjutan Panti Tuna Laras Di Kabupaten Karo Dan Rehabilitasi Lanjutan Panti Tuna Wicara Di Kota Pematang Siantar Yang Dilaksanakan Keseluruhan Pada Tahun 2023.

8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

- a) Pada Tahun 2022 Dan 2023 Akan Dilakukan Penanganan Jalan Di Zona Dataran Tinggi Sepanjang 120,11 Km Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Kabupaten Karo Penanganan Jalan Sepanjang 26, 67 Km
 - Simpang Tongkoh (Tahura) - Simpang Sinaman Sepanjang 5 Km Pada Tahun 2022;
 - Kuta Rakyat - Batas Langkat Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2022;
 - Lanjutan Simpang Tongkoh (Tahura) - Simpang Sinaman Sepanjang 5 Km Pada Tahun 2023;
 - Lanjutan Kuta Rakyat - Batas Langkat Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2023;
 - Pembukaan Jalan Alternatif Medan Berastagi Melalui Rumah Liang Dan Samba Ikan Ii Sepanjang 12,67 Km.
 - Kabupaten Dairi Sepanjang 11 Km,
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sigalingging - Huta Jungak (Batas Pakpak Bharat) Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Tanjung Baeringin - Plta - Pangiringan Sepanjang 5 Km Pada Tahun 2023;
 - Penanganan Jalan Provinsi Ruas Simpang Lae Pandom Sampai Dengan Batas Kabupaten Karo Sepanjang 28 Km Pada Tahun 2022.
 - Kabupaten Pakpak Barat Sepanjang 2,40 Km,
 - Peningkatan Struktur Provinsi Ruas Simpang Sukarame - Salak Sepanjang 1 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simpang Jambu - Huta Jungak (Batas Dairi) 1,4 Km Pada Tahun 2023.

- Kabupaten Simalungun Sepanjang 52,60 Km,
 - Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Batas Pematang Siantar - Pematang Raya Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar - Kerasaan Sepanjang 3 Km Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Pematang Raya - Tiga Runggu Sepanjang 6 Km Pada Tahun 2023;
 - Rekonstruksi Jalan Provinsi Ruas Kerasaan Perdagangan Sepanjang 3 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Saran Padang - Seribu Dolok Sepanjang 1,6 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar - Tanah Jawa Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Tanah Jawa - Batas Asahan Di Sepanjang 3 Km Pada Tahun 2023.

- Kota Pematang Siantar Sepanjang 5,64 Km
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ruas Jalan Ade Irma Sepanjang 1,71 Km Pada Tahun 2023;
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ruas Jalan D.I Panjaitan/Jalan Gereja (Kota Pematang Siantar) - Batas Kabupaten Simalungun Sepanjang 3,93 Km Pada Tahun 2023.

- Kabupaten Toba Sepanjang 16,5 Km
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Silimbat - Parsoburan Sepanjang 3 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan - Batas Labuhan Batu Utara Sepanjang 12 Km Pada Tahun 2022 Dan Tahun 2023;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria (Batas Tapanuli Utara) Sepanjang 1,5 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Balige - Tara Bunga - Meat (Batas Tapanuli Utara) Sepanjang 1,5 Km Pada Tahun 2023.

- Kabupaten Tapanuli Utara Sepanjang 40,30 Km,
 - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Aek Humbang - Batas Tapsel Sepanjang 1,20 Km Pada Tahun 2023;

- Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simpang Iv Hutabarat - Sipahutar Sepanjang 10 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sipahutar - Aek Humbang Sepanjang 1,60 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Pangaribuan - Garoga - Batas Tobasa Sepanjang 1,5 Km Pada Tahun 2023;
 - Penanganan Ruas Jalan Provinsi Simpang Sitanggor – Meat (Batas Toba) Dan Silangit – Simpang 3 Muara - Muara – Bakkara (Batas Humbang Hasundutan) Sepanjang 26 Km Pada Tahun 2022
 - Kabupaten Humbang Hasundutan Sepanjang 12,50 Km,
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Siabaksa - Bakara - Batas Taput Sepanjang 2,6 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Batu Gajah - Batas Pakpak Bharat Sepanjang 3,60 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Pakkat - Batas Tapanuli Tengah Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Pakkat - Tara Bintang Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Tara Bintang - Parlilitan Sepanjang 2,3 Km Pada Tahun 2023;
 - Kabupaten Samosir Sepanjang 9 Km.
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Gonting - Janji Raja Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simarmata - Simpang Sinapuran Sepanjang 2,5 Km Pada Tahun 2023;
 - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Palipi - Parmonangan Sepanjang 2,5 Km Pada Tahun 2023;
- b) Pembangunan Jembatan Aek Pardomuan Di Kabupaten Tapanuli Utara Pada Tahun 2023 Untuk Mendukung Aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
- c) Pembangunan Perkuatan Tebing Dan Normalisasi Pada Wilayah Sungai Di Dataran Tinggi;
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Siborgung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Pada Tahun 2022;
 - Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bah Bolon Kecamatan Nagori Senio, Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Pada Tahun 2022;

- Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bah Lombut Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Pada Tahun 2022;
 - Rehabilitasi / Perbaikan Dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pungai / Pantai Pada Sungai Lau Mbelin Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Pada Tahun 2022;
 - Rehabilitasi / Perbaikan Dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Sungai/Pantai Pada Sungai Lau Nagan Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo Pada Tahun 2022;
- d) Penanganan Jaringan Daerah Irigasi Di Wilayah Dataran Tinggi:
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Pada Daerah Irigasi Hutapaung/Parmiahan (Dak) Desa Hutajulu Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Tahun 2022;
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rambung Merah/Simarimbun (Dak) Pada Tahun 2022;
- e) Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Limbah Domestik :
- i. Pembangunan Infrastruktur Ipal Individual Pada Lokasi Stunting Di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - ii. Pembangunan Infrastruktur Ipal Individual Pada Lokasi Stunting Di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - iii. Pembangunan Infrastruktur Ipal Individual Pada Lokasi Stunting Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- f) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berlokasi Di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Karo Pada Tahun 2022;
- g) Pemasangan Jaringan Listrik Gratis Untuk Rumah Tangga Tidak Mampu Sebanyak 500 Unit Tahun 2022 Dan 500 Unit Tahun 2023 Di Dataran Tinggi;
- h) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Sebanyak 18 Unit Di Kabupaten Karo Dan Simalungun Pada Tahun 2022;
- i) Pembangunan Plts Terpusat Mendukung Pertanian Sebanyak 2 Unit Tahun 2023 Di Kabupaten Dairi Dan Samosir.

5.1.1.4 Kepulauan Nias

Kepulauan Nias terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan Kota diantaranya Kabupaten Nias, Kota GunungSitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Kondisi umum wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat dari 5 (lima) indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Kepulauan Nias pada tahun 2021 rata-rata sebesar 2,80 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,67 persen. Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Kepulauan Nias pada tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2018, yang tumbuh rata-rata sebesar 4,87 persen, penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di wilayah Kepulauan Nias hal ini salah satunya disebabkan karena terjadinya pandemic covid 19. Pada tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi ada di Kabupaten Nias dan terendah ada di Kota Gunung Sitoli. Dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui rata-rata TPT pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3,97 persen, kondisi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 6,91 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kawasan Kepulauan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan TPT pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,54 persen namun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 3,12 persen. Peningkatan terjadi hampir pada semua Kab/Kota di wilayah Kepulauan Nias, Kabupaten dengan nilai TPT yang paling tinggi pada tahun 2021 diantaranya adalah Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten dengan nilai TPT terendah berada di Kabupaten Nias Barat.

Jika dilihat dari kondisi Indeks Pembangunan Manusia di wilayah kepulauan Nias maka pada dari tahun 2019-2021 capaian IPM terus mengalami peningkatan, hingga rata-rata capaian pada tahun 2021 sebesar 63.90 poin, peningkatan terjadi hampir disemua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kepulauan Nias. Namun jika dilihat dari kondisi kemiskinan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah kepulauan Nias mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2021, begitu juga dengan persentase kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 2019 hingga 2021. pada tahun 2021 rata-rata persentase kemiskinan sebesar 20.45 persen, dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Nias Barat sebesar 26.42 persen dari total penduduk diikuti Kabupaten Nias Utara dengan angka kemiskinan 25,66%. Artinya, 1 dari 4 penduduk di kedua kabupaten tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian sebanyak 16,92% penduduk di Kabupaten Nias Selatan di bawah garis kemiskinan. Sementara persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias sebesar 16,82%. Terjadinya pandemi Covid-19 telah membuat jumlah penduduk miskin di Kepulauan Nias bertambah

Tabel 5.16

Makro Ekonomi Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021

No	Pertumbuhan Ekonomi				TPT			Gini Ratio			IPM			KEMISKINAN					
	Kab/ Kota	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Jumlah Ribuan Orang			Persen		
														2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Nias	4,50	1,80	1,80	1,09	3,49	3,49	0,265	0,265	0,265	61,65	61,93	62,74	61,65	61,93	62,74	22,10	23,12	24,33
2	Kab. Nias Selatan	5,02	0,61	1,74	2,25	4,15	4,15	0,330	0,330	0,330	61,59	61,89	62,35	61,59	61,89	62,35	52,51	53,88	55,16
3	Kota Gunung Sitoli	6,03	0,38	1,60	5,59	5,94	5,94	0,361	0,361	0,361	69,3	69,31	69,61	69,3	69,31	69,61	23,06	23,54	24,02
4	Nias Utara	4,39	1,58	2,56	3,07	4,54	4,54	0,237	0,237	0,237	61,98	62,26	62,82	61,98	62,36	62,82	34,42	34,74	35,84
5	Nias Barat	4,42	1,66	2,70	1,63	1,71	1,71	0,283	0,283	0,283	61,14	61,51	61,99	61,14	61,51	61,99	22,08	22,33	21,75
Rata-rata		4,87	1,20	2,80	4,54	3,97	3,97	0,295	0,295	0,295	63,132	63,38	63,90	3,132	63,38	63,90	154,17	157,61	161,1

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021, data diolah

Dilihat dari kondisi kemiskinan, wilayah Kepulauan Nias merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 19.98 persen, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi pada tahun 2020 sebesar 9.14 persen. Persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat, sedangkan yang terendah di Kota Gunung Sitoli.

Sementara rata-rata gini ratio pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,295 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2021 sebesar 0,316, dan angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Gini Rasio pada tahun 2019 yang tumbuh masing-masing sebesar 0.295 persen, Gini ratio tertinggi terdapat pada Kabupaten Nias Utara, sedangkan yang terendah ada pada Kota Gunung Sitoli.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kepulauan Nias mengalami Peningkatan, rata-rata IPM sebesar 63,40 persen angka ini rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara yang hanya mencapai 71,77. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Kepulauan Nias pada tahun 2019 dan 2018 ini mengalami peningkatan dari 62,32 dan 63,13, IPM tertinggi terdapat pada Kota Gunung Sitoli, sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Nias Barat.

Kondisi pendidikan di wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat dari capaian indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Kondisi Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Nias sejak tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2021 capainnya rata-rata sebesar 12.97 persen.

Harapan Lama sekolah tertinggi di wilayah Kepulauan Nias ada di Kota Gunung Sitoli sementara terendah ada di Kabupaten Nias Selatan, sementara itu Rata-Rata Lama Sekolah capaian tertinggi ada di Kota Gunung Sitoli dan capaian terendah ada di Kabupaten Nias Selatan. Sementara capaian Rata-rata lama sekolah mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan pada tahun 2020 rata-rata sebesar 6.58 persen,

Tabel 5.17
Kondisi Harapan Lama Sekolah dan
Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Nias	12,13	12,57	12,84	5,15	5,36	5,64
2	Kab. Nias Selatan	12,20	12,23	12,27	6,7	5,85	6,06
3	Kota GunungSitoli	13,71	13,74	13,75	9,1	8,61	8,62
4	Nias Utara	12,58	13,03	13,04	7,3	6,58	6,77
5	Nias Barat	12,66	12,94	12,95	7,4	6,49	6,69
Rata-rata		12,66	12,90	12,97	7,13	6,58	6,76

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Walaupun Angka Putus Sekolah di Kepulauan Nias terus membaik, namun kondisi pendidikan di Kepulauan Nias jauh berada dibawah kondisi pendidikan di kawasan pantai timur, barat dan wilayah dataran tinggi. Beberapa kondisi yang sering dihadapi oleh para siswa di Kepulauan Nias diantaranya berbagai fasilitas, seperti komputer, wifi yang tersedia di sekolah, buku-buku mata pelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya yang mereka dapat dari sekolah semua belum memadai, termasuk Fasilitas komputer dan jaringan internet yang tidak memadai. Sebagian besar para siswa lebih banyak belajar teori dibandingklan praktek. Untuk itu perlu dukungan dan prioritas pemerintah dan lintas sektor agar kondisi pendidikan di kepulauan Nias biasa menjadi lebih baik. Kondisi Angka Putus Sekolah di Kepulauan Nias dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.18
Kondisi Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK
Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/ Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Nias	1,95	0,21	0,01	1,15	0,88	0,01
2	Kab. Nias Selatan	1,85	1,39	0,10	2,39	2,74	0,08
3	Kota Gunung Sitoli	0,66	0,21	0,02	0,52	0,62	0,02
4	Nias Utara	0,36	0,58	0,01	2,11	0,52	0,01
5	Nias Barat	0,18	0,45	0,02	0,21	0,59	0,00
Rata-rata		1,00	0,57	0,03	1,28	1,07	0,03

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, data diolah

Kondisi kesehatan diwilayah Kepulauan Nias dapat dilihat dari beberapa capaian indikator diantaranya capaian Usia Harapan Hidup, Kematian Bayi, kematian Ibu dan Prevalensi *Stunting*. Jika dilihat dari perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kepulauan Nias Kota Gunung Sitoli merupakan Kota dengan capaian UHH tertinggi yaitu sebesar 71.02 tahun dan terendah ada di Kabupaten Nias Utara sebesar 69.29 tahun. Selanjutnya jika dilihat dari perkembangan jumlah kematian bayi, maka jumlah kematian Bayi terbanyak ada di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli sebanyak 22 Kematian dan terendah ada di kabupaten Nias Utara sebanyak 13 kematian. Namun kematian ibu di kepulauan Nias mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2019 penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya serta kurangnya pengetahuan dan juga faktor gaya hidup. Sementara itu jika dilihat dari capaian *stunting* sejak tahun 2019 hingga 2021 di kepulauan nias terus mengalami penurunan. Capaian Makro kesehatan wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19
Kondisi Kesehatan Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/ Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Nias	69,68	69,75	69.78	28	7	22	3	1	3	59,53	58,5	32.1
2	Kab. Nias Selatan	68,58	68,74	68.86	7	11	18	7	3	6	43,26	42,14	36.7
3	Kota Gunung Sitoli	71,02	71,19	71.32	26	23	22	3	3	3	33,4	32,2	26.3
4	Nias Utara	69,29	69,43	69.55	12	7	13	4	4	1	43,66	40,45	34.4
5	Nias Barat	68,82	68,96	69.08	30	16	19	7	6	8	44,06	43,06	27.9
Jumlah/Rata-rata		69.7	69.61	69.71	103	64	94	24	17	21	44.78	43.27	31.47

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, data diolah

Jika dilihat dari kondisi jalan Provinsi di Kepulauan Nias adalah sepanjang 263 Km. Jalan mantap pada tahun 2021 di wilayah Kepulauan Nias adalah 68,38 persen atau 179 Km. Terdapat penurunan 0,40 persen dari kondisi tahun 2019. Apabila kita lihat pada tabel jalan provinsi dengan kemantapan terendah di wilayah Kepulauan Nias berada di Kabupaten Nias Barat dengan tingkat kemantapan 54,69 persen. Sementara tingkat kemantapan Jalan Provinsi tertinggi di wilayah Kepulauan Nias berada di Kabupaten Nias yakni mencapai 99,19 persen. Kondisi infrastruktur di wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.20
Kondisi Infrastruktur Wilayah Kepulauan Nias

No	Kabupaten/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2019	2020	2021
1	Kab. Nias	89,00	80,00	82,00
2	Kab. Nias Selatan	70,00	73,00	76,00
3	Kota GunungSitoli	93,00	93,00	93,00
4	Nias Utara	65,00	66,00	65,00
5	Nias Barat	63,00	56,00	55,00
Rata-rata		76,00	73,60	74,20

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021, data diolah

Arah Kebijakan pembangunan wilayah Kepulauan Nias untuk mencapai prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 melalui kegiatan proyek prioritas/kegiatan prioritas pembangunan Membangun Desa Menata Kota (MDMK) sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan

- a) Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan dan Khusus Tahun 2022 Sebanyak 1 Unit Di SMAN 2 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Dan Tahun 2023 Sebanyak 1 Unit Di SMAN Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan
- b) Kerjasama *Link And Match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Atau Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (Dudi) Untuk 70 MoU Atau MoA Kompetensi Keahlian Vokasi;
- c) Pembangunan 3 Unit Pojok Baca Dan 1 Unit Gerobak Baca Di Kepulauan Nias Pada Tahun 2022 2 Unit Pojok Baca Dan 1 Unit Gerobak Baca Di Kepulauan Nias Pada Tahun 2023;

- d) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Untuk Siswa Siswi Miskin Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Sebanyak 25.526 Siswa Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 25.526 Siswa Siswi Pada Tahun 2023 Di Kepulauan Nias;
- e) Gubernur Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa Siswi Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se- Sumatera Utara;
- f) Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Sebanyak 1.000 Orang Di Kepulauan Nias;
- g) *Training Of Trainers* (Tot) 33 Orang Guru Melalui Pembelajaran Jarak Jauh Pada 33 Kabupaten/Kota;
- h) Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a) Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (*Testing, Tracing, Treatment*)
- b) Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Untuk Praktek Pola Hidup Sehat Sehari Hari Di Kepulauan Nias;
- c) Dokter Terbang Berjumlah 12 Orang Terdistribusi Di Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara Dan Nias Barat Pada Tahun 2022;
- d) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat :
 - Penerima Bantuan Iuran (Pbi) Provinsi Sebanyak 22.958 Jiwa Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 54.795 Jiwa Pada Tahun 2023 Di Kepulauan Nias;
 - Kontribusi Premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Pbi JKN) Pusat Tahun 2022 Sebanyak 473.070 Jiwa Dan Pada Tahun 2023 Sebanyak 473.070 Jiwa Di Kepulauan Nias
- e) Paket Makanan Tambahan (Pmt) Balita Kurus Sebanyak 5.900 Orang Pada Tahun 2022 Dan 5.900 Orang Pada Tahun 2023 Di Kepulauan Nias;
- f) Paket Makanan Tambahan (Pmt) Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek) Sebanyak 3.233 Orang Pada Tahun 2022 Dan Sebanyak 3.233 Orang Di Kepulauan Nias;

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja

- a) Kerja Sama Dengan 3 Dunia Usaha Dan Dunia Industri, 2 Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi Untuk Fasilitasi Program *Link And Match* Pada Tahun 2023;
- b) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online;

- c) Digitalisasi Pemasaran 20 Umkm Dan 5 Ikm Pada Tahun 2023 Di Kepulauan Nias;
- d) Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

- a) Pengadaan Benih Kelapa Pandan Wangi Sebanyak 600 Batang Untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat Miskin Produktif Di Kepulauan Nias Pada Tahun 2022 Dan 5.000 Batang Bibit Kelapa Tahun 2023 Dalam Mendukung Produksi Kelapa Sebesar 37.982,43 Ton;
- b) Pencapaian Target Produksi Padi Sebesar 239.090 Ton Dan Produksi Jagung Sebesar 12.584 Ton Melalui Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Padi Dan Jagung Di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara Dan Nias Barat;
- c) Pengembangan Kawasan Sentra Cabai Merah Untuk Mendukung Target Produksi Sebesar 1.757 Ton;
- d) Pengadaan Bibit Karet Okulasi Sebanyak 5.000 Batang Di Kabupaten Nias Utara Dalam Mendukung Produksi Karet 28.662,18 Ton Pada Tahun 2023;
- e) Pencapaian Target Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 50.813,58 Ton Pada Tahun 2023 Dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 523,13 Ton Melalui Pengadaan Coolbox Dan Pemberian Asuransi 10.000 Nelayan;

5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

- a) Pengembangan Desa Wisata Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Desa Wisata Di Kota Gunung Sitoli;
- b) Pembangunan Kios Kuliner, Pembangunan Kios Souvenir Di Kabupaten Nias Selatan;
- c) Pembangunan *Tourism Information Center* Dan Klinik, Pembangunan *Guest House, Garbage Area* Di Kabupaten Nias Selatan;
- d) Penyiapan Fasilitas Pada Daerah Wisata Dan Pembangunan Musholla Di Kabupaten Nias Selatan;
- e) Pembangunan Infrastruktur Digitalisasi Promosi Pariwisata;
- f) Lanjutan Perawatan Kawasan Permukiman Rumah Adat Bawomataluo Di Kabupaten Nias Selatan.

6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

- a) Pelatihan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Serta Gerakan Nasional Revolusi Mental Untuk Seluruh Aparatur Sipil Negara Di Kepulauan Nias;

- b) Dukungan Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias Terhadap Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Sebesar 80 Persen;
- c) Dukungan Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias Untuk Mempertahankan Pencapaian Tertinggi Nilai *Monitoring Center For Prevention* (Mcp) Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia;

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

- a) Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual;
- b) Pembinaan Atlet Berprestasi Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keolahragaan Di Kepulauan Nias Khususnya Untuk Mendukung Persiapan Pelaksanaan Pon Xxi Tahun 2024;
- c) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pada Tahun 2022 Sebanyak 41 Unit Di Kabupaten Nias, 11 Unit Di Kabupaten Nias Barat, 47 Unit Kabupaten Nias Selatan, 31 Unit Kabupaten Nias Utara Dan 16 Unit Di Kota Gunung Sitoli;
- d) Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Ibadah Sebanyak 146 Unit Di Kepulauan Nias Pada Tahun 2022;
- e) Bantuan Hibah Kepada 1 Lembaga Di Kota Gunung Sitoli Pada Tahun 2022;
- f) Bantuan Hibah Untuk Rehabilitasi Yayasan Sekolah Sebanyak 5 Unit Di Kepulauan Nias;
- g) Rehabilitasi 1 Unit Panti Pelayanan Sosial Anak Di Kota Gunung Sitoli Pada Tahun 2023;

8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

- a) Penanganan Jalan Sepanjang 71,7 Kilometer Untuk Pencapaian Tingkat Kemantapan Sebesar 94,07 Persen;
- b) Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang 1.000 Meter Pada Jalan Sudirman Di Kota Gunung Sitoli;
- c) Pembangunan *Box Culvert* Pada Jalan Provinsi Ruas Afia – Tuhemberua Pada Kabupaten Nias Utara;
- d) Pembangunan Jembatan Idano Oyo Dan Jembatan Mbo Mbo Sebua Di Kabupaten Nias Barat Pada Tahun 2022;
- e) Optimalisasi Jaringan Daerah Irigasi Gido Zebua Seluas 1.200 Ha Dengan Luas Potensial 355 Ha Di Kabupaten Nias;
- f) Pemasangan Jaringan Listrik Gratis Untuk Rumah Tangga Tidak Mampu Sebanyak 500 Unit Di Kepulauan Nias;

5.2 Proyeksi Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menunjukkan adanya disparitas kemajuan pembangunan antar daerah. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk Kabupaten/Kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah melalui beberapa indikator makro.

Tabel 5.21
Proyeksi Target Makro Kabupaten/Kota
se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	IPM	Persentase Penduduk Miskin	TPT	LPE	Gini Rasio
1.	Kab. Nias	64,50	15,03	2,50	4,90-5,90	0,240
2.	Kab. Mandailing Natal	68,80	7,89	4,30	5,00-6,00	0,232
3.	Kab. Tapanuli Selatan	72,00	6,72	2,42	5,00-6,00	0,248
4.	Kab. Tapanuli Tengah	70,70	11,20	5,54	5,00-6,00	0,292
5.	Kab. Tapanuli Utara	75,30	8,30	0,94	4,70-5,70	0,257
6.	Kab. Toba	76,60	7,60	0,50	4,80-5,80	0,303
7.	Kab. Labuhan Batu	73,90	8,41	4,05	4,90-5,90	0,269
8.	Kab. Asahan	72,20	8,19	5,24	5,20-6,20	0,266
9.	Kab. Simalungun	74,70	7,47	2,58	5,00-6,00	0,265
10.	Kab. Dairi	73,80	7,01	1,35	4,80-5,80	0,240
11.	Kab. Karo	75,90	7,40	1,43	4,60-5,60	0,243
12.	Kab. Deli Serdang	77,60	3,34	7,50	5,00-6,00	0,269
13.	Kab. Langkat	73,40	9,19	5,02	4,90-5,90	0,228
14.	Kab. Nias Selatan	64,40	15,05	2,15	4,90-5,90	0,305
15.	Kab. Humbang Hasundutan	70,70	8,26	0,44	4,80-5,80	0,266
16.	Kab. Pakpak Barat	69,50	8,20	1,53	5,40-6,40	0,214
17.	Kab. Samosir	72,80	11,86	0,80	5,30-6,30	0,260

No	Kabupaten/ Kota	IPM	Persentase Penduduk Miskin	TPT	LPE	Gini Rasio
18.	Kab. Serdang Bedagai	72,60	6,85	3,54	5,00-6,00	0,258
19.	Kab. Batu Bara	70,20	12,54	4,48	4,50-5,50	0,224
20.	Kab. Padang Lawas Utara	71,60	8,98	1,11	5,20-6,20	0,274
21.	Kab. Padang Lawas	70,40	8,32	2,11	5,20-6,20	0,274
22.	Kab. Labuhan Batu Selatan	74,20	7,28	2,90	5,10-6,10	0,218
23.	Kab. Labuhan Batu Utara	73,60	8,72	4,82	5,00-6,00	0,257
24.	Kab. Nias Utara	64,00	20,20	2,54	4,70-5,70	0,212
25.	Kab. Nias Barat	63,80	23,51	1,31	4,80-5,80	0,258
26.	Kota Sibolga	75,40	11,99	6,00	5,00-6,00	0,278
27.	Kota Tanjung	70,60	14,13	4,97	5,30-6,30	0,307
28.	Kota Pematang Siantar	81,00	7,52	9,50	4,80-5,80	0,309
29.	Kota Tebing Tinggi	77,10	8,71	7,98	5,00-6,00	0,315
30.	Kota Medan	82,50	7,33	8,74	5,40-6,40	0,289
31.	Kota Binjai	78,10	4,86	6,67	5,20-6,20	0,284
32.	Kota Padang Sidempuan	76,90	6,50	5,45	5,20-6,20	0,334
33.	Kota GunungSitoli	71,50	9,89	3,94	5,50-6,50	0,336
Sumatera Utara		73,61	7,87	5,50	5,00-6,00	4,70- 5,70

Sumber : Bappeda Provsu, data diolah 2021

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD/ KPBU/CSR/Hibah/Pinjaman

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan di Sumatera Utara perlu dukungan pendanaan dari berbagai pihak baik swasta maupun nasional. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalan dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta (Public Private Partnership), sektor dana Corporate Social Responsibility (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN).

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Nasional	Kementerian	Lokasi
1	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Normalisasi dan Penanganan Sungai Belawan, Badera, Deli, Babura, Sikambing, Selayang, Sei Putih dan Sungai Sulang Saling dalam rangka Pengendalian Banjir di Kota Medan dan Sekitarnya	Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, Food Estate dan KSPN)	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan TPA Regional Mebidang, Kecamatan STM Hilir	Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Deli Serdang
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Merek – Bts Kabanjahe (Tiga Panah)	Destinasi Pariwisata Prioritas (<i>Major Project</i>)	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Karo
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelatihan kapasitas/ kompetensi guru SMK Assesor Teknis dan LSP P-1 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan)	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	Sumatera Utaa
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Surveilans Gizi dan Petugas Kesehatan Puskesmas	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting (<i>Major Project</i>)	Kementerian Kesehatan	13 Kab/kota
6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Sports Center	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1 Lokasi di kawaasan Sport Centre Kab. Deli Serdang

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 dan telah dikelompokkan berdasarkan Bidang urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan serta Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh Perangkat Daerah pada Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2023, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kegiatan strategis daerah. Adapun rencana jumlah program dan kegiatan Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Meliputi Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang ditujukan untuk membangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di cabang dinas, Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi, Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan Pendidikan, Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu, Pembangunan kampung beasiswa scholarship booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3, Kerjasama Link dan Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasi dengan dunia, Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Se-Sumatera Utara, Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu.

2. Urusan Kesehatan

- **Dinas Kesehatan**

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Melalui kegiatan: Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih, Germas, Stunting, Penanganan COVID-19 melalui penguatan 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis. Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah dalam rangka penurunan prevalensi stunting, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di 33 kab/kota se-Sumatera Utara

4. Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu dan penyediaan kontribusi bagi peserta JKN, Layanan Bis Bergerak 2 unit.

- **RS. Haji**

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Mas.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Meliputi kegiatan: Penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba, Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan.

- **RS. Jiwa**

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Meliputi kegiatan: Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, UKP Rujukan, UKM Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi**

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI), Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal.

- **Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengembangan Permukiman
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 4) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung
- 8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Pengelolaan Persampahan Regional, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, Pengelolaan Sistem Drainase, Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan, Optimalisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras, Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Regional Mebidang, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Kawasan Permukiman
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meliputi kegiatan: Sertifikasi dan Registrasi dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- **Satuan Polisi Pamong Praja**

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Meliputi kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- **Badan Penanggulangan Bencana**

- 1) Program Penanggulangan Bencana
Meliputi kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

6. Dinas Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 4) Program Penanganan Bencana
- 5) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Meliputi kegiatan: Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

• **Dinas Tenaga Kerja**

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial
- 5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Meliputi kegiatan: Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran, Fasilitasi kerja sama sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja, Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online, Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), BLK, Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah, Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah, Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), TKA, Perpanjangan IMT, Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Perusahaan, Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor
Kabupaten/Kota (UMSK), Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak

Meliputi kegiatan: Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat, Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak, Pelembagaan PHA, Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Memerlukan Perlindungan Khusus, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

3. Urusan Pangan

• Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Meliputi kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan, Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

4. Pertanahan

• Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

- 1) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- 2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- 3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 4) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
Meliputi kegiatan: Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

5. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
- 9) Program Pengelolaan Persampahan
Meliputi kegiatan antara lain: Penurunan emisi gas rumah kaca Co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Meliputi kegiatan: Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa, Kerja Sama antar desa, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Ber.gerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat, BUMDES.

8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Meliputi kegiatan: Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Pengendalian Penduduk, Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Pelayanan Kesertaan Ber-KB, Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Organisasi Kemasyarakatan, Stunting.

9. Dinas Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran
- 3) Program Pengelolaan Perkeretaapian

Meliputi kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi, Penyediaan Angkutan Umum, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (pada UPT), Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut, Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat Pelabuhan, Pelabuhan, dan Pelabuhan Internasional, Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Nama Domain t dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Pusat dan Provinsi, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat.

11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5) Program Pengembangan UMKM
- 6) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Meliputi kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil. Pengembangan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan UKM, Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Meliputi kegiatan: Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal, Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, Promosi Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

13. Dinas Pemuda dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Meliputi kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024, Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi, Pembangunan sports centre di daerah kualanamu, Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

- **Urusan Statistik**

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

- **Urusan Persandian**

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- **Urusan Kebudayaan**

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pembinaan Sejarah
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat, Pelestarian Kesenian Tradisional, Pembinaan Lembaga Adat, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pembinaan Sejarah Lokal, Penetapan Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi, Penerbitan Izin Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi, Pengelolaan Museum Provinsi.

16. Dinas Perpustakaan dan Arsip

• Urusan Perpustakaan

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

• Urusan Kearsipan

- 1) Program Pengelolaan Arsip
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 3) Program Perijinan Menggunakan Arsip

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan, Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi, Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, Pengelolaan Arsip, Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi, Pemusnahan Arsip, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana, Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang, Pelayanan Izin Penggunaan Arsip, Pembuatan Pojok Baca di kab/kota, Pembuatan Gerobak Baca

3. Urusan Pilihan

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Ruang Laut di Luar Minyak dan Gas Bumi, Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Luar Minyak dan Gas Bumi, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Penangkapan Ikan, Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penerbitan Izin Usaha, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan,

Peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

• Urusan Pariwisata

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan kawasan pariwisata, ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina, wisata alam dan budaya, kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus - tapanuli tengah, wisata religi dan sejarah candi bahal - padang lawas utara, Pengembangan desa wisata melalui konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya, Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan, Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark kaldera toba, Digitalisasi promosi pariwisata, Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan daerah.

3. Urusan Pertanian

• Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi kegiatan:

- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 4) Program Penyuluhan Pertanian

Meliputi kegiatan: Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Penataan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani, Swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industry, Peningkatan produksi cabe merah dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industry.

- **Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Meliputi kegiatan: Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor, Penataan Prasarana Pertanian, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, Peningkatan produksi daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi, Peningkatan produksi daging kambing/domba dalam rangka permintaan konsumsi dan ekspor.

- **Dinas Perkebunan**

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pertanian
- 4) Program Penyuluhan Pertanian

Meliputi kegiatan: Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani, Pengawasan

Peredaran Sarana Pertanian, Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Penataan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

4. Dinas Kehutanan

- 1) Program Pengelolaan Hutan
- 2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- 4) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu, Perbenihan Tanaman Hutan, Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi, Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species), Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota , Penurunan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon.

5. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral

- 1) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- 2) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- 3) Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- 4) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Meliputi kegiatan: Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pertambangan Batuan, Konservasi Energi, Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, Penyediaan Tenaga Listrik bagi masyarakat kurang mampu, Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan

listrik rumah tangga miskin, dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi.

6. Dinas Prindustrian dan Perdagangan

• Urusan Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

• Urusan Perindustrian

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meliputi kegiatan: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya, Pasar Lelang Komoditas, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi, Promosi Dagang, Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk, Perlindungan Konsumen, Promosi Produk Dalam Negeri, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Izin Usaha dan perluasan Kawasan Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), Penyediaan Informasi Industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

7. Dinas Tenaga Kerja

• Urusan Transmigrasi

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Meliputi kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk, Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Meliputi kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam, Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meliputi kegiatan: Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan, Dukungan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP), Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meliputi Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

4. Badan Kepegawaian

- 1) Program Kepegawaian Daerah

Meliputi kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Meliputi kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode Training of Trainer (ToT) pada tenaga pendidik dari 33 kab/kota.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Meliputi kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

7. Badan Penghubung

1) Program Pelayanan Penghubung

Meliputi kegiatan: Pelayanan Penghubung

5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

• Inspektorat

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Meliputi kegiatan: Pengawasan Internal, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Pengawasan Internal, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Pendampingan dan Asistensi, Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan, Dukungan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP).

6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Biro Umum

- 1) Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meliputi kegiatan: Pengadaan Barang dan Jasa, Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Pengadaan lahan untuk perluasan layanan perkantoran pemerintah provinsi sumatera utara.

b. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- 1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Meliputi kegiatan: Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerja Sama Daerah

c. Biro Perekonomian

- 1) Program Perekonomian dan Pembangunan

Meliputi kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

d. Biro Sosial dan Kesejahteraan

- 1) Program Kesejahteraan Rakyat

Meliputi kegiatan: Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

e. Biro Organisasi

- 1) Program Penataan Organisasi

Meliputi kegiatan: Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peningkatan capaian indeks pelayanan public.

f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa meliputi kegiatan: Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

g. Biro Hukum

- 1) Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
Meliputi kegiatan: Penyusunan Perundang-Undangan, pemberian Bantuan Hukum.

h. Biro administrasi Pimpinan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi kegiatan: Materi dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan.

2. Sekretariat DPRD

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Meliputi kegiatan: Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan Aspirasi Masyarakat, , Pelaksanaan Tugas DPRD.

7. Unsur Pemerintahan Umum

• **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan
- 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Meliputi kegiatan: Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pemantapan kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik, Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara, Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan Program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2023, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program -program prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Adapun jumlah program dan kegiatan Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah Program pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi).

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pagu (Pagu Validasi)
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Dinas Pendidikan	3	11	30	3,750,000,000,000
2	Dinas Kesehatan	5	19	94	650,000,000,000
3	Rumah Sakit Haji	3	13	62	360.000.000.000
4	Rumah Sakit Jiwa	3	11	45	100.000.000.000
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	12	29	1.900.000.000.000
6	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	14	25	78	450.000.000.000
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	15	39	80,000,000,000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3	14	106	50.000.000000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	30	85.000.000.000
10	Dinas Sosial	7	21	379	150.000.000.000
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
11	Dinas Tenaga Kerja	6	24	69	80.000.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	17	32	16.000.000,000
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	7	19	34	110.000.000.000
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	19	56	45.000.000.000

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pagu (Pagu Validasi)
1	2	3	4	5	6
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	51	16.000.000.000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	17	32	50.000.000.000
17	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	4	14	71	20.000.000.000
18	Dinas Perhubungan	4	13	31	70.000.000.000
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	6	39	55.000.000.000
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7	13	34	70.000.000.000
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	7	18	35.000.000.000
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	15	40	822.000.000.000
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6	13	62	40,000,000,000
C	Urusan Pemerintahan Pilihan				
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	23	70	80.000.000.000
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	24	106	100.000.000.000
26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	14	44	180,000,000,000
28	Dinas Perkebunan	5	13	37	75.000.000.000
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	19	42	150.000.000.000
30	Dinas Kehutanan	6	18	68	150.000.000.000
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	19	47	55.000.000.000
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
32	Sekretariat Daerah				
1	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	19	21.000.000.000
2	Biro Umum	3	7	17	480.000.000.000
3	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2	8	18	12.000.000.000
4	Biro Perekonomian	2	8	16	6.000.000.000
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	5	13	500.000.000.000
6	Biro Organisasi	2	9	19	7.000.000.000
7	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2	6	16	7.000.000.000
8	Biro Administrasi Pembangunan	2	4	13	8.000.000.000
9	Biro Hukum	2	7	17	7.000.000.000
33	Sekretariat DPRD	2	14	39	415.000.000.000

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pagu (Pagu Validasi)
1	2	3	4	5	6
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	13	49	45,000,000,000
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	91	3,150,000,000,000
36	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3	9	31	450.000.000.000
37	Badan Kepegawaian Daerah	2	10	49	40.000.000.000
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10	49	90,000,000,000
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	11	53	18,000,000,000
40	Badan Penghubung Daerah	2	7	26	35,000,000,000
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
41	Inspektorat Daerah Provinsi	3	12	48	100,000,000,000
G	Unsur Pemerintahan Umum				
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	37	350,000,000,000
	Total				15.460.000.000.000

6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa mandatory spending bagi pemerintah daerah provinsi yaitu: 1) alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mandatory spending tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran SPM di Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Tabel 6.3
Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pendidikan	Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10,037,503,302	APBD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	264,140,243,000	APBD
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5,482,886	APBD
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	198,978,846	APBD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	270,957,208,000	APBD
				Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6,467,618,511	APBD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	9,581,652,000	APBD	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	277,634,982,599	APBD	
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,796,032,000	APBD

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
		berpotensi bencana provinsi	Kesehatan Masyarakat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7,130,999,647	APBD
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	223,768,800	APBD
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	668,546,000	APBD
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	731,141,488	APBD
					Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	347,404,000	
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5,405,800,000	APBD
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	244,631,326,000	APBD
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	100,000,000	APBD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	347.404.000	APBD

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1,001,802,928	APBD
	Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	2,300,000,000	APBD
					Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	800,000,000	APBD
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	10,000,000,000	APBD
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	-	-	-	-	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	13,085,000,000	APBD

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
		Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Relokasi Program Provinsi	Relokasi Program Provinsi			
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	800,000,000	APBD
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	3,000,000,000	APBD
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	APBD
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	300.000.000	APBD
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	600.000.000	APBD

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
					termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umu	150,000,000	APBD
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanta	657,372,000	APBD
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	250.000.000	APBD
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	205.000.000	APBD
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	653.000.000	APBD
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	250.000.000	APBD

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	250.000.000	APBD

6.4. Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Dalam mewujudkan target capaian dari sasaran prioritas pembangunan dilakukan melalui penganggaran yang berbasis prioritas (*money follow priority*). Dalam mendukung tercapainya 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara dilaksanakan melalui Kegiatan Strategis Daerah yang difokuskan dalam prioritas penganggaran pada Perangkat Daerah.

Tabel 6.4

Rencana Dukungan Pendanaan Pembangunan Sumatera Utara Terhadap Kegiatan Strategis Daerah

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Keterangan Indikasi Lokasi
1. Peningkatan Kualitas dan pemenuhan Akses Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Unit Dalam Rangka Memenuhi Akses Pemerataan Layanan Pendidikan;	Sumatera Utara
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, Dan SLB Negeri Dengan Prioritas Intervensi Siswa/I Kurang Mampu Sejumlah 167.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu) Jiwa;	33 Kab/Kota
	Pembangunan Kampung Beasiswa Scholarships Booth Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3 Di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;	Sumatera Utara
	Kerjasama Link And Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri Melalui: A. Penyelarasan Kurikulum Vokasi/SMK Dengan Dengan Jumlah Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kompetensi Keahlian Vokasi; B. Teaching Factory Atau Pembelajaran Berbasis Produk Dan Bisnis Dengan Jumlah Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kompetensi Keahlian Vokasi C. Mou Dan Moa Yang Ditandatangani Melalui Kerjasama Link And Match Antara SMK Dan Dunia Usia Dan Dunia Industri Dengan Jumlah Sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) Mou/Moa Kerjasama	33 Kab/Kota
	Pembangunan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pojok Baca Dan Gerobak Baca Serta Pengembangan Perpustakaan Digital (E-Library);	33 Kab/Kota
	Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se- Sumatera Utara;	Sumatera Utara

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Keterangan Indikasi Lokasi
	Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum Melalui Pola Integrasi Ilmu;	33 Kab/Kota
	Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Melalui Metode Training Of Trainer (Tot) Pada Tenaga	33 Kab/Kota
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis;	33 Kab/Kota
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan Dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	33 Kab/Kota
	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting;	33 Kab/Kota
	Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Melalui Penambahan 100 (Seratus) Bed Dalam Rangka Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Sumatera Utara
	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pada Masyarakat Di 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota	33 Kab/Kota
	Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (Empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta JKN sebanyak 4.733.689 jiwa	33 Kab/Kota
	Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 (Delapan) Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan	Sumatera Utara
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	Fasilitasi Kerja Sama 10 (Sepuluh) Sektor Ekonomi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan Kesempatan Kerja	33 Kab/Kota
	Fasilitasi Standarisasi 1000 (Seribu) UMKM Dan IKM Menuju digitalisasi Pemasaran	33 Kab/Kota
	Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa kerja online	33 Kab/Kota

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Keterangan Indikasi Lokasi
	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	33 Kab/Kota
4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi	Pemberian asuransi bagi 30.000 nelayan dan pemberian bantuan bio flok untuk KJA yang terdampak dikawasn Danau Toba, serta pemberian bantuan bibit ikan
	Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor	Vaksinasi dan pemberian bantuan bibit ternak, chopeer, pabrik pakan mini, serta vaksinasi
	Mempertahankan Swasembada Beras dan Jagung Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dan Industri	33 Kab/Kota
	Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri	33 Kab/Kota
	Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor	33 Kab/Kota
5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	<p>Penataan Kawasan Wisata Dan Cagar Budaya</p> <p>□ Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu punkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah baru - tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara</p>	Kabupaten Langkat, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah Madina, Paluta, Medan

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Keterangan Indikasi Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Pengembangan Desa Wisata Melalui 3 (Tiga) Konsep Tematik Yaitu Agro, Eko Dan Budaya ❑ Dukungan Penataan Cagar Budaya Kesultanan Langkat, Situs benteng Putri Hijau, Bawomataluo Dan Lapangan Merdeka Medan 	Pembangunan Waterfront dan pembenahan lantai Mesjid Azizi (kesultanan langkat), Pengembangan Situs Papan Tinggi (Tapteng), Pembangunan Cafe Sumut Bermartabat di Bowamataluo (Nias Selatan), Benteng Putri Hijau (Deli Serdang)
	Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Melalui Pemenuhan 6 (Enam) Rekomendasi Unesco Dalam Rangka Mempertahankan Status Unesco Global Geopark Kaldera Toba	Simalungun, Tobasa
	Digitalisasi Promosi Pariwisata	33 Kab/Kota
	Pelestarian Budaya Daerah Melalui Pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu	
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Dukungan Pencapaian 80 (Delapan Puluh) Persen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Dalam Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (GWPP);	33 Kab/Kota
	Peningkatan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Target Predikat BB;	Sumatera Utara
	Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.	Sumatera Utara
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara	33 Kab/Kota
	Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	Sumatera Utara
	Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara;	33 Kab/Kota
	Gubernur Dan Wakil Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual	Sumatera Utara

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Keterangan Indikasi Lokasi
	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;	33 Kab/Kota
	Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;	33 Kab/Kota
	Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;	33 Kab/Kota
	Pembangunan sports centre di Desa Sena, Kec Batang kuis dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;	Sumatera Utara
	Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah	Sumatera Utara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen	Sumatera Utara
	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan	33 Kab/Kota
	Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar	33 Kab/Kota
	Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang	33 Kab/Kota
	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang	33 Kab/Kota
	Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;.	33 Kab/Kota
	Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon	Sumatera Utara
	Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya	33 Kab/Kota

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara turut mendukung dalam pencapaian Prioritas Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut sinkronisasi Prioritas Pembangunan Sumatera Utara terhadap Prioritas Nasional.

Tabel 6.5`

Konsistensi Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pada PRPJMD 2019-2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan 	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	709,456,000	Dinas ESDM
		2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;				Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	19.758.444.670	Dinas ESDM
	3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;	4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan	5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT)			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	150,000,000

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					sampai dengan 12 Mil Laut			
	Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) Penyediaan air untuk pertanian;		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	500,000,000	Dinas SDA CKTR
		4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi	3.300.000.000	Dinas SDA CKTR
		6) Pengembangan waduk multiguna.				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	3,550,000,000	Dinas SDA CKTR
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	4,000,000,000	Dinas SDA CKTR

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	2,300,000,000	Dinas SDA CKTR
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	10,000,000,000	Dinas SDA CKTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	5,025,000,000	Dinas SDA CKTR
				Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya 5) pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. 		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2,500,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	600,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	600,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Sarana Pendukungnya	5,500,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2,500,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5,500,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan 		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan						
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2,790,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya	1,020,622,140	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1,360,478,610	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5,886,854,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2,400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan 		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1,670,000,000	Dinas Koperasi dan UKM

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha						
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar Akses Pembiayaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	7,200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	7,141,791,940	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	9,200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Pemangku Kepentingan	Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan		
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	5,100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1)Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, 2)Kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 3)Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan Kawasan industri terutama di luar Jawa; 4)Peningkatan daya saing destinasi dan 		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	346,618,600	Dinas Tenaga Kerja

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		industri pengolahan 5)Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 6)Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 7)Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk 8)Reformasi ketenagakerjaan 9)Pengembangan industri halal						
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	457,902,812	Dinas Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	145,337,560	Dinas Tenaga Kerja

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					lebih dari (satu) Kabupaten/Kota			
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	145,635,160	Dinas Tenaga Kerja
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi		Dinas Tenaga Kerja

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
						Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	1,188,087,900	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat	1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	produk ekspor dan jasa; 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) Pengelolaan impor; 4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement			Kewenangan Daerah Provinsi			

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		(FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi						
					Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing ekonomi	1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan,		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1,900,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital						
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	165,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	80,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Pameran Dagang Internasional/Nasional	400,723,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2,300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3,650,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PN2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	1)Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda 6) Pengentasan kemiskinan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing	1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2)integrasi sistem administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk						
		1) sistem jaminan sosial nasional; 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3) kesejahteraan sosial.						
		1)peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	8,800,000,000	

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan				Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
		peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4) penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.						

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		1) pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan 3) kualitas pemuda		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	12,048,616,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosia				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PN3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	250,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	350,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	350,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	250,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan	450,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
						Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	365,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	400,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	450,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	400,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2,050,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	5,000,000,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	144,320,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	320,467,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	135,000,000	Dinas Sosial

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Terlantar di dalam Panti			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Makanan	1,182,600,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Sandang	100,000,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	175,000,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	400,200,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	175,000,000	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	500,000,000	Dinas Sosial
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,000,000,000	Dinas Sosial

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll)	7,987,499,847	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,089,238,461	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,089,238,461	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5,405,800,000	Dinas Kesehatan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3,555,816,800	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	969,213,800	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1,522,411,710	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	37,003,722,700	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2,050,374,000	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7,130,999,647	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	361,779,500	Dinas Kesehatan
					Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	244,631,326,000	Dinas Kesehatan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	668,546,000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4,762,953,000	Dinas Kesehatan
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1,001,802,928	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	2,197,227,000	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2,135,175,000	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,987,500,000	Dinas Kesehatan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,583,552,000	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,605,345,200	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	10,037,503,302	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	264,140,243,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	5,482,886,883	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	270,957,208,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6,467,618,511	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	9,581,652,000	

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	277,634,982,599	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi		
				Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	420,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	203,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
				Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	450,000,000	
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	150,000,000	

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	200,000,000	
	Pengentasan Kemiskinan			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,000,000,000	Dinas Sosial
						Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	500,000,000	
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	22,866,569,825	Dinas Pemuda dan Olahraga

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	10,450,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	650,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2,219,760,900	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	161,689,978,500	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	3,000,000,000	BPSDM

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pembinaan Pengekoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		BPSDM
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	3,000,000,000	BPSDM
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	8,000,000,000	BPSDM

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah			
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan					
PN4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; 5) pembangunan dan kebudayaan sistem ekonomi kerakyatan	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12,420,150,000	Inspektorat			
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4,700,000,000	Inspektorat		
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4,200,000,000	Inspektorat		
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2,831,047,800		
						Program Penataan Organisasi		Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	726,000,000	Biro Organisasi
								Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	698,500,000	Biro Organisasi
									Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	740,502,170	Biro Organisasi
									Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	658,240,000	Biro Organisasi
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	400,000,000	BPKAD

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		berlandaskan Pancasila; dan 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;						
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh						

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.						
	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Spiritual	327,000,000,000	Biro Kesra
						Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	65,850,000,000	Biro Kesra

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	138,395,200	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	145,000,000	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	468,766,400	
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	1)peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan	Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.						
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2,500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	7,500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PN5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4)	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4,000,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		keselamatan dan keamanan transportasi; 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.						
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5,500,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	10,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	3,300,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Infrastruktur Ekonomi	1) konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	1,000,000,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pembangunan Jembatan	1,000,000,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pemeliharaan Rutin Jalan	8,021,000,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,280,170,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	225,441,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Gedung Terminal	5,000,000,000	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3,087,000,000	Dinas Perhubungan

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Infrastruktur Perkotaan	1)transportasi perkotaan; dan 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	5,025,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
						Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	200,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	10,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
	Energi dan Ketenagalistrikan	1)keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	14,933,140,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	transformasi digital,	1)penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.			dalam Daerah Provinsi	Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
PN6.Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	170,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		lingkungan hidup.						
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1) penanggulangan bencana; 2) peningkatan ketahanan iklim.			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan Rendah Karbon	1) pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan 3) pengembangan industri hijau.		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	875,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1,459,994,780	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	5,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
				Persampahan Regional	Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	6,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
				Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	225,000,000	Dinas Kehutanan
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3,617,047,220	Dinas Kehutanan
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100,000,000
				Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	60,000,000	Dinas Kehutanan
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	724,309,470	BPBD

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Provinsi (Per Jenis Bencana)		
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3,617,088,000	BPBD
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	28,609,103,800	BPBD
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3,584,375,000	BPBD
PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi;	1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3,000,000,000	Badan Kesbangpol
	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1) Penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	273,630,000,000	Badan Kesbangpol

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
		Indonesia (WNI) di luar negeri; dan 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional		Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	reformasi birokrasi dan tata kelola	1) penguatan implementasi manajemen ASN; - 35 - 2) transformasi pelayanan publik; 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,749,246,000	Badan Kesbangpol
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1) Penguatan keamanan dalam negeri; 2) Penguatan keamanan laut; dan 3) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	38,099,959,000	Badan Kesbangpol

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Penghayat Kepercayaan di Daerah		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,000,000,000	Badan Kesbangpol
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2,821,425,000	Badan Kesbangpol

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,036,050,000	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3,000,000,000	Satpol PP
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	800,000,000	Satpol PP

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					dalam (satu) Daerah Provinsi	melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
					Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	150,000,000	Satpol PP
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12,420,150,000	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4,700,000,000	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4,200,000,000	Inspektorat
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2,831,047,80	Inspektorat
				Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	726,000,000	Biro Organisasi
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	698,500,000	Biro Organisasi

RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Akuntabilitas Kinerja			
						Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	740,502,170	Biro Organisasi
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	400,000,000	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,496,000,000	BPKAD
				Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	550,000,000	BKD
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	150,000,000	BKD
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2,000,000,000	Bappeda
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	250,000,000	Bappeda



RPJMN			RPJMD/RKPD				Pagu	Perangkat Daerah
PN	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

6.5. Pembiayaan Tahun Jamak (Multi Years)

Bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat dan keberhasilan Program Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah yang efektif dan efisien (tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat manfaat) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran perlu dibuat daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat melalui pembiayaan pembangunan Tahun Jamak (Multi Years).

Tabel.6.6

Daftar Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dengan Tahun Jamak

No	Kegiatan Strategis Daerah
1	Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Haji Medan.
2	Pembangunan Sports Centre meliputi: pembangunan stadion Madya Atletik, Pembangunan Martial Arts Arena, Pembangunan Bowling Arena, manajemen konstruksi.
3	Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan, dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 418,74 (empat ratus delapan belas koma tujuh empat) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85,08 (delapan puluh lima koma nol delapan) persen.

6.6. Dukungan Program RKPD Provsu Tahun 2023 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Pengarusutamaan Gender.

a. Dukungan Program dan Kegiatan mendukung Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan

gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan Pengarusutamaan Gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui:
 - a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan
 - b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan
 - c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender
 - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

Dukungan Pengarusutaman Gender pada RKPD Provsu 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.7
Dukungan Program dan Kegiatan
Pengarusutaman Gender pada RKPD Provsu 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.350.000.000
2	Dinas Tenaga Kerja	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	442,841,760
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	4.191.000.000
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.000.000
5	Biro Sosial dan Kesejahteraan	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1.800.000.000
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	7.500.000.000
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1.612.968.000
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	800,000,000
9	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	28,410,000,000
10	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	6.000.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
11	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1,500,000,000
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destini Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1,954,000,000
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk keompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan sarana tenaga penyedia listrik belum berkembang daerah terpencil dan Pedesaan	14,933,140,000
14	Dinas Kominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,784,400
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.600.000.000
16	Biro Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1,500,000,000
17	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3,555,816,800
18	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	250,000,000
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,	3,451,825,225

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Seimbang dan Aman (B2SA)	
20	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4,200,000,000
21	Badan Kepegawaian daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	485,000,000

b. Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda pembangunan global yang meliputi 4 pilar, 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dengan harapan mampu menjawab tantangan dan permasalahan global, dimulai pada 1 Januari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030.

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Perpres tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Filantropi, Organisasi Masyarakat, serta Akademisi telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) untuk periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Penyusunan RAD TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *people, planet, prosperity, peace, and partnership*, serta prinsip dan semangat *inklusif no one left behind*, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; (2) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (3) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; (4) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; dan (5) Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable*

Development Goals tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan TPB/SDGs di Sumatera Utara.

Arah kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, melalui peningkatan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital, serta pelebaran ruang fiskal dengan memobilisasi sumber-sumber pendapatan negara.
2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kependudukan dan keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak;
3. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, melalui penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, melalui:
 - a. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan;
 - b. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional;
 - c. Konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
5. Meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya.
6. Mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah, melalui internalisasi paradigma pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dukungan anggaran terhadap pencapaian kegiatan TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8
Dukungan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

No	Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2023		Pagu
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	
1	Tujuan 1 Tanpa kemiskinan	22	48	1.163.814.042.470
2	Tujuan 2 Tanpa kelaparan	2	2	98.904.034.379
3	Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera	5	7	56.696.059.352
4	Tujuan 4 Pendidikan berkualitas	1	3	7.513.597.260.511
5	Tujuan 5 Kesetaraan gender	8	13	15.398.927.305
6.	Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak	5	15	13.550.000.000
7.	Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau	4	9	80.629.724.090
8.	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	10	11	232.455.517.889
9.	Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur	4	6	29.435.402.007
10.	Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan	3	4	11.623.258.430
11.	Tujuan 11 Kota dan komunitas berkelanjutan	7	12	64.993.394.979
12.	Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	2	2	15.943.046.103
13.	Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim	2	2	1.824.443.696
14.	Tujuan 14 Ekosistem laut	5	16	25.815.000.000
15.	Tujuan 15 Ekosistem darat	2	9	34.325.000.000
16.	Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	14	22	113.420.019.125
17.	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	2	2	77 7.682.211.180

a. Dukungan Program dan Kegiatan Transformasi Digital pada RKPD 2023

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan Big Data.

Implementasi pengarusutamaan transformasi digital salah satunya ditidakklanjuti oleh Pemerintah Sumatera Utara dengan penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan *E-Government* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. Dukungan dana atas kegiatan ini sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.8

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI
1	Dinas Pendidikan	PPDB SUMUT 2019	ppdb.disdik.sumut prov.go.id	PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
		SINDANG SUMUT	sindang.sumutprov.go.id	Sistem Informasi Data & Edukasi Pengupahan Sumatera Utara
		RKAS BOS	bos.disdik.sumutprov.go.id	Media sekolah untuk menginformasikan rencana kerja anggaran sekolah bantuan operasional sekolah
2	Dinas Kesehatan	Daftar Puskesmas Registrasi	sirremas.sumutprov.go.id	Sistem Informasi Daftar Puskesmas yang sudah melakukan Registrasi
3	Dinas Binas Marga dan Bina Kontruksi	Database Jalan Dan Jembatan	jalan.sumutprov.go.id	Sistem informasi tentang panjang jalan provinsi di sumatera utara, jumlah jembatan, kondisi jalan dan jembatan.
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem E-Monitoring	emonitoring.dispkp sumutprov.go.id	informasi dalam bentuk Dashboard tentang Jumlah Program, Jumlah Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Kegiatan belum berjalan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	layanrumah.dispkp.sumutprov.go.id	Sistem Informasi tentang Layanan Registrasi Rumah, Rumah Subsidi, Bedah Rumah dan Pembiayaan Perumahan.

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	sig.a.sumutprov.go.id	Sistem Informasi yang memuat data gender dan anak Sumatera Utara serta program-program unggulan Dinas PPPA Provsu
		SILAPSAN tPA	kekerasan.sumutprov.go.id	Sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kab/kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL. Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.
6	Dinas Perhubungan	SIPASK	sipask.sumutprov.go.id	Sistem Pendataan Angkutan Sewa Khusus, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	e-PPID Provsu	ppid.sumutprov.go.id	Sistem Informasi dan Dokumentasi di Provinsi Sumatera Utara
		Portal Sumut Smart Province	smartprovince.sumutprov.go.id	Portal yang menyajikan tentang aplikasi dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, aplikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Dashboard OPD Provsu, Multimedia (Video Kegiatan Kepala Daerah) dan CCTV
		SISUMAKER	sisumaker.sumutprov.go.id	Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI
		Aplikasi Portal e- ASN	easn.sumutprov.go.id	Portal aplikasi yang berisikan Simpeg, e-Schedule, e-SPPD, e Absensi, e-Letter, e-File dan Sistem Informasi Tamu
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	SIAPLAYANI	siaplayani.sumutprov.go.id	Sistem layanan Extra 24/7 bertujuan memastikan perizinan yang diajukan masyarakat selesai tepat waktu.
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Geoportal Provinsi Sumatera Utara	geoportal.sumutprov.go.id	Geoportal Sumatera Utara merupakan salah satu simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Data dan informasi geospasial disediakan dalam bentuk GIS web services dan dapat ditelusuri keberadaan datanya.
		E-Planning Sumut	eplanning.sumutprov.go.id	Alat bantu Pemerintah dalam kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ekeuangan	ekeuangan.sumutprov.go.id	Pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan tata usaha keuangan daerah, pengelolaan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan host to host ke kementerian/ lembaga negara, pengelolaan sinkronisasi kementerian/ lembaga negara, pengelolaan host to host antar opd se sumatera utara
11	BPPRD	Portal e- Pendapatan	bpprd.sumutprov.go.id	Portal yang berisi aplikasi dan informasi tentang : Website Resmi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Sistem Aplikasi Pajak Kendaraan Bermotor, Kode Bayar dan Cek Status Kendaraan Bermotor

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI
				Provinsi Sumatera Utara Informasi Lokasi Unit Pelaksanaan Teknis Samsat, Samsat Corner dan Gerai Samsat Provinsi Sumatera Utara Keterbukaan Informasi Publik Daerah Provinsi Sumatera Utara Sarana Penyampaian Pengaduan, Saran dan Pendapat Tentang
12	Badan Kepegawaian Daerah	e-SKP	skpbkd.sumutprov.go.id	e-SKP adalah suatu aplikasi yang bertujuan untuk membantu pegawai dalam membuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.
		Paket Keras	simpegbkd.sumut prov.go.id	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas
13	Biro Adm. Pemb. & PBJP	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	lpse.sumutprov.go.id	Sistem Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara
14	Biro Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sumatera Utara	jdih.sumutprov.go.id	Sistem Informasi yang menyajikan dokumentasidari produk hukum di Provinsi Sumatera Utara
15	Biro Umum & Perlengkapan	Simbada Online	simbada.sumutprov.go.id.	Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual
16	Biro Umum & Perlengkapan	Unit Layanan Adminstrasi (ULA)	ula.sumutprov.go.id	Sistem Informasi Unit Layanan Administrasi di lingkungan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI
17	Biro Organisasi	Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (SINIKEMAS)	http://202.159.112.72/skm/index.php	Aplikasi survey kepuasan masyarakat atas penilaian kualitas pelayanan publik

6.7. Rencana Penyesuaian SOTK Baru

Progress Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terjadi penggabungan beberapa Perangkat Daerah dan beberapa Perangkat Daerah berganti nomenklatur.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
4. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya mineral menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi;
8. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
9. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (jasa konstruksi dan sumber daya air);
10. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata

Tabel 6.8
Perangkat Daerah Dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN
1	Dinas Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	
3	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Pertanahan
5	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	Dinas Sosial	
8	Dinas Ketenagakerjaan	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peremberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
12	Dinas Perhubungan	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	
20	Dinas Pertanian	Pertanian Dan Pangan
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Pertanian
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Perindustrian, Perdagangan Dan ESDM
23	Biro Umum	
24	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
25	Biro Perekonomian	
26	Biro Sosial Dan Kesejahteraan	
27	Biro Organisasi	
28	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	
29	Biro Administrasi Pembangunan	
30	Biro Hukum	
31	Biro Administrasi Pimpinan	

32	Sekretariat DPRD	
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
35	Badan Pendapatan Daerah	
36	Badan Kepegawaian	
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
38	Badan Penghubung	
39	Inspektorat Provinsi	
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKK, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Inflasi, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 7 (tujuh) Indikator kinerja Makro dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan pada target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023.

7.1. Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, IPM, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Inflasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Capaian dan Proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara mulai Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Hasil Prognosis	Target
			2019		2020		2021		2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,4	5.22	5,4	-1,07	3,00-4,00	2,61	4,00-5,00	5,00-6,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,67	71.74	71,67	71,77	71,50-72,00	72,00	72,00-72,50	72,25-72,75
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,43	8,63	8,43	8,75	9,00-8,00	8,49	8,90-7,90	8,80-7,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,45	5,41	5,45	6,91	6,00-5,75	6,33	6,40-5,40	6,30-5,30
5	Indeks Gini	Poin	0,32	0,315	0,32	0,316	0,313	0,314	0,311	0,309
6	Laju Inflasi	Persen	2,9	2.33	2,9	1,96	2,50	1,71	2,25	2,00
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO ₂ eq	-	21.08	-	22,07	26,56	24.99	31,06	35,55

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

7.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2019-2023 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU). Target capaian indikator pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dan 2023 merupakan target Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. yang dirangkum menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. 2
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja		Satuan	2019		2020		2021		2022	2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Hasil Prognosis	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;										
Misi 3: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri										
1	Indeks Pendidikan	Poin	-	68.03	-	68.55	69.00-69,50	68,76	68,75-69,25	68,85-69,35
2	Indeks Kesehatan	Poin	-	-	-	75.54	76,00-76,40	75,74	75,70-76,20	75,75-76,25
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	55	55.05	59	55.55	57	59	59	61
4	Indeks Infrastruktur	Poin	-	-	-	0.69	0,70	0,71	0,74	0,79
Misi 2: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;										
5	Indeks Demokrasi	Poin	69.02	67.65	69.04	65.13	65,53	NA	65,50	65,75
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	B	B	B	B	64,00 (BB)	62,07 (B)	(70,00) BB	(75.00) BB
Misi 4: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia										
7	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	Persen	65	97	68	90,25	91	96,51	92	93
Misi 5: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab										
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	68.2	68.7	69.37	68,96	71,15	69,20	69,38

7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Penetapan Indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun capaian dan target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3

Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI										
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	5.22	5.4	-1.07	3,00-4,00	2.61	4,00-5,00	5,00-6,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	55	54.91	59	55.18	57	57,57	59	61	Seluruh Perangkat Daerah
3	PDRB Per Kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	36	37.05	37	36.31	38		39	40	Seluruh Perangkat Daerah
4	PDRB menurut Pengeluaran	Rupiah	950,000	1,063,964	1,050,000	1,042,000	1,189,623		1,337,246	1,484,869	Seluruh Perangkat Daerah
5	Laju Inflasi	Persen	2.95	2.33	2.9	1.96	2.5	1,71	2.25	2.00	Seluruh Perangkat Daerah
6	Indeks Gini	Poin	0.325	0.315	0.320	0.314	0.313	0,314	0.311	0.309	Seluruh Perangkat Daerah
7	Indeks Ketimpangan Regional	Poin	0.565	0.571	0.562	0.571	0.560	NA	0.558	0.556	Seluruh Perangkat Daerah
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL										
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8.87	8.63	8.43	9.14	9.00 - 8.00	9.14	8.90 - 7.90	8.80 - 7.80	Dinas Sosial
2	Jumlah Penduduk Miskin	orang	1,298,513	1,260,000	1,247,505	1,356,000	1,315,000	1,356	1,295,000	1,275,000	Dinas Sosial
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.12	71.74	71.67	71.77	71,50 - 72,00	71.77	72,00 - 72,50	72,25 - 72,75	Dinas Sosial
4	Indeks Pendidikan	Poin	-	68.03	-	68.55	68,65-69,15	68,79	68,75-69,25	68,85-69,35	Dinas Pendidikan
5	Indeks Kesehatan	Poin	-	-	-	75.54	75,65-76,15	75,74	75,70-76,20	75,75-76,25	Dinas Kesehatan
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.87	90.71	90.93	90.67	90.73	90.67	90.77	90.81	Dinas PP dan PA
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70.34	72.5	71.61	68.92	92.54	68.92	94.14	95.75	Dinas PP dan PA
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.79	9.45	9.97	9.54	9.68	9.57	9.82	9.96	Dinas Pendidikan
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.37	13.15	13.81	13.23	13.31	13.27	13.38	13.46	Dinas Pendidikan
10	APK SM Sederajat	Persen	97.44	100.83	98.14	105,12	99.14	105,12	99.44	100	Dinas Pendidikan
11	APM SM Sederajat	Persen	71.49	80.61	73.19	73,69	82.61	73,69	83.31	83.61	Dinas Pendidikan
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.74	68.95	68.87	69.10	69.23	69.23	69.35	69,50	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73.01	70.19	74.2	72	73.04	72	74.08	75.12	Dinas Tenaga Kerja
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.5	5.41	5.45	6.91	6.50-5,50	6.91	6,40-5,40	6,30-5,30	Dinas Tenaga Kerja
15	Jumlah Penganggur	Jiwa	390,000	383,088	380,000	508,000	500.000-450.000	NA	450.000-350.000	350.000-400.000	Dinas Tenaga Kerja
			”								
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA										
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Persen	-	55	-	10	2	10	6	8	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	54.9	54.9	56.86	53.7	58.82	58.82	96.87	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	88	88	90	90	45.04	90	60.06	75.07	Dinas Pemuda dan Olahraga
B	ASPEK PELAYANAN UMUM										
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB										
B.1.1	PELAYANAN DASAR										
1	PENDIDIKAN										
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	96.2	90.14	97	96.61	97.4	96.61	98.2	99.01	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56.1	52.07	57.4	48.97	58.7	48.97	60	61.3	Dinas Pendidikan
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94.42	90.48	94.72	93.55	95.02	93.55	95.32	95.62	Dinas Pendidikan
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	42.7	40.77	43.4	38.72	44.1	38.72	44.8	45.5	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN										
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	4.5	2.61	4.3	2.39	2.44	2,28	2.32	2.2	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	11.01	11.97	10.99	12.24	12.24	8,78	12.22	12.20	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	80.1	66.76	75.1	62.5	93.49	89.18	79.40	67.39	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	31,50	30.7	30.50	29.20	28.5	25,8	27.5	26.5	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	100	73.85	95	68.34	62	60,65	52	42	RS. Jiwa
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	65	70.59	61	79.83	80	76,87	82	85	RS. Jiwa
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	55	46	60	27	62	40	60	65	RS. Haji
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	5	4	5	4	5	5	5	5	RS. Haji
2.9	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	Persen	-	46	-	27	62	85	65	70	RS. Haji
2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	-	-	-	-	80	2,28	85	90	RS. Haji
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
3.1	PEKERJAAN UMUM										
3.1.1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	82.99	82.19	82.1	82.27	76,37	82.27	78.55	85.08	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84.26	83.71	83.8	84.06	86.29	84.06	88.77	91.26	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10.71	10.88	10.88	15	10.88	19.11	23.23	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.1.4	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	-	-	-	-	56.92	54.84	60.48	64.75	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.1.5	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	-	-	-	-	57.17	82.82	59.47	62.92	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.1.6	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	-	-	-	-	61.26	61.05	62.81	65.15	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.1.7	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	-	-	-	-	41.81	37.12	46.03	50.24	Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi
3.2	PENATAAN RUANG										
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
4.1	Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	-	58.69	67.44	63.48	68.98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentasi Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	-	-	-	-	16.27	16,27	16.83	18.52	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	-	-	100.00	100	100.00	100.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	65	97	68	90,25	92	31,25	95	97	Satpol PP
5.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	45	59	60	31.25	65	90,25	70	75	Satpol PP
5.3	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	Orang	300	400	350	-	400	NA	425	550	Bakesbangpol
5.4	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Jumlah Ormas	20		20	-	30	30	40	50	Bakesbangpol
5.5	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut	Persentase	0	6.5	6.3	(data belum keluar)	6.1	6.5	5.9	5.7	Bakesbangpol
5.6	Perbaiki Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat Provinsi	9		9		9	18	8	7	Bakesbangpol
5.7	Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	1300	1300	1100	0	260	1450	1275	1300	Bakesbangpol
5.8	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33	33	33	33	33	33	33	33	BPBD
5.9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	3	3	4	3	3	3	3	3	BPBD
5.10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	-	2	2	2	0	0	4	0	0	BPBD
5.11	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145.18	134.4	145.18	145	145.83	144.5	143.5	BPBD
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR										
1	TENAGA KERJA										
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	-	0.005	-	0.01	0.27	93,94	0.31	0.34	Dinas Tenaga Kerja
1.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	-	78.13	-	80	-	46,99	16.58	17.11	Dinas Tenaga Kerja
1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	-	0.66	-	0.7	7.72	0,52	7.94	7.8	Dinas Tenaga Kerja

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	-	7.49	-	8.24	50.12	95.44	50.1	50.73	Dinas Tenaga Kerja
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	Persen	50	73	60	98	66	98	85	100	Dinas PP dan PA
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	15	5/100.000	4	5/100.000	6/100.000	5/100.000	5/100.000	4/100.000	Dinas PP dan PA
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/10.000	20	11/100.000	10	12/100.000	3/10.000	12/100.000	2/10.000	1/10.000	Dinas PP dan PA
2.4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	-	-	-	-	58%	NA	76%	100%	Dinas PP dan PA
3	PANGAN										
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.40	89.6	92.3	83.77	86.68	85	89.59	92.5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.2	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	113.65	114.78	114.44	98.74	115.23	103.80	116.02	116.81	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.3	Produksi Daging (ton)	Ton	169,775.74	258,090.36	175,551.96	218,083.49	221,354.76	250.557,03	224,675.08	228,045.21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.4	Produksi Telur (ton)	Ton	186,062.33	541,234.15	191,961.45	470,179.22	477,232	507.406,72	484,390	491,656	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.5	Produksi susu (ton)	Ton	1,587.56	3,489.84	1,661.68	5,150.72	5,227.98	5.234,96	5,306.40	5,386.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
5	LINGKUNGAN HIDUP										
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	poin	68	68.2	68.7	69.37	69.02	69.37	69.20	69.38	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Udara	poin	86	86.6	87	89.3	87.09	89.3	87.19	87.29	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Air	poin	78	78.8	79	69.37	53.71	69.37	53.81	53.91	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Indeks Kualitas Lahan	poin	47	46.45	47.26	46.45	47.42	46.45	47.72	48.03	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	Indeks Kualitas air laut	poin	-	-	-	-	72.51	-	73.13	73.74	Dinas Lingkungan Hidup
5.6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	-	21.08	-	22.07	26.56	- 22.07	31.06	35.55	Dinas Lingkungan Hidup
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
6.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		84	91,78	87	88,99	92	88,99	94	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	84	91.78	87	98.91	99.2	98.91	99.2	99.2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	71	75.33	76	78.63	95	78.63	97	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	-	100	-	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen	-	100	-	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	-	100	-	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	-	-	-	-	30	-	40	50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.8	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	-	30	-	32	70	32	80	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.9	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.0	Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase		30	-	32	70	32	80	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
7.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Persen	-	-	-	19	56	3,4	57	58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	-	-	-	26	27	26.22	30	32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.3	Jumlah Bumdes Maju	Jumlah	-	-	-	21	40	0.7	50	60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.4	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	-	-	-	4	6	0.07	10	15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	-	2.86	3.04	2.84	3.04	2.98	3.04	2,91	2,85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)	Persen	59.2	45,42	59.39	49,60	50	49,60	55	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	12.5	12.1	11.5	15.2	14,8	15.2	13,5	12,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	PERHUBUNGAN										
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	90	39.32	92	39.32	45.29	39,92	68.58	91.86	Dinas Perhubungan
9.2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Persen	-	-	-	-	50	33,33	75	100	Dinas Perhubungan
9.3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Persen	-	-	-	-	90.29	71,99	90.86	91.71	Dinas Perhubungan
9.4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Persen	-	-	-	-	90	8,35	91.25	92.5	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	84	61	86	61	87	61	90	92	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Persen	20	20	41	31	55	31	65	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
11.1	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Jumlah UMKM	1.000	1.117	213 Usaha Mikro, 155 Usaha Kecil dan 77 Usaha Menengah	250 Usaha Mikro, 250 Usaha Kecil dan 80 Usaha Menengah	200	276	250	300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Persen	5	60,31	1,5	1,5	2	7,87	2,5	3,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Persen	5	2	3,5	2,1	2	8,79	2,5	3,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	Persen	5	-	-	-	2	NA	2,5	3,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.5	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Jumlah UMKM	50	64	-	-	20	164	25	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persen	60	39,86	-	-	25	187,9	35	40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persen	35	23,46	-	-	30	19,24	35	40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	PENANAMAN MODAL										
12.1	Investor PMDN	Investor	537	948	190	926	215	594	225	236	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2	Investor PMA	Investor			280	301	342	581	359	377	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.3	Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	33.91	18.78	11	13.3	18.75	9.85	19.60	20.58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.4	Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun			20.23	12.4	16.25	9.18	17.00	17.85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	-	-	-	-	12.375	7.474	13.61	14.970	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	-	-	-	-	6.121	807	7.039	7.743	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	68.50	70.69	20.00	37	21.00	NA	21.50	22.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	21	12.6	23,5	17.8	26.31	73	33.6	49.5	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	54.9	54.9	56.86	53.7	58.82	53.7	96.87	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	88	88	90	90	45.04	90	60.06	75.07	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	STATISTIK										
14.1	Data Statistik Sektoral	Persen	25	69	50	69	71	69	75	77	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	PERSANDIAN										

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	10	10	25	10	20	10	30	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN										
16.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	-	-	-	-	3		6	8	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.2	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	-	-	-	-	5	2	7	9	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	-	10	-	2	7	2	15	20	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	PERPUSTAKAAN										
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	-	-	-	9.75	12.5	0,4	14.5	16.5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
18	KEARSIPAN										
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	4	20	4.62	6.12	47	47	49	50	Dinas Perpustakaan dan Arsip
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	50	15,432	60	65	71	71	86	103	Dinas Perpustakaan dan Arsip
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1	PARIWISATA										
1.1	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	8.15	7.46	8.56	6.66	7.02	6.66	7.10	7.18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280,000	213,858	300,000	45,902	500	45,902	1,000	1,500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2.26	1.38	2.36	1.15	1.15	1.15	1.35	1.5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.4	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	DPP	-	-	-	-	8	8	10	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		
			2019		2020		2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN											
	Pertanian											
2.1	Produksi Tanaman Pangan		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	5,375,167.60	4,693,563	5,498,796.45	4,200,112	3,906,872	3,926,768	3,985,007	4,064,705		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1,829,409.19	1,960,424	1,875,144.42	1,965,444	1,922,023.03	1,727,166	1,624,357	1,706,549		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3. Kedele (ton)	Ton	8,905.03	9,627	9,528.38	4,003	4,052	1,463	4,145	4,244		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5.22	4.66	5.23	5.1	5.17	5.18	5.24	5.25		
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6.24	6.14	6.27	6.12	6.21	6.31	6.25	6.38		
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/ha	1.3	1.73	1.31	1.56	1.58	1.71	1.58	1.58		
2.3	Produksi Tanaman Hortikultura											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	16,918.42	18,072	17,341.39	29,196	17,775	53,766	18,219	18,675		
	2. Cabe (ton)	Ton	168,822.08	154,008	173,886.74	193,862	179,103	208.663	184,476	190,011		
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	998,498.42	1,130,462	1,008,483.41	1,270,084	1,018,568	1.469.937	1,028,754	1,039,041		
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1,180,230.44	1,107,154	1,193,212.98	1,249,380	1,206,338	1.467.473	1,219,608	1,233,024		
2.4	Produktivitas Tanaman Hortikultura											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	7.89	8.04	7.99	9.55	8.08	12.40	8.18	8.28		
	2. Cabe (ton)	Ton	9.91	9.61	10.02	10.48	10.13	12.25	10.24	10.36		
	Perkebunan											
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	Persen	3	3.74	3	2.60	2.65	2,36	2.80	3.00		Dinas Perkebunan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Produksi			7,569,995.7	7,818,400.5	7,766,705.0	7,953,702.74	7,748,411.0	8,176,773.58	8,422,484.9	Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	Ton	7,004,659.63	7,006,986.36	7,223,006.12	7,199,750.00	7,355,475.90	7,178,053.00	7,563,008.08	7,788,108.75	
	2. Karet (ton)	Ton	323,589.02	309,973.00	326,824.91	310,016.00	326,826.00	310,016.00	326,830.00	326,928.00	
	3. Kopi Arabika (ton)	Ton	65,327.91	66,831.00	67,666.65	67,469.00	71,586.92	67,469.00	76,511.55	83,654.39	
	3. Kopi Robusta (ton)	Ton	9,223.04	8,091.00	9,407.50	9,128.00	10,360.46	9,128.00	12,899.57	14,845.52	
	4. Kelapa (ton)	Ton	102,943.95	99,132.00	106,311.66	99,972.00	101,745.60	99,992.00	105,014.99	109,300.38	
	5. Kakao (ton)	Ton	41,936.76	34,792.00	42,146.44	35,696.00	36,223.00	35,696.00	38,286.00	40,321.00	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	42,028.92	44,190.34	43,037.24	44,674.00	51,484.86	48,057.00	54,223.39	59,326.94	
2.7	Laju pertumbuhan Produktivitas sektor perkebunan (%)	Persen	-	1.61	-	1.92	2.02	-	2.12	2.22	Dinas Perkebunan
2.8	NTP Perkebunan	Persen	-	94.73	-	124.96	100.01	160,10	100.51	101.01	Dinas Perkebunan
2.9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	-	9.88	-	10.66	10.58	-	10.68	10.78	Dinas Perkebunan
3	KEHUTANAN										
3.1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	60,500	60,500	59,500	59,895	58,500	59,895	57,500	56,500	Dinas Kehutanan
3.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	276,336	275,711	276,226	275,333	275,233	275,233	275,120	275,000	Dinas Kehutanan
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0.84	0.84	0.85	0.83	0.86	0,63	0.87	0.88	Dinas Kehutanan
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
4.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.9	98.8	100	99.99	100	99,83	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	-	99.11	-	107.69	98.83	98,50	99.52	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	-	8.74	-	22.95	75.82	26,97	80.16	86.96	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	PERDAGANGAN										
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	6.48	8.00	6.50	-1,94	2.97	-1,94	3.39	3.81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Ekspor Non Migas	(Juta U\$)	na	7.663,174	na	8086.221	7,995.503	8,086.221	8,092.923	8,190.344	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	PERINDUSTRIAN										
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	3.27	1.23	3.29	-0.84	0.61	-0.84	1.00	1.39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.2	Pertumbuhan Industri										Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Persen	5.00	-5.11	6.00	-5.11	1.48	-5.11	2.33	3.17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	8.50	9.01	9.10	9.01	8.28	9.01	8.55	8.82	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	TRANSMIGRASI										
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun	43,20	42.3	45.57	45.50	46,91	47,84	48,34	49,79	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen	-	-	-	-	6.4	NA	6.8	7.2	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.3	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	781.454,57	787.330,00	804.898,54	647.654,92	634,701.24	653.793,27	655,242.20	676,399.89	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	44,232.57	540,421.70	60,559.54	336,335.72	433,032.24	336,335.72	446,023.20	459,403.89	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	237.222	246,908.30	244.339	146,603.40	201,669	146,603	209,219	216,996	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.6	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ Th	43,20	42,30	45.57	45,50	46.91	47,84	48.34	49.79	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	100	100	101	101	102	107,99	103	104	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	Persen	101	101	102	102,7	103	104	104	105	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.9	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	138,438.4	NA	25	11,345	25,000	11,345	25,000	25,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.10	Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang (m ²)	m ²	500	NA	500	230	52,031	230	72,031	102,031	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.11	Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (Ha)	Ha	3	NA	3	2	39	2	42	45	Dinas Kelautan dan Perikanan
B.3 FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG											
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
1.1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	80	78	85	85	80	85	82	84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 KEUANGAN											
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
2.2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	-	-	-	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
2.4	Persentase tanah milik pemprovsu yang disertifikasi	Persen	-	-	-	-	43,93	29,63	64,17	84,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.5	Persentase laporan Aset daerah yang disusun	Persen	-	-	-	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		
			2019		2020		2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.6	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH											
8.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	48.25	49	50.38	51	53	99,21%	55	57		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
8.2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	-	8,89%	106,72%	9,75%	11,66%		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
8.3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	-	1,20%	103,57%	1,20%	1,20%		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
8.4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	-	2%	61,59%	2%	2%		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
8.5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	-	10,80%	95,45%	10,80%	10,80%		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	36 hari	8	36 hari	NA	9 JP	9JP	12 JP	20 JP		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	17.49	NA	NA	19.2	22,22	19,2	33,33	44,44		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FORMAL	Persen	33.33	NA	19.44	NA	24	24	35%	41		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	KEPEGAWAIAN DAERAH											

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Nilai Sistem Merit	Point	-	-	-	97,5	250	263,5 (B)	300	325	Badan Kepegawaian
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	20	20	20	20	33	100	50	60	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	50	50	50	50	40	40	50	57	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	PENGAWASAN										
6.1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
6.2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakisip \geq B	Persen	-	-	-	73	80	73	90	100	Inspektorat
6.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	80	81,67	82	83,64	75	82	77	80	Inspektorat
6.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
6.5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level	Level 3	Level 3	Level 3 terdefinisi	Level 3 terdefinisi	Level 3,25	Level 3	Level 3,5	Level 3,5	Inspektorat
6.6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 menuju level 3	Level 2 plus	Level 2 plus	Level 3	Level 2 plus	Level 3 plus	Level 3 plus	Inspektorat
6.7	Pengaduan Masyarakat	Persen	50	52,4	55	74,5	68	55	72	75	Inspektorat
6.8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	-	-	-	10	20	10	40	60	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGHUBUNG										
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	-	-	-	77.42	70	77,42	80	90	Kantor Penghubung
8	SEKRETARIAT DEWAN										
8.1	Persentase capaian tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
9	SEKRETARIAT DAERAH										
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	Persen	100	100	100	100	100	28	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah
9.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	2	3.5	3.8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah
9.3	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	2	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah
9.4	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen					70	86	75	80	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9.5	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen					70	70	75	80	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9.6	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100	100	100	100	100	50	100	100	Biro Hukum Sekretariat Daerah
9.7	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	50	100	100	Biro Hukum Sekretariat Daerah
9.8	Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	Persen	100	100	100	100	100	99,01	100	100	Biro Hukum Sekretariat Daerah
9.9	Persentase kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	100	100	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen					100	100	100	100	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
9.11	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	-	-	-	-	100%	100	100%	100	Biro Pengadaan barang/Jasa Bidang Sekretariat Daerah
9.12	Terbitnya Peraturan/Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dokumen									Biro Adminstrasi pembangunan Sekretariat Daerah
9.13	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	Persen	-	-	-	-	100		100	100	Biro Adminstrasi pembangunan Sekretariat Daerah
9.14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	65.00 (B)	63,89 (B)	(70.00) (BB)	(72.00) (BB)	Biro Organisasi
9.15	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	2,99 (C)	3,00 (C)	3,51 (B)	3,68 (B)	3,80 (B)	3,68 (B)	4,01 (A-)	4,20 (A-)	Biro Organisasi
9.16	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
9.17	Nilai capaian pelaporan kinerja	Bobot	10	11,64	11	9,11	12	9,11	14	15	Biro Organisasi
9.18	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan		-	-	-	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
9.19	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
9.20	Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
9.21	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah										
1.2	NTP	Poin	100.101	98.08	100.102	109.83	109.92	109.83	110.35	111.41	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		
			2019		2020		2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
	NTP Tanaman Pangan	Persen	100.62	93.16	100.64	96.9	100.66	96.90	100.68	100.82		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	98.82	94.73	99.12	125.05	100.01	125.05	100.51	101.01		Dinas Perkebunan
	NTP Hortikultura	Persen	100.98	92.87	101.01	97.28	101.03	97.28	101.06	101.20		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pertanian
	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	100.00	101.00	101.00	101.45	102.00	101.45	103.00	104.00		Dinas Kelautan Perikanan
	NTP Peternakan	Persen	113.65	114.78	114.44	98.74	115.23	103.08	116.02	116.81		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
2.1	Indeks Infrastruktur	Poin	-	-	-	0.69	0,70	0,71	0,74	0,78		Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata ruang, Bidang Perumahan dan Permukiman
2.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84.26	83.71	84.78	83.8	86.29	84,15	88.77	91.26		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
2.3	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.90	99.99	100.00	99.11	-	99	-	-		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.4	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	-	-	-	57.17	56.51	59.47	62.92		Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata ruang
2.5	Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	-	59	67.44	63.48	68.98		Dinas Perumahan dan Permukiman
2.6	Luas Kawasan Kumuh Ditangani	Persen	-	-	-	-	-	-	28.37	54.12		Dinas Perumahan dan Permukiman
2.7	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00		Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Fokus Iklim Berinvestasi											

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	-	-	-	-	1,170		1,348	1,348	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4	Fokus Sumber Daya Manusia										
4.1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)			10,532		10,703					
4.2	Angkatan Kerja (ribu orang)			7,411		7,350					
4.3	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	96.2	97	97	97	97.29		97.57	97.86	Dinas Pendidikan
4.4	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56.1	53.2	57.4	54.7	56.2		57.7	59.2	Dinas Pendidikan
4.5	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94.42	39.9	94.72	43	45.4		47.8	50.2	Dinas Pendidikan
4.6	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	42.7	94.2	43.4	94.72	95.24		95.76	96.28	Dinas Pendidikan
5	Dukungan Terhadap Daya Saing										
5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	B	(60.05) B	B	(61.05) B	(64.00) BB	B	(67.00) BB	(70.00) BB	Biro Organisasi, Inspektorat, BPKAD, Bappeda
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	Persen	69.02	67.65	69.04	65.13	65,53		65,93	66,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3	Skor Kebebasan Sipil	Skor	-	72.54	-	-	72.99		73.44	73.89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	145	145.18	134.4	145.18	145		144.5	143.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		s								
1	Pendidikan										
1.1	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	-	-	-	-	100		100	100	Dins Pendidikan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
			2019		2020		2021		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	Persen	-	-	-	-	100		100	100	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan										
2.1	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	-	-	100		100	100	Dinas Kesehatan
2.2	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	-	100		100	100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota						100		100	100	Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata ruang
3.2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota						100		100	100	Dinas Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata ruang
4	Perumahan Rakyat										
4.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni						100		100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						100		100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	KONDISI								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		
			2019		2020		2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Trantibumlinmas											
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	jiwa	12.982.204 jiwa	NA	15.032.170 jiwa	15.032.170 jiwa	5.350 jiwa	5.351 Jiwa	6.152 jiwa	7.074 jiwa	Satpol PP	
6	Sosial											
6.1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	Persen	1.167	1.167	1.137	1.137	1.107	1.077	1.047	5.535	Dins Sosial	
6.2	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	Persen	630	630	600	600	570	540	510	2.850	Dinas Sosial	
6.3	Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di lam panti	Persen	293	293	263	263	233	203	173	1.165	Dinas Sosial	

7.4 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Indikator kinerja program prioritas pada Perangkat Daerah mengacu pada target prom yang terdapat pada PRPJMD Provsu Tahun 2019-2023 dan dengan adanya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.4

Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	83.61 %	4,300,000,000	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	%	99.01 %	277,634,982,599	Dinas Pendidikan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	12.389.100.000	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting pada Balita	%	26,50%	26.421.037.885	Dinas Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,5 : 1.000	335,473,487,943	Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	%	100 %		Dinas Kesehatan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan	%	50%	13,176,397,200	Dinas Kesehatan
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	100%	2,048,423,445	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	%	75%	9,176,460,928	Dinas Kesehatan
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	%	0	4.200.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	%	100	2.650.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pelayanan Limbah Domestik	%	50,24	3.600.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Luas Permukiman Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang Terlayani	Ha	2.650,60	5.225.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kapasitas pelayanan air minum	%	65,15	28,500,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi yang terlayani	%	64,75	26,300,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
		Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	%	60,34		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
13	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	%	100	9,300,500,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
14	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	%	14.07 %	4.349.741.445,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi mantap	Persen	85	1,407,758,750,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
16	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Difasilitasi	%	100	13.085.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
17	Program Pengembangan Permukiman	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	%	100,00	250.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
18	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Lokasi	1	11,300,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				900.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	18,52	13.048.616.215	Dinas Perumahan dan Permukiman
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				9,147,459,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	unit	100	32.763.388.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
23	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	kab/kota	33 kab/kota	5.606.246.625,00	BPBD
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	%	80 %	750.000.000	Satpol PP
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	7.005.000.000	Satpol PP
26	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	%	100 %	3.600.000.000	Dinas Sosial
27	Program Penanggulangan Bencana				41.776.093.481	BPBD
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.	%	100 %	1.538.000.000	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
29	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	%	100 %	4.575.000.000	Dinas Sosial
30	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Kegiatan/Orang	1287	2,265,372,000	Dinas Sosial
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMPN Provinsi yang dikelola	Kegiatan/Orang	1980	600.000.000	Dinas Sosial
32	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	%	100 %	300.000.000	Dinas Sosial
33	Program Pemberdayaan Sosial				3,600,000,000	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
34	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	7,80%	3.781.772.164	Dinas Tenaga Kerja
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	(1). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi;	%	4,81%	14.959.962.192	Dinas Tenaga Kerja
		(2). Tingkat produktivitas tenaga kerja.	indeks	5,65		
35	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	17,11%	7.801.635.936	Dinas Tenaga Kerja
37	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	50,73%	1.156.975.500	Dinas Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
38	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	93,94%	696.618.600	Dinas Tenaga Kerja
39	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Provinsi	%	24	850.000.000	Dinas PP dan Perlindungan Anak
40	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi	%	24	1.680.000.000	Dinas PP dan Perlindungan Anak
41	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang tersedia	%	30	150.000.000	Dinas PP dan Perlindungan Anak
42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Terpilah	%	92	200.000.000	Dinas PP dan Perlindungan Anak
43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kluster Hak Anak Terimplementasi	%	91	773.000.000	Dinas PP dan Perlindungan Anak
44	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Terimplementasi	%	97	800.000.000	Dinas PP dan Perlindungan Anak
45	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	%	2	1,238,129,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
46	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan	%	10	1,707,209,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
47	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Point	92,50	13,480,225,915	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	%	100 %	1,020,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
49	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	100 %	1,090,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	100%	590,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
51	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100 %	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
52	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	%	74%	700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
53	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	poin	60	4,699,070,500	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	%	74%	590,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	69,38	2,604,994,780	Dinas Lingkungan Hidup
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	%	100 %	320,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
57	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%)	%	100%	1,190,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
58	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				1.000.000.000	Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
59	Rogram Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				1.000.000.000	Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
60	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente				3.000.000.000	Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
61	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100%	1,096,863,928	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
62	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	%	100%	500,000,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
63	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	%	100%	700,000,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
64	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan profil kependudukan	Buku	Dokumen	350,000,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
65	Program Penataan Desa	Terwujudnya penataan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	kab/kota	33 kab/kota	10,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
66	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar desa	%	100 %	2,670,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
67	Program Administrasi Pemerintahan Desa	persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	%	100 %	8,374,204,267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
68	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	%	100 %	7,973,632,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota BKB ber-KB	%	69 %	3.980.000.000	Dinas PP dan KB
70	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase PUS yang ber-KB	%	60 %	2.465.000.000	Dinas PP dan KB
71	Program Pengendalian Penduduk	1. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan GDPK	Kab/Kota	33 Kab/Kota	2.370.000.000	Dinas PP dan KB
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	80 %	7.679.000.000	Dinas Perhubungan
73	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	%	92,5	800.000.000	Dins Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
74	Program Pengelolaan Perkeretaapian				836.000.000	Dins Perhubungan
75	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	100	8.931.065.327	Dins Kominfo
76	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	%	100	27.031.761.928	Dins Komunikasi Dan Informatika
77	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Terwujudnya data statistik sektoral	%	100	954.326.090	Dins Komunikasi Dan Informatika
78	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	%	100	752.161.600	Dins Komunikasi Dan Informatika
79	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	%	100 %	752,161,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
80	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	persen	5	14.341.971.940	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif	%	62		Dinas Koperasi dan UKM
81	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	UMKM	70	9.200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Produk KUKM Yang Berdaya Saing	unit	108		Dinas Koperasi dan UKM
82	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif	unit	2.862.000	4,205,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
83	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	unit	100 unit	2.050.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
84	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	unit	475 unit	5.100.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM	orang	4.973 orang		Dinas Koperasi dan UKM

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
85	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	unit	100 unit	700.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyelesaian dokumen perizinan	dokumen	1.484	2.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
87	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	investor	613	2,700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
88	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kenaikan realisasi investasi	%	22	1.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
89	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai investasi	Triliun	38,43	2.400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
90	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
91	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	100	722.542.499.523	Dinas Pemda dan Olahraga
92	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	%	100	10.037.446.025	Dinas Pemda dan Olahraga
93	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100	505.529.805	Dinas Pemda dan Olahraga
94	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang	1.500 Orang	4.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
95	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya	DPP	4 DPP	26,604,100,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
96	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	5 Objek	17.279.404.320	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
97	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	40%	79.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
98	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	957 orang	630.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
99	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pembinaan sejarah	Kali	10 Kali	402.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
100	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah pengunjung ke Museum Negeri Provsu	Orang	40.000 orang	5.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
101	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Festival	8	4.574.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
102	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penggiat Seni dan Budaya	Orang	1500	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
103	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	gender	Koleksi	2	470.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
104	Program Pembinaan Perpustakaan	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	%	100	13.370.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
105	Program Pengelolaan Arsip	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	%	100	625.000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
106	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah dokumen perlindungan dan penyelamatan arsip	Dokumen	100	280.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
107	Program Perijinan Penggunaan Arsip				50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan						
108	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Patroli Pengawasan di Laut	kali	22	4.500. 000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
109	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Point	86.68	3.100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
110	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	266,996	14.010. 000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
111	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	612,539	21.008.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
112	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kap/Tahun	49,79	2.300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
113	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	point	92,5	13.480.225.915	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
114	Program Penanganan Kerawanan Pangan				1.238.129.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
115	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kenaikan Rata-Rata Produksi Daging, Susu dan Telu	%	1,5	15.630.185.983	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
116	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kenaikan Rata-Rata Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas			14.149.839.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
117	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Hewan Dan Masyarakat	Point	79	361.986.460	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
118	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	%	3.04 %	745,000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Cakupan luas lahan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	1200 Ha		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
119	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Aneka Buah	%	1,21	28.860.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
120		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Aneka Kacang dan Umbi	%	11,59		
121		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Aneka Sayur	%	0,47		
122		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Bawang Merah	%	1,21		
123		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Cabe Merah	%	11,59		
124		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Jagung	%	0,47		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
125		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Kedelai	%	10,68		
126		Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Padi	%	2,41		
127	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui	%	4,0	14.025.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
128		Persentase Lahan Sawah yang diari Jaringan Irigasi	%	93		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
129		Persentase Penyediaan Kebutuhan Prasarana Pertanian	%	1,23		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
130	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	%	0.03 %	10.176.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
131		Jumlah penyuluhan petani pekebun	orang	3430 Ha		
132	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan	%	100	475.216.002	Dinas Kehutanan
133	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	%	100	1.952.000.000	Dinas Kehutanan
134	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan Pengelolaan DAS	%	100	1.781.000.000	Dinas Kehutanan
135	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya serta tertib dalam pengelolaannya	%	100	19.175.762.497	Dinas Kehutanan
136	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase rekomendasi teknis izin Pengusahaan air tanah	%	100 %	1,197,468,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
137	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Bauran Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	%	36 %	20.467.900.670	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
138	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	100 %	15.233/140.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
139	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase rekomendasi/persetujuan teknis perizinan mineral dan batubara	%	100 %	804.594.500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
140	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	4,98%	1000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
141	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	jenis	-	850.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
142	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang difasilitasi	unit	-	90.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
143	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	dokumen	55.730	160,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
144	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga bapokting	%	14,64%	320.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
145	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	85,24%	80,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
146	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi industri yang tersedia	%	-	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
147	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang difasilitasi	%	100	600.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
148	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan RPIK	Kab/Kota	4	6.350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
149	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	SP/lokasi	79 SP/lokasi	322,583,280	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Pendukung						
150	Program Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100	4.601.246.510	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
151	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Meningkatkan Pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan Aturan Peraturan dalam Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan	%	100%	10,334,283,000	Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah
152	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	100%	496.250.000.000	Biro Kesra Sekretariat Daerah
153	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Persentase kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya	%	100%	4.340.029.560	Biro Hukum Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
154	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat	%	100%	4.190.000.000	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
155	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Terlaksananya standar yang proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara, Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel secara Elektronik dan Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel	%	100%	73.464.563.368	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
156	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan sumatera utara yang bermartabat	%	100%	5.150.000.000	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Urusan Penunjang						
157	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	229.184.264.644	Sekretariat DPRD
158	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	%	100	6.710.000.000	Bappeda
159	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan	%	100	10.750.000.000	Bappeda
160	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	%	100%	9,496,000,000	BPKAD

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
161	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100	3,104,479,000,000	BPKAD
162	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	11,933,193,000	BP2RD
163	Program Kepegawaian Daerah	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	%	100 %	14,455,152,500	BKD
164	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	100 %	14.001.000.000	BPSDM
165	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	kualitas penelitian pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	%	100%	3,073,100,000	Balitbang
166	Program Pelayanan Penghubung	Persentase Tingkat Pelayanan Penghubung	%	100%	19,092,435,629	Badan Penghubung
Urusan Pengawasan						
167	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan	%	100%	33,054,159,600	Inspektorat
168	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	%	100%	4,601,338,300	Inspektorat
Urusan Pemerintahan Umum						
169	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100%	5,299,922,990	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
170	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	%	100%	277,631,962,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
171	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	Persentase pertambahan Ormas	%	100%	4,051,645,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Organisasi Kemasyarakatan					
172	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	%	100%	39,674,776,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
173	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	%	100%	5,360,525,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mempedomani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. RKPD Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pada periode RPJMD Provsu Tahun 2019-2023 sehingga dapat menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan dan lebih fokus pada pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan dilakukan melalui program kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah Provinsi.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Nasional.

RKPD digunakan sebagai pedoman Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara 2023; Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah. Selain itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota melakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan

Daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023.

Pada akhirnya, keterlibatan dan kepatuhan semua Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan penanggulangan serta pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini menjadi perhatian seluruh pihak. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh Pemangku Kepentingan bersama-sama mewujudkan Pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI